



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA





**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦭꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor : B/100.1.6/00557/PEM/2026

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu yang kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Bantul, 16 Maret 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat bersama-sama menyelesaikan kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 dengan baik dan lancar serta menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah daerah berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021, pada Sub Bab Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, aparatur pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi/pusat/instansi vertikal, atas dukungan dan partisipasi, serta kinerjanya sehingga dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul. Kami menerima saran dan kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang lebih baik. Akhirnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran komprehensif atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 serta menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul supaya memacu kinerja ke depan untuk lebih optimal.



Bantul, 26 Maret 2026
BUPATI BANTUL

H. Abdul Halim Muslih



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	3
1.1.1. Penjelasan Umum	3
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	18
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	67
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	103
2.1. Capaian Kinerja Makro	105
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	105
2.1.2. Angka Kemiskinan.....	107
2.1.3. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)	108
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan)	109
2.1.5. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku).....	111
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	112
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	114
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan.....	114
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	145
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	151
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	154
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target di Dalam Perjanjian Kinerja	157
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	159
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah	163
2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian Standar Nasional	167
2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.....	167

2.3.7.	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	282
2.3.8.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	296
BAB III.	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	305
BAB IV.	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	309
4.1.	Urusan Pendidikan	311
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	311
4.1.2.	Target Pencapaian	312
4.1.3.	Realisasi.....	314
4.1.4.	Alokasi Anggaran	316
4.1.5.	Dukungan Personil	328
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi.....	328
4.2.	Urusan Kesehatan.....	329
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	329
4.2.2.	Target Pencapaian	334
4.2.3.	Realisasi.....	343
4.2.4.	Alokasi Anggaran	356
4.2.5.	Dukungan Personil	357
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi.....	360
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	362
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	362
4.3.2.	Target Pencapaian	363
4.3.3.	Realisasi.....	365
4.3.4.	Alokasi Anggaran	369
4.3.5.	Dukungan Personil	373
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi.....	373
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	374
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	374
4.4.2.	Target Pencapaian	375
4.4.3.	Realisasi.....	376
4.4.4.	Alokasi Anggaran	377
4.4.5.	Dukungan Personil	379
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi.....	380
4.5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	381
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	381
4.5.2.	Target Pencapaian	389



4.5.3.	Realisasi.....	394
4.5.4.	Alokasi Anggaran	403
4.5.5.	Dukungan Personil	414
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi.....	414
4.6.	Urusan Sosial	416
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	416
4.6.2.	Target Pencapaian	418
4.6.3.	Realisasi.....	422
4.6.4.	Alokasi Anggaran	426
4.6.5.	Dukungan Personil	430
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi.....	431
4.7.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Penerapan SPM	432
4.7.1.	SPM Pendidikan.....	432
4.7.2.	SPM Kesehatan	435
4.7.3.	SPM Pekerjaan Umum	436
4.7.4.	SPM Perumahan Rakyat	437
4.7.5.	SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	438
4.7.6.	SPM Sosial.....	442
BAB V.	PENUTUP	445
LAMPIRAN.....		449



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk per Kapanewon (Kecamatan) Tahun 2025.....	5
Tabel 1.2	Susunan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul Tahun 2025	9
Tabel 1.3	Rincian Jumlah PNS dan PPPK di Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Jenjang Pendidikan Pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan.	11
Tabel 1.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 (sebelum dilakukan Audit BPK RI)	15
Tabel 1.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 (sebelum dilakukan Audit BPK RI)	16
Tabel 1.6	Pagu Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Daerah Tahun 2025 (sebelum dilakukan Audit BPK)	18
Tabel 1.7	Matriks Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	28
Tabel 1.8	Matriks Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 (Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025)	34
Tabel 1.9	Program Pelayanan Dasar RPJMD 2021-2026 dalam Pemenuhan SPM di Kabupaten Bantul	71
Tabel 1.10	Rencana Pencapaian Indikator SPM dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.....	80
Tabel 1.11	Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi dalam Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2025	86
Tabel 1.12	Program/Kegiatan SPM di Kabupaten Bantul dalam Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025	89
Tabel 2.1	Matriks Capaian Indikator Makro Kabupaten Bantul Tahun 2025. ...	105
Tabel 2.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Menurut Komponen, 2021-2025.....	106
Tabel 2.3	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2021-2025.....	107
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2021- 2025	108
Tabel 2.5	Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025.....	110

Tabel 2.6	Pendapatan per Kapita Atas PDRB ADHB Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Laju PDRB ADHB Per Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025	111
Tabel 2.7	Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	114
Tabel 2.8	Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	145
Tabel 2.9	Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025	154
Tabel 2.10	Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	156
Tabel 2.11	Matriks Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran Daerah (Indikator Kinerja Utama (IKU)) Kabupaten Bantul Tahun 2025 Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Dengan Dasar RPJMD Tahun 2021-2026.....	157
Tabel 2.12	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dari Perjanjian Kinerja Bulan Januari Tahun 2025.	159
Tabel 2.13	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasar Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan September Tahun 2025.	161
Tabel 2.14	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 Dan Target Akhir Tahun Dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 (Tahun 2026).....	163
Tabel 2.15	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 Dan Target Akhir Tahun Dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 (Tahun 2030).....	165
Tabel 2.16	Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Pada Tahun 2025 Terhadap Capaian Tingkat Nasional	167
Tabel 2.17	Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	168
Tabel 2.18	Tabel Matriks Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	169
Tabel 2.19	Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	173
Tabel 2.20	Trend Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 - 2025	174
Tabel 2.21	Trend Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025 Di Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi DIY	176
Tabel 2.22	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	177
Tabel 2.23	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Di Kabupaten Bantul Sampai Dengan Tahun 2025.....	178



Tabel 2.24	Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2020-2025.....	180
Tabel 2.25	Prevalensi stunting di DIY data SSGI tahun 2024	186
Tabel 2.26	Prevalensi Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 Berdasarkan data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)	187
Tabel 2.27	Target Indeks Ketimpangan Gender Di Kabupaten Bantul Pada Dokumen Renstra Tahun 2026-2030	190
Tabel 2.28.	Tabel Perbandingan IKG Tahun 2020 – 2024 Di Kabupaten Bantul Dengan Capaian IKG Pada Tingkat Provinsi DIY dan Nasional	190
Tabel 2.29	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	193
Tabel 2.30	Komponen dan Bobot Penilaian AKIP	195
Tabel 2.31	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Se-DIY	201
Tabel 2.32	Faktor Penghambat, Pendorong serta Strategi Pencapaian dalam Pencapaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2025.....	203
Tabel 2.33	Rekap Nilai dan Peringkat MCP KPK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 sd 2025	207
Tabel 2.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.....	227
Tabel 2.35	Capaian Dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk.....	235
Tabel 2.36	Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi D.I.Y, dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I.Y Tahun 2024- 2025	239
Tabel 2.37	Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.	240
Tabel 2.38	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2025.....	245
Tabel 2.39	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan rupiah/orang/tahun) Tahun 2020 – 2025	248
Tabel 2.40	Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025	248
3)	Tabel 2.39 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan rupiah/orang/tahun) Tahun 2020 – 2025 Sasaran Menurunnya Kedalaman Kemiskinan.....	250
Tabel 2.41	Capaian Dan Realisasi Sasaran Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Tahun 2025.....	250
Tabel 2.42	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021–2025	250
Tabel 2.43	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021–2025	251

Tabel 2.44	Rencana Dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Menurunnya Risiko Bencana Di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	254
Tabel 2.45	Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2021- 2025	257
Tabel 2.46.	Titik lokasi pemantauan udara untuk penghitungan IKU (Indeks Kualitas Udara).....	258
Tabel 2.47	Tabel Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2021 - 2025	259
Tabel 2.48	Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2020 - 2024	260
Tabel 2.49	Tabel Nilai IRB Tahun 2024-2025 Kabupaten/kota se-DIY	264
Tabel 2.50	Faktor Penghambat, Faktor Pendorong, dan Strategi dalam pencapaian Sasaran Daerah Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tahun 2026	265
Tabel 2.51	Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Di Kabupaten Bantul Tahun 2025	265
Tabel 2.52	Target dan Realisasi Data Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025.	266
Tabel 2.53	Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2025.....	267
Tabel 2.54.	Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	268
Tabel 2.55.	Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	269
Tabel 2.56.	Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	270
Tabel 2.57.	Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2025	271
Tabel 2.58	Capaian dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Indeks Pelestarian Kebudayaan Di Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	277
Tabel 2.59	Capaian dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2025.	279
Tabel 2.60.	Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	285
Tabel 2.61	Tabel. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	296
Tabel 2.62	Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2025	299



Tabel 2.63	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2025	302
Tabel 4.1	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2025	311
Tabel 4.2	Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2025.....	312
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2025	314
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran SPM Pendidikan Tahun 2025	316
Tabel 4.5	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Pendidikan Tahun 2025	318
Tabel 4.6	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025	326
Tabel 4.7	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025	328
Tabel 4.8	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025	329
Tabel 4.9	Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025	334
Tabel 4.10	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025	343
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2025	356
Tabel 4.12	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2025	356
Tabel 4.13	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	358
Tabel 4.14	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2025	360
Tabel 4.15	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025	362
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	364
Tabel 4.17	Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	365
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025	369
Tabel 4.19	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025	369
Tabel 4.20	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025	373
Tabel 4.21	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025	374
Tabel 4.22	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Perumahan Rakyat.....	374
Tabel 4.23	Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	375
Tabel 4.24	Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	376
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025	377

Tabel 4.26	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	378
Tabel 4.27	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025	380
Tabel 4.28	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025	380
Tabel 4.29	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	381
Tabel 4.30	Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.....	389
Tabel 4.31	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	394
Tabel 4.32	Alokasi Anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.....	403
Tabel 4.33	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	406
Tabel 4.34	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2025.....	413
Tabel 4.35	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	414
Tabel 4.36	Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Sosial.....	416
Tabel 4.37	Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2025.....	418
Tabel 4.38	Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2025	422
Tabel 4.39	Alokasi Anggaran SPM Sosial Tahun 2025.....	426
Tabel 4.40	Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Sosial Tahun 2025	427
Tabel 4.41	Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025	429
Tabel 4.42	Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penerapan SPM Sosial Tahun 2025	430
Tabel 4.43	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sosial Tahun 2025.....	431
Tabel 4.44	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025	432
Tabel 4.45	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2025.....	435
Tabel 4.46	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025	436
Tabel 4.47	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025.	437



Tabel 4.48	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	439
Tabel 4.49	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Sosial Tahun 2025	442



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Bantul (<i>Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2024</i>).....	3
Gambar 2.1	Juara Tingkat Nasional Gala Siswi Indonesia (GSI) 2025, Sentul, Oktober 2025.....	176
Gambar 2.2	Capaian Nilai AKIP Kabupaten/Kota Tahun 2024/2025 Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Oleh Menpan RB (<i>Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul</i>)	195
Gambar 2.3	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2024 dari BPK, Tanggal 24 April 2025 (<i>Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, 2026</i>)	200
Gambar 2.4	Opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 No.9B/LHP/XVIII.YOG/04/2025, Tanggal 14 April 2025 (<i>BPK RI, 2025</i>)	200
Gambar 2.5	<i>Launching</i> Penggunaan <i>Virtual Account</i> pada pembayaran Pajak Daerah dan penggunaan E-Retribusi pada tanggal 7 Mei 2025. (<i>BPKPAD, 2025</i>)	203
Gambar 2.6	Dokumentasi Hasil Kegiatan Pengaspalan Jalan (Sumber DPUPKP Kab. Bantul, 2025)	267
Gambar 2.7.	Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi DI Jotawang Tahun 2025 (<i>Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025</i>).....	269
Gambar 2.8.	Pengentasan Kawasan Kumuh di Wiyoro, Banguntapan di Kabupaten Bantul. (<i>Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025</i>)	274



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025 (<i>Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kab. Bantul; Data Diolah</i>)107
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (<i>Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2026, BPS; 2026, data diolah</i>).....109
Grafik 2.3	Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2021–2025 (<i>Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026; BPS DIY, 2026; data diolah</i>).....113
Grafik 2.4	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan 5 Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi Tahun 2021 – 2025174
Grafik 2.5	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021 – 2025 (<i>Sumber: BPS 2026</i>).....175
Grafik 2.6	Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2020-2025 (<i>Sumber: BPS, 2026</i>)181
Grafik 2.7	Prevalensi stunting di DIY berdasarkan data SSGI tahun 2024 (<i>Sumber: Dinkes Kab. Bantul, 2026</i>)186
Grafik 2.8	Target Dan Capaian Status Gizi Kabupaten Bantul Dibandingkan Dengan Capaian Pada Tingkat Provinsi DIY Tahun 2021-2025 (<i>Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2026</i>).....187
Grafik 2.9	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2021-2025 (<i>Sumber: BPS,2025</i>)191
Grafik 2.10	Capaian Nilai AKIP Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025 (<i>Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab.Bantul, 2026</i>)194
Grafik 2.11	Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kabupaten Bantul Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Kab/Kota Tahun 2024-2025 (<i>Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, 2026</i>)195
Grafik 2.12	Capaian Nilai IPKD Tahun 2025 pada Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan Nasional (<i>Sumber: Inspektorat Kab. Bantul 2026</i>).....206
Grafik 2.13	Progres Sasaran Pada Area Perencanaan Pembangunan Daerah. (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>)208
Grafik 2.14	Progres Sasaran Pada Area Anggaran (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>).....210
Grafik 2.15	Progres Sasaran Pada Area Pengadaan Barang Dan Jasa (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>).....212
Grafik 2.16	Progres Sasaran Pada Area Pelayanan Publik (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>).....215

Grafik 2.17	Progres Sasaran Pada Area Penguatan APIP (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>).....	217
Grafik 2.18	Progres Sasaran Pada Tata Kelola Manajemen ASN (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>)	219
Grafik 2.19	Progres Sasaran Pada Area Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>)	221
Grafik 2.20	Progres Sasaran Pada Area Pengelolaan BMD (<i>Sumber: KPK, Jaga.id</i>).....	223
Grafik 2.21	Perbandingan IPP Kabupaten Bantul dan Kabupaten/ Kota Lain Dalam Provinsi DIY Tahun 2025 (<i>Sumber: Bag. Organisasi, Setda Kab. Bantul, 2026</i>).....	225
Grafik 2.22	PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum Di Kabupaten Bantul dan Prov. DI Yogyakarta Tahun 2020-2025 (<i>Sumber: BPS Kab. Bantul, 2026; Data diolah</i>).....	227
Grafik 2.23	Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 (%) Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi D.I.Y Dan Nasional (<i>Sumber: BPS,2026</i>)	231
Grafik 2.24	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 202-2024 (<i>Sumber: BPS,2025</i>).....	236
Grafik 2.25	Capaian Realisasi Terhadap TPT periode 2020-2025 (<i>Sumber: BPS, 2025</i>)	240
Grafik 2.26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025 (<i>Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2026</i>)	256
Grafik 2.27	Rumus Indeks Resiko Bencana (<i>Sumber: BPBD Kab. Bantul</i>)	263
Grafik 2.28	Perkembangan dan Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2021 – 2025 (<i>Sumber : BPBD Kab. Bantul, 2025</i>)	263
Grafik 2.29	Target Indeks Pelestarian Kebudayaan Tahun 2025-2029 Dan Realisasi Pada Tahun 2025 Kabupaten Bantul (<i>Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2026</i>).....	278
Grafik 2.30	Target dan realisasi Keuangan per Bulan terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (<i>Sumber: Bappeda Ka. Bantul, 2026 (diolah); Ket: LRA cut off 25 Januari 2026</i>).....	283
Grafik 2.31	Target dan realisasi Fisik per Bulan terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (<i>Sumber: Bappeda Ka. Bantul, 2026 (diolah); Ket: LRA cut off 25 Januari 2026</i>).....	283



BAB I PENDAHULUAN

LPPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025



Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di wilayah bagian selatan, secara astronomis Kabupaten Bantul terletak antara 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur dan 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan Batas wilayah administratif Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
 Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
 Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
 Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri atas 17 Kapanewon (Kecamatan) dan 75 Kalurahan (Desa) sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 511,527 Km². Kapanewon Dlingo merupakan wilayah terluas dengan luasan 60,765Km² (11,88%), sedangkan Kapanewon Srandakan merupakan Kapanewon dengan wilayah terkecil seluas 18,160Km² atau 3,55% dibanding seluruh total wilayah Kabupaten Bantul.

Tinggi wilayah rata-rata geometrik Kabupaten Bantul 48m.d.p.l (meter di atas permukaan laut). Kapanewon Dlingo memiliki wilayah tertinggi dengan ketinggian 200m.d.p.l, sedangkan wilayah terendah berada di Kapanewon Srandakan dengan ketinggian 12m.d.p.l. Wilayah Kapanewon dengan jarak terjauh menuju ke Ibukota Kabupaten berada di Kapanewon Piyungan dengan jarak 17km, sedangkan wilayah Kapanewon dengan jarak terdekat berada di Kapanewon Bantul dengan jarak 1km.

Topografi Kabupaten Bantul terbagi menjadi daerah dataran rendah, daerah perbukitan serta daerah pantai. Topografi sebagai dataran rendah sebesar 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah Bagian Barat merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86Km² (17,73% dari keseluruhan wilayah). Bagian Tengah, berupa daerah datar dan landai seluas 210,94km² adalah daerah pertanian yang subur. Bagian Selatan, merupakan bagian dari daerah Bagian Tengah dengan keadaan alam yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan Kecamatan Srandakan, Sanden, dan Kretek.



c. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kapanewon

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan Data Jumlah Penduduk Semester 2 Tahun 2025 sebanyak 985.142 jiwa, dengan komposisi penduduk dengan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 490.557 jiwa atau 49,80% dan penduduk Perempuan sebanyak 494.565 jiwa atau sebesar 50,20% dari total jumlah penduduk. Secara administratif, Kabupaten Bantul terdiri atas 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan. Informasi mengenai jumlah penduduk dan jumlah kapanewon dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk per Kapanewon (Kecamatan) Tahun 2025.

No.	Kapanewon (Kecamatan)/ Kalurahan (Desa)	Wilayah		Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)
		Luas Wilayah (Km2)	% Luas Terhadap Total Wilayah	L	P	L+P	% terhadap Total Penduduk	
1	Srandakan	18,160	3,55%	15.506	15.665	31.171	3,56%	1.717
	1 Poncosari	11,616	2,27%	6.498	6.583	13.081	1,49%	1.126
	2 Trimurti	6,543	1,28%	9.008	9.082	18.090	2,07%	2.765
2	Sanden	23,296	4,55%	15.773	16.172	31.945	3,65%	1.371
	1 Gading Sari	8,291	1,62%	4.964	5.100	10.064	1,15%	1.214
	2 Gadingharjo	2,872	0,56%	1.907	1.909	3.816	0,44%	1.329
	3 Srigading	7,826	1,53%	4.710	4.885	9.595	1,10%	1.226
	4 Murtigading	4,307	0,84%	4.192	4.278	8.470	0,97%	1.966
3	Kretek	26,161	5,11%	15.234	15.707	30.941	3,53%	1.183
	1 Tirtomulyo	4,407	0,86%	3.529	3.558	7.087	0,81%	1.608
	2 Parangtritis	11,151	2,18%	3.964	4.134	8.098	0,92%	726
	3 Donotirto	4,575	0,89%	4.098	4.261	8.359	0,95%	1.827
	4 Tirtosari	2,431	0,48%	2.158	2.239	4.397	0,50%	1.809
	5 Tirtohargo	3,597	0,70%	1.485	1.515	3.000	0,34%	834
4	Pundong	23,591	4,61%	18.027	18.317	36.344	4,15%	1.541
	1 Seloharjo	10,900	2,13%	6.073	5.999	12.072	1,38%	1.107
	2 Panjangrejo	5,669	1,11%	4.709	4.936	9.645	1,10%	1.701
	3 Srihardono	7,021	1,37%	7.245	7.382	14.627	1,67%	2.083
5	Bambanglipuro	22,696	4,44%	20.931	21.353	42.284	4,83%	1.863
	1 Sidomulyo	7,959	1,56%	6.978	7.079	14.057	1,61%	1.766
	2 Mulyodadi	6,507	1,27%	5.977	6.113	12.090	1,38%	1.858
	3 Sumbermulyo	8,229	1,61%	7.976	8.161	16.137	1,84%	1.961
6	Pandak	24,561	4,80%	26.600	26.327	52.927	6,04%	2.155
	1 Caturharjo	5,865	1,15%	5.974	5.816	11.790	1,35%	2.010

No.	Kapanewon (Kecamatan)/ Kalurahan (Desa)	Wilayah		Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)	
		Luas Wilayah (Km2)	% Luas Terhadap Total Wilayah	L	P	L+P		
	2 Triharjo	6,761	1,32%	6.836	6.650	13.486	1,54%	1.995
	3 Gilangharjo	7,264	1,42%	8.102	8.149	16.251	1,86%	2.237
	4 Wijirejo	4,671	0,91%	5.688	5.712	11.400	1,30%	2.441
7	Pajangan	33,073	6,47%	19.278	19.195	38.473	4,39%	1.163
	1 Triwidadadi	12,605	2,46%	5.597	5.644	11.241	1,28%	892
	2 Sendangsari	11,739	2,29%	6.375	6.293	12.668	1,45%	1.079
	3 Guwosari	8,728	1,71%	7.306	7.258	14.564	1,66%	1.669
8	Bantul	21,991	4,30%	33.300	33.816	67.116	7,66%	3.052
	1 Palbapang	5,507	1,08%	7.102	7.297	14.399	1,64%	2.615
	2 Ringinharjo	2,755	0,54%	4.394	4.451	8.845	1,01%	3.210
	3 Bantul	5,348	1,05%	8.397	8.666	17.063	1,95%	3.190
	4 Tirenggo	6,060	1,18%	9.822	9.743	19.565	2,23%	3.228
	5 Sabdodadi	2,320	0,45%	3.585	3.659	7.244	0,83%	3.122
9	Jetis	24,285	4,75%	30.089	30.151	60.240	6,88%	2.481
	1 Patalan	5,654	1,11%	6.173	6.223	12.396	1,42%	2.192
	2 Canden	5,337	1,04%	6.200	6.161	12.361	1,41%	2.316
	3 Sumberagung	6,230	1,22%	7.865	7.942	15.807	1,81%	2.537
	4 Trimulyo	7,064	1,38%	9.851	9.825	19.676	2,25%	2.785
10	Imogiri	52,555	10,27%	32.378	32.851	65.229	7,45%	1.241
	1 Selopamioro	20,172	3,94%	7.640	7.742	15.382	1,76%	763
	2 Sriharjo	6,648	1,30%	4.673	4.810	9.483	1,08%	1.426
	3 Wukirsari	15,291	2,99%	9.191	9.315	18.506	2,11%	1.210
	4 Kebonagung	1,997	0,39%	1.964	2.012	3.976	0,45%	1.991
	5 Karangtengah	3,177	0,62%	2.812	2.818	5.630	0,64%	1.772
	6 Girirejo	3,044	0,60%	2.437	2.429	4.866	0,56%	1.599
	7 Karangtalun	1,250	0,24%	1.584	1.586	3.170	0,36%	2.536
	8 Imogiri	0,977	0,19%	2.077	2.139	4.216	0,48%	4.313
11	Dlingo	60,765	11,88%	20.189	20.413	40.602	4,64%	668
	1 Mangunan	12,447	2,43%	2.474	2.581	5.055	0,58%	406
	2 Muntuk	12,946	2,53%	4.512	4.438	8.950	1,02%	691
	3 Dlingo	8,725	1,71%	2.938	2.981	5.919	0,68%	678
	4 Temuwuh	7,639	1,49%	3.770	3.810	7.580	0,87%	992
	5 Terong	8,883	1,74%	2.925	2.946	5.871	0,67%	661
	6 Jatimulyo	10,125	1,98%	3.570	3.657	7.227	0,83%	714
12	Banguntapan	28,642	5,60%	58.918	59.794	118.712	13,56%	4.145
	1 Baturetno	3,892	0,76%	8.910	8.965	17.875	2,04%	4.593
	2 Banguntapan	7,918	1,55%	19.304	19.969	39.273	4,48%	4.960
	3 Jagalan	0,296	0,06%	1.441	1.501	2.942	0,34%	9.943
	4 Singosaren	0,709	0,14%	2.048	1.996	4.044	0,46%	5.702
	5 Jambidan	3,757	0,73%	5.538	5.562	11.100	1,27%	2.955



No.	Kapanewon (Kecamatan)/ Kalurahan (Desa)	Wilayah		Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)
		Luas Wilayah (Km2)	% Luas Terhadap Total Wilayah	L	P	L+P	% terhadap Total Penduduk	
6	Potorono	4,175	0,82%	7.172	7.252	14.424	1,65%	3.455
7	Tamanan	3,843	0,75%	6.708	6.631	13.339	1,52%	3.471
8	Wirokerten	4,053	0,79%	7.797	7.918	15.715	1,79%	3.877
13	Pleret	23,618	4,62%	25.442	25.094	50.536	5,77%	2.140
1	Wonokromo	4,286	0,84%	7.633	7.564	15.197	1,74%	3.545
2	Pleret	4,431	0,87%	7.138	7.026	14.164	1,62%	3.196
3	Segoroyoso	5,093	1,00%	4.722	4.659	9.381	1,07%	1.842
4	Bawuran	5,063	0,99%	3.382	3.323	6.705	0,77%	1.324
5	Wonolelo	4,745	0,93%	2.567	2.522	5.089	0,58%	1.073
14	Piyungan	34,079	6,66%	27.354	27.603	54.957	6,28%	1.613
1	Sitimulyo	10,219	2,00%	9.378	9.292	18.670	2,13%	1.827
2	Srimulyo	14,993	2,93%	9.125	9.461	18.586	2,12%	1.240
3	Srimartani	8,866	1,73%	8.851	8.850	17.701	2,02%	1.996
15	Sewon	27,773	5,43%	51.852	51.886	103.738	11,85%	3.735
1	Pendowoharjo	6,875	1,34%	11.817	11.771	23.588	2,69%	3.431
2	Timbulharjo	8,043	1,57%	11.990	11.894	23.884	2,73%	2.969
3	Bangunharjo	7,062	1,38%	13.557	13.628	27.185	3,10%	3.850
4	Panggunharjo	5,793	1,13%	14.488	14.593	29.081	3,32%	5.020
16	Kasihan	32,408	6,34%	54.604	54.870	109.474	12,50%	3.378
1	Bangunjiwo	15,447	3,02%	15.264	15.172	30.436	3,48%	1.970
2	Tirtonirmolo	5,083	0,99%	12.126	12.029	24.155	2,76%	4.752
3	Tamantirto	6,752	1,32%	12.194	12.312	24.506	2,80%	3.629
4	Ngestiharjo	5,125	1,00%	15.020	15.357	30.377	3,47%	5.927
17	Sedayu	33,874	6,62%	25.102	25.351	50.453	5,76%	1.489
1	Argodadi	10,676	2,09%	6.162	6.105	12.267	1,40%	1.149
2	Argorejo	7,331	1,43%	6.638	6.805	13.443	1,54%	1.834
3	Argosari	6,416	1,25%	4.745	4.759	9.504	1,09%	1.481
4	Argomulyo	9,452	1,85%	7.557	7.682	15.239	1,74%	1.612
		511,527		490.577	494.565			
Kabupaten Bantul		% Penduduk Laki-laki		49,80%			985.142	1.712
		% Penduduk Perempuan			50,20%			

Sumber: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 -2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau; Lampiran I Surat Dinas Nomor B-13.2/PBNR/IGD.04.05/8/2025, Tanggal 31 Agustus 2025
2. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No. B/400.14.4/00916; Tanggal 13 Februari 2026, Hal: Data Jumlah Penduduk Semester 2 Tahun 2025; data diolah

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada 1.712 jiwa/km² (Tabel 1.1). Angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bantul secara keseluruhan berada dalam fase transisi menuju wilayah semi-urban. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020 bahwa seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul telah masuk ke dalam klasifikasi perkotaan.

Berdasarkan Tabel 1.1. terdapat tiga wilayah Kapanewon terpadat yang berada di wilayah utara, ketiga wilayah tersebut yaitu:

1. Banguntapan: memiliki kepadatan tertinggi, mencapai 4.145 jiwa/km², dengan Kalurahan Jagalan memiliki tingkat kepadatan 9.943 jiwa/km².
2. Sewon: kepadatan rata-rata 3.735 jiwa/km².
3. Kasihan: kepadatan rata-rata 3.378 jiwa/km², dengan Kalurahan Ngestiharjo mencapai 5.927 jiwa/km².

Wilayah kapanewon dengan kepadatan penduduk terendah terdapat pada:

1. Dlingo: menjadi yang paling lenggang dengan hanya 668 jiwa/km², memiliki luas wilayah terbesar (60,765 km² atau 11,88% dari total wilayah), namun menampung jumlah penduduk paling sedikit.
2. Kretek: dengan kepadatan penduduk 1.183 jiwa/km².
3. Pajangan: dengan kepadatan penduduk 1.163 jiwa/km².

d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1) Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



Tabel 1.2 Susunan Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	Nama	Tipe
A.	Sekretariat Daerah	A
B.	Sekretariat DPRD	A
C.	Inspektorat Daerah	A
D.	Dinas Daerah, terdiri atas:	
1.	Dinas Kependidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	A
2.	Dinas Kesehatan	A
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	A
7.	Dinas Sosial	B
8.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana</i>)	B
9.	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	B
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	B
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B
12.	Dinas Lingkungan Hidup	B
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B
14.	Dinas Perhubungan	B
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	B
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
17.	Dinas Pariwisata	B
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	B
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	C
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	C
E.	Badan Daerah, terdiri atas:	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
2.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	A
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	B
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	C
F.	Kapanewon (Nomenklatur Kecamatan di tingkat Kabupaten untuk D.I. Yogyakarta) , terdiri atas:	
1.	Kapanewon Srandakan	A
2.	Kapanewon Sanden	A
3.	Kapanewon Kretek	A
4.	Kapanewon Pundong	A
5.	Kapanewon Bambanglipuro	A

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah		Dasar Hukum
	Nama	Tipe	
6.	Kapanewon Pandak	A	
7.	Kapanewon Pajangan	A	
8.	Kapanewon Bantul	A	
9.	Kapanewon Jetis	A	
10.	Kapanewon Imogiri	A	
11.	Kapanewon Dlingo	A	
12.	Kapanewon Banguntapan	A	
13.	Kapanewon Pleret	A	
14.	Kapanewon Piyungan	A	
15.	Kapanewon Sewon	A	
16.	Kapanewon Kasihan	A	
17.	Kapanewon Sedayu	A	
G.	Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah		Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah
1.	RSUD Panembahan Senopati	B	
2.	RSUD Saras Adyatma	D	

Sumber: Perda Kab. Bantul Nomor 5 Tahun 2021; Perbup Bantul No. 55 Tahun 2023

2) Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bantul (PNS dan PPPK tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 2.548 pegawai dengan komposisi sebesar 17,18% atau sebanyak 438 pegawai PPPK, dan 82,81% atau sebanyak 2110 pegawai PNS. Dari sisi pendidikan, sebesar 58,79% atau 1.489 pegawai PNS memiliki jenjang pendidikan tinggi, dan sebesar 5,81% PPPK berjenjang pendidikan tinggi, bila dibanding seluruh jumlah pegawai (PNS dan PPPK diluar Guru dan Tenaga Kesehatan Secara rinci sebaran dan jumlah pegawai PNS pada perangkat daerah pengampu urusan di Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2025 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.



Tabel 1.3 Rincian Jumlah PNS dan PPPK di Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)
Jenjang Pendidikan Pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan.

		Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)																									Jumlah Total
No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)												Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)													
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.		
I	Sekretariat Daerah																										
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Dan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
8	Bagian Hukum	-	-	2	-	-	1	1	-	6	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	-	9	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	11	
10	Bagian Organisas	-	-	2	-	-	-	2	2	2	1	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	-	-	-	4	2	14	3	-	24	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	4	28	
12	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA	1	-	-	-	-	-	3	-	5	2	-	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	13	
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	1	-	-	2	1	3	2	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	12	
14	Bagian Tata Pemerintahan	-	1	2	-	-	-	3	2	2	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	

No Nama Organisasi Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)																								Jumlah Total
		Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)												Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)												
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	
15	Bagian Umum dan Protokol	-	5	20	3	-	-	6	3	13	-	-	50	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4	54
	Jumlah Sekretariat Daerah	1	6	29	4	-	1	23	10	51	23	-	148	-	-	6	4	-	-	2	-	3	-	-	15	163
II	Sekretariat DPRD	-	2	8	2	-	-	5	-	13	7	-	37	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	40
III	Badan																									
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	4	2	-	-	12	-	18	9	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	47
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	3	-	-	-	-	2	7	3	-	15	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	17
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	4	-	-	-	2	3	12	6	-	29	2	-	56	4	-	-	1	-	3	-	-	66	95
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	2	18	1	-	-	21	-	48	9	-	99	-	-	6	2	-	-	1	-	-	-	-	9	108
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1	1	4	1	-	6	1	23	15	-	52	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	53
	Jumlah Badan	2	4	30	7	1	-	41	6	108	42	-	241	2	-	62	6	-	-	5	-	4	-	-	79	320
IV	Dinas																									
1	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	-	1	2	1	-	-	8	1	10	7	-	30	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	33
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	3	-	-	-	3	-	12	8	-	26	-	-	4	1	-	-	1	-	1	-	-	7	33
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	15	1	-	-	5	1	17	6	-	45	-	-	1	1	-	-	4	-	1	-	-	7	52
4	Dinas Kesehatan	-	2	30	5	-	-	33	10	53	29	1	163	-	-	26	18	-	-	20	-	-	-	-	64	227
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	1	23	5	-	-	27	9	49	25	-	139	-	-	9	6	-	-	17	-	33	4	-	69	208
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	3	1	-	-	8	4	23	8	-	47	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	-	7	54
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	6	36	6	-	-	9	-	22	16	-	97	-	-	4	2	-	-	1	-	6	-	-	13	110



No Nama Organisasi Perangkat Daerah		Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)																								Jumlah Total
		Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)												Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)												
		SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	
8	Dinas Lingkungan Hidup	1	4	28	6	-	-	4	-	19	9	-	71	-	-	3	1	-	-	1	-	2	-	-	7	78
9	Dinas Pariwisata	2	4	19	3	-	-	8	-	14	5	-	55	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	7	62
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	5	21	12	-	-	2	-	30	13	-	86	1	-	6	5	-	-	3	-	1	-	-	16	102
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	-	-	6	-	-	-	4	2	9	3	-	24	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	26
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	1	1	-	-	9	2	14	5	-	32	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	3	-	-	-	2	-	22	6	-	33	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	35
14	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1	13	66	15	-	6	6	1	68	39	2	217	6	-	22	5	-	-	2	-	1	-	-	36	253
15	Dinas Perhubungan	-	-	16	2	-	1	7	3	8	6	-	43	-	-	4	6	-	-	-	-	-	-	-	10	53
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	2	-	-	-	17	-	4	3	-	26	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	28
17	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	-	1	6	3	-	-	6	3	6	11	-	36	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	4	40
18	Dinas Sosial	-	-	6	2	-	-	5	2	14	6	-	35	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	38
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	2	1	-	-	10	-	24	3	-	40	-	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-	5	45
Jumlah Dinas		9	37	288	64	-	7	173	38	418	208	3	1.245	8	-	90	52	-	-	54	-	57	4	-	265	1.510
V	Inspektorat Daerah	-	-	2	1	-	-	5	1	34	15	-	58	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	59
VI	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	8	1	-	-	8	1	17	3	-	40	6	-	10	4	-	-	3	-	1	-	-	24	64
VII	Rumah Sakit Umum Daerah																									

No		Nama Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh ASN Menurut Pendidikan (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)																								Jumlah Total
			Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)												Jenjang Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)												
			SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	SD	SLTP	SLTA	SMK	D-I	D-II	D-III	D-IV	S-1	S-2	S-3	Juml.	
1	RSUD Panembahan Senopati	1	5	25	2	-	-	14	1	11	11	-	70	-	-	4	12	-	-	6	1	3	-	-	26	96	
2	RSUD Saras Adyatma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	-	7	8	
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah		1	5	25	2	-	-	14	1	11	12	-	71	-	-	6	14	-	-	9	1	3	-	-	33	104	
VIII Kapanewon																											
1	Kapanewon Bambanglipuro	-	-	4	1	-	-	2	-	5	-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	
2	Kapanewon Banguntapan	-	-	2	-	-	-	1	-	12	2	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	18	
3	Kapanewon Bantul	-	-	2	-	1	-	-	1	6	2	-	12	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	14	
4	Kapanewon Dlingo	-	1	5	-	-	-	1	1	9	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	18	
5	Kapanewon Imogiri	-	1	6	1	-	-	3	1	5	2	-	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	
6	Kapanewon Jetis	-	1	4	-	-	-	1	1	8	2	-	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	
7	Kapanewon Kasihan	-	1	2	-	-	-	2	2	9	2	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	19	
8	Kapanewon Kretek	-	-	4	-	-	-	2	-	7	2	-	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	
9	Kapanewon Pajangan	-	-	2	-	-	-	1	1	9	1	-	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	
10	Kapanewon Pandak	-	1	5	-	-	-	2	1	9	-	-	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	
11	Kapanewon Piyungan	-	1	2	-	-	-	1	-	9	2	-	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	
12	Kapanewon Pleret	-	-	4	-	-	-	1	1	6	2	-	14	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	
13	Kapanewon Pundong	-	-	1	1	-	-	2	1	9	2	-	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	
14	Kapanewon Sanden	-	-	3	-	-	-	2	-	5	3	-	13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	
15	Kapanewon Sedayu	-	-	7	-	-	-	1	-	8	1	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	18	
16	Kapanewon Sewon	-	1	5	-	-	-	1	-	10	2	-	19	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	
17	Kapanewon Srandakan	-	-	4	-	-	-	1	-	9	3	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	18	
Jumlah Kapanewon		-	7	62	3	1	-	24	10	135	28	-	270	-	-	12	5	-	-	1	-	-	-	-	18	288	
Jumlah Total		14	62	452	84	2	8	293	67	787	338	3	2.110	16	-	188	86	-	-	74	1	69	4	-	438	2.548	

Sumber: BKPSDM Kab. Bantul, 2026



e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.488.884.349.506,96. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun 2025 sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berdasarkan data realisasi dari BPKPAD Kabupaten Bantul *cut off* per tanggal 23 Januari 2026, yaitu sebesar Rp2.512.298.437.218,89, terdapat selisih lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp23.414.087.711,93 atau realisasi tercapai 100,94%, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sejumlah Rp773.220.778.377,96, terealisasi sejumlah Rp766.131.199.608,89 atau tercapai sebesar 99,08% yang dipengaruhi oleh sektor Retribusi Daerah tercapai sebesar 94,59% dari yang dianggarkan.
2. Dana Pendapatan Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.715.663.571.129,00, realisasi tercapai sebesar 101,76% atau terealisasi sejumlah Rp1.745.825.974.633,00.
3. Lain Lain Pendapatan Yang Sah terdapat realisasi dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan total sebesar Rp341.262.977,00.

Tabel 1.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025
(sebelum dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp) *)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	% Realisasi thd Jumlah Pendapatan LRA
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	773.220.778.377,96	766.131.199.608,89	99,08%	30,50%
	Pajak Daerah	409.430.783.300,00	414.970.679.632,50	101,35%	16,52%
	Retribusi Daerah	330.331.530.552,00	312.457.635.841,00	94,59%	12,44%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.838.377.004,15	103,16%	0,83%
	Lain-lain PAD yang Sah	13.258.769.657,96	17.864.507.131,24	134,74%	0,71%
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.715.663.571.129,00	1.745.825.974.633,00	101,76%	69,49%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.570.277.248.668,00	1.589.798.154.936,00	101,24%	63,28%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.386.322.461,00	156.027.819.697,00	107,32%	6,21%

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp) *)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	% Realisasi thd Jumlah Pendapatan LRA
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	341.262.977,00	-	0,01%
	Pendapatan Hibah	0,00	340.350.528,00	-	0,01%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	912.449,00	-	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN- LRA	2.488.884.349.506,96	2.512.298.437.218,89	100,94%	100,00%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; data unaudited cut-off 23 Januari 2026; data diolah

2) Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Jenis Belanja

Pagu anggaran belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2.636.904.600.204,41. Realisasi Belanja sebesar Rp2.501.013.620.265,84 atau 94,84%.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada seluruh Perangkat Daerah (PD) yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa, (iii) Belanja Hibah, dan (iv) Belanja Bantuan Sosial. Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.054.869.567.977,38, realisasi sebesar Rp1.953.446.228.782,04 atau 95,06%.

Tabel 1.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 (sebelum dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA DAERAH				
1	BELANJA OPERASI	2.054.869.567.977,38	1.953.446.228.782,04	95,06%
	Belanja Pegawai	1.056.701.685.446,47	1.000.755.806.665,00	94,71%
	Belanja Barang dan Jasa	900.300.140.867,91	856.399.680.925,04	95,12%
	Belanja Hibah	91.882.816.349,00	91.182.341.192,00	99,24%
	Belanja Bantuan Sosial	5.984.925.314,00	5.108.400.000,00	85,35%
2	BELANJA MODAL	209.530.341.302,52	195.412.733.322,80	93,26%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.617.407.546,52	60.251.382.383,00	94,71%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.825.933.733,00	13.492.099.185,00	91,00%



No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.073.263.503,00	111.660.165.894,80	92,23%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.449.736.520,00	9.447.873.360,00	99,98%
	Belanja Modal Aset Lainnya	564.000.000,00	561.212.500,00	99,51%
3	BELANJA TAK TERDUGA	11.360.421.425,51	3.525.110.891,00	31,03%
	Belanja Tak Terduga	11.360.421.425,51	3.525.110.891,00	31,03%
4	BELANJA TRANSFER	361.144.269.499,00	348.629.547.270,00	96,53%
	Belanja Bagi Hasil	40.548.857.469,00	40.548.857.469,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	320.595.412.030,00	308.080.689.801,00	96,10%
	JUMLAH BELANJA	2.636.904.600.204,41	2.501.013.620.265,84	94,85%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; data unaudited cut-off 23 Januari 2026; data diolah

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp209.530.341.302,52 dengan realisasi Rp195.412.733.322,80 atau 93,26%.

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.360.421.425,51 dengan realisasi Rp3.525.110.891,00 atau 31,03%.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp361.144.269.499,00 dengan realisasi sebesar Rp348.629.547.270,00 atau 96,53%. Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat pada Tabel 1.5.

3) Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan dapat berbentuk angsuran hutang, bantuan modal dan/atau transfer ke dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp174.720.250.697,45 dengan realisasi Rp175.061.744.482,45 atau 100,20%. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp26.700.000.000,00 dengan realisasi Rp25.375.550.000,00 atau 95,04%. Rincian Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Daerah Tahun 2025 (sebelum dilakukan Audit BPK)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.720.250.697,45	175.061.744.482,45	100,20%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	173.920.250.697,45	173.920.250.697,45	100,00%
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	1.141.493.785,00	142,69%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.700.000.000,00	25.375.550.000,00	95,04%
	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000,00	26.700.000.000,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO		148.020.250.697,45	149.686.194.482,45	101,13%

Sumber: BPKPAD Kab. Bantul; data unaudited cut-off 23 Januari 2026; data diolah

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Kabupaten Bantul (Isu Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029)

Pada tahun 2025 menjadi tahun transisi penting di mana RPJMD 2021-2026 (periode kepala daerah sebelumnya) berakhir, dan dimulailah penyusunan serta implementasi RPJMD baru untuk periode 2025-2029, yang selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045, terutama pasca-Pilkada Serentak 2024. Oleh karenanya indikator kinerja utama dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak dilaksanakan pada RPJMD 2025-2029 akan tetap diukur capaiannya. Sedangkan untuk pembahasan perencanaan



kinerja difokuskan kepada RPJMD baru yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025 ke depan.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan masih menjadi isu pokok dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di DIY dan nasional. Tingkat pengangguran di Bantul pada 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di DIY.

2. Kesenjangan Pendapatan

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu lima tahun terakhir masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Gini Ratio Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan DIY dan nasional. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui fasilitasi kesempatan berusaha, padat karya dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin.

3. Peningkatan kualitas dan daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Perkembangan penduduk membawa konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan, baik dari segi cakupan penduduk yang membutuhkan pendidikan maupun dari segi mutu atau kualitas pendidikan yang diberikan. Upaya mewujudkan kapasitas SDM yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan

jaman, memerlukan tindakan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat melalui:

- a) Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas.
- b) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten dalam bidangnya dan memiliki ketrampilan dalam mengajar.
- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, industri dan pasar kerja lokal maupun internasional serta perkembangan teknologi.

Dalam bidang pendidikan upaya pemenuhan layanan dasar yang berkualitas dan inklusif dilakukan melalui layanan pendidikan sekolah kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak dari keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus/disabilitas.

4. Pengelolaan Sampah

Permasalahan sampah menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang terjadi di DIY. Mulai Tahun 2024, Kabupaten/Kota di DIY harus melaksanakan pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan berbagai upaya pengelolaan sampah baik untuk penanganan maupun pengurangan sampah. Upaya penanganan sampah dilakukan dengan pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah. Saat ini fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia belum memadai untuk mengelola timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Upaya optimalisasi yang dilakukan antara lain penambahan gedung, penambahan alat, dan pendampingan operasional. Upaya untuk melakukan pengurangan sampah pada sumbernya juga belum memberikan hasil yang signifikan. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan antara lain sosialisasi pengurangan sampah pada sumbernya, memilah sampah/shodaqoh sampah.

5. Pembangunan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan merupakan tiga aspek utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi salah satu kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Terjadinya alih fungsi



lahan pada sawah irigasi menjadi pemanfaatan lahan lain berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, terancamnya keseimbangan ekosistem, serta banyaknya buruh tani yang kehilangan pekerjaan. Permasalahan irigasi juga menjadi salah satu kendala bagi petani. Pembangunan saluran irigasi sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, dengan adanya saluran irigasi dalam kondisi baik produksi pangan dapat terpenuhi walaupun areal budidaya relatif jauh dari sumber air permukaan (sungai).

6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul semakin meningkat dan terus menunjukkan tren positif. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa wisata. Tantangan di sektor pariwisata ke depan adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan kesiapan daerah tujuan wisata baik jumlah maupun kualitas pelayanan.

7. Pengembangan Kawasan Selatan

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan pada lima tahun ke depan. Kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi kabupaten. Wilayah pesisir Kabupaten Bantul memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

8. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Gumuk Pasir Parangtritis merupakan gumuk pasir tipe Barchan yang unik dan langka karena terbentuk pada iklim tropika basah. Gumuk Pasir Parangtritis merupakan geosite bernilai internasional yang memiliki potensi menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG). Keberadaan Gumuk Pasir Parangtritis secara ekologis berfungsi sebagai tanggul alam terhadap ancaman gelombang tsunami, saat ini kondisinya mulai rusak. Penggunaan lahan gumuk pasir yang semakin

meningkat dari tahun ke tahun membuat luas gumuk pasir semakin berkurang. Zona inti yang dikhususkan untuk konservasi mengalami alih fungsi lahan akibat adanya beberapa aktivitas manusia seperti pembangunan permukiman, sarana pariwisata, penghijauan, pembukaan lahan pertanian dan pembukaan lahan tambak. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), mengenai permasalahan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis yaitu berkurangnya luasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan Samas–Parangtritis. Restorasi zona inti gumuk pasir bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis gumuk pasir. Potensi masalah yang telah diidentifikasi di kawasan Zona Inti Gumuk Pasir Parangtritis sesuai Rencana Tapak adalah:

- a) Wisata kendaraan bermotor (motor dan mobil serta *off-roader*);
- b) Perikanan / Tambak / Peternakan dan Pertanian;
- c) Pemukiman liar / tidak berizin.
- d) Vegetasi yang tumbuh dan menutup lorong angin.

Dampak langsung yang terjadi akibat restorasi ini adalah penertiban lahan terbangun yang berada di zona inti seperti bangunan, pengalihan jalur jeep wisata dan pengalihan aktivitas lainnya. Pelaksanaan penertiban zona inti Gumuk Pasir Parangtritis membutuhkan regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan aksi restorasi sehingga dapat dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan. Penyusunan regulasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Informasi Geospasial (BIG) yang diwakili Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (BGPGP), Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Perguruan Tinggi, dan masyarakat di wilayah Gumuk Pasir Parangtritis, sehingga diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis. Rumusan rencana aksi restorasi Gumuk Pasir Parangtritis telah tertuang dalam dokumen RPJPD pada Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi, untuk menjadi acuan perencanaan program yang mendukung program



unggulan pada dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan RKPD sebagai acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan aksi restorasi.

9. Reformasi Birokrasi

Kabupaten Bantul perlu terus mendorong reformasi birokrasi hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital.

10. Reformasi Kalurahan

Pembangunan di wilayah kalurahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dan mendorong kemandirian kalurahan. Kemandirian kalurahan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. Identifikasi karakter antar kalurahan yang berbeda menjadi aset informasi penting dalam pengembangan masing-masing kalurahan. Akselerasi pembangunan kalurahan dilakukan melalui:

- a) Reformasi Birokrasi Kalurahan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja dengan Pamong Kalurahan yang profesional dan partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- b) Reformasi birokrasi kalurahan yang bersinergi dengan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan.

11. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2024 khususnya pada Indeks Kualitas Air (IKA). Penurunan IKA disebabkan oleh banyaknya sumber pencemar pada lima sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog, Winongo, Gajahwong, Opak dan Sungai Oyo. Sumber pencemar berasal dari beberapa sektor yaitu: sektor industri, domestik dari permukiman, IPAL dan IPLT, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan galian C/mineral non logam, serta sektor lain seperti RS, TPA/TPST dan laboratorium. Faktor lain penyebab menurunnya IKLH adalah penurunan kualitas udara disebabkan oleh emisi gas buang

kendaraan bermotor (SONOx) yang relatif masih tinggi. Selain itu ketersediaan RTH Publik sebagai komponen penyusun IKTL masih dibawah ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Kabupaten Bantul baru memiliki RTH seluas 1.079, 40 ha atau hanya 2,11% dari luas wilayah, sehingga terdapat kekurangan RTH seluas 9.145,66 ha.

12. Percepatan Penurunan Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Bantul menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan pada Tahun 2024. Pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung menangani kondisi stunting seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pencegahan infeksi, status gizi ibu, dan penyakit menular. Sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi kondisi yang dapat menyebabkan kasus stunting seperti penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi.

13. Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

Mekanisme sistem penanganan masalah terhadap kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dari berbagai lintas sektor belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan tidak meratanya penanganan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

14. Pengendalian Inflasi Daerah

Laju inflasi Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan yang didorong oleh stabilitas harga bahan pokok, seperti beras. Walaupun terjadi penurunan, angka inflasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional.

15. Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Bantul yang rawan terhadap berbagai



jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tsunami, menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tentang ancaman bencana dan upaya pengurangan risiko bencana.
- b) Penegakan aturan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kebijakan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik.
- c) Dokumen perencanaan dan kajian terkait penanggulangan bencana belum menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya.
- d) Tutupan lahan yang semakin menyempit, pola iklim yang tidak menentu, serta kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko bencana.
- e) Pembangunan infrastruktur bencana belum optimal.

16. Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta

a) Urusan Kelembagaan

Reformasi Kalurahan menjadi hal yang penting pada urusan kelembagaan guna mencapai visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Dukungan terhadap kegiatan ini baru dilaksanakan mulai Tahun 2024 dengan melibatkan kapanewon dan perangkat daerah yang menangani urusan kalurahan sehingga masih diperlukan program dan kegiatan yang keberlanjutan.

b) Urusan Kebudayaan

Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya melingkupi Kalurahan Budaya, Kalurahan Wisata, Kalurahan Primma (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), dan Kalurahan Preneur. Penetapan Kalurahan Mandiri Budaya oleh DIY diawali dengan Desa/Kalurahan Rintisan Budaya yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Pada Urusan Kebudayaan juga memuat pendidikan berbasis budaya, kesehatan tradisonal, perlindungan masyarakat melalui kelompok jaga warga, dan peningkatan ketahanan pangan melalui lumbung mataraman serta desa

maritim.

c) **Urusan Tata Ruang**

Kabupaten Bantul memiliki tujuh SRS Kasultanan yaitu: SRS Pantai Samas-Parangtritis, SRS Makam Raja-raja di Imogiri, SRS Kerto Pleret, SRS Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede, SRS Sumbu Filosofi, SRS Karst Gunungsewu, dan SRS Masjid Pathok Nagoro. Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten belum optimal untuk mencapai tujuan keistimewaan. Sumbu Filosofi merupakan kekayaan budaya, telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh *United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tanggal 24 September 2023 dengan nama *The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks*. Menindaklanjuti penetapan tersebut, Gubernur DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang mengamanahkan pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta dilaksanakan secara kolaboratif dan koordinatif antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kasultanan dan setiap orang untuk mengelola Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

d) **Urusan Pertanahan**

Tanah kasultanan dan tanah kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah kasultanan dan kadipaten mengalami beberapa kendala, yaitu proses pemberkasan pendaftaran dan belum cukupnya data dukung proses tersebut.

b. Visi Dan Misi Bupati Bantul

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran



yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"

Sedangkan rumusan visi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman Dan Budaya Istimewa"

Penjelasan Pokok-Pokok Visi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029:

1. Maju, diartikan sebagai cara berfikir dan cara bekerja yang mengadopsi teknologi untuk melanjutkan transformasi digital menuju masa depan Kabupaten Bantul yang berdaya saing.
2. Kuat, diartikan memiliki kapasitas, prakarsa dan kedaulatan dalam mengembangkan ruang hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.
3. Demokratis, diartikan sebagai prinsip, nilai dan tatanan bermasyarakat yang mengakui dan menghormati hak setiap warga, serta kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, aman dan tertib.
4. Bingkai Keberagaman, diartikan sebagai pedoman hidup yang memedomani ajaran agama yang dianutnya secara moderat dalam rangka turut membangun masyarakat Kabupaten Bantul yang bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada NKRI.
5. Bingkai Budaya Istimewa, iartikan sebagai nilai pengakuan dan penghormatan masyarakat Kabupaten Bantul kepada budaya Kerajaan Mataram yang diwariskan, dilestarikan dan dikembangkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten

Bantul Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.
4. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
5. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun penentuan program prioritas daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 1.7. sebagai berikut:

Tabel 1.7 Matriks Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pestaerian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno



SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Penyelenggaraan Pengawasan

SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan***



SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
4.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Pengembangan UMKM
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/SP
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
5.	Menurunnya kedalaman kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial

SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
7.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



SASARAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Penatagunaan Tanah
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***
8.	Meningkatnya pelestarian budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
9.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

***) Program bersumber Dana Keistimewaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat
Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2026; Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul 2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Tabel 1.8 Matriks Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 (Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025)

<i>PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan</i>
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
<i>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<i>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</i>
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
<i>RSUD Panembahan Senopati</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
RSUD Saras Adyatma
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Dinas Kesehatan</i>



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Srandakan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Sanden
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
<i>Puskesmas Kretek</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Pundong</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Bambanglipuro</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Pandak I</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Pandak II</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Bantul I</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Bantul II</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Jetis I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Jetis II
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Imogiri I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Imogiri II
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Dlingo I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Dlingo II
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Pleret
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Piyungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Banguntapan I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Banguntapan II
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Banguntapan III
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Sewon I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas Sewon II
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
<i>Puskesmas Kasihan I</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Kasihan II</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Pajangan</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Sedayu I</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>Puskesmas Sedayu II</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan BLUD
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>UPTD Jamkesda</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<i>UPTD Labkesda</i>
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</i>
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</i>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</i>
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</i>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</i>
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</i>
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</i>
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</i>
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
<i>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</i>
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</i>
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</i>
Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis
Dinas Perhubungan



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</i>
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
<i>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</i>
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
<i>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</i>
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
<i>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</i>
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
<i>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</i>
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Praja
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Dinas Sosial
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Sarana dan Prasarana Keistimewaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Penyimpanan sementara Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pengelolaan Sampah
UPTD Laboratorium Lingkungan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pengelolaan Sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Pelayanan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENATAAN DESA
Penyelenggaraan Penataan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penataan Organisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Pendidikan Berbasis Budaya
Dinas Kesehatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
<i>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
<i>Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
Pengembangan Industri Kreatif
<i>Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
<i>Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya
<i>Kapanewon Piyungan; Kapanewon Dlingo; Kapanewon Imogiri; Kapanewon Pandak; Kapanewon Bantul; Kapanewon Kretek; Kapanewon Banglipuro; Kapanewon Jetis; Kapanewon Kasihan; Kapanewon Pajangan; Kapanewon Sanden; Kapanewon Sedayu; Kapanewon Srandakan; Kapanewon Banguntapan; Kapanewon Pundong</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
<i>Kapanewon Pleret</i>
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
UPTD Balai Budidaya Ikan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Dinas Pariwisata
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Pengembangan Prasarana Pertanian
Pembangunan Prasarana Pertanian
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
Puskesmas Banguntapan III
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Peningkatan Budaya Pemerintahan
Dinas Sosial
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Peningkatan Budaya Pemerintahan
Sekretariat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bagian Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
<i>Bagian Tata Pemerintahan</i>
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Administrasi Tata Pemerintahan
Fasilitasi Kerja Sama Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
<i>Bagian Perencanaan dan Keuangan</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
<i>Bagian Hukum</i>
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
<i>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</i>
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
<i>Bagian Organisasi</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penataan Organisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Peningkatan Budaya Pemerintahan
<i>Bagian Umum dan Protokol</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Peningkatan Budaya Pemerintahan
Kapanewon Piyungan; Kapanewon Dlingo; Kapanewon Imogiri; Kapanewon Pandak; Kapanewon Bantul; Kapanewon Kretek; Kapanewon Sedayu; Kapanewon Srandakan; Kapanewon Banguntapa; Kapanewon Pundong; Kapanewon Sanden; Kapanewon Pajangan; Kapanewon Kasihan; Kapanewon Jetis; Kapanewon Bambanglipuro;
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
Kapanewon Sewon; Kapanewon Pleret
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
SEKRETARIAT DPRD
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Layanan Administrasi DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KEUANGAN
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Mutasi dan Promosi ASN
Pengembangan Kompetensi ASN
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH
Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi
UNSUR KEWILAYAHAN
KECAMATAN
Kapanewon Piyungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Dlingo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Imogiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Pandak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Bantul
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
<i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Kretek
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
<i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Bambanglipuro
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
<i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Kapanewon Jetis
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
<i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Kasihan
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
<i>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Pajangan
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Sanden
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Sedayu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Sewon
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Srandakan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Banguntapan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Pundong
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kapanewon Pleret
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



PROGRAM/ Kegiatan Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perencanaan Tahunan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber: Bag. Organisasi, RKPD TA 2025 Perubahan, Bappeda Kab. Bantul, data diolah

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 (enam) urusan wajib yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan fiskal, sumber daya manusia, karakteristik maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan penerapan SPM. Bahwa hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

b. Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan penerapan SPM di berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 439 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tahun 2025; dan
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 594 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

c. Kebijakan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan SPM telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPJMD 2021-2026 pada Tabel 1.9 sebagai berikut.



Tabel 1.9 Program Pelayanan Dasar RPJMD 2021-2026 dalam Pemenuhan SPM di Kabupaten Bantul

KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	n/a	100 Persen	91.970.069.372	100 Persen	92.470.069.372	100 Persen	92.922.332.372	100 Persen	93.342.756.372	100 Persen	99.342.756.372	100 Persen	470.047.983.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	n/a	66 Persen	217.410.642.120	70 Persen	217.710.642.120	75 Persen	218.010.642.120	79 Persen	218.310.642.120	83 Persen	220.810.642.120	83 Persen	1.092.253.210.600	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 indeks	1 indeks	21.022.955.117	1 indeks	24.842.065.331	1 indeks	22.369.095.882	1 indeks	26.822.863.349	1 indeks	22.196.026.290	1 indeks	117.253.005.969	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	indeks peningkatan kapasitas SDM	1 indeks	1 indeks	352.754.220	1 indeks	354.000.000	1 indeks	356.000.000	1 indeks	358.000.000	1 indeks	360.000.000	1 indeks	1.780.754.220	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	645.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	3.335.000.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026			TARGET	Rp										
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp													
(1)			(2)		(3)		(4)		(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)		(15)	(16)		(17)	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		645.00 0.000	1 indeks		665.00 0.000	1 indeks		670.00 0.000	1 indeks		675.00 0.000	1 indeks		680.00 0.000	1 indeks		3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		725.00 0.000	1 indeks		743.00 0.000	1 indeks		750.00 0.000	1 indeks		768.00 0.000	1 indeks		785.00 0.000	1 indeks		3.771.0 00.000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		645.00 0.000	1 indeks		665.00 0.000	1 indeks		670.00 0.000	1 indeks		675.00 0.000	1 indeks		680.00 0.000	1 indeks		3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		706.72 0.400	1 indeks		725.00 0.000	1 indeks		743.00 0.000	1 indeks		761.00 0.000	1 indeks		2.901.4 17.064	1 indeks		5.837.1 37.464	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		635.00 0.000	1 indeks		665.00 0.000	1 indeks		670.00 0.000	1 indeks		675.00 0.000	1 indeks		680.00 0.000	1 indeks		3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATA N PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		635.00 0.000	1 indeks		665.00 0.000	1 indeks		670.00 0.000	1 indeks		675.00 0.000	1 indeks		680.00 0.000	1 indeks		3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN				
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks		635.00 0.000	1 indeks		665.00 0.000	1 indeks		670.00 0.000	1 indeks		675.00 0.000	1 indeks		680.00 0.000	1 indeks		3.325.0 00.000	DINAS KESEHATAN				



KODE	JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	645.00 0.000	1 indeks	665.00 0.000	1 indeks	670.00 0.000	1 indeks	675.00 0.000	1 indeks	680.00 0.000	1 indeks	3.335.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	845.00 0.000	1 indeks	866.00 0.000	1 indeks	870.00 0.000	1 indeks	872.00 0.000	1 indeks	875.00 0.000	1 indeks	4.328.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	705.83 2.000	1 indeks	725.00 0.000	1 indeks	743.00 0.000	1 indeks	750.00 0.000	1 indeks	755.00 0.000	1 indeks	3.678.8 32.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	825.00 0.000	1 indeks	845.00 0.000	1 indeks	850.00 0.000	1 indeks	860.00 0.000	1 indeks	865.00 0.000	1 indeks	4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	745.00 0.000	1 indeks	765.00 0.000	1 indeks	770.00 0.000	1 indeks	775.00 0.000	1 indeks	780.00 0.000	1 indeks	3.835.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	650.00 0.000	1 indeks	670.00 0.000	1 indeks	675.00 0.000	1 indeks	680.00 0.000	1 indeks	687.00 0.000	1 indeks	3.362.0 00.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	825.00 0.000	1 indeks	845.00 0.000	1 indeks	850.00 0.000	1 indeks	860.00 0.000	1 indeks	865.00 0.000	1 indeks	4.245.0 00.000	DINAS KESEHATAN

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	675.00 0.000	1 indeks	700.00 0.000	1 indeks	710.00 0.000	1 indeks	715.00 0.000	1 indeks	720.00 0.000	1 indeks	3.520.0 00.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	877.00 0.000	1 indeks	845.00 0.000	1 indeks	850.00 0.000	1 indeks	860.00 0.000	1 indeks	865.00 0.000	1 indeks	4.297.0 00.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	665.00 0.000	1 indeks	682.00 0.000	1 indeks	699.00 0.000	1 indeks	715.00 0.000	1 indeks	720.00 0.000	1 indeks	3.481.0 00.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	665.00 0.000	1 indeks	682.00 0.000	1 indeks	699.00 0.000	1 indeks	715.00 0.000	1 indeks	720.00 0.000	1 indeks	3.481.0 00.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	725.00 0.000	1 indeks	743.00 0.000	1 indeks	750.00 0.000	1 indeks	755.00 0.000	1 indeks	765.00 0.000	1 indeks	3.738.0 00.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	803.84 4.080	1 indeks	810.00 0.000	1 indeks	815.00 0.000	1 indeks	820.00 0.000	1 indeks	825.00 0.000	1 indeks	4.073.8 44.080	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	825.00 0.000	1 indeks	845.00 0.000	1 indeks	850.00 0.000	1 indeks	861.00 0.000	1 indeks	865.00 0.000	1 indeks	4.246.0 00.000	DINAS KESEHATAN	



KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	695.000.000	1 indeks	715.000.000	1 indeks	720.000.000	1 indeks	725.000.000	1 indeks	730.000.000	1 indeks	3.585.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	825.000.000	1 indeks	845.000.000	1 indeks	850.000.000	1 indeks	860.000.000	1 indeks	867.000.000	1 indeks	4.247.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	645.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	645.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	3.335.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 indeks	1 indeks	635.000.000	1 indeks	665.000.000	1 indeks	670.000.000	1 indeks	675.000.000	1 indeks	680.000.000	1 indeks	3.325.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	57,29 Persen	-	-	67 Persen	55.000.000	69 Persen	59.950.000	71 Persen	64.746.000	73 Persen	69.279.000	73 Persen	248.975.000	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
			UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Turn Over Interval (TOI)	2,69 hari	-	-	2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		2 hari		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
			UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Turn Over (BTO)	46,29 kali	-	-	50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET		Rp
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	82,36 Persen	83,56 Persen	1.684.064.441	84,38 Persen	8.744.242.764	85,19 Persen	8.918.667.040	85,98 Persen	9.489.533.744	86,76 Persen	9.962.587.119	100 Persen	38.799.095.108	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	84,83 Persen	87,86 Persen	4.896.417.653	89,89 Persen	5.351.716.994	91,92 Persen	5.436.888.693	93,95 Persen	5.500.577.563	95,98 Persen	5.650.635.319	95,98 Persen	26.836.236.222	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	05		PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100 Persen	3.788.800.826	100 Persen	4.784.865.801	100 Persen	4.813.352.381	100 Persen	4.984.687.619	100 Persen	4.499.156.802	100 Persen	22.870.863.429	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN	Persentase Perda dan Perkada yang	100 Persen	100 Persen	2.384.412.000	100 Persen	2.479.788.771,20	100 Persen	4.887.460.448	100 Persen	2.541.472.297	100 Persen	3.436.809.527,02	100 Persen	15.729.943.044	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			DAN KETERTIBAN UMUM	ditegakkan														
01	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20 Persen	25 Persen	3.190.686.000	30 Persen	2.855.000.000	35 Persen	3.068.000.000	40 Persen	3.160.800.000	45 Persen	3.034.241.000	60 Persen	15.308.727.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
				Indeks Pemulihan Pascabencana	n/a	n/a		45 Persen		55 Persen		60 Persen		65 Persen		75 Persen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	14,48 Menit	< 15 Menit	393.930.000	< 15 Menit	690.000.000	< 15 Menit	495.000.000		666.000.000	< 15 Menit	732.600.000	< 15 Menit	2.977.530.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	n/a	60 Persen	673.959.448	70 Persen	523.959.448	75 Persen	523.959.448	80 Persen	523.959.448	85 Persen	523.959.448	85 Persen	2.769.797.240	DINAS SOSIAL
01	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	80 Persen	75 Persen	8.938.751.920	75 Persen	9.188.751.920	75 Persen	9.788.924.104	80 Persen	9.788.751.920	80 Persen	10.288.751.920	80 Persen	47.993.931.784	DINAS SOSIAL

KODE			JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)														
				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan n sosial yang tertangani	n/a	70 Persen	(6)	70 Persen	(8)	70 Persen	(10)	80 Persen	(12)	80 Persen	(14)	80 Persen	(16)	DINAS SOSIAL
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	4.074.365.740	60 Persen	4.141.265.740	70 Persen	4.141.265.740	75 Persen	4.341.265.740	80 Persen	5.004.080.834	80 Persen	21.702.243.794	DINAS SOSIAL
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen	100 Persen	250.582.500	100 Persen	250.582.500	100 Persen	518.608.626	100 Persen	518.608.626	100 Persen	918.608.626	100 Persen	2.456.990.878	DINAS SOSIAL

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026



Pelantikan H. Abdul Halim Muslih sebagai Bupati Bantul dan H. Aris Suharyanta sebagai Wakil Bupati Bantul periode tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2026 berimplikasi pada perlunya penyesuaian arah kebijakan daerah agar selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Penyesuaian dimaksud meliputi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, yang selanjutnya dituangkan dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Perubahan RPJMD tersebut dilaksanakan dalam rangka menjamin keselarasan program pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 telah mengintegrasikan rencana aksi penerapan SPM ke dalam perencanaan yaitu dengan mencantumkan matriks rencana pencapaian indikator kinerja SPM tahun 2025-2029 pada dokumen RPJMD, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.10 sebagai berikut:

Tabel 1.10 Rencana Pencapaian Indikator SPM dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
SPM Pendidikan																																	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	21.742	21.742	21.742	29.851.000.153	30.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	21.742	21.742	30.149.510.154	35.000.000.000	APBD, APBN	Dinas Pendidikan	21.742	21.742	30.451.005.256	35.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	21.742	21.742	30.755.15.309	35.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	21.742	21.742	31.063.070.462	35.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar	Orang	107.398	107.398	107.398	382.906.600.422	395.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	107.398	107.398	386.735.666.426	395.000.000.000	APBD & APBN	Dinas Pendidikan	107.398	107.398	390.603.023.090	400.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	107.398	107.398	394.509.053.321	400.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	107.398	107.398	398.454.143.854	400.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan
	SD	Orang	73.137	73.137	73.137	212.714.577.080	215.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	73.137	73.137	214.841.722.850	215.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	73.137	73.137	216.990.140.079	220.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	73.137	73.137	219.160.041.480	220.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	73.137	73.137	221.351.641.894	220.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan
	SMP	Orang	34.261	34.261	34.261	170.192.023.342	180.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	34.261	34.261	171.893.943.575	180.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	34.261	34.261	173.612.883.011	180.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	34.261	34.261	175.349.011.841	180.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	34.261	34.261	177.102.501.960	180.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	2.413	2.413	2.413	5.398.177.300	6.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	2.413	2.413	5.452.159.073	6.000.000.000	APBD & APBN	Dinas Pendidikan	2.413	2.413	5.506.680.664	6.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	2.413	2.413	5.561.747.470	6.000.000.000	APBD APBN	Dinas Pendidikan	2.413	2.413	5.617.364.945	6.000.000.000	APBD & APBN	Dinas Pendidikan
SPM Kesehatan																																	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	9.357	9.250	9.250	1.403.141.000		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	8.610	8.610	1.313.814.920		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	8.015	8.015	1.230.769.580		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	7.460	7.460	1.153.307.120		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	6.945	6.945	1.081.427.540		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	9.510	9.250	9.250	59.040.000		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	8.610	8.610	5.904.000		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	8.015	8.015	59.040.000		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	7.460	7.460	59.040.000		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	6.945	6.945	59.040.000		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	7.959	7.250	7.250	316.769.750		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	7.065	7.065	310.248.315		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	6.890	6.890	304.079.390		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	6.700	6.700	297.381.700		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan	6.340	6.340	284.691.340		BLUD, APBD	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	48.829	42.000	42.000	7.561.558.200		APBD, APBN, BLUD	Dinas Kesehatan	41.000	41.000	7.391.241.100		APBD, APBN, BLUD	Dinas Kesehatan	40.000	40.000	7.220.924.000		APBD, APBN, BLUD	Dinas Kesehatan	39.000	39.000	7.050.606.900		APBD, APBN, BLUD	Dinas Kesehatan	38.000	38.000	6.880.289.800		APBD, APBN, BLUD	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	121.607	121.607	121.607	7.112.189.486		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	120.600	120.600	7.038.151.800		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	119.600	119.600	6.969.147.800		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	118.600	118.600	6.900.102.800		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	117.600	117.600	6.831.139.800		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	267.474	200.000	200.000	2.135.950.000		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	200.000	200.000	2.135.950.000		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	200.000	200.000	2.135.950.000		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	200.000	200.000	2.135.950.000		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	200.000	200.000	2.135.950		APBN, APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	107.711	105.000	105.000	3.595.410.000		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	106.000	106.000	3.628.410.000		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	107.000	107.000	3.661.410.000		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	108.000	108.000	3.694.410.000		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	109.000	109.000	3.727.410.000		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	12.650	12.105	12.105	2.756.230.200		APBD	Dinas Kesehatan	12.230	12.230	2.780.640.000		APBD	Dinas Kesehatan	12.370	12.370	2.808.360.000		APBD	Dinas Kesehatan	12.496	12.496	2.833.308.000		APBD	Dinas Kesehatan	12.636	12.636	2.861.028.000		APBD	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	4.401	4.080	4.080	950.707.440		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	4.152	4.152	219.624.336		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	4.225	4.225	222.987.300		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	4.298	4.298	226.350.264		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan	4.371	4.371	229.713.228		APBD-DAK, APBD	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Orang	2.578	2.000	2.000	7.227.000.000		APBD	Dinas Kesehatan	2.000	2.000	722.700.000		APBD	Dinas Kesehatan	2.000	2.000	722.700.000		APBD	Dinas Kesehatan	2.000	2.000	722.700.000		APBD	Dinas Kesehatan	2.000	2.000	722.700.000		APBD	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Orang	11.718	11.620	11.620	8.365.014.760		APBD, APBD-DAK	Dinas Kesehatan	9.960	9.960	7.176.209.088		APBD, APBD-DAK	Dinas Kesehatan	8.560	8.560	6.173.601.880		APBD, APBD-DAK	Dinas Kesehatan	7.580	7.580	5.471.776.840		APBD, APBD-DAK	Dinas Kesehatan	6.820	6.820	4.927.329.360		APBD, APBD-DAK	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	Orang	13.953	11.264	11.264	256.922.944		APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	11.037	11.037	252.071.727		APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	10.913	10.913	249.421.723		APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	10.801	10.801	247.028.171		APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan	10.696	10.696	244.784.216		APBD, APBD-DAK, BLUD	Dinas Kesehatan
SPM Pekerjaan Umum																																	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	2.932	6.800	6.800	8.330.000.000		APBD	DPUPK P, PAM	6.800	6.800	8.500.000.000		APBD	DPUPK PPAM	7.140	7.140	9.817.500.000		APBD	DPUPK PPAM	7.440	7.440	10.695.000.000		APBD	DPUPK PPAM	7.780	7.780	11.670.000.000		APBD	DPUPKP, PAM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Orang	2.452	1.600	1.600	3.500.000.000		APBD	DPUPK P	1.600	1.600	3.675.000.000		APBD	DPUPK P	1.600	1.600	3.850.000.000		APBD	DPUPK P	1.600	1.600	4.025.000.000		APBD	DPUPK P	1.600	1.600	4.200.000.000		APBD	DPUPKP
SPM Perumahan Rakyat																																	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	-	104	104	610.000.000		APBD	DPUPK P	104	104	660.000.000		APBD	DPUPK P	104	104	660.000.000		APBD	DPUPK P	104	104	660.000.000		APBD	DPUPK P	104	104	660.000.000		APBD	DPUPKP
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Orang	52	20	20	175.382.500		APBD	DPUPK P	20	20	185.000.000		APBD	DPUPK P	20	20	185.000.000		APBD	DPUPK P	20	20	185.000.000		APBD	DPUPK P	20	20	185.000.000		APBD	DPUPKP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)			Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Kabupaten/Kota																																
SPM Trantibumlinmas																																	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)	Orang	100	1.485	1.485	271.815.500		APBD	Satuan pamong Praja	1.485	1.485	227.389.800		APBD	Satuan pamong Praja	1.485	1.485	247.635.780		APBD	Satuan pamong Praja	1.485	1.485	309.549.608		APBD	Satuan pamong Praja	1.485	1.485	371.488.069		APBD	Satuan pamong Praja
2	Kebencanaan					780.000.000						1.300.000.000						1.670.000.000						1.635.000.000					1.132.000.000				
a	Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan)	Orang	15.250	15.327	15.327	95.000.000		APBD	BPBD	15.404	15.404	95.000.000		APBD	BPBD	15.482	15.482	95.000.000		APBD	BPBD	15.560	15.560	95.000.000		APBD	BPBD	15.638	15.638	387.000.000		APBD	BPBD
b	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	972.161	972.259	972.259	370.000.000		APBD	BPBD	972.357	972.357	870.000.000		APBD	BPBD	972.455	972.455	1.220.000.000		APBD	BPBD	972.553	972.553	1.170.000.000		APBD	BPBD	972.651	972.651	370.000.000		APBD	BPBD
c	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.306	955	955	315.000.000		APBD	BPBD	960	960	335.000.000		APBD	BPBD	965	965	355.000.000		APBD	BPBD	970	970	370.000.000		APBD	BPBD	975	975	375.000.000		APBD	BPBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Orang	391	145	145	1.128.500.000		APBD	BPBD	145	145	2.778.500.000		APBD	BPBD	150	150	3.927.000.000		APBD	BPBD	150	150	1.627.000.000		APBD	BPBD	160	160	4.977.000.000		APBD	BPBD
SPM Sosial																																	
1	Reabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Orang	7.500	266	266	2.806.511.890		APBD	Dinas Sosial	266	266	2.806.511.890		APBD	Dinas Sosial	266	266	2.806.511.890		APBD	Dinas Sosial	266	266	2.806.511.890		APBD	Dinas Sosial	266	266	2.806.511.890		APBD	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Orang	707	21	21	932.997.728		APBD	Dinas Sosial	21	21	932.997.728		APBD	Dinas Sosial	21	21	932.997.728		APBD	Dinas Sosial	21	21	932.997.728		APBD	Dinas Sosial	21	21	932.997.728		APBD	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Orang	5.763	848	848	7.378.066.331		APBD	Dinas Sosial	848	848	7.378.066.331		APBD	Dinas Sosial	848	848	7.378.066.331		APBD	Dinas Sosial	848	848	7.378.066.331		APBD	Dinas Sosial	848	848	7.378.066.331		APBD	Dinas Sosial



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2028)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layana Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layana Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layana Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layana Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layana Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
4	Rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Orang	25	4	4	755.478.168		APBD	Dinas Sosial	4	4	755.478.168		APBD	Dinas Sosial	4	4	755.478.168		APBD	Dinas Sosial	4	4	755.478.168		APBD	Dinas Sosial	4	4	755.478.168		APBD	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Orang	110	25	25	217.233.750		APBD	Dinas Sosial	25	25	217.233.750		APBD	Dinas Sosial	25	25	217.233.750		APBD	Dinas Sosial	25	25	217.233.750		APBD	Dinas Sosial	25	25	217.233.750		APBD	Dinas Sosial

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

d. Arah Kebijakan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan rancangan KUA Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dalam dokumen RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2025 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.



KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatannya dikelompokkan ke dalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kapanewon), dan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/05947/DPRD/2024 dan Nomor B/900.1.1/614/DPRD/2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, tanggal 9 Agustus 2024, menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked*. Prioritas belanja Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pencapaian SPM dituangkan dalam kebijakan belanja daerah Tahun 2025, di antaranya sebagai berikut:

1. Belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah menjadi belanja prioritas kedua sesuai peraturan perundang-undangan. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang

mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

2. Prioritas penggunaan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
3. Pemenuhan Penerapan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi belanja prioritas daerah pada urutan pertama dari 9 belanja prioritas Daerah.
4. Pemenuhan *mandatory spending* pada KUA 2025 untuk alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta untuk alokasi anggaran kesehatan telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pencapaian SPM diakomodir ke dalam dokumen KUA Tahun 2025 dengan dicantumkan rencana pemenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025. Dalam KUA 2025 disebutkan jenis SPM dan indikator SPM yang harus dipenuhi setiap tahun, dengan target capaian 100% ditunjukkan dalam Tabel 1.11. sebagai berikut:

Tabel 1.11 Jenis dan Indikator Pelayanan SPM yang Harus Dipenuhi dalam Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
I. SPM PENDIDIKAN			
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum-nya	Setiap tahun
2. Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
II. SPM KESEHATAN			
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
III. SPM PEKERJAAN UMUM			
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun
IV. SPM PERUMAHAN RAKYAT			
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
V. SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Jumlah Warga Negara yang	100%	Setiap tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota		
2. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3. Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun
VI. SPM SOSIAL			
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun

Sumber: Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan SPM Tahun 2025 yang dicantumkan dalam Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025 ditunjukkan dalam Tabel 1.12 sebagai berikut:



Tabel 1.12 Program/Kegiatan SPM di Kabupaten Bantul dalam Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
SPM PENDIDIKAN									
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 persen						64.779.243.184,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 persen	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37.808.061.520,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 persen	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.654.471.316,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 persen	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.965.285.348,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 persen	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	351.425.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	79 persen						36.348.591.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8.339 guru	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8.339 guru	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.348.591.000,00
SPM KESEHATAN									
1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda Indeks pemenuhan UKP 1 indeks Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan 1 Indeks Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indeks capaian SPM	100 Persen 1 indeks 1 indeks 1 Indeks						6.326.862.497,00

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 indeks	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 indeks	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.747.563.413,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 indeks	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 indeks	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.335.068.968,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	2 Aplikasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	2 Aplikasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185.625.000,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	6 Rumah Sakit	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	2 Aplikasi	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.605.116,00
1.02.4.01.0.00.01.0001 Puskesmas Srandakan									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0002 Puskesmas Sanden									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0003 Puskesmas Kretek									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan			Cakupan pelayanan	100 persen	Cakupan pelayanan	100 persen	Semua Kecamatan,	15.000.000,00



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			UKM Puskesmas Kretek		UKM Puskesmas Kretek		Semua Kelurahan	
1.02.4.01.0.00.01.0004 Puskesmas Pundong									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0005 Puskesmas Bambanglipuro									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0006 Puskesmas Pandak I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0007 Puskesmas Pandak II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
1.02.4.01.0.00.01.0008 Puskesmas Bantul I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0009 Puskesmas Bantul II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0010 Puskesmas Jetis I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0011 Puskesmas Jetis II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetis II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0012 Puskesmas Imogiri I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan Puskesmas Imogiri I	100 persen	Cakupan pelayanan Puskesmas Imogiri I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0013 Puskesmas Imogiri II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan Puskesmas Imogiri II	100 persen	Cakupan pelayanan Puskesmas Imogiri II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0014 Puskesmas Dlingo I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						111.714.126,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan Puskesmas Dlingo I	100 persen	Cakupan pelayanan Puskesmas Dlingo I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111.714.126,00
1.02.4.01.0.00.01.0015 Puskesmas Dlingo II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan Puskesmas Dlingo II	100 persen	Cakupan pelayanan Puskesmas Dlingo II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0016 Puskesmas Pleret									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						111.714.126,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan Puskesmas Pleret	100 persen	Cakupan pelayanan Puskesmas Pleret	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111.714.126,00

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			UKM Puskesmas Pleret		UKM Puskesmas Pleret		Semua Kelurahan	
1.02.4.01.0.00.01.0017 Puskesmas Piyungan									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0018 Puskesmas Banguntapan I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0019 Puskesmas Banguntapan II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0020 Puskesmas Banguntapan III									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
1.02.4.01.0.00.01.0021 Puskesmas Sewon I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0022 Puskesmas Sewon II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0023 Puskesmas Kasihan I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						47.238.042,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47.238.042,00
1.02.4.01.0.00.01.0024 Puskesmas Kasihan II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Kasihan II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0025 Puskesmas Pajangan									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pajangan	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pajangan	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0026 Puskesmas Sedayu I									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
1.02.4.01.0.00.01.0027 Puskesmas Sedayu II									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	1 Indeks						15.000.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II	100 persen	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000,00
SPM PEKERJAAN UMUM									
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman									
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	85,98 Persen						2.828.258.767,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Rumah tangga dengan akses air bersih dibagi dengan jumlah rumah	100 persen	Capaian kinerja pengelolaan SPAM di daerah kabupaten	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.828.258.767,00



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	di Daerah Kabupaten/Kota			tangga kali 100%					
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	93,95 Persen						11.906.245.996,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	93,95 Persen	Capaian kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.906.245.996,00
SPM PERUMAHAN RAKYAT									
1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman									
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen						657.930.000,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Jumlah Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi	2 Jenis	Capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.060.000,00
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi	1 Jenis	Capaian kinerja sosialisasi dan penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.677.500,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	Capaian kinerja pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	652.192.500,00
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM									
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja									
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen						3.489.177.477,00
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban			Persentase pelanggaran	100 persen	Persentase pelanggaran	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.247.262.372,00

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			kantrantibmas yang ditindaklanjuti		kantrantibmas yang ditindaklanjuti			
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 persen	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.226.931.605,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 persen	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.983.500,00
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBENCANAAN									
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	40 persen						4.624.867.598,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	66 persen	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	66 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155.698.500,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75 persen	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	75 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.225.335.309,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.027.206.389,00
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	87 persen	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	87 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	216.627.400,00
SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KEBENCANAAN									
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan	100 persen						1.904.093.450,00



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	evakuasi korban kebakaran							
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota			Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	87 persen	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	87 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.384.944.300,00
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	70 persen	Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	70 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.999.800,00
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	86 persen	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	86 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	258.499.550,00
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 persen	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245.649.800,00
SPM SOSIAL									
1.06.2.22.4.01.01.0000 Dinas Sosial									
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 persen						9.175.593.339,00

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	68 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	68 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.175.593.339,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen						124.203.400,00
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	85 persen	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	85 persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124.203.400,00
JUMLAH									142.671.529.602,00

Sumber: Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025 Kab. Bantul dalam Dokumen KUA Kabupaten Bantul Tahun 2025, data diolah



Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Nomor B/900.1.1/04688/DPRD/2025 dan Nomor B/900.1.1/579/DPRD/2025, tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025, tanggal 14 Juli 2025.

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp39.338.873.980,62 yaitu pada APBD 2025 sebesar Rp2.671.602.861.975,03 menjadi Rp2.632.263.987.994,41. Penurunan belanja pada Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 ini merupakan hasil tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun 2025 harus memastikan kesesuaian-kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I), terdapat beberapa penambahan belanja yang antara lain digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, yaitu:

1. Urusan Pendidikan untuk rehabilitasi bangunan SD yang rusak.
2. Urusan Kesehatan untuk pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan dasar.

3. Urusan Sosial untuk bantuan sosial masyarakat miskin ekstrem.
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana, dan perbaikan sambungan rumah pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di zona terdampak negatif TPA Piyungan.
5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk penataan dan penertiban reklame.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



**LPPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1 Matriks Capaian Indikator Makro Kabupaten Bantul Tahun 2025.

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	82,05	83,03	1,19
2.	Angka Kemiskinan	11,66%	11,54%	-1,03
3.	Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3,62%	3,57%	-1,38
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB ADHK)	5,04%	4,92%	-2,38
5.	Pendapatan per Kapita (PDRB per Kapita ADHB)	Rp35.843.000,00	Rp38.187.390,00	6,54
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,417	0,427	2,40

Sumber : Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026; Provinsi DIY Dalam Angka 2026; Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2025- No. 70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025; Surat BPS Kab. Bantul No.B-40/34020/HM.500/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Hal: Revisi Data Makro Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bantul 2026, BPS Kab. Bantul.

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit hasil turunan indikator-indikator sosial berupa Angka Harapan Hidup saat lahir, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta indikator ekonomi berupa Pengeluaran Per Kapita Riil yang disesuaikan. Capaian kinerja komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Menurut Komponen, 2021-2025

Komponen	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,89	73,90	74,64	74,80	75,04
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,38	15,48	15,61	15,63	15,91
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,57	9,59	9,79	9,81	10,11
Pengeluaran Riil per Kapita	Rp*1000/orang/tahun	15.545	16.002	16.524	16.851	17.240
IPM	Indeks	80,28	81,04	81,74	82,05	83,03
Pertumbuhan IPM	%	0,34	0,95	0,86	0,38	1,19

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia D.I.Yogyakarta Tahun 2025; Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2025- No. 70/11/34/Th. XXVII, 5 November 2025, BPS DIY 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mencapai 83,03 atau meningkat sebesar 1,19% dibanding tahun 2024 yang mencapai 82,05. Capaian IPM Kabupaten Bantul memiliki status “sangat tinggi” pada tahun 2025 (IPM>80; berdasarkan kriteria dari *United Nations Development Programme* (UNDP)). Hal tersebut menjadi cerminan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta memiliki daya saing yang kuat sehingga eksistensi kehidupannya di masa mendatang menjadi lebih terjamin.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditinjau dari komponen penyusunnya (Tabel 2.2) dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang positif pada semua komponen penyusun IPM. Dimensi umur yang panjang dan sehat mengalami kenaikan (UHH) sebesar 75,04 tahun pada tahun 2025, meningkat 0,24 tahun bila dibandingkan tahun 2024 yang tercapai sebesar 74,80. Pada dimensi pengetahuan, capaian tahun 2025 terhadap indikator HLS dan RLS masing-masing sebesar 15,91 tahun dan 10,11 tahun, meningkat sebesar 0,28 tahun pada indikator HLS dan sebesar 0,3 pada RLS bila dibandingkan dengan tahun 2024. Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan sebesar Rp389.000,00/orang/tahun bila dibandingkan



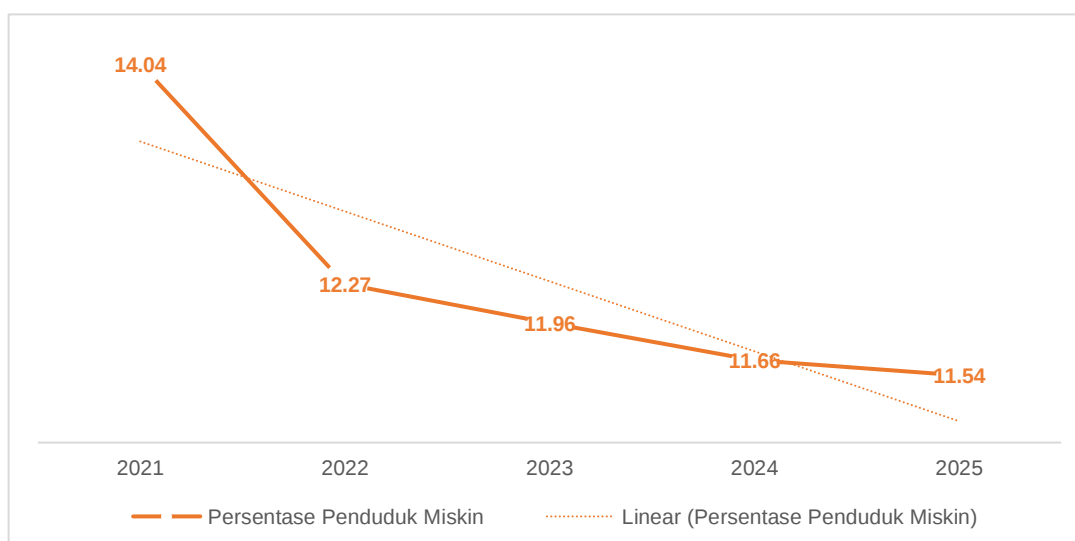
dengan tahun 2024 atau tercapai sebesar Rp17.240.000,00/orang/tahun. Ditinjau dari laju Pertumbuhan IPM, sejak tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhan nilai IPM mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,19% pada tahun 2025 dari tahun 2024.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, dan Laju Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul 2021-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita/ bulan)	Jumlah penduduk miskin (*1000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Laju Angka Kemiskinan (%)
2021	418.265,00	146,98	14,04	4,00
2022	455.511,00	130,13	12,27	-12,61
2023	488.340,00	128,51	11,96	-2,53
2024	510.740,00	126,93	11,66	-2,50
2025	531.456,00	127,25	11,54	-1,03

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kab. Bantul; data diolah



Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025. (Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kab. Bantul; Data Diolah)

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang cenderung menurun pada tahun 2021–2024 (Tabel 2.4 dan Grafik 2.1). Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dari 14,04% pada tahun 2021 turun menjadi 11,54% di tahun 2025, meskipun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 320 orang bila dibandingkan tahun 2024, namun garis kemiskinan juga mengalami peningkatan sebesar Rp20.176,00/Kapita/bulan yang ikut andil dalam perhitungan turunnya angka kemiskinan ini.

2.1.3. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bantul, 2021- 2025

Jenis Kegiatan Utama	Σ Penduduk Tahun 2025 Berusia >15 th (jiwa)	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama Pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
I. Angkatan Kerja	614.314	71,64	74,39	75,06	74,87	74,84
1. Bekerja	592.403	95,96	96,03	96,22	96,38	96,43
2. Pengangguran	21.191	4,04	3,97	3,78	3,62	3,57
II. Bukan Angkatan Kerja	206.492	28,36	25,61	24,94	25,13	25,16
1. Sekolah	62.003	28,93	29,38	30,99	32,79	30,03
2. Mengurus Rumah Tangga	116.697	57,08	59,13	54,94	55,74	56,51
3. Lainnya	27.792	14,00	11,49	14,06	11,47	13,46
Jumlah	820.806	100	100	100	100	100
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		71,64	74,39	75,06	74,87	74,84
Tingkat Pengangguran		4,04	3,97	3,78	3,62	3,57

Sumber: Kabupaten Bantul dalam Angka 2026; BPS Kab. Bantul, 2026

Sejumlah 820.806 jiwa penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2025 termasuk dalam kategori usia kerja (Usia 15 tahun ke atas menurut data BPS). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul ini mencapai 74,84%, yang mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

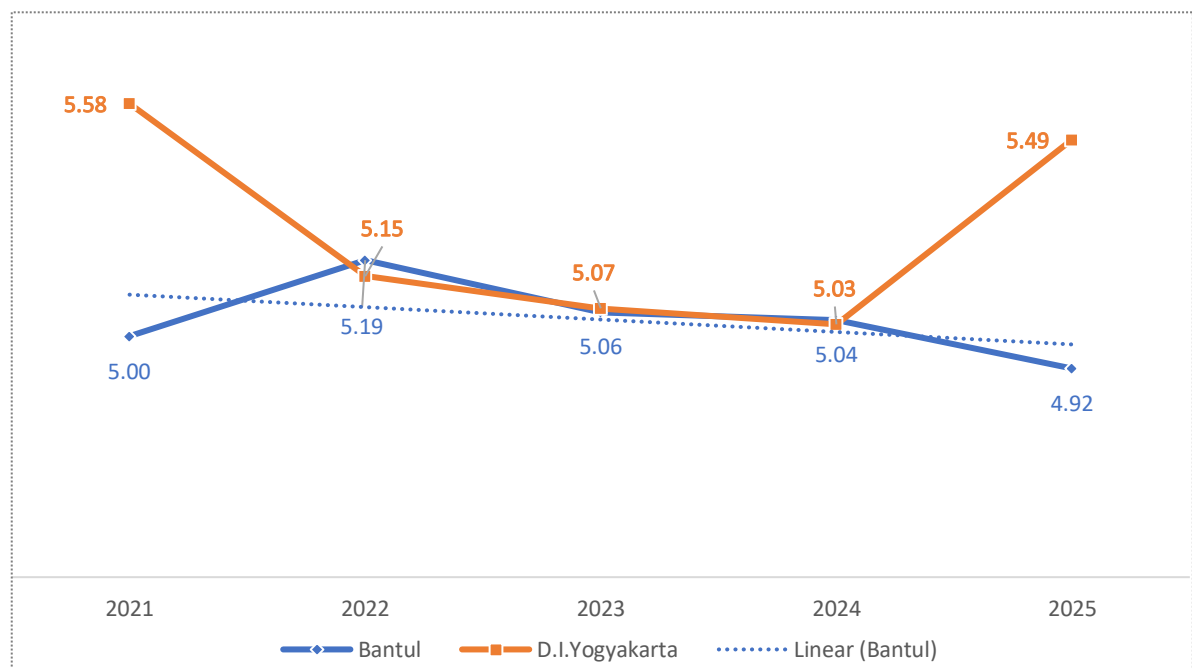
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bantul pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,05% bila dibandingkan tahun 2024 atau tercatat sebesar 3,57%, hal ini berarti dari setiap 100 penduduk usia kerja, terdapat sekitar 4 orang



yang menganggur. Angka ini mencerminkan kondisi pasar kerja di Bantul serta tantangan yang masih perlu diatasi dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan)

Tren Linear Kapasitas perekonomian Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan ke arah negatif atau mengalami perlambatan sejak tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan sebesar 0,19% dari tahun 2021 ke tahun 2022, kembali mengalami perlambatan hingga pada tahun 2025 menjadi 4,92% (Grafik 2.2). Berbeda dengan kondisi perekonomian di tingkat Provinsi DIY yang pada tahun 2025 justru mengalami peningkatan sebesar 0,46% dari tahun 2024 sebesar 5,03% mencapai 5,49% pada tahun 2025.



Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 di Kabupaten Bantul dan Provinsi D.I. Yogyakarta (Sumber: BPS, Kabupaten Bantul dalam Angka 2026, BPS, 2026, data diolah)

Perlambatan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 disumbang oleh 7 sektor lapangan usaha (sektor Pengadaan Listrik dan Gas; sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang;

sektor Konstruksi; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; sektor Jasa Perusahaan; sektor Jasa Pendidikan; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (Tabel 2.5)).

Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan; dan Sektor Jasa Lainnya merupakan sektor yang mengalami peningkatan lebih dari 100% pada tahun 2025, namun demikian nampaknya peningkatan pada sektor-sektor tersebut secara agregat belum dapat menunjukkan laju pertumbuhan ke arah positif dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tabel 2.5 Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025

LAPANGAN USAHA ADHK		TAHUN		Kinerja (%)
		2024*	2025**	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,84	6,72	700,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,50	7,67	1.434,00
C	Industri Pengolahan	3,75	4,66	24,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,27	4,58	-55,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,37	-0,68	-149,64
F	Konstruksi	8,42	-4,17	-149,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	5,54	23,39
H	Transportasi dan Pergudangan	6,67	8,52	27,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	7,71	-6,09
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,55	8,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,45	1,22	-83,62
L	Real Estat	4,14	4,25	2,66
M, N	Jasa Perusahaan	5,39	4,97	-7,79
O	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,59	6,42	-2,58
P	Jasa Pendidikan	4,47	6,66	48,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,41	7,66	41,59
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,79	7,71	103,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,04	4,92	-2,38

Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Bantul, 2026; data diolah; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara



2.1.5. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku)

Tabel 2.6 Pendapatan per Kapita Atas PDRB ADHB Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Laju PDRB ADHB Per Jenis Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2024-2025

LAPANGAN USAHA		PDRB ADHB pada TAHUN (miliar rupiah)		Laju PDRB ADHB %
		2024 ^{*)}	2025 ^{**)}	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.913,83	5.393,17	9,75
B	Pertambangan dan Penggalian	144,02	158,28	9,90
C	Industri Pengolahan	5.136,58	5.522,66	7,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	51,44	54,13	5,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	26,16	26,15	-0,04
F	Konstruksi	3.143,83	3.062,87	-2,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.973,55	3.198,92	7,58
H	Transportasi dan Pergudangan	1.951,95	2.138,86	9,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.649,55	5.215,95	12,18
J	Informasi dan Komunikasi	3.212,05	3.409,57	6,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.157,35	1.197,19	3,44
L	Real Estat	2.217,37	2.388,09	7,70
M, N	Jasa Perusahaan	167,54	179,22	6,97
O	Administrasi Pemerintah, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2.516,76	2.650,54	5,32
P	Jasa Pendidikan	2.551,64	2.735,85	7,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	853,46	930,18	8,99
R, S, T, U	Jasa Lainnya	811,64	909,07	12,00
PDRB ADHB (miliar rupiah)		36.478,72	39.170,70	
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		1.017,75	1.025,75	
PDRB ADHB per Kapita***		Rp35.842.515,35	Rp38.187.375,09	6,54%
PDRB ADHB per Kapita****		Rp35.843.000,00	Rp38.187.390,00	

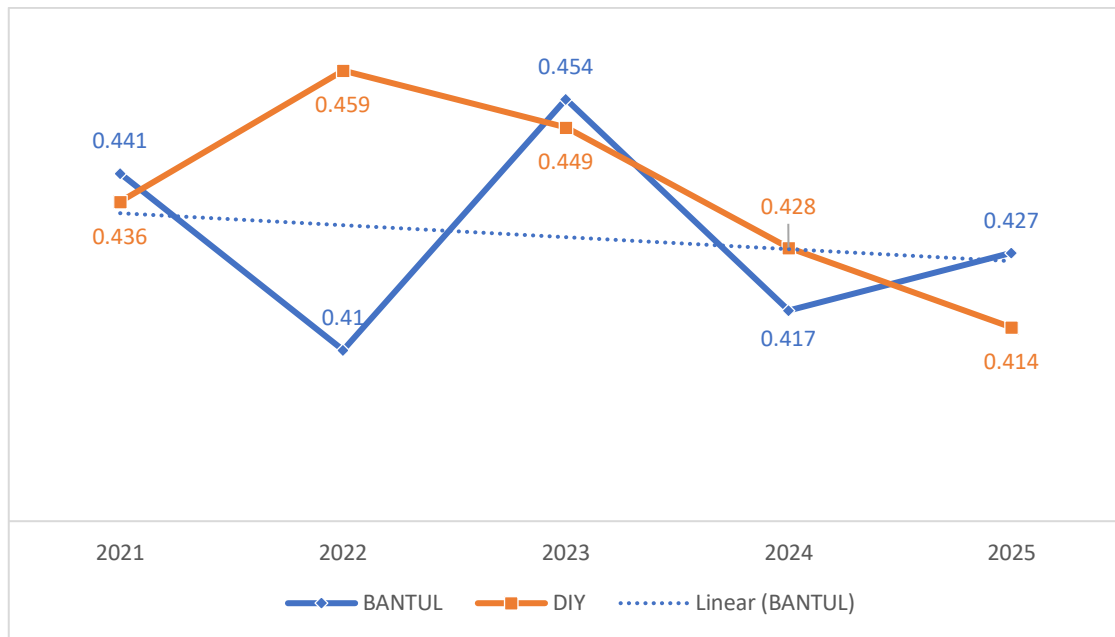
Sumber: Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Bantul; data diolah; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; ***) Berdasarkan perhitungan menggunakan PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026; ****) Berdasarkan Surat BPS Kab. Bantul No. B-40/34020/HM.500/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Hal: Revisi Data Makro Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bantul 2026, BPS Kab. Bantul

Capaian laju kinerja Pendapatan per Kapita Kabupaten Bantul yang dihitung menggunakan data PDRB ADHB pada tahun 2025 dibagi jumlah penduduk tahun 2025 dalam Kabupaten Bantul Dalam Angka Tahun 2026 diperoleh hasil sebesar 6,54% (Tabel 2.6) atau Pendapatan per Kapita penduduk Kabupaten Bantul meningkat sebesar Rp2.344.859,74 dari Pendapatan perkapita Rp35.842.515,35 pada tahun 2024 menjadi Rp38.187.375,09 pada tahun 2025. Sementara itu, BPS Kabupaten Bantul melalui Surat No. B-40/34020/HM.500/2026 Tanggal 2 Maret 2026, Hal: Revisi Data Makro Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bantul 2026 menyampaikan bahwa capaian PDRB per Kapita pada Tahun 2024 sebesar Rp35.843,00 (dalam ribuan rupiah) dan Rp38.187,39 (dalam ribuan rupiah) pada tahun 2025, dan laju PDRB ADHB per Kapita yaitu 6,54% (capaian laju PDRB ADHB per Kapita dalam Surat BPS sama dengan hasil perhitungan PDRB ADHB dibagi jumlah penduduk).

Peningkatan laju kinerja Pendapatan per Kapita ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB pada hampir seluruh sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke arah positif kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar -0,04% dan Sektor lapangan usaha Konstruksi dengan laju pertumbuhan sebesar -2,58%. Sektor lapangan usaha yang memiliki andil tertinggi dalam pencapaian peningkatan PDRB ADHB per kapita yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,18%. Rincian lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.6.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2021 dengan *tren* yang menurun (Grafik 2.3). Angka Indeks Gini Ratio pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,441, kemudian turun hingga titik terendah sebesar 0,41 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,454, dan kembali mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2024 menjadi 0,417, dan kembali naik pada tahun 2025 sebesar 0,427.



Grafik 2.3 Indeks Gini Ratio Kabupaten Bantul dan D.I. Yogyakarta Tahun 2021–2025 (*Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2026; BPS DIY, 2026; data diolah*)

Nilai Tingkat Ketimpangan Pendapatan penduduk Kabupaten Bantul berada pada tingkatan Moderat (nilai antara 0,3 hingga 0,5) dan memiliki kecenderungan untuk meningkat yang mendekati ke arah ketimpangan tinggi. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi tingkat kesenjangan.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan

Tabel 2.7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a	Pendidikan						
	1	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	27.015	100,00	%	
			Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	27.015			
	2	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	127.065	100,00	%	
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	127.065			
	3	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	3.975	99,97	%	
			jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	3.976			



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan	
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan		
	4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	2.453	65,45	%	
			Jumlah seluruh toilet	3.748			
	5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	3.293	63,44	%	
			Jumlah ruang kelas	5.191			
b	Kesehatan						
	1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	9	0,11	%	
			Jumlah ibu melahirkan tahun N	8.472			
	2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	3.673	9,05	%	
			Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	40.580			
	3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	8.339	92,46	%	
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	9.019			

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	8.465	93,86	%	
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	9.019			
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	7.304	99,19	%	
		Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	7.364			
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	42.147	93,66	%	
		Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	45.000			
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu	121.607	100,00	%	



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		tahun ajaran				
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	121.607			
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	268.848	100,00	%	
		Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	268.848			
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	107.711	100,00	%	
		Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	107.711			

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.450	100,00	%	
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.450			
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5.100	100,00	%	
		Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	5.100			



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.601	100,00	%	
		Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.601			
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	11.620	100,00	%	
		Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	11.620			
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (Ibu hamil, Pasien Infeksi Menular Seksual, Pasien Tuberkulosis, Wanita Pekerja Seks, Lelaki Seks dengan Lelaki, Pengguna Narkotika Suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	11.264	100,00	%	

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (Ibu hamil, Pasien Infeksi Menular Seksual, Pasien Tuberkulosis, Wanita Pekerja Seks, Lelaki Seks dengan Lelaki, Pengguna Narkotika Suntik, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.264			
c Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	65,60	%	-
			Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)			-
	2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	65,87	%	-
			Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)			-
	3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	100,00	%	-
			Jumlah total penduduk kabupaten/kota			-



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	350.563	100,00	%	-
		Jumlah rumah di kabupaten/kota	350.563			-
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	1	100,00	%	Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Bantul & Surat Keterangan Ka. DPUPKP Kab. Bantul: Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/pengaman permukiman rawan banjir.
		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1			
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	%	Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Bantul & Surat Keterangan Ka.

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Tidak dapat dilaksanakan			DPUPKP Kab. Bantul: Kab. Bantul tidak mempunyai kewenangan dalam pembangunan infrastruktur pelindung/pengaman permukiman sepanjang pantai rawan abrasi dalam wilayah sungai kabupaten.
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	3.226	100,00	%	-
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	3.226			-
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan	63	100,00	%	-
		Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk	63			-



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	304	39,58	%	-
		Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	768			-
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	5	17,86	%	Penilaian dapat dilakukan selama dan paska pembangunan. Penilaian difokuskan pada KKPR yang telah memiliki masa berlaku lebih lama sebagai prioritas lokasi yang telah dimungkinkan mengalami pembangunan fisik.
		Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	28			
d	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Tidak dapat dilaksanakan	Tidak dapat dilaksanakan	%	Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Bantul & Surat Keterangan Ka.

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	Tidak dapat dilaksanakan			DPUPKP Kab. Bantul: pada tahun 2025 sudah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 25 unit, namun tidak direalisasikan karena tidak ada rumah terdampak bencana di Kabupaten Bantul selama tahun 2025.
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	1,83	83,18	%	-
		Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	2,2			-
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	368	19,74	%	-
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	1.864			-
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0	0,00	%	Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Bantul & Surat Keterangan Ka. DPUPKP Kab. Bantul:



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	7			PSU berada dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya sehingga sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan, belum terdapat kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Pemkab. Bantul terhadap PSU dimaksud.
e Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	3	100,00	%	-
		Jumlah dokumen kebencanaan (Kawasan Rawan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3			-
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	119	100,00	%	-
		Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	119			-
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang	34	100,00	%	-

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
	yang ditegakkan	ditegakkan				
		Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	34			-
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	972.259	100,00	%	-
		Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	972.259			-
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.605	100,00	%	-
		Jumlah warga yang menjadi korban bencana	1.605			-
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	184	88,46	%	24 kejadian tidak dapat memenuhi <i>response time</i> disebabkan lebih dari setengah kejadian berlokasi lebih dari 7,5 km dari Pos Pemadam dan 14
		Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	208			



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
						kejadian berupa kebakaran jaringan listrik PLN, sampah, dan kendaraan di jalan
f	Sosial					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2.914	100,00	%	-
		Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2.914			-
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	208	100,00	%	-
		Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	208			-
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2.498	100,00	%	-
		Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	2.498			-
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10	100,00	%	-

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
			Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	10			-
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	159	100,00	%		-
		Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	159				-
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	5.630	100,00	%		-
		Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	5.630				-
2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a Tenaga Kerja							
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	10	100,00	%	-
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	10			-



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan	
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan		
b	2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	121	30,40	%	Masih rendahnya pemahaman perusahaan terhadap konsep tata kelola kerja layak, dinamika kondisi perusahaan membuat perusahaan lebih fokus pada keberlangsungan usaha (penerapan seluruh aspek tata kelola kerja layak belum menjadi prioritas utama)
		Jumlah perusahaan	398				
	3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	2.682	100,00	%	-
			Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2.682			-
	b Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
		1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	263	100,00	%
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)				263	-		

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
	2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	206	100,00	%	-
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	206			-
c Pangan							
	1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	57,861	48,62	%	-
			Target jumlah cadangan pangan	119			-
d Pertanahan							
	1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	965.937	29,95	%	-
			Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	3.224.827			-
	2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	37.453,8	75,70	%	-
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	49.476,19			-
	3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	3	75,00	%	-
			Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	4			-
e Lingkungan Hidup-							



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	6	15,00	%	-
		Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	40			-
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten/kota	56.297,15	36,59	%	-

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	153.853,22			-
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	233.729	99,98	%	-
		Jumlah anak usia 0 – 4 tahun	233.766			
2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	213.020	97,61	%	
		Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	218.227			
3	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100,00	%	
		2 dokumen	2			
4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	763.758	99,59	%	
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	766.929			
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	7.465	100,00	%	
		Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	7.465			
6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	152	100,00	%	
		Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	152			
7	Persentase akta perceraian	Akta perceraian yang diterbitkan	31	100,00	%	



No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	31			
g Pemberdayaan masyarakat dan desa							
	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Tuntas hasil 100%	Tuntas hasil 100%	%	
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	Tuntas hasil 100%			
	2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Tuntas hasil 100%	Tuntas hasil 100%	%	
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	Tuntas hasil 100%			
	3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	17	100,00	%	
			Jumlah kerja sama desa yang ditangani	17			
h Pengendalian penduduk dan keluarga berencana							
	1	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	<i>Total Fertility Rate</i> /TFR kabupaten/kota	1,3	84,42	%	
			Target <i>Fertility Rate</i> /TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	1,54			

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	74.662	73,98	%	
	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun		100.918				
	3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) kabupaten/kota	8,94	41,58	%	
	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan		21,5				
i	Perhubungan						
	1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%	0,75	0,75	Rasio	-
	2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,36	0,36	Rasio	-
	3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	0,00	%	Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Bantul & Surat



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
	keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	1			Keterangan Ka. Dinas Perhubungan Kab. Bantul: sampai dengan Tahun 2025, belum ada perusahaan angkutan umum di Kab. Bantul yang tersertifikasi SMKPAU karena belum memiliki SDM sebagai tim penilai SMKPAU & perusahaan angkutan umum belum menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan SMKPAU.
j Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	90	100,00	%	-
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	90			-
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	19	100,00	%	-
		Jumlah Layanan Publik	19			-

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
	3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	666.345	99,34	%	-
			Jumlah penduduk	670.755			-
k Koperasi, usaha kecil dan menengah							
	1	Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	(396.680.832.631 - 383.715.191.839)	3,38	%	-
			Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	383.715.191.839			-
	2	Persentase Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	72.120	76,16	%	-
			Σ Jumlah usaha mikro	94.697			-
I Penanaman Modal							
	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	(754.866.711.055 - 727.122.758.804)	3,82	%	-
			Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	727.122.758.804			-
	2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	754.866.711.055	110,20	%	-
			Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	685.000.000.000			-
m Kepemudaan dan Olahraga							



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan	
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan		
n	1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	24	3,04	%	-
			Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	790			-
	2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	10.059	4,79	%	-
			Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	210.065			-
	3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	12	1,33	%	-
			Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	900			-
	4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	35	15,09	%	-
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	232			-
n Statistik							
	1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	71.735	100,00	%	-

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
		kesepakatan forum satu data daerah	jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	71.735			-
o Persandian							
	1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	843	91,83	%	-
			Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918			-
p Kebudayaan							
	1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	274	100,00	%	-
			Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	274			-
	2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	156.843	0,21	%	-
			Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	156.517			-
q Perpustakaan							
	1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100	55,93	55,93	Nilai	-
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100	8,41	8,41	Nilai	-
r Kearsipan							



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$ $T =$ Tingkat ketersediaan arsip $a =$ Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip $i =$ Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip $s =$ Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik $j =$ Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kesehatan Nasional (JIKN)	79,16	79,16	%	
3	Urusan Pilihan					
a	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	14.683,93	106,45	%	-
		Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	13.794			-

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Konsumsi per kapita = Jumlah ikan yang dikonsumsi rumah tangga per kapita setara utuh segar dalam periode 1 tahun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Penimbang individu = Nilai yang menggambarkan keterwakilan sampel di dalam populasi Jumlah penduduk = Jumlah seluruh penduduk di lingkup populasi sampel Kg/Kap/Th	14,95	14,95	Kg/Kap/Tahun	-
b Pariwisata						
1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	3.273.296.291	0,43	%	-
		Realisasi investasi Tahun N	754.866.711.055			-
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	(3.100 - 2.931)	5,77	%	-
		Jumlah wisatawan asing tahun N-1	2.931			-
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	(5.995.318 - 5.934.434)	1,03	%	-
		Jumlah wisatawan tahun N-1	5.934.434			-



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
c	Pertanian					
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	(228.338,3 - 214.131,3)	6,63	%	-
		Produksi tanaman pangan tahun N-1	214.131,3			
2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	(61.276,67 - 74.455,85)	-17,70	%	Produksi Tanaman Hias tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan karena tidak adanya satuan konversi standar dari satuan tangkai atau pohon ke satuan ton. Penurunan produksi disebabkan petani beralih budidaya dari tanaman hortikultura ke tanaman pangan sesuai dorongan program pemerintah pusat yaitu Luas Tambah Tanam. Pemerintah sudah berusaha mengantisipasi dengan menambah luas tanam tanaman hortikultura dengan budidaya di lahan pasir. Akan tetapi karena unsur hara di lahan pasir sangat minim sehingga mempengaruhi produksi yang mengakibatkan penurunan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2025.
		Produksi hortikultura tahun N-1	74.455,85			

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
f	3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	(24.269,028 - 24.011,018)	1,07	%	-
			Produksi komoditas peternakan tahun N-1	24.011,018			-
	4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	418.765	100,00	%	-
			Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	418.765			-
	Perdagangan						
	1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	11.380	89,89	%	-
Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota			12.660				



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
g	Perindustrian					
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut	0	0,00	%	Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kab. Bantul & Surat Keterangan Ka. DKUKMPP Kab. Bantul: Dokumen RPIK Kab. Bantul belum ditetapkan. Tahun 2022 telah dilakukan penyusunan NA dan Raperda RPIK, namun s.d. Tahun 2025 berakhir, dokumen RPIK masih dalam bentuk draf/rancangan karena menunggu Reviu Perda tentang RTRW Kab. Bantul disahkan.
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	289	1,05	%	Kesadaran pelaku IKM melaporkan data industri di SIINas masih rendah, kendala teknis pengguna (lupa <i>username & password</i>), karakteristik IKM mayoritas berskala
		Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	27.622			

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
						rumah tangga/informal menyebabkan belum seluruh pelaku usaha memiliki kesiapan administrasi & literasi digital yg memadai
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	(27.622 - 27.014)	2,25	%	-
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	27.014			-
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	448.638.749.587	59.43	%	-
		Total investasi seluruh sektor	754.866.711.055			-



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.8 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a	Perencanaan						
	1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	17	100,00	%	-
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17			-
b	Keuangan						
	1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	852.658.702.946,47	32,34	%	-
			Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	2.636.904.600.204,41			-
	2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	766.131.199.608,89	30,50	%	-
			Realisasi pendapatan daerah	2.512.298.437.218,89			-

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
	3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	1.508.513.368.475,84	60,32	%	-
			Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2.501.013.620.265,84			-
	4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	697.445.757.326,43	30,65	%	-
			Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	2.275.760.330.705,41			-
c Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
	1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.646	64,60	%	-
			Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.548			-
d Penelitian dan Pengembangan							
	1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	43	100,00	%	-
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	43			-
e Fungsi Pengawasan							



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	5,00	5,00	Nilai	-

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5 Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah	5,00	5,00	Nilai	Capaian 2025 menggunakan capaian 2024. Tahun 2025 (tinjau Peraturan BPKP RI No. 6 Tahun 2025), BPKP Perwakilan DIY melaksanakan sampling evaluasi & penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP pada 5 APIP kab/kota, Kab. Bantul tidak termasuk.



No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
		Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
3	Manajemen risiko Indeks	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) Manajemen Risiko, nilai capaian 1; - Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; - Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; - Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan - Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks.	5,00	5,00	Nilai	
4	Persentase Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	31	100,00	%	
		Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	31			

No		Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Elemen Data		Capaian		Keterangan
			Parameter	Nilai	IKK	Satuan	
f	Fungsi Pengadaan						
	1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40,00	40,00	Poin	
	2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	26,56	26,56	Poin	
	3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	20,77	20,77	Poin	
g	Hubungan dengan Perwakilan Daerah						
	1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat Waktu 2. Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu (100%) Tidak Tepat Waktu (0%)	Tepat	Tepat	1. Tepat Waktu 2. Tidak Tepat Waktu	
	2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	11	100,00	%	-
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	11			-
h	Pelayanan Publik						
	1	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	84,35	84,35	Nilai	-



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan target indikator sasaran strategis daerah dalam bentuk rentang (*range*) yang disesuaikan dalam dokumen perencanaan tahunan RKPD Perubahan Tahun 2023, dan juga telah diterapkan pada beberapa indikator dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029. Penetapan target dalam bentuk rentang (*range*) pada indikator-indikator makro dan strategis daerah didasarkan pada prinsip perencanaan adaptif. Beberapa faktor dan tujuan penerapan target dalam bentuk rentang diantaranya:

1. Faktor Eksternalitas dan Ketidakpastian Ekonomi: Indikator dalam kelompok indikator ekonomi maupun sosial memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap variabel eksternal seperti kebijakan nasional, fluktuasi pasar global, dan kondisi fiskal pusat. Target rentang berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas (*buffer*) untuk mengakomodasi guncangan yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah.
2. Akurasi Metodologi Statistik: Mengingat sumber data utama berasal dari survei berkala (seperti Susenas atau Sakernas oleh BPS) yang memiliki ambang galat (*margin of error*), penetapan target rentang mencerminkan prinsip kehati-hatian ilmiah (*scientific prudence*). Hal ini memastikan bahwa capaian kinerja tetap dianggap valid selama berada dalam koridor interval kepercayaan yang logis.
3. Sinkronisasi Perencanaan Vertikal: Penetapan rentang diselaraskan dengan sistematika penyusunan RPJMN dan RKP Nasional. Hal ini memudahkan sinkronisasi target antara kabupaten, provinsi, dan pusat agar tidak terjadi tumpang tindih asumsi angka tunggal yang kaku di tingkat daerah.
4. Berdasarkan kelompok sifat indikator (indikator negatif dan positif) penerapan target rentang memiliki tujuan:
 - a) Indikator negatif (seperti kemiskinan dan pengangguran), rentang berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko guna mengantisipasi eksternalitas ekonomi yang dapat memperlebar kerentanan sosial.
 - b) Indikator positif (seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan investasi), rentang ditetapkan untuk menjaga motivasi pencapaian kinerja yang progresif namun tetap realistis di tengah keterbatasan ruang fiskal dan dinamika kebijakan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi kinerja tetap objektif dan selaras dengan standar metodologi statistik nasional (BPS).

Dalam rangka menjamin objektivitas dan akuntabilitas pengukuran kinerja terhadap indikator dalam bentuk rentang, maka pengukuran realisasi terhadap target menggunakan nilai acuan utama terhadap kelompok sifat indikator (indikator kinerja bersifat negatif dan indikator kinerja bersifat positif).

Pengukuran kinerja pada indikator bersifat negatif menerapkan *Batas Atas* dari rentang target sebagai nilai acuan utama dalam perhitungan capaian realisasi. Dasar pertimbangan strategis yang mendasari kebijakan ini adalah:



1. Fungsi Ambang Batas Toleransi (*Maximum Threshold*): Pada indikator negatif, nilai target dalam dokumen perencanaan merupakan batas maksimal dampak atau kondisi yang dapat ditoleransi. Penggunaan batas atas sebagai pembagi (*denominator*) dalam rumus capaian memastikan bahwa selama realisasi berada di bawah atau setara dengan batas tersebut, program kerja dianggap telah memenuhi koridor target yang direncanakan secara makro.
2. Prinsip Keadilan Penilaian (*Fairness in Evaluation*): Penetapan target dalam bentuk rentang bertujuan untuk mengakomodasi dinamika eksternal yang sulit dikendalikan. Dengan menggunakan batas atas sebagai acuan, evaluasi kinerja memberikan apresiasi proporsional terhadap upaya pengendalian yang berhasil menjaga realisasi tetap berada dalam rentang target, sehingga menghindari penalti nilai (*under-performance*) pada capaian yang secara substansi sudah sesuai rencana.
3. Konsistensi Logika *Invers*: Mengingat karakteristik indikator negatif adalah '*semakin kecil nilai realisasi, semakin baik kinerjanya*', maka batas atas merepresentasikan standar minimal keberhasilan. Keberhasilan menurunkan realisasi di bawah batas atas, terutama jika menyentuh atau melampaui batas bawah rentang, secara otomatis akan terhitung sebagai capaian yang melampaui 100%, yang mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan secara akurat.
4. Mitigasi Risiko Perencanaan: Pendekatan ini meminimalisir deviasi perhitungan yang bersifat semu, sehingga dokumen LAKIP dapat menyajikan gambaran kinerja yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun instansi pemeriksa.

Pengukuran kinerja pada indikator bersifat positif ditetapkan menggunakan *Batas Bawah* dari rentang target yang ditetapkan sebagai titik acuan perhitungan capaian kinerja untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan telah memenuhi standar pelayanan minimal yang direncanakan. Penggunaan batas bawah memberikan penilaian yang objektif terhadap progres pencapaian, di mana setiap kenaikan di atas standar minimal tersebut dihitung sebagai nilai tambah (*added value*) atas efektivitas program.

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2025 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 Peraturan Bupati Bantul 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.9. sebagai berikut:

Tabel 2.9 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun 2025
Tujuan:				
	I. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,25
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,2815
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	90-94
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,25
Tujuan:		Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,99 - 82,53



No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun 2025
II. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya				
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86
3	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,7
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	12
Tujuan: III. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	2,79
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100
Tujuan: IV. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	5,27-5,66
6	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,346- 0,439
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08-3,58
		Capaian Jaringan Kabupaten kreatif	Persen	100
Tujuan: V. Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	69,50
7	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	77,47
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,63
8	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,70
9	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	146
Tujuan: VI Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	10,75-11,02
10	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	38,575
Tujuan: VII. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,75
11	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,31
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	KLA

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2025; berdasarkan RPJMD 2021-2026

Tabel 2.10 Matriks Kinerja Utama Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun 2025
Tujuan: I. Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,10-82,53
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,70
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,88
		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,50-13,50
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,125
Tujuan: II. Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,25
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	Angka	82,73
		Opini BPK	Opini	1 (WTP)
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,68
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47-4,51
Tujuan: III. Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,16-5,36
		PDRB per kapita	Rp Juta	36,99-38,21
		Gini Ratio	Indeks	0,390-0,410
3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,77-12,86
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,10-14,77
		PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	5.107,17-5.152,41
4	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,75 – 26,82
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08 – 3,58
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	4,00 – 4,50
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ orang/ tahun)	Ribu rupiah	17.078
Tujuan: IV. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	Persen	10,75-11,02
5	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,16
Tujuan: V. Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	64,39



No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target tahun 2025
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	66,07
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	123,02
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	59,08
8	Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,51
9	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	89,26
10	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Crime Rate	per 100.000 penduduk	148

Sumber : Perjanjian Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2025; berdasarkan RPJMD 2025-2029

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target di Dalam Perjanjian Kinerja

Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Bantul selama lima tahun sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah tercermin dari capaian 7 (tujuh) indikator tujuan dan 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Tabel 2.11 Matriks Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran Daerah (Indikator Kinerja Utama (IKU)) Kabupaten Bantul Tahun 2025 Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Dengan Dasar RPJMD Tahun 2021-2026.

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
I. Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	88,25	90,03	102,02
1.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,2815	3,4254*	80,00
2.	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00
3.	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) KPK	Nilai	90-94	91,2	101,33
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,18	4,18*	100,00
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,25	92,97	103,01

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
II. Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	81,99-82,53	83,03	101,27
6.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86	75,04	100,24
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,7	15,91	101,34
8.	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	12	14	116,67
III. Indeks Rasa Aman		Indeks	2,79	4,55*	163,08
9.	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100,00	100,00
IV. Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,20 - 5,32	4,92	94,62
10.	Rasio Gini	Angka	0,390 - 0,410	0,427	95,85
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08 - 3,58	3,57	100,28
12.	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	100	100,00
V. Indeks Pembangunan Infrastruktur		Indeks	69,50	68,04	97,90
13.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	77,47	72,53*	93,62
14.	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,63	75,6*	99,96
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,70	71,17	115,35
16.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	146	96,02	134,23
VI. Tingkat Kemiskinan		Persen	10,75- 11,02	11,54	95,28
17.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	38.575	37.116	103,78
VII. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	96,75	96,05*	99,28
18.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,31	75,97*	102,23
19.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	KLA	Utama	90,06
		Nilai	890	801,5*	

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024;

Dari Tabel 2.11 terlihat capaian IKU Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) indikator atau sebesar 65,38% mencapai target, dan 9 (sembilan) indikator atau sebesar 34,62% tidak mencapai target. Hal tersebut umumnya karena angka tersebut masih menggunakan capaian tahun 2024 dikarenakan belum adanya rilis angka dari BPS, sedangkan untuk indikator Kabupaten Layak Anak angka tersebut adalah capaian tahun 2024 dikarenakan indikator tersebut dievaluasi 2 tahun sekali. Perhitungan pada indikator negatif menggunakan target *range* tertinggi sebagai acuan perhitungan.



2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.12 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dari Perjanjian Kinerja Bulan Januari Tahun 2025.

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Realisasi 2025	%Kinerja	Selisih kinerja
T.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	90,03	102,28	2,01
1.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4254	3,4254*	100,00	0
2.	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00	0
3.	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	93,29	91,2	97,76	-2,09
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,18	4,18*	100,00	0
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,14	92,97	103,14	2,83
T.2	Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,05	83,03	101,19	0,98
6.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,8	75,04	100,32	0,24
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,91	101,79	0,28
8.	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	10	14	140,00	4
T.3	Indeks Rasa Aman	Indeks	4,55	4,55*	100,00	0
9.	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100,00	0
T.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	4,92	97,62	-0,12
10.	Rasio Gini	Angka	0,417	0,427	97,60	-0,01
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,57	101,38	-0,05
12.	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	100	100,00	0
T.5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	69,5	68,04	97,90	-1,46

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Realisasi 2025	%Kinerja	Selisih kinerja
13.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	58,72	75,23	128,12	16,51
14.	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,62	75,6	99,97	-0,02
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,43	71,17	108,77	5,74
16.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	129,5	96,02	125,85	-33,48
T.6	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,66	11,54	101,03	0,12
17.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	38.601	37.116	103,85	-1.485
T.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,05	96,05*	100,00	0
18.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,97	75,97*	100,00	0
19.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	Utama	100,00	0
		Nilai	801,5	801,5*)		

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024

Dari Tabel 2.12 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 5 indikator atau sebesar 19,23% dari seluruh IKU (tujuan dan sasaran) yang mengalami penurunan capaian bila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024, indikator tersebut adalah: Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk indikator Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja MCP KPK penurunan terjadi karena metode penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sementara sisanya ada 9 IKU (tujuan dan sasaran) tetap dan 12 IKU mengalami kenaikan capaian bila dibandingkan dengan capaian 2024.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dari RPJMD periode tahun 2021-2026 berganti dengan RPJMD 2025-2029 sehingga pengukuran capain kinerja tersaji dalam 2 tabel. Pengukuran dengan target pada RPJMD 2025-2029 tersaji dalam tabel 2.13.



Tabel 2.13 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasar Perjanjian Kinerja Perubahan Bulan September Tahun 2025.

No.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian	Selisih
T1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,05	83,03	101,19	0,98
S.1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,91	101,79	0,28
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	10,11	103,06	0,3
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,8	75,04	100,32	0,24
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,5	16,5*	100,00	0
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,127*	100,00	0
T2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	90,03	102,28	2,01
S.2.1	Nilai AKIP	Angka	81,27	82,8	101,88	1,53
	Opini BPK	Opini	WTP	1 (WTP)	100,00	0
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	91,2	97,76	-2,09
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,68	111,96	0,5
T3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	4,92	100,00	-0,12
	PDRB per kapita	Rp Juta	35,843	38,187	100,00	2,344
	Rasio Gini	Indeks	0,417	0,427	100,00	0,01
S.3.1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	13,32	100,00	0,57
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,1	100,00	0,02
	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4913,83	5.393,17	100,00	479,43
S.3.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,72	26,72*	100,00	0
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,57	101,38	-0,05
	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	3,85*	100,00	0
	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	16.851,00	17.240,00	102,31	389
T4	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,66	11,54	101,03	-0,12
S.4.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,28	1,28*	100,00	0
T5	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	63,12	63,12*	100,00	0

No.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Capaian	Selisih
S.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	71,05	115,21	9,38
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	129,5	128,26	100,96	-1,24
S.5.2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58,72	69,19	117,83	10,47
T6	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,44	7,44*	100,00	0
S.6.1	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,42	124,51	17,6
S.6.2	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	73	73*	100,00	0

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, Bappeda Kab.Bantul, 2026; Keterangan: T: Tujuan; S: Sasaran Daerah; *) angka 2024

Dari Tabel 2.13 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 indikator atau sebesar 3,33% dari seluruh IKU (tujuan dan sasaran) yang mengalami penurunan capaian bila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024, indikator tersebut adalah: Indeks Pencegahan Korupsi Daerah. Untuk indikator Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) KPK penurunan terjadi karena metode penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sementara 8 IKU (tujuan dan sasaran) atau sebesar 26,67% tetap dan 21 IKU atau sebesar 70% mengalami kenaikan.



2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.14 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 Dan Target Akhir Tahun Dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 (Tahun 2026).

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
T.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,25	90,03	108,14	83,75	107,50
1.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	4,2815	3,4254*	80,00	4,3315	79,08
2.	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
3.	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Nilai	84	91,2	108,57	84,5	107,93
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	4,18*	122,94	3,45	121,16
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,10	92,97	104,34	89,50	103,88
T.2	Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,99	83,03	101,27	82,44	100,72
6.	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,29	75,04	101,01	74,39	100,87
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,3	15,91	103,99	15,32	103,85
8.	Desa/ Kelurahan Pamor Budaya	Kalurahan	10	14	140,00	12	116,67
T.3	Indeks Rasa Aman	Indeks	2,79	4,55*	163,08	2,81	161,92
9.	Persentase penanganan gangguan ketetraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100	100	100,00	100	100,00
T.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,83	4,92	101,86	5,12	96,09
10.	Rasio Gini	Angka	0,320	0,427	66,56	0,310	45,20
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,30	3,57	91,82	3,2	79,27
12.	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100	100	100,00	100	100,00
T.5	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	69,50	68,04*	97,90	70,61	96,36
13.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	77,47	72,53	97,11	79,08	95,13

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
14.	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,10	75,6*	100,67	75,20	100,53
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,24	71,17	109,09	66,07	107,72
16.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	159,33	96,02	139,04	154,27	221,33
T.6	Tingkat Kemiskinan	Persen	12,05	11,54	104,23	11,50	99,31
17.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71.059	37.116	147,77	70.668	280,80
T.7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,75	96,05*	99,28	96,90	99,12
18.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,31	75,97*	102,23	75,96	100,01
19.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	KLA	Utama	88,08	KLA	84,37
		Nilai	910	801,5*		950	

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, Bappeda Kab.Bantul, 2026; Keterangan: T: Tujuan; S: Sasaran Daerah; *) Capaian 2024

Realisasi Capaian IKU pada tahun 2025 terhadap target tahun 2025 yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 (Tabel 2.14), dari 26 IKU tujuan dan sasaran terdapat 7 (tujuh) atau sebesar 26,92% IKU yang belum dapat memenuhi target, 3 (tiga) atau sebesar 11,54% IKU tercapai tepat 100%, dan 16 (enam belas) atau sebesar 61,56% IKU tercapai lebih dari 100%.

Terhadap target akhir periode RPJMD 2021–2026 (tahun 2026), dari 26 IKU tujuan dan sasaran terdapat 15 IKU atau sebesar 57,96% memiliki capaian melebihi target yang ditetapkan, 2 IKU atau sebesar 7,69% tercapai tepat 100%, dan sebanyak 9 IKU atau sebesar 34,62% tercapai kurang dari target yang ditetapkan. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab 2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.



Tabel 2.15 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025 Dan Target Akhir Tahun Dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 (Tahun 2030).

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	%Capaian terhadap Akhir RPJMD (2030)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
T1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,10-82,53	83,03	101,13	83,36-84,34	99,36
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,70	15,91	101,34	15,781 - 16,15	100,82
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,88	10,11	102,33	10,25	98,63
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86	75,04	100,24	75,40-76,46	99,52
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,50-13,50	16,5*	93,55	14.25-12.25	84,21
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,125	0,127*	98,40	0,115	89,57
T2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,25	90,03	102,02	90	100,03
6	Nilai AKIP	Angka	82,73	82,8	100,08	90	92,00
7	Opini BPK	Opini	1(WTP)	1(WTP)	100,00	1 (WTP)	100,00
8	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,68	91,2	97,35	95,55	95,45
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47-4,51	4,68	104,70	4,52-4,56	103,54
T3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,16-5,36	4,92	95,35	5,76-6,13	85,42
	PDRB per kapita	Rp Juta	36,99-38,21	38,187	103,24	48,50-53,87	78,74
	Rasio Gini	Indeks	0,390-0,410	0,427	95,85	0,375-0,405	94,57
10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,77-12,86	13,32	104,31	13,63-15,06	97,73
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,10-14,77	14,1	100,00	14,58-15,14	96,71
12	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	5.107,17 - 5.152,41	5.393,17	105,60	6.369,63 - 6.706,52	84,67
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,75-26,82	26,72*	99,89	27-16 - 27.26	98,38
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08-3,58	3,57	100,28	2,90-3,52	98,58
15	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	4,00-4,50	4,72	118,00	4,50-5,00	104,89
16	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu	17.078	17.240	100,95	18.840,0	91,51

No	Indikator Tujuan - Sasaran	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	%Capaian terhadap Akhir RPJMD (2030)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	(Ribu rupiah/orang/tahun)	rupiah				0	
T4	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,75-11,02	11,54	95,28	7,93-8,28	60,63
17	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,16	1,28*	140,74	1,98	134,69
T5	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	64,39	63,12*	98,03	68,83	91,70
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,07	71,05	107,54	66,59	106,70
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	123,02	96,02	121,95	95,19	99,13
20	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	59,08	69,2	117,13	65,97	104,90
T6	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,51	7,44*	99,07	7,86	94,66
21	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	89,26	89,42	100,18	97,52	91,69
22	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	148	73*	150,68	138,5	147,29

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024

Realisasi Capaian IKU (Tujuan dan Sasaran) tahun 2025 terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 (Tabel 2.15) dapat dilihat bahwa dari keseluruhan 30 IKU terdapat 9 IKU atau sebesar 30% IKU tidak tercapai, 2 IKU atau 6,67% IKU tercapai tepat 100%, dan 19 IKU atau 63,33% tercapai melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Terhadap target akhir tahun RPJMD (target tahun 2030) sebanyak 21 IKU atau sebesar 70,00% IKU belum mencapai target, 1 IKU atau 3,33% tercapai tepat 100%, dan 8 IKU atau 26,67% IKU telah tercapai melampaui target yang ditetapkan untuk akhir tahun periode RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Perhitungan capaian persentase realisasi terhadap target rentang yang ditetapkan dalam Tabel 2.15 menggunakan nilai acuan dengan pengelompokan terhadap indikator bersifat negatif dan indikator bersifat positif. Terhadap indikator bersifat negatif digunakan nilai batas atas yang merupakan batas toleransi/ titik kritis, kinerja dianggap tercapai jika tidak melebihi batas kritis. Penggunaan batas bawah (Skenario Minimal) pada perhitungan capaian kinerja indikator bersifat positif memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah memenuhi dalam mencapai target yang diperjanjikan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Informasi lebih lanjut terhadap ketercapaian



masing-masing indikator pada setiap Sasaran Daerah diuraikan dalam sub bab 2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan.

2.3.5. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Capaian Standar Nasional

Capaian Kinerja Utama Kabupaten Bantul pada tahun 2025 menunjukkan terdapat 7 indikator dari 10 indikator yang dapat disandingkan dengan capaian nasional memiliki tingkat capaian yang lebih tinggi (Tabel 2.16.). Ketujuh Indikator tersebut adalah Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Nilai AKIP, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Tabel 2.16 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Pada Tahun 2025 Terhadap Capaian Tingkat Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025		%Capaian terhadap Capaian Nasional
			Bantul	Nasional	
1	Usia Harapan Hidup	tahun	75,04	74,47	100,77
2	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	15,91	13,30	119,62
3	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10,11	9,07	111,47
4	Nilai AKIP	Indeks	82,80	66,42	124,66
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,57	4,85	135,85
6	Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,427	0,375	87,82
7	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,127*	0,421*	331,50
8	Laju pertumbuhan ekonomi	persen	4,92	5,11	96,28
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,54	8,47	73,39
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,28	1,37	107,03

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024

2.3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi yang Telah Dilakukan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.17 Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

No	Interval Realisasi Kinerja	Nilai	Kriteria Realisasi Kinerja	Penilaian	Kode
1	91 ≤ 100		Sangat Tinggi		
2	76 ≤ 90		Tinggi		
3	66 ≤ 75		Sedang		
4	51 ≤ 65		Rendah		
5	≤ 50		Sangat Rendah		

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017



Tabel 2.18 Tabel Matriks Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	2025			target Akhir RPJMD (2030)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
T1	Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,05	82,10-82,53	83,03	101,13	83,36-84,34	99,60
S.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,70	15,91	101,34	15,78-16,15	98,51
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,88	10,11	102,33	10,25	98,63
		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,8	74,86	75,04	100,24	75,40-76,46	98,14
		<i>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita</i>	<i>Persen</i>	<i>16,5</i>	<i>15,50-13,50</i>	<i>16,5*</i>	<i>93,55</i>	<i>14,25-12,25</i>	<i>84,21</i>
		<i>Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</i>	<i>Indeks</i>	<i>0,127</i>	<i>0,125</i>	<i>0,127*</i>	<i>98,40</i>	<i>0,115</i>	<i>89,57</i>
T2.	Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,02	88,25	90,03	102,02	90,00	100,03
S.2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	Angka	81,27	82,73	82,8	100,08	90,00	92,00
		Opini BPK	Opini	WTP	1(WTP)	1(WTP)	100,00	1(WTP)	100,00
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	93,68	91,2	97,35	95,55	95,45
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,47-4,51	4,68	104,70	4,52-4,56	103,54

NO	Indikator Kinerja	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	2025			target Akhir RPJMD (2030)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	1,8	n/a
T3	Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,04	5,16-5,36	4,92	95,35	5,76-6,13	85,42
		PDRB per kapita	Rp Juta	35,84	36,99-38,21	38,187	103,24	48,50-53,87	78,74
		Rasio Gini	Indeks	0,417	0,390-0,410	0,427	95,85	0,375-0,405	94,57
S.3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	12,77-12,86	13,32	104,31	13,63-15,05	97,73
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,10-14,77	14,1	100,00	14,58-15,13	96,71
		PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4913,83	5.107,17 - 5.152,41	5.393,17	105,60	6.369,63 - 6.706,52	84,67
S.3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,72	26,75-26,82	26,72	99,89	27,16-27,26	98,38
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,08-3,58	3,57	100,28	2,90-3,52	98,58
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	4,00-4,50	4,72	118,00	4,50-5,00	104,89
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	16,851	17.078	17.240*	100,95	18.840	91,51



NO	Indikator Kinerja	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	2025			target Akhir RPJMD (2030)	Capaian terhadap akhir RPJMD (%)
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
T4	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,66	10,75-11,02	11,54	95,28	7,93-8,28	60,63
S.4.1	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,28	2,16	1,28	140,74	1,96	134,69
T5	Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	63,12	64,39	63,12	98,03	68,83	91,70
S.5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,07	71,05	107,54	66,59	106,70
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	129,5	123,02	96,02	121,95	95,19	99,13
S.5.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	58,72	59,08	69,2	117,13	65,97	104,90
T6	Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,44	7,51	7,44*	99,07	7,86	94,66
S.6.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,26	89,42	100,18	97,52	91,69
S.6.2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	73	148	73	150,68	138,5	147,29

Sumber : Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024

a. Misi 1 Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif, dan berdaya saing.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 1 yaitu Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia target sebesar 82,10-82,53, tercapai sebesar 83,03 atau sebesar 101,13% dengan kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut telah menyumbang sebesar 99,60% terhadap target akhir tahun RPJMD (tahun 2030) yaitu sebesar 83,36-84,34. Tujuan Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia didukung dengan (1) satu sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif.

1) Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif.

Kualitas pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama pembangunan manusia yang saling berkaitan untuk menciptakan SDM unggul, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Investasi pada kedua sektor ini secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, serta memfasilitasi inovasi dan daya saing bangsa. Kualitas pendidikan dan kesehatan saling berkaitan. Masyarakat yang sehat lebih mudah menyerap ilmu (pendidikan), sementara pendidikan yang tinggi meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Keduanya krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan penguatan masyarakat yang inklusif merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun lingkungan sosial yang terbuka, adil, dan menghargai keberagaman, di mana semua orang tanpa terkecuali dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan kesempatan yang sama.



Tabel 2.19 Matriks Kinerja Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif

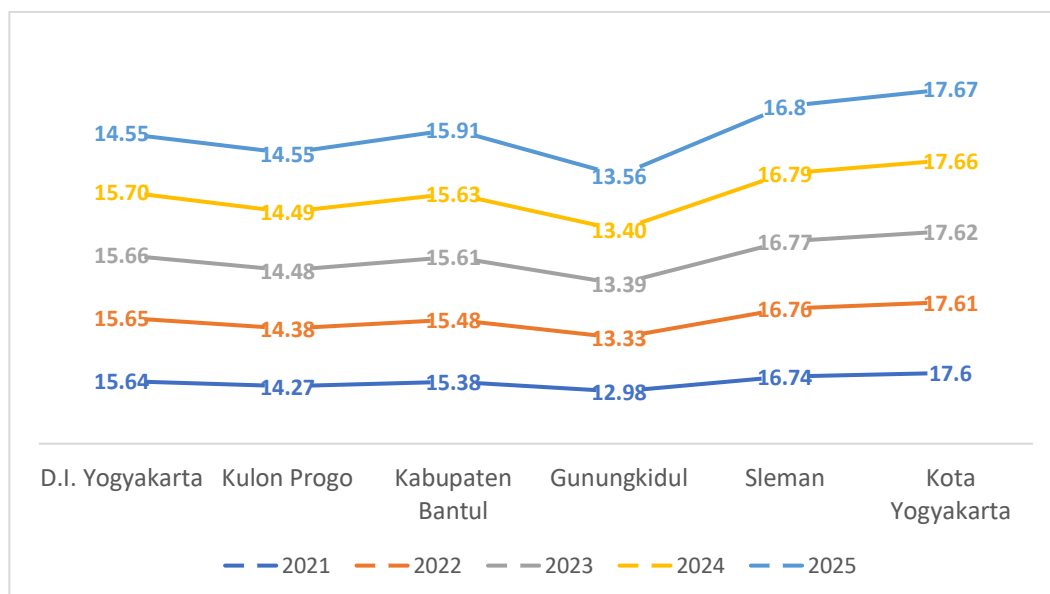
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	%Capaian terhadap Akhir RPJMD (2030)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
a)	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,63	15,70	15,91	101,34	15,78- 16,15	98,51
b)	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,81	9,88	10,11	102,33	10,25	98,63
c)	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,8	74,86	75,04	100,24	75,40- 76,46	98,14
d)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	16,5	15,50-13,50	16,5*	93,55	14,25- 12,25	84,21
e)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,125	0,127*	98,40	0,115	89,57

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2025, Data diolah; *) angka 2024

a) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana angka ini menunjukkan peluang anak usia tujuh tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 15,70 terealisasi sebesar 15,91 atau 101,34% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi. Terhadap target yang ditetapkan pada akhir tahun RPJMD 2025-2029, telah tercapai sebesar 98,51% yang dapat diartikan sebagai indikasi pencapaian dengan skor sangat tinggi ($91 \leq 100$). Perhitungan capaian terhadap target pada akhir tahun RPJMD 2025-2029 menggunakan ambang batas atas (skenario optimis) yang menunjukkan bahwa realisasi saat ini masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi lagi terhadap pencapaian di masa datang. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 15,63 Angka Harapan Lama Sekolah di kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar 0,28.



Grafik 2.4 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta dan 5 Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi Tahun 2021 – 2025

Angka Harapan lama Sekolah Bantul sebesar 15,91 tahun, artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 15,91 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh jenjang pendidikan hingga Diploma III.

Tabel 2.20 Trend Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 - 2025

	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
DIY	15,64	15,65	15,66	15,70	14,55
Kabupaten Kulon Progo	14,27	14,38	14,48	14,49	14,55
Kabupaten Bantul	15,38	15,48	15,61	15,63	15,91
Kabupaten Gunungkidul	12,98	13,33	13,39	13,40	13,56
Kabupaten Sleman	16,74	16,76	16,77	16,79	16,8
Kota Yogyakarta	17,60	17,61	17,62	17,66	17,67

Sumber: BPS, 2026

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga, apabila dibandingkan dengan angka kabupaten lain se DIY, angka HLS Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta

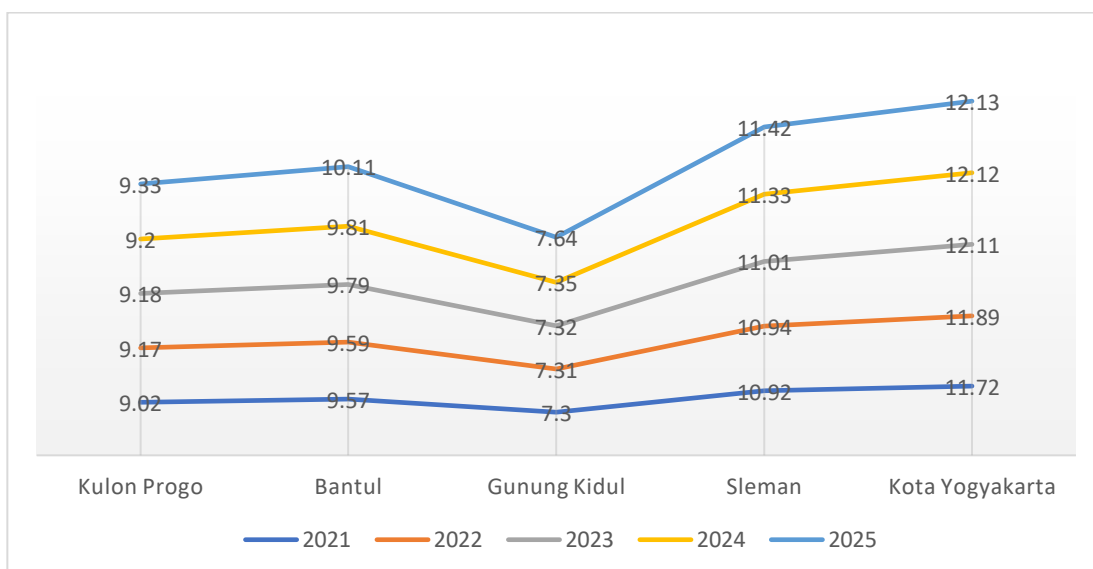


(15,91 tahun).

Angka HLS Kabupaten Bantul tahun 2025 meningkat 0,3 poin dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran serta dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu adanya program beasiswa, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orangtua siswa.

b) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan penduduk berusia 15 atau 25 tahun ke atas dalam pendidikan formal. RLS mengukur jumlah tahun belajar penduduk (usia 15+ atau 25+) yang telah diselesaikan, tidak termasuk tahun mengulang. Merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendidikan. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Grafik 2.5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul, dalam Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2021 – 2025 (Sumber: BPS 2026)

Rata - rata Lama Sekolah pada tahun 2025 memiliki target sebesar 9,88 dan terealisasi sebesar 10,11 atau sebesar 102,33% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Tinggi.

Terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2030 dengan nilai 10,25 capaian terealisasi sebesar 98,63% dengan skor sangat tinggi.

Angka rata-rata lama Sekolah Bantul sebesar 10,11 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bantul telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan

Tabel 2.21 Trend Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 – 2025 Di Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi DIY

	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Kulon Progo	9,02	9,17	9,18	9,2	9,33
Kabupaten Bantul	9,57	9,59	9,79	9,81	10,11
Kabupaten Gunungkidul	7,3	7,31	7,32	7,35	7,64
Kabupaten Sleman	10,92	10,94	11,01	11,33	11,42
Kota Yogyakarta	11,72	11,89	12,11	12,12	12,13

Sumber: BPS, 2026

Kabupaten Bantul masih tetap berada pada posisi ketiga, apabila dibandingkan dengan angka kabupaten lain se DIY, angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul masih berada di bawah angka Provinsi D.I Yogyakarta (10,20 tahun).



Gambar 2.1 Juara Tingkat Nasional Gala Siswi Indonesia (GSI) 2025, Sentul, Oktober 2025 (Sumber: Disdikpora Kab Bantul, 2026)



Pembangunan pendidikan telah menunjukkan keberhasilan dan peningkatan, yang dapat digambarkan antara lain melalui Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.22

Tabel 2.22 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,77	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,69	100	101,77	101,77
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100,07	100	97,95	97,95
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	15,29	15,30	16,65	108,82

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2026)

Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan masyarakat Bantul salah satunya adalah perpustakaan (Tabel 2.23). Selain Kantor Perpustakaan Umum, juga diadakan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Selain perpustakaan, terdapat 104 pojok baca dan taman bacaan Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap perwujudan akses dan mutu pendidikan masyarakat yang berkualitas. Sampai dengan tahun 2025 ada sebanyak 836 perpustakaan yang terakreditasi.

Tabel 2.23 Jumlah dan Jenis Perpustakaan Di Kabupaten Bantul Sampai Dengan Tahun 2025

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	JUMLAH
1	Perpustakaan Daerah/Kabupaten	1
2	Perpustakaan Desa	75
3	Perpustakaan SD/MI	398
4	Perpustakaan SMP/MTs	120
5	Perpustakaan SMA/SMK/MA	102
6	Perpustakaan Khusus/Instansi	9
7	Perpustakaan Tempat Ibadah	20
8	Perpustakaan Komunitas	104
9	Perpustakaan Pondok Pesantren	7
Jumlah		836

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025

Kedepan akan terus dilakukan koordinasi secara intensif baik dengan pemerintah maupun swasta guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantul. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas.

Faktor pendorong indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, adalah:

1. Kompetensi tenaga pendidik yang mayoritas bersertifikasi.
2. Ketersediaan dan pemerataan satuan pendidikan di wilayah.
3. Dukungan Pemerintah Kalurahan dan kader dalam pendidikan anak usia dini.
4. Dukungan organisasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga.

Faktor penghambat indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, adalah:

1. Terdapat perubahan jadwal dari Pusat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan berjenjang sampai Nasional.
2. Regulasi bidang pendidikan dari Pusat yang berubah-ubah.
3. Sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai.
4. Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM untuk memenuhi SPM pendidikan dasar.



5. Kurangnya pemenuhan sarana-prasarana untuk peningkatan kompetensi siswa seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan.

Strategi kedepan untuk mewujudkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, adalah:

1. Perencanaan anggaran pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap.
3. Peningkatan kualitas hasil pembelajaran.
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses dan sarana prasarana pendidikan.
5. Peningkatan peran aktif pemuda dalam kegiatan kewirausahaan.
6. Peningkatan infrastruktur olahraga yang memadai.

c) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan derajat kesehatan masyarakat secara khusus. UHH atau *Life Expectancy at Birth* menggambarkan estimasi rata-rata lamanya hidup yang dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir pada suatu periode tertentu, dengan asumsi bahwa pola mortalitas yang berlaku pada periode tersebut tetap konstan sepanjang hidupnya. Secara teknis, UHH dihitung melalui tabel kehidupan (*life table*) yang memetakan probabilitas bertahan hidup penduduk dari satu kelompok usia ke kelompok usia berikutnya.

Namun demikian, UHH tidak dapat dipahami semata-mata sebagai indikator demografis. Angka ini merupakan cermin komprehensif dari kondisi sosial-ekonomi, keterjangkauan dan mutu layanan kesehatan, kualitas lingkungan hidup, serta efektivitas sistem perlindungan sosial suatu wilayah. Dalam perspektif pembangunan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen, kesehatan merupakan bagian dari perluasan kapabilitas individu untuk hidup panjang, sehat, dan bermakna. Oleh karena itu, dalam kerangka *Human Development Index* (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP, UHH ditempatkan sebagai salah satu pilar

utama bersama pendidikan dan pendapatan, karena memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan kolektif masyarakat.

Peningkatan UHH pada prinsipnya mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Namun, indikator ini bersifat agregatif sehingga berpotensi menyamarkan ketimpangan internal, baik antarwilayah, antarkelompok maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu, interpretasi UHH harus selalu disertai dengan analisis kontekstual terhadap determinan sosial dan kinerja sektor kesehatan yang mendasarinya.

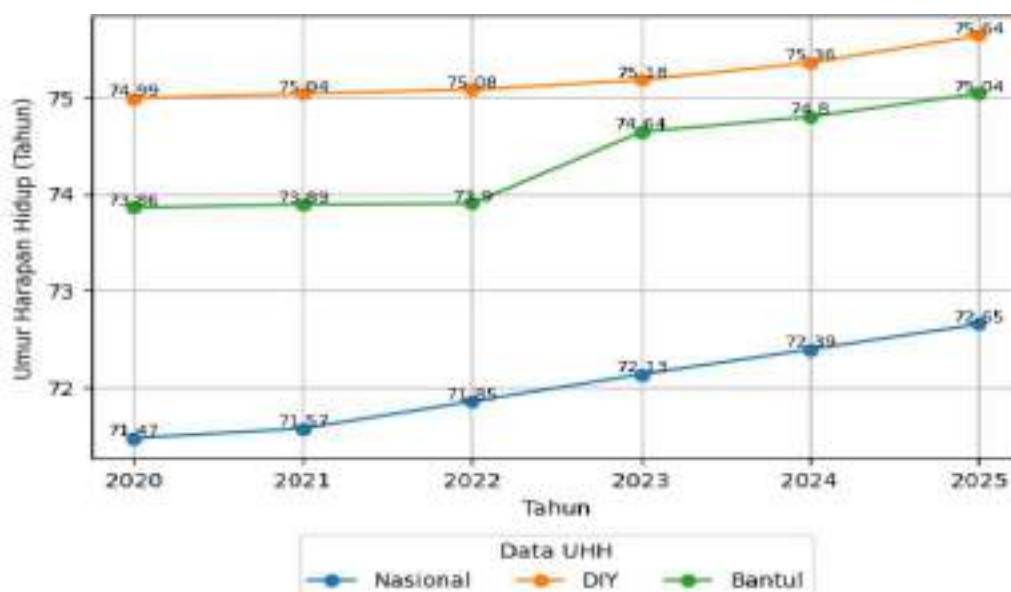
Di Kabupaten Bantul, capaian UHH menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Pada tahun 2025 UHH Kabupaten Bantul sebesar 75,04 meningkat dibandingkan tahun 2024 UHH Kabupaten Bantul tercatat sebesar 74,80, dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 74,86 capaian tahun 2025 tercapai sebesar 100,24% dengan tingkat capaian yang sangat tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 75,40-76,46 capaian tahun 2025 menyumbang sebesar 98,14%.

Tren lima tahun terakhir menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, sekaligus menandai pemulihan sektor kesehatan pascapandemi *Covid-19*. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum serta dampak positif dari berbagai intervensi pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Tabel 2.24 Capaian Usia Harapan Hidup per Kabupaten dalam Provinsi D.I.Yogyakarta tahun 2020-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,46	73,7	73,39	74,15	74,47
DIY	75,04	75,08	75,18	75,36	75,64
Kab. Bantul	73,89	73,9	74,64	74,8	75,04
Kab. Kulon Progo	75,27	75,28	75,35	75,49	75,71
Kab. Sleman	74,93	75	75,26	75,48	75,81
Kota Yogyakarta	74,76	74,83	75,52	75,73	76,05
Kab. Gunungkidul	74,19	74,23	74,76	74,91	75,12

Sumber: BPS, 2026, data diolah



Grafik 2.6 Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dan Nasional tahun 2020-2025 (Sumber: BPS, 2026)

Secara nasional, capaian UHH Kabupaten Bantul (Grafik 2.6 dan Tabel 2.24) berada di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa secara agregat derajat kesehatan penduduk Bantul relatif lebih baik dibandingkan kondisi rata-rata nasional. Namun demikian, capaian tersebut perlu dilihat secara lebih kritis dalam konteks regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama periode 2020–2025, Kabupaten Bantul secara konsisten berada pada posisi terbawah dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY dalam hal capaian UHH. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun UHH Bantul meningkat secara absolut, laju peningkatannya relatif lebih lambat dibandingkan wilayah sekitarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan kesehatan Kabupaten Bantul ke depan tidak semata-mata terletak pada pencapaian angka UHH, melainkan pada peningkatan kualitas dan daya saing pembangunan kesehatan secara regional. Dengan kata lain, agenda pembangunan kesehatan perlu diarahkan pada intervensi yang lebih tajam dan berorientasi pada kelompok serta wilayah yang masih tertinggal di Kabupaten Bantul.

Peningkatan dan stabilitas Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bantul tidak terjadi secara alamiah, melainkan didukung oleh berbagai

inovasi penguatan sistem kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan respons, mutu pelayanan, serta kesinambungan layanan dari tingkat primer hingga rujukan. Inovasi-inovasi ini berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat kapasitas sistem kesehatan daerah dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas hidup masyarakat lintas kelompok usia.

Salah satu inovasi tersebut adalah penguatan *Public Safety Center* (PSC) 119 sebagai simpul koordinasi kegawatdaruratan medis. PSC 119 berfungsi memastikan penanganan kasus gawat darurat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks UHH, keberadaan PSC 119 berkontribusi pada pengurangan risiko kematian akibat keterlambatan penanganan kasus akut, baik pada kelompok ibu, bayi, maupun masyarakat usia produktif dan lanjut usia.

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Adyatma di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 merupakan investasi struktural untuk memperluas kapasitas layanan rujukan dan memperkuat jejaring pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan spesialis, mengurangi beban fasilitas rujukan yang ada, serta memperpendek waktu tempuh rujukan, yang secara jangka panjang mendukung ketahanan sistem kesehatan dan peningkatan umur harapan hidup.

Penguatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak juga dilakukan melalui inovasi pendampingan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SPOG) berbasis lokus, yang difokuskan pada wilayah dan fasilitas dengan risiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Pendekatan berbasis lokus memungkinkan intervensi yang lebih kontekstual dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kapasitas klinis tenaga kesehatan di layanan primer dan rujukan.

Sebagai pelengkap, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mengembangkan serial daring pembahasan kasus kesehatan ibu sebagai media pembelajaran dan berbagi pengetahuan antar tenaga kesehatan di 27 Puskesmas. Forum ini mendorong budaya refleksi klinis, penyamaan persepsi penatalaksanaan kasus, serta peningkatan mutu pelayanan



secara berkelanjutan. Inovasi ini memperkuat sistem pembelajaran dalam pelayanan kesehatan dan berkontribusi pada pemerataan kualitas layanan antar wilayah.

Faktor Pendorong:

1. Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Relatif Merata
Ketersediaan jaringan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di seluruh kapanewon, didukung kondisi geografis yang relatif mudah dijangkau, menjadi faktor struktural penting dalam meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan dasar. Akses ini memperkuat upaya promotif dan preventif, khususnya bagi kelompok ibu, bayi, dan lansia, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika UHH.
2. Penguatan Sistem Kesehatan Pasca Pandemi
Pengalaman penanganan pandemi *Covid-19* mendorong penguatan kapasitas sistem kesehatan daerah, terutama pada aspek *surveilans epidemiologi*, kesiapsiagaan fasilitas layanan, serta koordinasi lintas sektor. Capaian *Case Fatality Rate Covid-19* yang sangat rendah pada tahun 2025 menjadi indikator meningkatnya resiliensi sistem kesehatan daerah.
3. Inovasi Kegawatdaruratan Medis dan Layanan Rujukan
Penguatan PSC 119 dan pembangunan RSUD Saras Adyatma meningkatkan kecepatan respons kegawatdaruratan dan memperbaiki akses terhadap pelayanan rujukan spesialis. Kedua inovasi ini berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko kematian akibat keterlambatan penanganan kasus akut.
4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Inovasi pendampingan dokter spesialis obstetri dan ginekologi berbasis lokus serta forum pembelajaran kasus kesehatan ibu bagi seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Bantul baik fasilitas kesehatan primer maupun rujukan guna mendorong peningkatan mutu pelayanan maternal dan neonatal. Upaya ini berperan penting dalam menekan mortalitas ibu dan bayi, yang merupakan determinan utama UHH.
5. Pendekatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Determinan Sosial
Integrasi program kesehatan dengan sektor lain, seperti sanitasi,

pangan, dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat pendekatan *promotif–preventif*. Hal ini sejalan dengan konsep *social determinants of health* yang menempatkan kesehatan sebagai hasil interaksi faktor medis dan non-medis.

Faktor Penghambat:

1. Ketimpangan Kualitas Pelayanan Antarwilayah. Meskipun akses layanan relatif merata, kualitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya homogen antar Puskesmas dan antarwilayah. Variasi kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, dan kapasitas manajerial fasilitas berpotensi memperlebar kesenjangan hasil kesehatan di tingkat lokal.
2. Tingginya Angka Kematian Ibu yang Fluktuatif. Peningkatan AKI pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan layanan maternal belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas risiko kehamilan, terutama pada kasus rujukan terlambat, komorbiditas ibu, serta determinan sosial seperti status gizi dan pendidikan kesehatan keluarga.
3. Stagnasi dan Kenaikan Prevalensi Stunting. Meningkatnya prevalensi stunting mengindikasikan bahwa intervensi gizi belum sepenuhnya efektif menysasar determinan hulu, seperti ketahanan pangan keluarga, sanitasi lingkungan, dan pola asuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan kualitas kesehatan generasi mendatang dan memperlambat peningkatan UHH.
4. Tantangan Transisi Epidemiologi. Meningkatnya proporsi penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lanjut usia menjadi tantangan baru. Beban ganda penyakit ini berpotensi menekan kualitas hidup dan usia harapan hidup apabila tidak diimbangi dengan penguatan layanan promotif dan preventif berbasis gaya hidup sehat.

Strategi kedepan:

1. Penguatan Intervensi Berbasis Lokus dan Kelompok Rentan. Strategi pembangunan kesehatan diarahkan pada wilayah dan kelompok dengan risiko kesehatan tertinggi melalui pendekatan berbasis data dan pemetaan risiko. Fokus pada ibu hamil risiko tinggi, bayi, balita,



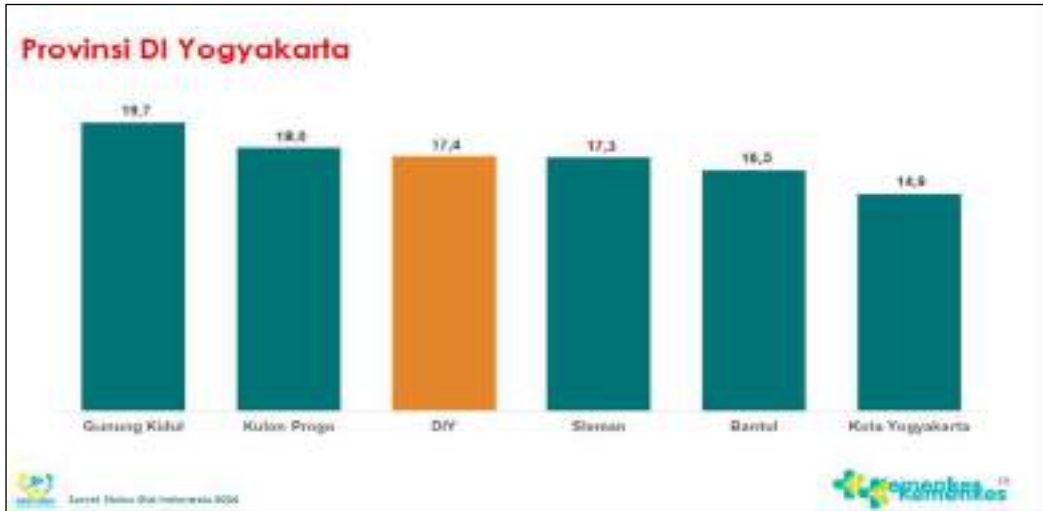
lansia, dan masyarakat miskin menjadi kunci dalam menekan ketimpangan internal UHH.

2. Peningkatan Mutu dan Kesiambungan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Penguatan sistem rujukan obstetri dan neonatal, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengawasan mutu layanan menjadi prioritas utama untuk menurunkan AKI dan AKB secara berkelanjutan.
3. Akselerasi Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Konvergensi. Strategi penurunan stunting difokuskan pada integrasi intervensi spesifik dan sensitif, dengan memperkuat peran lintas sektor dalam pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, dan edukasi keluarga. Pendekatan ini penting untuk menjaga keberlanjutan peningkatan UHH dalam jangka menengah dan panjang.
4. Penguatan Promotif dan Preventif Penyakit Tidak Menular. Pengendalian PTM dilakukan melalui penguatan skrining dini, promosi gaya hidup sehat, serta integrasi layanan PTM di tingkat primer. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk usia produktif dan lanjut usia.
5. Peningkatan Daya Saing Sistem Kesehatan Daerah Secara Regional. Kabupaten Bantul perlu mendorong inovasi pelayanan, digitalisasi sistem informasi kesehatan, serta peningkatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang adaptif. Upaya ini bertujuan mempercepat laju peningkatan UHH agar tidak tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY.

d) Prevalensi stunting

Capaian Prevalensi stunting pada tahun 2025 sebesar 16,5%, angka ini berada di atas rentang target yang ditetapkan (13,50%–15,50%), dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,55% (Kategori: Tinggi). Capaian tersebut jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 14,25-12,25 telah menyumbang sebesar 84,21%. Stunting merupakan indikator untuk mengukur masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usianya. Capaian ini merupakan capaian dari tahun 2024 (Grafik 2.7), dikarenakan pada tahun 2025 Kementerian Kesehatan RI belum melakukan rilis Survey

Status Gizi Indonesia (SSGI) dan dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang digunakan untuk menghitung angka prevalensi stunting.



Grafik 2.7 Prevalensi stunting di DIY berdasarkan data SSGI tahun 2024 (Sumber: Dinkes Kab. Bantul, 2026)

Sementara dari data EPPGBM tahun 2024, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 2.25 Prevalensi stunting di DIY data SSGI tahun 2024

STATUS GIZI (TB/U) DATA EPPGBM DIY TAHUN 2024								
NO	KABUPATEN/KOTA	TB/U						
		Jumlah Balita Diukur	Sangat Pendek	%	Pendek	%	Stunting	%
1	KULON PROGO	20727	454	2.19	1698	8.19	2152	10.38
2	BANTUL	48766	796	1.63	2621	5.37	3417	7.01
3	GUNUNG KIDUL	32687	922	2.82	3769	11.53	4691	14.35
4	SLEMAN	51513	744	1.44	2494	4.84	3238	6.29
5	KOTA YOGYAKARTA	11137	184	1.65	938	8.42	1122	10.07
	DIY	164830	3100	1.88	11520	6.99	14620	8.87

(Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2024)

Berdasarkan data SSGI tahun 2024 (Grafik 2.7) Prevalensi stunting Kabupaten Bantul berada pada tingkatan terendah ke 2 dengan Prevalensi Stunting sebesar 16,5% setelah Kota Yogyakarta dengan Prevalensi stunting sebesar 14,9%, sementara capaian Prevalensi stunting menurut data EPPGBM pada tahun yang sama capaian Kabupaten Bantul berada pada posisi terendah ke 2 dengan capaian



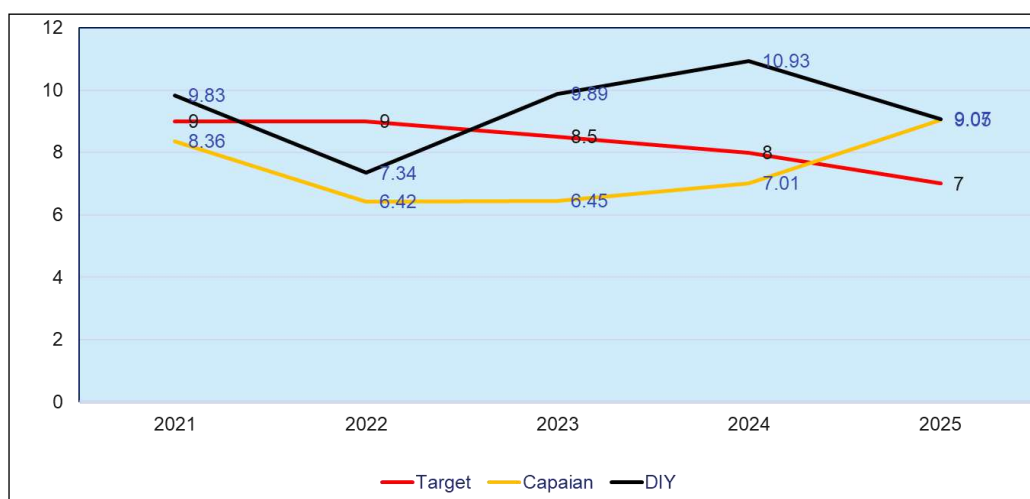
sebesar 7,01% setelah Kabupaten Sleman dengan capaian 6,29.

Capaian Prevalensi stunting berdasarkan data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sangat fluktuatif. Prevalensi stunting pada Tahun 2025 tercatat sebesar 9,05 persen, belum mencapai target Tahun 2025 sebesar 7,5 persen, dengan tingkat capaian 79,33 persen, serta menunjukkan kenaikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 7,01 persen. Dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 2.26 Prevalensi Stunting Kabupaten Bantul Tahun 2021-2025
Berdasarkan data e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM)

Tahun	Jumlah Balita Stunting	Total Balita	Prevalensi Stunting
2021	3.996	47.788	8,36%
2022	3.001	46.722	6,42%
2023	2.842	44.620	6,37%
2024	3.270	44.894	7,28%
2025	3.673	40.580	9,05%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025



Grafik 2.8 Target Dan Capaian Status Gizi Kabupaten Bantul Dibandingkan Dengan Capaian Pada Tingkat Provinsi DIY Tahun 2021-2025 (Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul 2026)

Capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Bantul apabila dibandingkan dengan capaian pada tingkat Provinsi DIY berdasarkan

target yang ditetapkan dalam rentang waktu 2021-2025 dapat dilihat pada Grafik 2.8.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai intervensi gizi telah dilaksanakan, tantangan pada determinan hulu stunting, seperti status gizi ibu, sanitasi, dan pola asuh, masih memerlukan penguatan intervensi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong:

1. Peran pemerintah, swasta, LSM, masyarakat dan Organisasi profesi dalam Pendanaan penanggulangan stunting.
2. Pendampingan dan pemeriksaan kesehatan balita stunting dan gizi buruk oleh dokter ahli di 27 puskesmas.
3. Adanya Sistem Rujukan bagi balita terindikasi stunting ke Rumah sakit.
4. Penguatan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
5. Pendampingan keluarga beresiko Stunting.
6. Program PMT lokal untuk balita T, BB kurang dan gizi kurang.
7. Program PMT bagi balita stunting berupa susu PKMK.

Faktor Penghambat:

1. Akses pelayanan kesehatan spesialistik bagi balita stunting dan gizi buruk belum terpenuhi.
2. Kasus anemia tinggi pada remaja putri dan rendahnya partisipasi minum TTD.
3. Konvergensi Lintas Sektor dalam penanggulangan stunting dan gizi buruk belum optimal.
4. Tidak semua sasaran stunting menerima PMT yang diberikan oleh pemerintah.

Strategi Penurunan Stunting:

1. Meningkatkan Akses pelayanan kesehatan spesialistik bagi balita stunting dan gizi buruk.
2. Program pencegahan anemia pada remaja putri dengan skrining anemia pada remaja putri, dan pemberian tambah darah dalam program SEPEKAN (sekolah peduli kasus anemia).
3. Skrining layak hamil bagi calon pengantin dan pasangan usia subur.
4. Meningkatkan peran lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam



intervensi sensitif.

5. Meningkatkan literasi kesehatan bagi ibu balita dan keluarganya.
6. Program PMT Lokal bagi balita T, BB kurang dan gizi kurang untuk pencegahan stunting.
7. Peningkatan kapasitas kader posyandu dan peran posyandu.

e) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai dan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang responsif gender.

Capaian indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2025 sebesar 0,127 dari target 0,125 atau tercapai sebesar 98,4% dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian ini adalah capaian tahun 2024 sebab sampai dengan laporan ini disusun capaian IKG tahun 2025 belum dirilis. Capaian IKG tersebut telah menyumbangkan 89,57% dari target akhir capaian tahun 2030 dalam RPJMD 2025-2029 sebesar 0,115.

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Bantul, menunjukkan perbaikan ketimpangan, tercatat sebesar 0,127 pada 2024, yang merupakan angka terendah/terbaik di DIY. Angka ini mencerminkan berkurangnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Bantul dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Tabel 2.27 Target Indeks Ketimpangan Gender Di Kabupaten Bantul Pada Dokumen Renstra Tahun 2026-2030

Indikator	Satuan	KORID 51 MWAL		TARGET				
		Realisasi 2024	Baseline Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,85	15,70	15,72-15,79	15,75-15,88	15,78-15,97	15,79-16,06	15,78-16,15
Harapan Lama Sekolah	Tahun	9,53	9,58	9,59	9,60	10,13	10,18	10,25
Uraa Hidup per Ribu (UHR)	Tahun	74,80	74,86	74,97-75,13	75,17-75,50	75,18-75,67	75,73-76,14	75,40-76,46
Keuangan: Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	14,50	15,58-15,60	15,25-15,26	15,30-15,33	14,75-14,76	14,60-14,62	14,35-14,36
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,127	0,125	0,125	0,121	0,125	0,117	0,115

(Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2026)

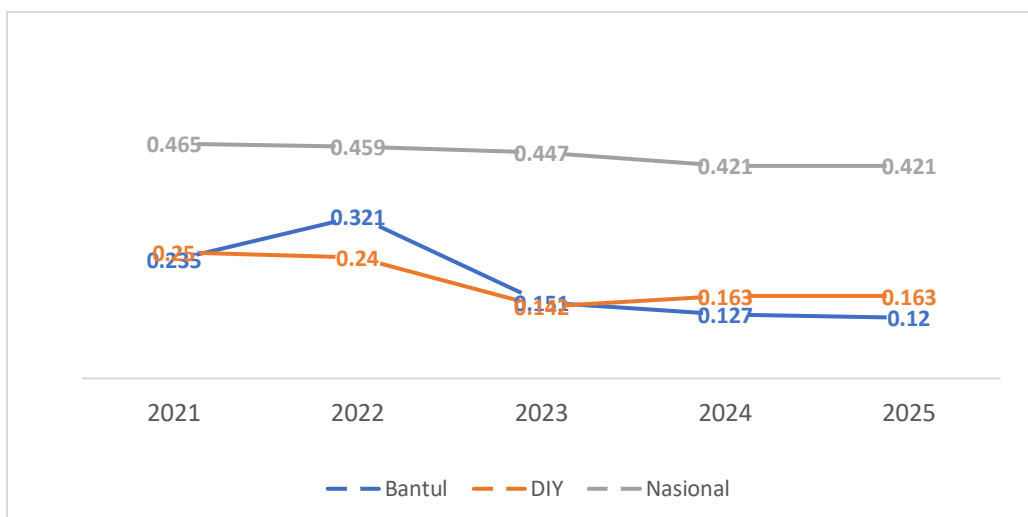
Pada tahun 2025 target Kabupaten Bantul untuk Indeks Ketimpangan Gender adalah 0,125 dengan realisasi 0,127* menunggu *release* dari BPS.

Tabel 2.28. Tabel Perbandingan IKG Tahun 2020 – 2024 Di Kabupaten Bantul Dengan Capaian IKG Pada Tingkat Provinsi DIY dan Nasional

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKG Kabupaten Bantul	0,194	0,235	0,321	0,151	0,127
IKG DIY	0,149	0,250	0,240	0,142	0,163
IKG Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS, 2025

Pada Tabel 2.28 Indeks Ketimpangan Gender di atas menyatakan untuk target Nasional masih pada rata-rata angka 0,4 sedangkan untuk Kabupaten Bantul sudah berada jauh di bawahnya yaitu angka 0,1 yang sudah selaras dengan target yang telah ditetapkan DIY. Capaian tahun 2025 masih menggunakan data tahun 2024 dikarenakan belum *release* secara resmi capaian IKG dari BPS.



Grafik 2.9 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2021-2025
(Sumber: BPS, 2025)

Kebijakan daerah untuk menurunkan ketimpangan gender difokuskan pada pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan, serta penganggaran responsif gender (ARG). Langkah nyata meliputi peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan ekonomi, perlindungan dari kekerasan, dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan Keputusan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada Indeks Ketimpangan Gender:

1. Budaya dan Sosial (Patriarki): Budaya yang memposisikan perempuan terbatas pada ranah domestik membuat partisipasi di ranah publik rendah.
2. Akses Pendidikan dan Kesehatan: Kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan antara laki-laki dan perempuan masih terjadi, yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan kapabilitas perempuan.
3. Partisipasi Tenaga Kerja: Terbatasnya akses dan kesempatan perempuan di pasar tenaga kerja, serta perbedaan keterampilan, menghambat kemandirian ekonomi perempuan.
4. Representasi Politik: Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan (legislatif/pemerintahan).
5. Kebijakan dan Infrastruktur: Kurangnya kebijakan pemerintah yang inklusif dan kurangnya infrastruktur pendukung di daerah terpencil.

Faktor pendukung dari Indeks Ketimpangan Gender yaitu:

1. Dimensi Kesehatan Reproduksi: Penurunan angka kematian ibu saat melahirkan dan perbaikan akses layanan kesehatan reproduksi.
2. Dimensi Pemberdayaan: Peningkatan partisipasi perempuan di kursi parlemen, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan.
3. Dimensi Pasar Tenaga Kerja: Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di sektor formal maupun informal.
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Kualitas hidup yang meningkat berdampak langsung pada penurunan ketimpangan.
5. Kebijakan Pengarusutamaan Gender: Program pemerintah yang mendukung kesetaraan gender di berbagai sektor.
6. Pertumbuhan Ekonomi: Akses terhadap lapangan kerja yang lebih luas bagi perempuan.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan bagi Perempuan dan anak, adalah:

1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan untuk meningkatkan ekonomi mandiri, khususnya di pedesaan.
2. Pengarusutamaan Gender (PUG): Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di tingkat daerah untuk memastikan kebijakan pemerintah peka terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.
3. Anggaran Responsif Gender (ARG): Penyusunan APBD yang mengakomodasi kebutuhan akses, partisipasi, dan kontrol sumber daya bagi perempuan.
4. Perlindungan Perempuan: Penguatan hukum dan layanan, termasuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Peningkatan Akses Kesehatan: Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta edukasi bagi calon orang tua.
6. Kebijakan Afirmatif: Mendorong partisipasi perempuan dalam politik (legislatif) dan posisi pengambilan keputusan di pemerintahan.



b. Misi 2 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 2 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi target sebesar 88,25 tercapai 90,03 atau sebesar 102,2% dari target yang ditetapkan dalam dokumen PK dan RPJMD 2025-2029. Capaian tahun 2024 sebesar 88,02 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 2,01. Tujuan kedua ini didukung dengan sasaran, yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

1) Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional

Tabel 2.29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
a)	Nilai AKIP	Angka	81,27	82,73	82,8	100,08	90,00	92,00
b)	Opini BPK	Opini	WTP	1(WTP)	1(WTP)	100,00	1(WTP)	100,00
c)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,29	93,68	91,2	97,35	95,55	95,45
d)	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,18	4,47-4,51	4,68	104,70	4,52-4,56	103,54

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2025, Data diolah

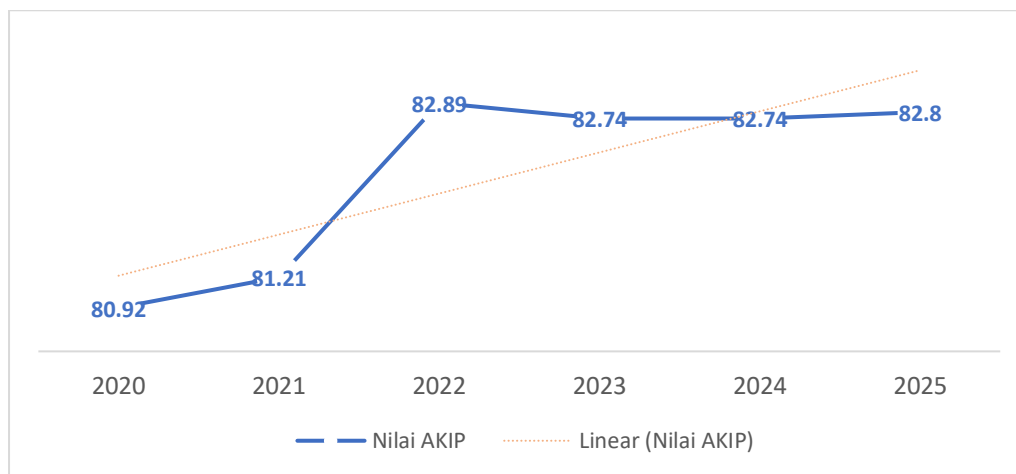
a) Nilai AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. AKIP diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan integritas dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Pelaksanaan akuntabilitas di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 82,8 dari target sebesar 82,73 atau tercapai 100,08% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 82,74 maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 1,53. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 92% dari target capaian tahun 2030 (akhir tahun RPJMD 2025-2029) sebesar 90.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Capaian nilai AKIP Kabupaten Bantul selama dari tahun 2020 – 2025 tersaji dalam Grafik 2.10.



Grafik 2.10 Capaian Nilai AKIP Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025
(Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kab.Bantul, 2026)



Adapun evaluasi AKIP perkomponen penilaian dapat dilihat dari Tabel 2.30. berikut:

Tabel 2.30 Komponen dan Bobot Penilaian AKIP

Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,89
Pengukuran Kinerja	30	25,73
Pelaporan Kinerja	15	13,84
Evaluasi Kinerja	25	17,35
Total	100	82,82

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, 2026

Adapun perkembangan perolehan nilai SAKIP Instansi secara Nasional dilihat pada Gambar 2.2. berikut:

SUMMARY HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2025				
Predikat SAKIP 2025	Sistem Pemerintah			Jumlah
	SL	BB	SKB/SKN	
AA	0	1	2	
A	12	5	14	
BB	82	13	80	
B	30	18	353	
CC	0	0	36	
C	0	2	22	
D	0	1	0	
Tidak Dievaluasi	1	0	1	
Total	95	38	506	
Predikat th ke atas	64	35	446	
Persentase predikat SAKIP 'S' ke atas	68,00%	92,11%	88,34%	
Perubahan Predikat dari 2024 ke 2025		Jumlah		
Naik ke A			2	
Naik ke BB			81	
Naik ke B			17	
Naik ke CC			1	
Total IP naik predikat			101	
Turun ke BB			1	
Turun ke B			2	
Total IP turun predikat			3	
Jenis Instansi		Rata-rata Nilai SAKIP		
		2024	2025	
Kementerian/Lembaga		72,83	73,61	
Provinsi		70,75	69,05	
Kabupaten/kota		62,00	64,86	
Nasional		68,56	66,42	

Gambar 2.2 Capaian Nilai AKIP Kabupaten/Kota Tahun 2024/2025 Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Oleh Menpan RB (Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul)

Adapun perbandingan capaian nilai AKIP Kabupaten dengan rata-rata nasional dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.11 Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kabupaten Bantul Dengan Rata-Rata Capaian Nasional Kab/Kota Tahun 2024-2025 (Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, 2026)

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, Kabupaten Bantul mengembangkan *e-Government* berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan.

Faktor Penghambat:

1. Aplikasi perencanaan dan penganggaran yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi terintegrasi dengan paliaksi SAKIP.
2. *Cascading* Perangkat Daerah belum sepenuhnya menggambarkan penjenjangan kinerja yang ada di dalam perangkat daerah tersebut.
3. Ada perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan tidak sesuai dengan isu strategis yang akan dicapai.
4. Belum semua pimpinan perangkat daerah berkomitmen untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif dan *update* menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pimpinan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk *controlling* terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.
5. Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan strategi kinerja pada tahun berikutnya;
6. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkret dan sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap unit kerja. Salah satu hal konkret yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kompetensi evaluator internal.

Faktor pendorong:

1. Komitmen kepala daerah untuk selalu meningkatkan capaian implementasi SAKIP.
2. Adanya kinerja yang terintegrasi yaitu esakip, e-kinerja dan sapa ASN yang digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
3. Terbentuknya tim pendamping penyusunan penjenjangan kinerja perangkat daerah.
4. Adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang



mekanisme kerja yang mengatur implementasi sistem kerja baru.

Langkah strategis kedepan:

1. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya kedalam dokumen perencanaan.
2. Menjelaskan tentang makna/arti tentang gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada indikator kinerja yang menggunakan Indeks atau Tingkat dengan angka sebagai satuan target.
3. Menyusun standar monev pada pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada kualitas dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PD dan tidak sebatas pemenuhan laporan kegiatan.
4. Dalam laporan kinerja agar memperjelas analisis yang komprehensif serta rekomendasi perbaikan kedepan yang harus dilakukan oleh PD apabila terdapat indikator kinerja dengan realisasi dan capaian dibawah target kinerja.
5. Dalam Laporan kinerja memperjelas formulasi pengukuran disertai dengan angka dan data yang valid terutama bagi indikator kinerja yang bersifat peningkatan atau penurunan sehingga laporan kinerja semakin berkualitas karena menggunakan data yang dapat diandalkan.
6. Memastikan temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD.
7. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD. Selain itu perlu keseragaman format pelaporan hasil evaluasi yang membuat hasil evaluasi ke PD memiliki standar dan kualitas yang sama.

Alternatif yang sudah dilakukan:

1. Reviu pohon kinerja baik level pemda maupun perangkat daerah dengan pendampingan dari Kemenpan RB.

2. Pengembangan aplikasi esakip untuk menu, pohon kinerja, cascading, rencana aksi dan monev rencana aksi.
3. Melakukan desk pengendalian secara berkala untuk memastikan pengukuran kinerja di lakukan sudah sesuai.
4. Mendetailkan Perjanjian kinerja pada jenjang Kepala Perangkat daerah dengan menambahkan menu hubungan indikator dengan sasaran, alasan penetapan target, formulasi dan sumber data yang disepakati.

b) Opini BPK

LKPD Kabupaten Bantul merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul. Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul dimulai dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD. Dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu:

- a) Laporan Operasional (LO);
- b) Neraca;
- c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d) Laporan Arus Kas (LAK);
- e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- f) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BPKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). BPKPAD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Hasil dari pemeriksaan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Bantul berupa suatu Predikat Opini. Tingkatan Opini BPK atas LKPD yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMT/Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*). Opini wajar tanpa pengecualian adalah laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPK RI, Pemerintah Daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat, yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan. LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun n-1.

Target capaian tahun 2026 akhir Renstra adalah Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tahun 2025 ini telah mempertahankan

kebiasaan dan kinerja atas pencapaian Laporan Keuangan WTP yang ke 13 kali nya secara perturut-turut, sehingga dapat dipertahankan sampai target akhir Renstra tahun 2026.



Gambar 2.3 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2024 dari BPK, Tanggal 24 April 2025 (Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, 2026)



Gambar 2.4 Opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 No.9B/LHP/XVIII.YOG/04/2025, Tanggal 14 April 2025 (BPK RI, 2025)



Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini biasanya diberikan oleh BPK pada bulan April pada tahun n atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah n-1, atau dapat di gambarkan Opini WTP ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada 24 April 2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 menggambarkan keberhasilan penyelenggraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul dan LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.31.

Tabel 2.31 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten/ Kota Se-DIY

Nama Pemda di Provinsi DIY	Tahun atas laporan Keuangan												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kulon Progo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2026

Dari Tabel 2.31 diatas dapat digambarkan bahwa Kabupaten Bantul telah mempertahankan kebiasaan, budaya kinerja atas akuntabel laporan keuangan selama 13 tahun atas Laporan Keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2024. Hal ini juga menunjukkan Kabupaten Bantul sebagai salah satu dari 4 (empat) Kabupaten/kota yang memperoleh Predikat WTP atas laporan Keuangan Tahun 2012.

Upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Bantul agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil (*outcome*) dari kedua Sasaran Strategis BPKPAD tersebut digunakan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meraih opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2024. Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator Kinerja Utama tersebut,

dengan melakukan langkah strategis, yaitu:

1. tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang standarisasi Harga barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
2. tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
3. tersusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang standarisasi Harga barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
4. melakukan beberapa inovasi dalam pemungutan Pajak Daerah seperti layanan SPPT PBB Online dan pembayaran pajak daerah menggunakan QRIS (Pakde QRIS);
5. penambahan metode pembayaran Pajak Daerah dengan *Virtual Account*, serta penggunaan e-Retribusi dalam pengelolaan Retribusi Daerah;
6. melakukan validasi data lahan pertanian guna melaksanakan pembebasan PBB P2 Lahan Pertanian Berkelanjutan pada tahun 2026;
7. penggunaan satu sistem pengelolaan pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), baik modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan;
8. sosialisasi seluruh PD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
9. melakukan kegiatan Sensus Barang Milik Daerah;
10. mengadakan *desk* secara intensif dengan PD tentang belanja, kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
11. melakukan *desk* dan pendampingan dalam melakukan pelaporan aset seluruh PD;
12. melakukan inventarisasi aset secara berkala; dan
13. melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh PD Memulai pelatihan dan bimbingan atas penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan.

Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah bertujuan untuk memastikan sesuai prosedur dan akurat, pihak Pengelola Barang terus berkoordinasi



dengan TIM sensus masing2 PD/Unit Kerja Baik di Dinas, Badan, Kantor, Kapanewon, Puskemas dan Sekolah Negeri sehingga menghasilkan data aset yang rapi, jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Sensus aset dilakukan atas seluruh kategori aset dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIBAR), di antaranya tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, jalan, irigasi, aset tetap lainnya konstruksi dalam pekerjaan serta aset lainnya.



Gambar 2.5 *Launching Penggunaan Virtual Account pada pembayaran Pajak Daerah dan penggunaan E-Retribusi pada tanggal 7 Mei 2025. (BPKPAD, 2025)*

Dalam pencapaian indikator Opini Laporan Keuangan faktor -faktor yang mempengaruhi dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.32 Faktor Penghambat, Pendorong serta Strategi Pencapaian dalam Pencapaian IKU Opini Laporan Keuangan Tahun 2025

Faktor Penghambat	- Dari Opini WTP tersebut masih terdapat beberapa catatan terkait pelaporan Koreksi Ekuitas dan LK BUMD, sehingga perlunya pendampingan dalam melakukan pelaporan keuangan nya - Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang tidak memenuhi target, yaitu PBB P2 dan Pajak Reklame
Faktor Pendorong	- Adanya rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah terutama Inspektorat Daerah secara teratur, melakukan

	pemanfaatan aplikasi guna pengelolaan keuangan dan aset seperti SIPD RI, SIMPERSADA, SIMAS, dll. - Meningkatkan kemudahan dalam pelayanan pajak daerah berupa beberapa cara pembayaran, baik menggunakan <i>Virtual Account</i> dan penggunaan E-Retribusi
Strategi Pencapaian	- Melakukan identifikasi secara menyeluruh terkait dasar hukum yang belum lengkap dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Melakukan monitoring atas pemenuhan SOP dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - Melakukan penertiban atas pencatatan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang disewakan; - Melakukan monitoring atas perjanjian atas sewa aset tetap berupa tanah dan bangunan; dan - Melakukan pendampingan penguatan aplikasi SIPD RI dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan.

Sumber: Bag. Organisasi Setda Kab. Bantul, 2026

Opini WTP di tahun 2025 adalah atas LKPD tahun anggaran 2024. LKPD di sini berisikan terkait laporan keuangan dan aset daerah pada tahun 2024, seperti LO, LPE, LAK, LRA, LPSAL, CaLK. Untuk membuat laporan tersebut secara akuntabel dan tepat waktu Kabupaten Bantul melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD dengan didampingi adanya koordinasi secara berkala terkait.

Arus kas, realisasi belanja, realisasi pendapatan, catatan atas pelaksanaan kegiatan yang berpotensi tidak bisa terealisasi dan sampai dengan laporan aset pengadaan dan persediaan dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah.

Untuk lebih menguatkan kegiatan tersebut di tahun 2025 telah dilakukan upaya berupa pelaksanaan sensus aset, sehingga dapat di ketahui secara pasti atas barang milik daerah yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.



c) Indeks Pencegahan Korupsi Daerah

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mengemban tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. KPK mendapatkan kewenangan menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi. Permintaan laporan tersebut disampaikan melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP). Upaya pencegahan korupsi dilaksanakan antara lain melalui implementasi pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik korupsi. Dalam mewujudkannya perlu adanya komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola dan melakukan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penajaman indikator sehingga diharapkan mendorong efektivitas untuk menurunkan tingkat korupsi maka KPK telah melakukan beberapa evaluasi yang ditindaklanjuti dengan penyesuaian indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* yang selanjutnya disebut sebagai IPKD MCSP.

Memperhatikan hasil evaluasi atas upaya pencegahan korupsi daerah melalui MCSP, data penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK, skor Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024, maka fokus area pencegahan korupsi pada pemerintah daerah tahun 2025 yaitu:

1. Area Perencanaan;
2. Area Penganggaran;
3. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Area Pelayanan Publik;
5. Area Manajemen ASN;
6. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Area Optimalisasi Pendapat; dan
8. Area Penguatan APIP.

Terdapat perubahan area pencegahan korupsi Tahun 2025 jika dibandingkan dengan area pencegahan korupsi Tahun 2024. Perbedaan tersebut berdasarkan evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP terhadap hasil skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dan Dimensi Pengalaman pada Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024. Perbedaan area optimalisasi pajak daerah berubah menjadi optimalisasi pendapatan daerah. Perubahan ini untuk mengakomodasikan konteks pendapatan daerah yang lebih luas daripada hanya pendapatan dari pajak saja. Lalu, area pengawasan APIP berubah menjadi area penguatan APIP. Perubahan ini dilakukan karena kondisi saat ini APIP sangat memerlukan penguatan dari aspek anggaran, sumber daya alam (SDM), independensi dan objektivitas, serta peran dan layanan.



Grafik 2.12 Capaian Nilai IPKD Tahun 2025 pada Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan Nasional (Sumber: Inspektorat Kab. Bantul 2026)

Hasil monitoring progress pelaksanaan aksi pencegahan korupsi menggambarkan capaian aksi yang telah dilaksanakan pada 8 area intervensi dengan bobot masing masing. Kemajuannya setiap sistem



dihitung berdasarkan kemajuan dari setiap kriteria yang terukur dan seragam di sistem tersebut. Target IPKD MCSP Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 93,68 terealisasi sebesar 91,20 atau sebesar 97,35%, capaian ini telah menyumbang sebesar 95,45% jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (tahun 2030) sebesar 95,55. Capaian nasional sebesar 69,55.

Tabel 2.33 Rekap Nilai dan Peringkat MCP KPK Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2021 sd 2025

Tahun	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
Uraian	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional	Nilai MCP KPK	Peringkat DIY	Peringkat Nasional
Pemprov DIY	90	2	26	94	1	19	95	1	59	92	3	69	88	6	193	82,18	6	204
Kota Yogya	82,81	5	77	87,95	3	107	88,48	6	182	90,58	4	100	95,01	3	58	90,87	2	54
Kab. Sleman	86,55	3	46	89,39	2	89	94,27	2	63	93,58	2	34	97,38	1	14	90,74	3	57
Kab. Bantul	80,69	6	102	85,37	4	129	92,52	4	108	94,49	1	20	93,29	5	89	91,2	1	45
Kab. Kulon Progo	86,46	4	47	81,36	5	206	91,25	5	134	90,28	5	108	93,91	4	81	82,42	5	202
Kab. Gunungkidul	90,69	1	17	78,97	6	243	94,14	3	70	90,13	6	112	97,12	2	15	85,18	4	156

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 2026

Adapun perolehan capaian nilai MCSP KPK dari masing-masing area adalah sebagai berikut:

1. Area Perencanaan (95,3 %)

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area perencanaan, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama pada sasaran perencanaan pembangunan daerah; pokok pikiran; serta penyaluran hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sehingga sasaran pencegahan korupsi pada area perencanaan difokuskan pada ketiga hal tersebut. Ketiga sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area perencanaan yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi pada sasaran perencanaan pembangunan daerah baik dari aspek transparansi, aspek regulasi dan kebijakan maupun aspek akuntabilitas yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain publikasi RKPD Murni 2026 dan RKPD perubahan 2025 yang telah disampaikan melalui *website*; Input usulan masyarakat, RKPD Murni dan RKPD perubahan untuk APBD Murni dan APBD perubahan telah dilakukan melalui SIPD; penyusunan Renja Murni dan Renja perubahan disampaikan melalui surat edaran Kepala Daerah;

waktu penetapan dokumen perencanaan pembangunan telah sesuai dengan aturan yang ada dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh APIP dan hasilnya telah ditindaklanjuti.

Dari sasaran pokok pikiran upaya yang telah dilakukan baik dari aspek transparansi, aspek regulasi dan kebijakan maupun aspek akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyampaikan tangkap layar akun total pikir Tahun 2026, daftar akun pikir, memiliki kamus usulan Pokir, sosialisasi kamus pikir dan telah menyampaikan data pikir Tahun 2026 melalui SIPD, jumlah pikir telah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan telah disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun dari sasaran penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan maka baik dari aspek transparansi, aspek regulasi dan kebijakan maupun aspek akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan beberapa upaya diantaranya:

- Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki informasi yang dipublikasikan untuk penyaluran hibah dan bantuan pemerintah Tahun 2025;
- Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki perkara tentang tata cara penyaluran hibah, bantuan pemerintah; dan
- Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki SK Kepala Daerah tentang persetujuan Hibah, bantuan pemerintah dan SOP penyaluran Hibah, bantuan pemerintah.



Grafik 2.13 Progres Sasaran Pada Area Perencanaan Pembangunan Daerah. (Sumber: KPK, Jaga.id)

Dari semua upaya pencegahan korupsi baik meliputi aspek transparansi, aspek regulasi dan kebijakan maupun aspek akuntabilitas pada area perencanaan ini nilainya mencapai 95,3 persen. Hal ini dapat



diartikan bahwa upaya terhadap pencegahan korupsi area perencanaan sudah dilakukan secara maksimal.

Faktor penghambat upaya terhadap pencegahan korupsi pada area perencanaan adalah adanya beberapa pokir yang belum disertai rincian kebutuhan riil sehingga menimbulkan risiko korupsi, sedangkan faktor pendorong dan strategi kedepan diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara eksekutif, dan legislatif membuat jadwal penyusunan rencana dan pokir dapat dilakukan secara tepat waktu.

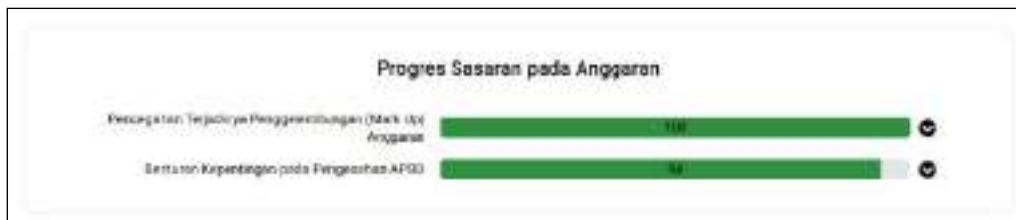
2. Area Penganggaran (96,8%)

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area penganggaran, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama penyalahgunaan anggaran dan penyuapan/gratifikasi/pemerasan pada proses pengesahan anggaran sehingga sasaran pencegahan korupsi pada Area Penganggaran difokuskan pada kedua hal tersebut. Kedua sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area penganggaran yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi pada area penganggaran yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya:

- Dari aspek transparansi maka upayanya adalah Standar Harga Satuan dan Analisis standar Biaya telah dipublikasi dan input telah dilakukan pada SIPD. Transparansi APBD Murni dan APBD perubahan melalui publikasi pada laman Web Pemerintah Kabupaten dan dapat diakses oleh masyarakat.
- Dari Aspek regulasi dan kebijakan upaya yang telah dilakukan yaitu telah menerbitkan SK Kepala Daerah tentang pembentukan Tim ASB dan SHS, SOP penyusunan dan penetapan ASB dan SHS, Perkada tentang penetapan SHS dan ASB, Pemerintah Kabupaten telah menyusun regulasi dan kebijakan terkait penetapan APBD dan APBD Perubahan tepat waktu dan DPRD telah menyusun jadwal pembahasan Rancangan KUA PPAS dan Rancangan RAPBD sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

- Dari aspek akuntabilitas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten: Seluruh rekomendasi tindak lanjut rekomendasi hasil reviu SHS dan ASB Tahun 2026 dinyatakan telah ditindaklanjuti, Implementasi Tahun 2025 SHS telah diinput dalam aplikasi SIPD dan digunakan sebagai batas tertinggi sehingga tidak dapat dilampaui dalam proses perencanaan maupun penggunaan anggaran.



Grafik 2.14 Progres Sasaran Pada Area Anggaran (Sumber: KPK, Jaga.id)

Terkait area penganggaran, beberapa upaya telah dilakukan dalam meminimalisir pencegahan korupsi diantaranya melalui penetapan dan implementasi SHS, ASB secara tepat waktu; penetapan KUA PPAS, APBD secara tepat waktu, pengawasan lapangan sehubungan dengan pelaksanaan bantuan keuangan/hibah/bansos, audit atas realisasi perjalanan dinas dan honorarium pada 3 PD tertinggi pelaksana. Dari keseluruhan sub indikator pada area penganggaran maka nilai upaya pencegahan pada area ini mencapai 96,8 %.

Faktor penghambat pada area penganggaran ini yaitu beberapa pokok pikiran (Pokir) yang disiapkan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (RKPD & RPJMD) sehingga hal ini akan menghambat proses perencanaan (pembangunan). Pokir yang diminta besaran/alokasi pagu nilai tertentu tanpa disertai rencana kebutuhan riil Sehingga menimbulkan resiko korupsi.

Faktor pendorong dan strategi kedepan yang diperlukan yaitu adanya SIPD RI yang menjadikan ke Urusan Pokir harus diinput sebelum proses musrenbang RKPD menjadikan proses perencanaan lebih tepat sesuai jadwal pada tahapan berikutnya.

3. Area Pengadaan Barang dan Jasa (88,88 %)

Pengadaan terkait erat dengan perencanaan. Bila area perencanaan



sudah dikelola dengan transparan, maka ketika anggaran sudah tersedia risiko berikutnya adalah proses pengadaan. Dari aspek proses teknis pengadaan memang sudah melibatkan teknologi dan relatif lebih transparan. Namun dari perspektif pencegahan korupsi, integritas SDM termasuk independensi serta kemampuan SDM dalam kelompok kerja untuk menolak intervensi masih perlu perbaikan agar efektif dari proses serta memperkecil peluang korupsi.

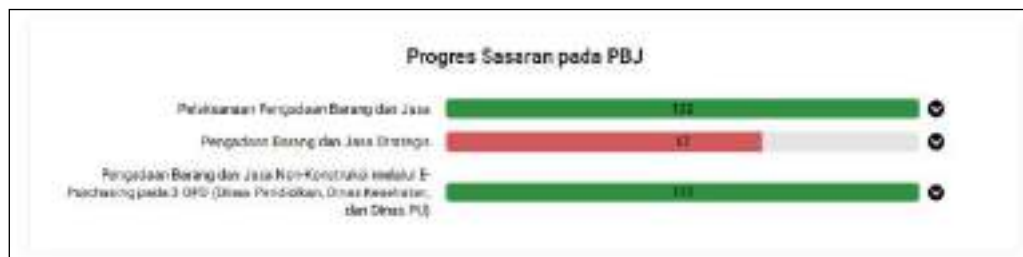
Berdasarkan penanganan perkara tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah, kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa mayoritas pada *mark-up* pengadaan barang dan jasa serta penerimaan fee proyek dari calon vendor atau vendor. Integritas vendor menjadi salah satu kerawanan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa sehingga Pakta Integritas termasuk implementasinya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih perlu didorong.

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area pengadaan barang dan jasa perlu difokuskan pada pencegahan korupsi pada pelaksanaan pengadaan yaitu transparansi pengadaan terutama melalui kepatuhan input SIRUP dan pelaksanaan *e-purchasing*, konsolidasi pengadaan, termasuk dukungan terhadap produk dalam negeri. Hal lain yang perlu didorong adalah Pencegahan korupsi pada proyek strategis Pemerintah Kabupaten melalui pelaksanaan reviu HPS, lelang dini, kepatuhan dan pengawasannya sehingga tidak terjadi keterlambatan dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Hasil pemetaan permasalahan korupsi untuk area pengadaan barang dan jasa, masih ditemukan permasalahan korupsi terutama penyuapan/gratifikasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan, serah terima hingga pemanfaatan hasil pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah dengan modus. Permasalahan ini muncul baik dalam proses pengadaan barang dan jasa secara umum, pengadaan barang dan jasa strategis pemerintah daerah, maupun pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*. Ketiga sasaran tersebut merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya pencegahan korupsi.

Dari aspek transparansi maka upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya kegiatan PBJ Tahun 2025 telah 100% diinput ke dalam SIRUP per 31 Maret 2025 termasuk paket konsolidasi, sosialisai atas PBJ Tahun 2025 yang melalui mekanisme *e-purchasing* telah dilaksanakan dan telah tersedianya bukti publikasi atas e-katalog yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBJ Tahun 2025.

Dari aspek regulasi dan kebijakan, upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Surat Edaran Sekda tentang upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun 2025, penandatanganan pakta integritas pengadaan barang dan jasa oleh PPK dan pejabat pengadaan pada Dinas PUKP, adanya peraturan Bupati tentang kode etik pegawai pada UKPBJ, keputusan Bupati tentang 10 proyek strategis, adanya SOP keuangan yang mengakomodir pembayaran terhadap pengadaan melalui konsolidasi yang akuntabel, SK pembentukan tim teknis *e-purchasing* untuk membantu PPK.



Grafik 2.15 Progres Sasaran Pada Area Pengadaan Barang Dan Jasa
(Sumber: KPK, Jaga.id)

Dari aspek akuntabilitas upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi area PBJ yaitu melakukan reuiu perencanaan PBJ Tahun 2025 untuk memastikan seluruh PBJ telah diinput dalam SIRUP, mencegah terjadinya pemecahan kegiatan dan untuk melakukan evaluasi terhadap metode PBJ (telah dituangkan dalam berita acara Reuiu). Disamping itu yaitu dengan melengkapi PBJ strategis Tahun 2025 dengan RKBMD, dokumen perizinan, sesuai dengan RPJMD dan RKPD dan telah sesuai dengan hasil studi kelayakan; penyelesaian temuan BPK atas pengadaan barang dan jasa tahun 2022 s.d. 2024; penetapan pemenang



PBJ Strategis Tahun 2025, kontrak 5 PBJ Strategis, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pada 5 PBJ Strategis serta laporan penyelesaian tindak lanjut atas 5 *probity audit* 5 PBJ strategis.

Atas beberapa Langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan korupsi area pengadaan barang jasa baik dari aspek transparansi, regulasi dan kebijakan serta aspek akuntabilitas diatas maka capaian nilai pencegahan korupsi pada area ini mencapai 88,88%. Capaian ini belum maksimal dikarenakan keterlambatan dalam penyampaian informasi proyek strategis melalui *website* melebihi 3 Faktor penghambat.

Keterlambatan publikasi melalui *website* menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur sehingga mempengaruhi proses penyelesaian kegiatan pada tahap selanjutnya.

Faktor pendorong dan strategi ke depan yaitu penetapan atas 10 proyek strategis sebaiknya dilakukan pada tahun n-1 sedini mungkin dilakukan sehingga lelang dini dan revidi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dapat dilakukan atas proyek-proyek besar yang mempunyai risiko tinggi dapat dilakukan pada tahun n-1.

4. Area Pelayanan Publik (95,3 %)

Secara umum beberapa permasalahan korupsi pada Layanan Publik adalah pemberian gratifikasi seperti membayar lebih agar layanan bisa dipercepat, adanya pemerasan atau pungutan liar, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, birokrasi yang rumit, pelayanan yang tidak responsif, sehingga minim kepuasan publik. Layanan publik pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, serta kependudukan dan pencatatan sipil adalah 4 area layanan publik yang berhubungan langsung dan banyak digunakan oleh masyarakat sehingga menjadi prioritas untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi sektor perijinan dari aspek transparansi yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan RDTR yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian ijin yang telah dipublikasikan dalam *website* dan telah terintegrasi dengan OSS. Dari sektor pendidikan upaya pencegahan korupsi diantaranya adanya publikasi informasi

pendaftaran peserta didik baru pada portal SPMB *online* pada semua sekolah dan publikasi anti suap/gratifikasi/pungli di sekolah yang ada di Kabupaten Bantul.

Dari sektor Kesehatan upaya pencegahan korupsi pada aspek transparansi yaitu telah tersedianya informasi jenis-jenis dan tarif layanan RSUD dan informasi ketersediaan ruang rawat inap RSUD Saras Adyatma. Adapun di 27 puskesmas yang ada juga telah ada publikasi *online* dan atau *offline* pada setiap layanan.

Dari sektor kependudukan dan catatan sipil upaya pencegahan korupsi aspek transparansi yang telah dilakukan yaitu adanya informasi/publikasi ketersediaan blangko pelayanan KTP secara *online* dan *offline* kepada masyarakat dan tersedianya publikasi *online* dan *offline* pelayanan dan persyaratan layanan kependudukan dan layanan sipil.

Dari sektor perijinan telah adanya kebijakan dan regulasi dalam rangka pencegahan korupsi layanan perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan RDTR yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian izin, adanya peraturan Bupati terkait pelimpahan kewenangan beserta rincian ijin yang dilimpahkan, seluruh penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul telah dilengkapi dengan SOP dan sudah terintegrasi dengan penerbitan perizinan, adanya keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Nomor 035 Tahun 2024 tentang penetapan standar pelayanan perizinan, adanya surat edaran Sekda terkait dengan larangan penyuapan/gratifikasi/pungli.

Dari sektor Pendidikan, aspek regulasi dan kebijakan meliputi telah terbitnya Juknis terkait SPMB yang juga mengatur terkait penetapan jalur domisili serta kapasitas daya tampung, jalur penerimaan, afirmasi.

Dari sektor Kesehatan, telah adanya kebijakan yang mengatur tentang tarif layanan Kesehatan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari sektor kependudukan dan catatan sipil yaitu adanya Surat Edaran Sekda tentang larangan penyuapan, gratifikasi dan atau pungutan liar atas pengurusan layanan administrasi kependudukan.

Dari beberapa upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul baik dari sektor perijinan, Pendidikan,



Kesehatan maupun sektor kependudukan dan catatan sipil maka nilai pencegahan korupsi area pelayanan publik mencapai 95,3%.



Grafik 2.16 Progres Sasaran Pada Area Pelayanan Publik (Sumber: KPK, Jaga.id)

Upaya yang belum bisa maksimal diantaranya masih terdapat beberapa perizinan non berusaha yang masih dalam proses izin *online*.

Faktor penghambat:

- Tidak ada transparansi tata ruang yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.
- Pengajuan perubahan tata ruang atau tata ruang tidak sesuai namun pemohon tetap meminta agar izin tetap diproses.
- Persyaratan perizinan/ rekomendasi teknis belum terpenuhi namun pemohon memaksakan untuk tetap diproses.

Faktor pendorong:

- Adanya *mall* pelayanan terpadu satu pintu menjadikan proses *mall* pelayanan publik dapat berjalan lebih mudah dan lebih cepat

5. Area penguatan APIP (80,98%)

Area Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat pengawasan APIP dalam rangka pencegahan korupsi di pemerintahan daerah. KPK telah mendorong penguatan regulasi dan beberapa upaya lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2024, KPK bersama Kemendagri dan BPKP menerbitkan Surat Edaran Bersama Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ dan Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024. Berdasarkan Surat Edaran Bersama KPK, Kemendagri dan BPKP tersebut maka prioritas area Pengawasan APIP

difokuskan pada 4 (empat) aspek, yaitu: (1). Aspek Anggaran; (2). Aspek Sumberdaya Manusia; (3). Aspek Independensi dan Objektivitas; serta (4). Aspek Peran dan Layanan.

Dari aspek anggaran terkait anggaran sarana dan prasarana untuk Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan pengawasan. Namun dari sisi kecukupan anggaran APIP untuk Kabupaten Bantul masih belum dapat memenuhi sesuai ketentuan dalam Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1592/IJ tanggal 18 Juli 2025 perihal Pedoman Teknis Laporan Kecukupan/Memadai Anggaran dan SDM (terpenuhi 0,16% dari ketentuan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri sebesar 0,50%).

Dari aspek sumber daya manusia maka jumlah jabatan fungsional baik auditor maupun PPUPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul masih belum memenuhi dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB. Adapun terkait peningkatan kompetensi SDM masih belum memenuhi dari amanat yaitu sebesar 60 jam/orang/tahun. Dari hasil reviu tim Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka kecukupan anggaran dan SDM pada sekretariat Inspektorat mendapat nilai 68,75 persen (kurang mencukupi/memadai), sedangkan kecukupan dan anggaran SDM pada Inspektorat Pembantu Bidang pengawasan Khusus telah mencukupi/memadai.

Dari aspek independensi dan obyektifitas telah terpenuhi, dimana Kepala Daerah telah menandatangani berita acara untuk memberikan akses langsung kepada Inspektur Daerah dalam hal persetujuan internal audit Charter (IAC); Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pengawasan berindikasi penyalahgunaan kewenangan dan/atau kerugian keuangan negara/daerah dan telah melaporkan kepada Inspektur Provinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; pengisian jabatan Inspektur dan/atau Irbansus telah sesuai ketentuan.

Dari aspek peran dan layanan masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya perkara tentang penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang mengatur tentang kewajiban ASN untuk melaporkan pelanggaran belum ada.



Grafik 2.17 Progres Sasaran Pada Area Penguatan APIP (Sumber: KPK, Jaga.id)

Dari capaian 4 aspek pada area penguatan APIP tersebut diperoleh nilai atas pencegahan korupsi dari area penguatan APIP sebesar 80,98%.

Faktor penghambat:

- APIP masih belum didukung dengan anggaran yang memadai sehingga kurang optimal dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- Rendahnya jumlah dan kompetensi APIP di Inspektorat sedangkan *mandatory audit* terlalu banyak, sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi.
- Manajemen risiko belum berjalan dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan reviu/ audit.

Faktor pendorong, strategi ke depan:

- Pemenuhan anggaran Inspektorat sesuai dengan Amanah Permendagri No 15 Tahun 2023 yang dijadikan syarat pengesahan APBD menjadikan penguat Inspektorat dalam upaya memenuhi kecukupan anggaran pengawasan pada tahun-tahun mendatang.
- Usulan secara berkala terkait kecukupan SDM APIP.

6. Area Manajemen ASN (91,6 %)

Sasaran pencegahan korupsi pada area manajemen ASN yaitu pada tata Kelola manajemen ASN dimana penyuapan/gratifikasi/pemerasan dalam jual beli jabatan merupakan prioritas kerawanan korupsi pada area ini yang selanjutnya perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi.

Upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari aspek transparansi diantaranya penggunaan sistem informasi ASN yang terintegrasi melalui aplikasi *Integrated Mutasi (I-Mut)* dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan SE BKN Nomor 7 Tahun 2024; adanya pengumuman resmi dalam pembukaan seleksi terbuka JPT dan

JA; adanya pengumuman hasil akhir seleksi terbuka JPT dan JA; seluruh penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN telah disahkan oleh PPK (Surat Keputusan).

Dari aspek regulasi dan kebijakan upaya pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Bantul pada area manajemen ASN ini diantaranya telah adanya regulasi dan kebijakan dalam upaya penegakan integritas, pengendalian, pengawasan kode etik dan disiplin ASN yaitu melalui terbitnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang benturan kepentingan, adanya pakta integritas dalam pengangkatan pegawai, peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi; telah diterbitkan Surat Edaran terkait dengan Pengendalian Gratifikasi di seluruh sektor Pemerintah Kabupaten Bantul dan telah disusun SOP yang mengatur Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN yaitu SOP penyusunan formasi ASN, SOP pengadaan ASN, SOP penetapan usul Nomor Induk Pegawai, SOP mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Bantul, SOP mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Bantul, dan SOP pemberhentian ASN .

Regulasi yang ada belum mengatur terkait BUMD, DPRD dan ajudan/staf khusus sebagai wajib lapor LHKPN dalam peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang wajib lapor LHKPN pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dari aspek akuntabilitas upaya pencegahan korupsi pada area manajemen ASN diantaranya penggunaan sistem informasi kinerja ASN pada seluruh perangkat daerah, kepatuhan wajib lapor LHKPN telah ditaati oleh hampir semua wajib lapor LHKPN baik eksekutif, legislatif, BUMD, maupun staf khusus dan ajudan, adanya upaya dalam rangka memberikan pemahaman antikorupsi sehingga diikuti dengan implementasi budaya antikorupsi diantaranya pemberdayaan PAKSI dalam pembangunan budaya antikorupsi, adanya dokumen rencana aksi pembangunan budaya anti korupsi, SK Kepala Daerah tentang Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI dan optimalisasi peran unit pengendali gratifikasi. Disamping itu terkait disiplin ASN ditunjukkan dengan terlaksananya penegakan kode etik dan disiplin pada ASN yang diketahui telah melakukan pelanggaran disiplin melalui adanya bukti



implementasi I-Dis (*Integrated* Disiplin).

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya untuk pencegahan korupsi area manajemen ASN tersebut maka skor pencegahan korupsi pada area ini mendapat nilai sebesar 91,6 %.



Grafik 2.18 Progres Sasaran Pada Tata Kelola Manajemen ASN
(Sumber: KPK, Jaga.id)

Faktor penghambat:

- Belum ada *punishment* terkait dengan capaian kinerja ASN dalam konteks manajemen ASN.
- Belum terimplementasinya Tunjangan Penghasilan Pegawai berbasis risiko korupsi.

Faktor pendorong:

- Penilaian kinerja sudah dilaksanakan di level organisasi perangkat daerah dan pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja tinggi sesuai dengan kategori tertentu sudah diberikan melalui usulan seleksi tertentu.

7. Area Optimalisasi Pendapatan Daerah (88,32 %)

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Optimalisasi Pendapatan Daerah masih ditemukan potensi korupsi terutama penyuapan/pemerasan/gratifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah terutama kebocoran penerimaan pajak dan retribusi daerah, maupun penagihan piutang pajak dan retribusi daerah. Kedua hal tersebut tersebut menjadi prioritas dan sasaran pencegahan korupsi pada area Optimalisasi Pajak Daerah yang selanjutnya perlu untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kebocoran penerimaan daerah dan menurunkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari aspek transparansi beberapa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya *database* pajak daerah sudah terintegrasi dengan perijinan dan keuangan daerah melalui aplikasi DPMPTSP, sudah mempunyai *database* pajak yang lengkap dan akurat dan adanya dokumen yang menunjukkan alur pembayaran pajak daerah secara *online*.

Dari aspek regulasi dan kebijakan telah ditetapkan perbup turunan terkait pajak daerah yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan telah adanya SOP terkait pajak daerah yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 685 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dari aspek akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai inovasi terkait retribusi daerah yaitu Beti Sakebon (Beli tiket wisata ke Bantul *Online*) dan inovasi terkait pajak daerah yaitu Bayar Pakde QRis (inovasi pajak daerah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi pembayaran digital untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat).

Area ini menjadi salah satu area yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah dari sisi penerimaan. Salah satu bentuk kerugian pemerintah daerah adalah ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan tidak sesuai atau bahkan jauh di bawah potensinya. Korupsi dalam sektor pendapatan daerah ini terjadi karena pemungutan pajak atau retribusi dari masyarakat tidak dikelola dengan baik.

Area optimalisasi pajak menjadi perhatian salah satunya untuk mendorong dimensi pengalaman Indeks Perilaku Anti Korupsi. Dalam hal ini pencegahan korupsi yang dilakukan antara lain dengan mendorong pembayaran pajak secara *online* dan inovasi dalam pencegahan korupsi termasuk peningkatan pajak daerah. Dari sisi tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu mendorong penetapan regulasi pajak daerah menyesuaikan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pembangunan *database* pajak yang terintegrasi, serta pengendalian dan



pengawasan pajak daerah. Upaya pencegahan korupsi pada area optimalisasi pajak daerah difokuskan pada 3 indikator dan 7 subindikator.



Grafik 2.19 Progres Sasaran Pada Area Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (Sumber: KPK, Jaga.id)

Dari sisi area optimalisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bantul nilai pencegahannya mencapai 88,32 %. Upaya penagihan piutang pajak daerah telah dilakukan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) setiap bulannya yang kemudian disampaikan langsung kepada wajib pajak dan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak.

Faktor penghambat:

- Belum adanya sanksi atas keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran pajak mengakibatkan wajib pajak cenderung mengabaikan terhadap kewajibannya.

Faktor pendorong, strategi ke depan:

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan.

8. Area Pengelolaan BMD (90,87 %)

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan korupsi, pada area Pengelolaan Barang Milik Daerah masih ditemukan permasalahan korupsi yaitu pada penyalahgunaan BMD sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Setelah melakukan pengadaan barang, BMD tidak dicatatkan sebagai aset milik pemerintah daerah dan tidak dilakukan pengamanan hukum melalui sertifikasi BMD (terutama untuk BMD tanah).
- 2) BMD disalahgunakan oleh beberapa oknum ASN.
- 3) BMD tidak dikembalikan setelah selesai menjabat atau BMD dikembalikan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

- 4) Pemanfaatan BMD tidak dilakukan penghitungan sesuai dengan nilai yang seharusnya.

Area ini menjadi salah satu area yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah terutama dari sisi pengamanan BMD untuk mencegah hilangnya BMD dan penerimaan kas daerah dari pemanfaatan BMD.

Dari aspek transparansi pengelolaan BMD di Kabupaten Bantul dapat dikatakan sudah transparan dibuktikan dengan adanya *database* BMD dalam rangka penatausahaan BMD dimana menu-menu laporan BMD sudah ditampilkan sesuai dengan format Permendagri 47 Tahun 2021.

Dari aspek Regulasi dan kebijakan, pengelolaan BMD di Kabupaten Bantul sudah didukung dengan Perda pengelolaan BMD yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah disesuaikan dengan dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Selain Perda tersebut juga sudah disusun draf Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman IPA (Indeks Pengelolaan Aset) Barang Milik Daerah yang mengacu kepada Pedoman Pengelolaan aset/ BMD yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun dari aspek akuntabilitas, hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan BMD meliputi telah dilaksanakannya rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola setiap triwulan, inventarisasi BMD (dibentuk Tim inventarisasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 189 Tahun 2025) telah dilakukan secara keseluruhan, upaya persertifikatan BMD (tanah) bekerjasama dengan BPN dan penertiban PSU, penyampaian laporan BMD ke Kemendagri secara tepat waktu, Pakta Integritas penggunaan BMD telah ditandatangani oleh seluruh ASN yang menggunakan BMD serta tindak lanjut hasil reviu pengelolaan BMD telah sesuai.

Dari beberapa upaya yang telah dilaksanakan tersebut maka capaian nilai pencegahan korupsi pada area pengelolaan BMD Kabupaten Bantul mencapai 90,9 %.



Grafik 2.20 Progres Sasaran Pada Area Pengelolaan BMD (Sumber: KPK, Jaga.id)

Dari nilai capaian area pengelolaan BMD ini masih perlu dilakukan upaya-upaya menyeluruh terutama terhadap penertiban PSU, BMD bermasalah, penyerahan PSU oleh masyarakat.

Faktor penghambat:

- Proses sertifikasi aset BMD sangat tergantung dengan pihak lain sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal dalam upaya penyelesaian sertifikasi aset.
- Beberapa aset fasum fasos yang melibatkan pengembang dari tahun-tahun terdahulu sudah banyak yang tidak diketahui keberadaan dari pengembangnya sehingga menyulitkan dalam proses penyelesaian sertifikasi aset.
- BMD disalahgunakan oleh beberapa oknum ASN.
- BMD tidak dikembalikan setelah selesai menjabat atau BMD dikembalikan dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

Faktor pendorong:

- Komitmen Pimpinan yang tinggi dalam penyelesaian aset Pemerintah Kabupaten menjadi pendorong dalam proses penyelesaian sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Bantul.

Strategi ke depan:

- Penertiban dan pengelolaan BMD secara menyeluruh serta pemberian sanksi bagi ASN yang tidak tertib dalam penggunaan BMD.

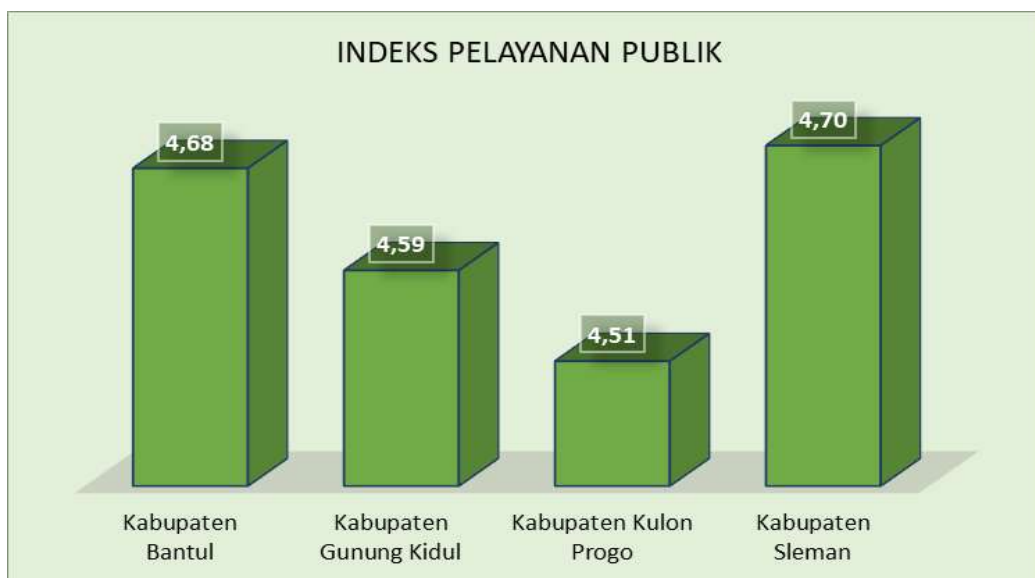
d) Indeks Pelayanan Publik

Indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 4,68 dengan Kategori (A). Hasil IPP ini

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025. Realisasi sebesar 4,68 menunjukkan capaiannya 104,70% dari target sebesar 4,47-4,51, dengan kriteria Sangat Tinggi. Capaian tahun 2025 sebesar 4,68 atau sebesar 104,70, capaian ini meningkat sebesar 0,50 dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 4,18 atau 112%. Dan bila dilihat dari target akhir tahun RPJMD tahun 2030 sebesar 4,52-4,56, maka capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar 103,5% telah memenuhi target akhir RPJMD.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan daerah untuk memastikan kualitas layanan berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. Indeks diperoleh melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang merupakan kegiatan sistematis oleh Kementerian PAN-RB untuk mengukur kinerja unit layanan guna memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009. Evaluasi ini menilai 6 aspek utama: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. Secara teknis evaluasi berpedoman pada Pedoman MENPANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Bantul pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian IPP Kabupaten lain di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan hasil yang cukup baik, merupakan peringkat ke 2 dibandingkan dengan kabupaten lain di D.I Yogyakarta dan Peringkat 5 secara nasional. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Gunung Kidul 4.92, Kabupaten Sleman 4.70, Kabupaten Kulon Progo 4.51. Perbandingan IPP Kabupaten Bantul dan Kabupaten lain di lingkup D.I Yogyakarta tersaji dalam Grafik 2.13.



Grafik 2.21 Perbandingan IPP Kabupaten Bantul dan Kabupaten/ Kota Lain Dalam Provinsi DIY Tahun 2025 (*Sumber: Bag. Organisasi, Setda Kab. Bantul, 2026*)

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang baik tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Dilihat daerah sudut pandang teoritis menggunakan pendekatan teori implementasi Indikator utama teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Menurut George C. Edward III (1980) ada 4 faktor pendorong atau kunci keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi (kejelasan standar dan tujuan), adanya komunikasi yang baik akan memeperjelas tujuan oragnisasi sehingga mandatori yang diberikan oleh pemberi amanat kepada penerima sudah jelas. Contoh terkait tugas fungsi kelembagaan, perjanjian kinerja dan matrik peran hasil.
2. Sumber Daya (staf, dana, fasilitas), ketersediaan sumberdaya dari sisi jumlah SDM, Jumlah anggaran dan jumlah fasilitas akan mendorong kualitas pelayanan.
3. Disposisi (sikap dan dedikasi pelaksana), di Kabupaten Bantul di implementasikan budaya kerja pemerintahan didalamnya mengatur kode etik dan kode prilaku yang harus dipedomani oleh ASN di Kabupaten Bantul.
4. Struktur Birokrasi (desain organisasi), struktur organisasi di Kabupaten bantul selalu di evaluasi secara berkala untuk mewujudkan

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mencapai sasarannya dengan kriteria sangat tinggi kemungkinan didukung faktor pendorong komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis dan struktur birokrasi yang cukup efisien.

Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurangnya fasilitas yang memadai baik dari jumlah maupun kualitasnya.

Strategi ke depan untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik melalui pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah dengan melakukan pendampingan yang lebih intensif serta melakukan pelatihan-pelatihan untuk menyiapkan bukti dukung pemenuhan standar pelayanan publik, peremajaan dan peningkatan kualitas pelayanan.

c. Misi 3 Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Misi 3 memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Tujuan Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah, dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - a) Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,16 – 5,36 terealisasi 4,92 atau sebesar 95,35%.
 - d) PDRB per kapita dengan target 36,99 - 38,21 terealisasi 38,187 atau sebesar 103,24%.
 - e) Gini Ratio dengan target 0,390 - 0,410 terealisasi 0,427 atau sebesar 95,85%.
2. Tujuan Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, dengan indikator, yaitu Tingkat Kemiskinan dengan target 10,75 - 11,02 terealisasi 11,54 atau sebesar 95,28 %.

Misi 3 didukung dengan 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.
2. Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk.
3. Menurunnya Kedalaman Kemiskinan.



1) Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

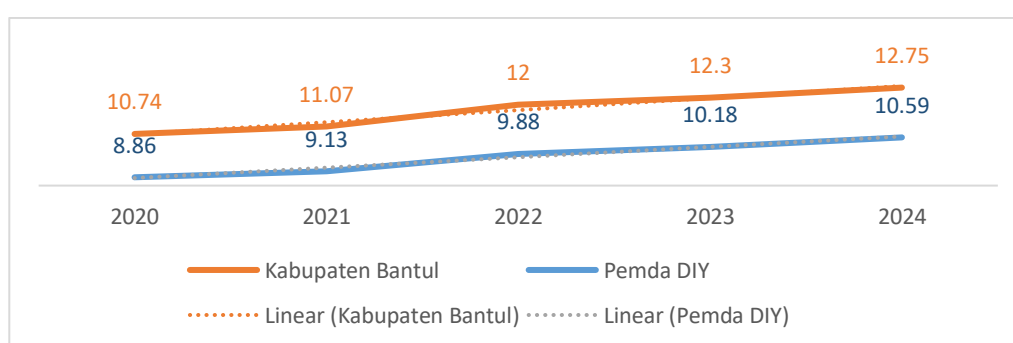
Tabel 2.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	%Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,75	12,77-12,86	13,32	104,31	13,63-15,05	97,73
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,08	14,10-14,77	14,1	100,00	14,58-15,13	96,71
3.	PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	4.913,83	5.107,17 - 5.152,41	5.393,17	105,60	6.369,63 - 6.706,52	84,67

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024; **) angka proyeksi

a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Capaian kinerja Indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum) menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 12,77-12,86 terealisasi sebesar 13,32 atau tercapai 104,31% dengan kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini adalah capaian tahun 2025 dirilis dibulan Febuari oleh BPS. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 13,63-15,06, capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 97,73% dari target akhir Renstra tahun 2030.



Grafik 2.22 PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum Di Kabupaten Bantul dan Prov. DI Yogyakarta Tahun 2020-2025 (Sumber: BPS Kab. Bantul, 2026; Data diolah)

PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) pada periode 2020–2024 menunjukkan tren pemulihan yang signifikan

pasca pandemi COVID-19. Setelah mengalami kontraksi tajam sebesar -11,55% pada tahun 2020 akibat pembatasan mobilitas dan aktivitas pariwisata, sektor ini bangkit dengan pertumbuhan 6,72% di tahun 2021. Momentum pemulihan semakin menguat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 12,70%, mencerminkan peningkatan kunjungan wisatawan dan pulihnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan kuliner. Pada tahun 2023 dan 2024, pertumbuhan tetap terjaga masing-masing sebesar 8,53% dan 8,21%, menunjukkan bahwa sektor ini telah memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi kontributor terbesar ketiga dalam struktur PDRB Kabupaten Bantul. Kinerja yang konsisten ini mencerminkan daya tarik Kabupaten Bantul sebagai destinasi wisata dan kuliner yang terus menguat. Sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem UMKM lokal, mengingat mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bantul bergerak di bidang kuliner dan kerajinan yang mendukung industri pariwisata.

Faktor Pendorong:

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah: Kehadiran Komite Ekonomi Kreatif (KEK) dan Forum Komunikasi Bisnis (FKB) memberikan stimulus bagi pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Pemberdayaan UMKM: Program pelatihan dan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM memperkuat kapasitas usaha kuliner dan akomodasi skala kecil-menengah.
3. Reputasi sebagai Kabupaten Kreatif: Pengakuan Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten kreatif di Indonesia meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
4. Potensi Wisata dan Kuliner Lokal: Kekayaan destinasi wisata budaya, alam, dan kuliner khas menjadi magnet tersendiri bagi kunjungan wisatawan.

Faktor Penghambat:

1. Ketergantungan pada Musim Wisata: Fluktuasi kunjungan wisatawan pada periode tertentu dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan sektor.



2. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung: Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata di beberapa lokasi masih perlu ditingkatkan.
3. Tingkat Kompetisi Antarsektor: Meskipun tumbuh kuat, sektor ini masih di bawah pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi yang lebih seimbang.
4. Kualitas SDM Pelaku Usaha: Sebagian pelaku UMKM masih memerlukan peningkatan kompetensi dalam manajemen usaha dan pemasaran digital.

Upaya Peningkatan Kinerja:

1. Penguatan Promosi Destinasi Wisata: Mengintensifkan promosi digital dan *event* pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sepanjang tahun.
2. Peningkatan Kualitas dan Standarisasi Layanan: Mendorong sertifikasi halal, standar kebersihan, dan kualitas pelayanan di usaha akomodasi dan kuliner.
3. Pengembangan Infrastruktur Pendukung – Memperbaiki aksesibilitas jalan menuju objek wisata, ketersediaan transportasi publik, dan fasilitas umum.
4. Penguatan Ekosistem UMKM – Melanjutkan pendampingan teknis, akses pembiayaan, dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kuliner dan akomodasi.
5. Diversifikasi Produk Wisata – Mengembangkan paket wisata terintegrasi yang menggabungkan wisata budaya, kuliner, dan ekonomi kreatif untuk memperpanjang durasi kunjungan wisatawan.
6. Kolaborasi *Multi-stakeholder* – Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

b) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menjadi salah satu indikator kinerja daerah untuk mengukur pencapaian sasaran daerah yaitu “Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah”. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 14,10-14,77. Capaian pada tahun 2025

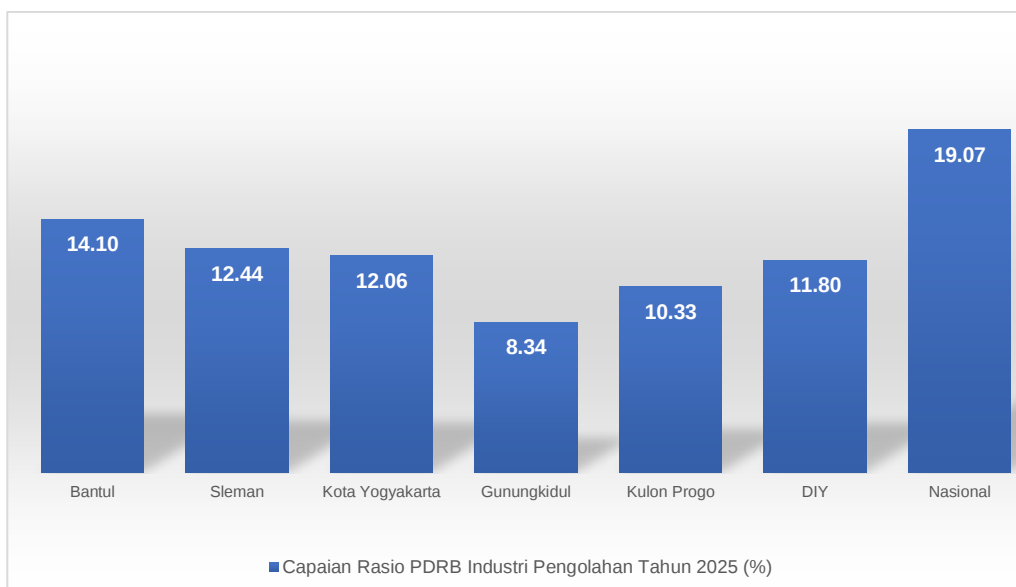
terrealisasi sebesar 14,10% dari target sebesar 14,10-14,77% atau tercapai sebesar 100%, dengan kriteria Sangat Tinggi. Capaian ini relatif sama dengan tahun 2024. Dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD tahun 2030 sebesar 14,58-15,14, maka Rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2025 telah menyumbang 96,71%.

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah kontribusi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total PDRB, yang mencerminkan tingkat industrialisasi daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat industrialisasi suatu wilayah serta dampak kebijakan ekonomi, seperti penanaman modal, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di Kabupaten Bantul, sektor industri pengolahan merupakan sektor tertinggi dalam distribusi dan aktivitas perekonomian daerah di atas sektor pertanian dan pariwisata. Hal ini didukung oleh perkembangan industri khususnya industri kreatif yang mengalami pertumbuhan positif serta didukung oleh peningkatan ekspor daerah yang didominasi oleh produk industri kreatif. Selain itu, pertumbuhan investasi positif di Kabupaten Bantul yang sebagian besar mengarah pada investasi sektor industri kreatif juga memberikan andil terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Faktor pendorong dalam pencapaian Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah meningkatkan pertumbuhan industri dan industri kreatif, mendorong kegiatan ekspor daerah yang didominasi oleh produk industri kreatif, pertumbuhan investasi di Kabupaten Bantul yang positif yang sebagian besar mengarah pada investasi sektor industri kreatif serta kebijakan pemerintah daerah yang memfokuskan arah dan strategi pembangunan melalui peningkatan daya saing IKM dan pengembangan industri berbasis teknologi informasi dan pariwisata.

Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Bantul tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 kabupaten/kota di DIY, dan nasional dengan menggunakan angka capaian sementara yaitu capaian tahun 2024 dapat dilihat dalam Grafik 2.15 berikut:



Grafik 2.23 Capaian Rasio PDRB Industri Pengolahan Tahun 2025 (%) Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi D.I.Y Dan Nasional (*Sumber: BPS, 2026*)

Dari capaian tersebut diatas, rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Bantul tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di DIY. Demikian pula lebih tinggi dari capaian di tingkat provinsi DIY. Adapun apabila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, maka rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Bantul lebih rendah.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan rasio PDRB industri pengolahan adalah terkait dengan kondisi perekonomian secara global menghadapi tekanan yang kurang baik, antara lain perang dagang, perang antar negara, persaingan daya saing produk antarnegara, kebijakan fiskal dan hilirisasi industri. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat capaian indikator ini adalah antara lain ketersediaan bahan baku bagi keberlangsungan produksi, masih kurangnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada efisiensi dan nilai tambah yang dihasilkan industri serta capaian investasi yang masuk.

Strategi kedepan untuk meningkatkan rasio PDRB industri pengolahan ini diarahkan kepada penguatan ekspor daerah melalui diversifikasi produk dan perluasan pasar negara tujuan ekspor. Disamping itu penguatan daya saing produk industri daerah secara berkelanjutan

juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan rasio PDRB industri pengolahan. Pengembangan kawasan industri diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan aktivitas industri di daerah serta kebijakan pemerintah bagi kemudahan dalam perizinan usaha untuk mendorong pertumbuhan sektor industri.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan capaian kinerja Rasio PDRB Industri Pengolahan:

1. Penguatan kapasitas IKM melalui pembinaan berkelanjutan IKM dan Sentra IKM.
2. Fasilitasi sertifikasi untuk memperoleh Sertifikat TKDN-IK (Tingkat Komponen Dalam Negeri-Industri Kecil).
3. Fasilitasi kemudahan perizinan berusaha sektor industri.
4. Perluasan pasar produk Industri /industri kreatif dengan mengikutsertakan pelaku Industri/ industri kreatif dalam pameran dagang skala nasional maupun internasional.
5. Mengoptimalkan pengembangan Kawasan Industri Piyungan sebagai pusat ekonomi baru.
6. Meningkatkan promosi potensi investasi untuk menarik investor di sektor industri.
7. Penyediaan bahan baku lokal untuk mendukung kerlanjutan proses produksi industri.

c) PDRB Sektor Pertanian ADHB

Indikator PDRB Sektor pertanian ADHB target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 5.107,17 - 5.152,41 terealisasi sebesar 5.393,17 atau capaian terhadap target sebesar 105,60% dengan kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun 2025 telah menyumbang capaian sebesar 84,67% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 6.369,63 - 6.706,52.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah karena berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kontribusi sektor ini mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam dan menjadi indikator



penting dalam menilai ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) digunakan untuk menggambarkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor pertanian berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Dengan menggunakan PDRB ADHB, dapat diketahui besarnya kontribusi sektor pertanian dan sub-sektornya secara nominal terhadap total PDRB, sehingga memberikan gambaran struktur ekonomi daerah serta peranan masing-masing sub-sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB dihitung dengan membandingkan nilai tambah bruto sektor pertanian terhadap total PDRB ADHB seluruh sektor. Semakin besar nilai kontribusi yang dihasilkan, semakin besar pula peranan sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Untuk mendukung capaian tersebut kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul, antara lain:

1. Melaksanakan penambahan luas tanam dan mempercepat masa tanam.
2. Pendampingan oleh penyuluh pertanian kepada gapoktan dan petani sehingga yang sebelumnya tanam 2 kali setahun menjadi 3 kali setahun.
3. Bantuan pupuk bersubsidi kepada petani.
4. Hibah alat mesin pertanian kepada petani dan Gapoktan.
5. Di sektor peternakan adanya hibah ayam merah putih.
6. Mendorong peningkatan hasil olahan perikanan.
7. Mendorong peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan, akses permodalan, teknologi, serta pemasaran hasil perikanan.

Faktor Penghambat:

1. Penurunan produksi tanaman bawang merah dan kelapa.
2. Adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke industri maupun pemukiman.
3. Adanya wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) pada hewan ternak yang terjadi di akhir tahun 2025.

Faktor Pendukung:

1. Dukungan dari kegiatan LTT dari pusat, gerakan tanam, gerakan panen sehingga terjadi kenaikan produksi padi yang cukup signifikan.
2. Kenaikan produktivitas padi karena adanya kerja sama dengan kepolisian dan TNI.
3. Gerakan tanam dan panen bersama untuk mengendalikan hama.
4. Penguatan tata kelola sektor kelautan dan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan dengan inovasi Gapura Samudra dan Trajumastra.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan:

1. Optimalisasi dan penguatan Program PPBMP agar lebih terintegrasi dengan pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata lokal.
2. Penguatan keterkaitan sektor unggulan, khususnya industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian, guna meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta menekan ketimpangan pendapatan.
3. Pengembangan teknologi pertanian (teknik penyiraman).
4. Penguatan pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha berkelanjutan.



2) Sasaran Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk.

Tabel 2.35 Capaian Dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk.

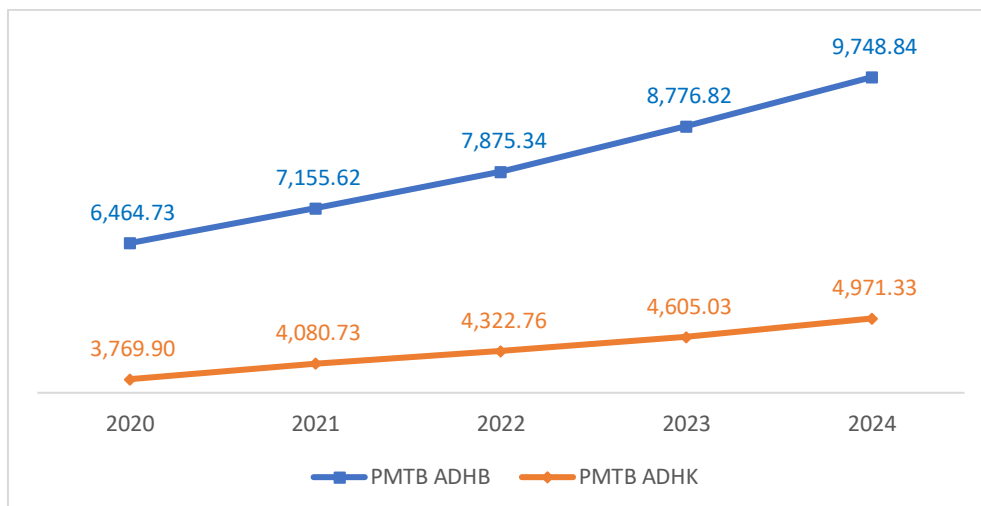
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
a)	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,72	26,75-26,82	26,72*	99,89	27,16-27,26	98,38
b)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,62	3,08-3,58	4,72	118	2,90-3,52	104,89
c)	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,85	4,00-4,50	3,85*	96,25	4,50-5,00	85,56
d)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	16,851	17.078	17.240	100,95	18.840	91,51

Sumber : Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024 **)angka proyeksi

a) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Capaian indikator kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan (PMTB) tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 26,75%-26,82% terealisasi sebesar 26,72% atau capaian terhadap target sebesar 99,89% dengan kinerja Sangat Tinggi (angka sementara menggunakan capaian Tahun 2024). Realisasi tahun 2025 elah menyumbang capaian sebesar 98,38% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 27,16–27,26%.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Perkembangan investasi di daerah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk tercapainya tujuan pembangunan yang dicita-citakan.



Grafik 2.24 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Bantul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 202-2024 (Sumber: BPS, 2025).

Investasi daerah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencakup semua pengeluaran masyarakat untuk modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi, termasuk PMDN dan PMA. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 PMTB Kabupaten Bantul, baik yang dihitung atas dasar harga berlaku (PMTB ADHB) maupun atas dasar harga konstan 2010 (PMTB ADHK), mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan PMTB ini merupakan indikator peningkatan investasi di Kabupaten Bantul dan peluang yang baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Upaya yang dilakukan Kabupaten Bantul untuk meningkatkan capaian indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto antara lain dengan mendorong peningkatan investasi dan mempermudah perijinan investasi.

Faktor Penghambat dalam meningkatkan investasi daerah yaitu:

1. Adanya masalah pengadaan lahan.
2. Adanya permasalahan dalam Kawasan Industri Piyungan antara PT YIP dengan desa/kalurahan.
3. Ketebatasan infrastruktur.



Faktor Pendukung dalam meningkatkan investasi daerah yaitu:

1. Adanya sektor ekonomi kreatif yang unggul. Kolaborasi ekonomi kreatif/UMKM dengan pariwisata dan pertanian yang merupakan potensi unggulan dalam pertumbuhan di Kabupaten Bantul.
2. Terdapat 75 sentra industri kreatif yang menjadi sektor utama.
3. Adanya program pemerintah yaitu Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).
4. Adanya ekosistem ekonomi kreatif.

Strategi dalam meningkatkan investasi daerah yaitu:

1. Kebijakan pemerintah dengan pemberian insentif pajak kepada perusahaan untuk mendorong investasi.
2. Kebijakan pemerintah dalam kemudahan perijinan kepada pelaku usaha/investor.
3. Penciptaan lapangan kerja.
4. Penumbuhan wirausaha baru.
5. Perbaikan penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, yang menguntungkan masyarakat miskin.
6. Perlu adanya pemberdayaan yang tepat sasaran khususnya untuk kelompok rentan dan disabilitas.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan RKPD tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 3,08 - 3,58% terealisasi sebesar 3,57% atau capaian terhadap target sebesar 100,28% dengan kinerja **Sangat Tinggi**. Realisasi tahun 2025 telah menyumbang capaian sebesar 98,58% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 3,90-3,52%. Sehingga telah terjadi penurunan TPT sebesar 0,05% dari capaian tahun 2025 sebesar 3,57% terhadap realisasi tahun 2024 sebesar 3,62%.

Untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul, tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian pemerataan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi juga oleh pemerataan, laju faktor

pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan di wilayah, karena akan membawa dampak terhadap serapan tenaga kerja setempat. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2024 oleh BPS Kabupaten Bantul dengan pembaharuan data pada Desember 2025, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bantul pada angka 74.84, dimana kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan angka TPAK di Provinsi DI.Y dengan angka 74.74, Sleman 72.96 dan Kota Yogyakarta sebesar 71.03. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, maka menunjukkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian maupun proses pembangunan cukup melimpah. Kondisi ini relevan dengan jumlah penduduk Tahun 2024 sebesar 980.269 jiwa dengan komposisi 69,57% merupakan kelompok usai kerja produktif (15 Th - 64 Th) atau sebesar 681.983 jiwa.

Bonus demografi bagaikan dua mata pisau, apabila kelompok usia produktif dapat dikelola dengan baik, maka merupakan sumberdaya utama dalam pelaksanaan proses pembangunan, akan tetapi bila tidak dapat dikelola dengan baik, maka tingkat pengangguran akan tinggi yang berpotensi terhadap kerawanan sosial, ekonomi dan dapat mengancam stabilitas daerah. Kebijakan ekonomi luar negeri, Amerika dalam menaikkan tarif dasar beberapa produk ekspor sampai dengan 47%, dapat berpotensi terhadap eksistensi perusahaan-perusahaan di daerah, yang berdampak pada tingginya resiko terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi para pegawainya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang terhadap terbukanya kesempatan kerja antar negara Asia Tenggara, sekaligus sebagai ancaman terhadap potensi masuknya tenaga kerja asing yang mengisi lowongan jabatan di perusahaan yang berada di Indonesia.

Namun pertumbuhan tersebut, harus disikapi dengan menyiapkan angkatan kerja yang mempunyai kesesuaian kompetensi atau *link and match* dunia usaha serta dunia industri, sehingga ketersediaan angkatan kerja di setiap daerah dapat terserap secara merata. Serapan tenaga kerja yang merata akibat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan berdasarkan potensi kewilayahan tersebut, merupakan bagian dari



strategi dalam pemerataan pendapatan disetiap daerah, untuk mewujudkan perekonomian yang berkualitas.

Potensi, peluang dan hambatan urusan ketenagakerjaan tersebut harus disikapi dengan menyiapkan angkatan kerja yang mempunyai kesesuaian kompetensi atau *link and match* dunia usaha serta dunia industri, sehingga pencari kerja di Kabupaten Bantul dapat terserap secara merata. Selain itu, ketersediaan informasi lowongan pekerjaan harus diikuti dengan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, yang berdampak pada meningkatnya kualitas dan daya saing Angkatan Kerja yang tinggi, baik dalam pasar kerja lokal, antar daerah maupun antar negara. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurun, seiring dengan meningkatnya serapan tenaga kerja, yang akan berdampak terhadap terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat.

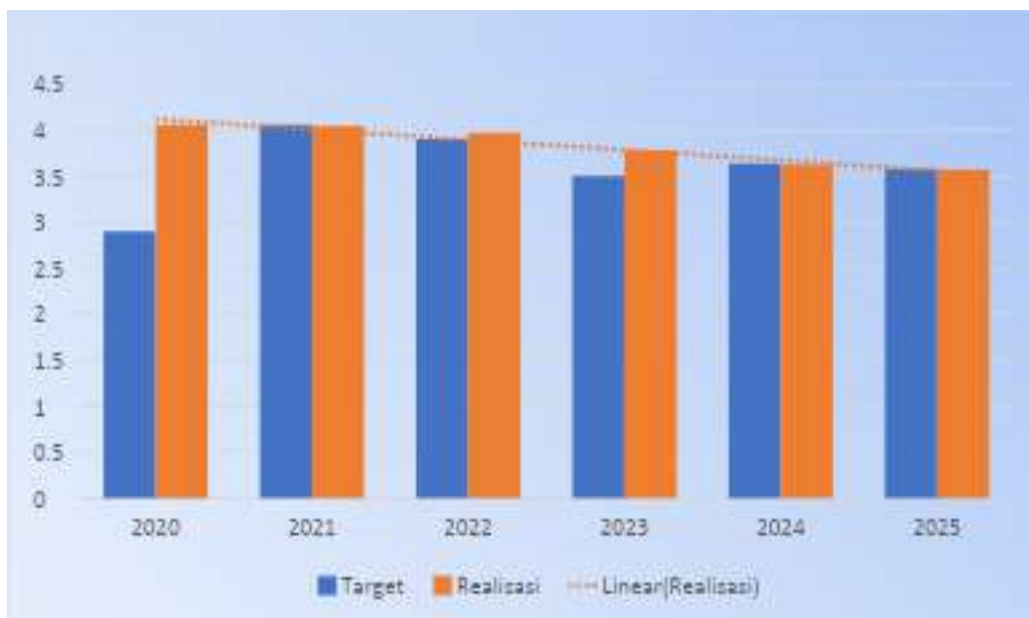
Tabel 2.36 Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi D.I.Y, dan Kabupaten/ Kota dalam Provinsi D.I.Y Tahun 2024- 2025

No.	Tingkat Wilayah	Persentase Capaian		Selisih
		TPT (%)		
		2024	2025	
1	Nasional	4,91	4,85	0,06
2	Provinsi	3,48	3,46	0,02
3	Sleman	4,13	4,07	0,06
4	Bantul	3,62	3,57	0,05
5	Kulon Progo	2,01	2,14	-0,13
6	Gunung Kidul	2,16	2,15	0,01
7	Kota Yogyakarta	5,8	5,72	0,08

Sumber : BPS, 2025

Dari Tabel 2.36. dapat diketahui bahwa angka persentase realisasi TPT Kabupaten Bantul **lebih rendah** dibandingkan dengan angka persentase capaian tingkat Nasional, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul lebih sedikit daripada jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan juga jumlah secara Nasional. Akan tetapi sedikit lebih tinggi daripada capaian Provinsi D.I.Y, Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka TPT Kabupaten Bantul

masih **lebih baik** dibandingkan Provinsi D.I.Y., Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo yang mengalami kenaikan angka penangguran sebesar 0,13%. Meskipun bila diperbandingkan dengan Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta maupun Nasional masih sedikit lebih rendah dengan jumlah capaian penurunan 0,05%.



Grafik 2.25 Capaian Realisasi Terhadap TPT periode 2020-2025
(Sumber: BPS, 2025)

Dari Grafik 2.25 diatas, dapat dilihat bahwa target angka TPT disetiap tahunnya mengalami penurunan, seiring dengan pencapaiannya.

Adapun kegiatan yang membawa dampak terhadap meningkatnya serapan tenaga kerja pada tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul Tahun 2025.

No	Kegiatan	Pekerja	Paket	Tenaga Kerja Terserap
1	Padat Karya			
	-APBD	26	195	5.070
	-APBD Perubahan	26	23	598
	-Dais	34	90	3.060
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			5.899
3	Pelatihan Subsidi Program dan LPKS			535



No	Kegiatan	Pekerja	Paket	Tenaga Kerja Terserap
4	Pelatihan berbasis kompetensi BLK			412
5	Pelatihan BPVP			106
6	Pemagangan Jepang			29
Jumlah				15.174

Sumber: BPS, diolah Disnakertrans, 2025

Pelaksanaan padat karya infrastruktur dan pelatihan dititikberatkan pada obyek sasaran masyarakat miskin, penganggur dan atau setengah penganggur. Peserta pelatihan yang telah selesai dalam kepelatihannya, dilakukan monitoring sampai dengan memperoleh pekerjaan atau berwirausaha. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025 adalah:

1. Pelatihan Tenaga Kerja berbasis kompetensi.
2. Pelayanan informasi lowongan kerja dan AK1.
3. Penempatan tenaga kerja lokal, antar daerah dan luar negeri.
4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
5. Perluasan kesempatan kerja.
6. Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial.
7. Mediasi perselisihan tenaga kerja dengan majikan/Perusahaan.
8. Perlindungan pekerja migran Indonesia yang bermasalah.
9. Pengukuran dan pelatihan peningkatan produktivitas.
10. Penyelenggaraan Transmigrasi.

Faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2. Kurangnya keakuratan validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan dalam upaya mengatasinya.
3. Keterbatasan ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi lowongan kerja dengan kompetensi serta kepeminatan pekerja yang

membutuhkan.

4. Potensi rentannya hubungan industrial yang stabil sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif.
5. Ketidaksiapan tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja sehingga menyebabkan *turnover* yang tinggi di Perusahaan.
6. Kepeminatan tenaga kerja di sektor informal cukup tinggi tetapi peluangnya belum tersedia.
7. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran.
8. Krisis ekonomi global berdampak pada industri di luar DIY, sehingga tidak dapat melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.
9. Karakter angkatan kerja Gen Z yang kurang memiliki etos kerja dan daya juang yang tinggi dalam menghadapi persaingan kerja dan perubahan lingkungan kerja yang dinamis.

Faktor pendorong dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang aplikatif, sehingga memberikan kemudahan dalam melaksanakan monitoring atas progress capaian kinerja.
2. Tersedianya aplikasi pelayanan terintegrasi dalam *website* dinas, yang mempermudah proses pelayanan, informasi dan layanan aduan masyarakat.
3. Terciptanya sinergitas unsur pemerintah daerah, pengusaha dan pekerja dalam upaya menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif.
4. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam keikutsertaan berbagai program pemberdayaan, baik pelatihan maupun padat karya.
5. Pemanfaatan secara optimal, efektif dan efisien berbagai sumberdaya yang tersedia, di antaranya melalui pembentukan tim kerja *stakeholder* terkait.
6. Tersedianya regulasi daerah tentang ketenagakerjaan sebagai payung hukum terhadap kebijakan yang diambil.

Adapun beberapa kegiatan sebagai strategi yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun 2025 adalah:



1. Melaksanakan pelatihan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri berdasarkan data peserta PKH yang terdegradasi.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas *stakeholder* pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur.
3. Melayani informasi lowongan kerja melalui berbagai media, baik secara tatap muka maupun *online*.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi.
5. Pelaksanaan Orientasi Pra Penempatan oleh Dinas, BKK dan LPTKS bagi calon tenaga kerja.
6. Melaksanakan *Job Canvasing* ke Perusahaan di luar Kabupaten Bantul.
7. Menyelenggarakan pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru dengan disertai kerjasama lembaga pelayanan jasa keuangan dalam program pendampingan pemberian permodalan yang diperlukan.
8. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi terkait pelaksanaan program transmigrasi.
9. Melaksanakan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.
10. Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam lomba *May Day Award*, sebagai pendorong perusahaan lain untuk lebih aktif.

Berdasarkan permasalahan, tema, prioritas RKPD 2025 dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bantul untuk memantapkan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan SDM berkualitas, serta penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka kabupaten mengambil kebijakan sebagai bentuk inovasi sekaligus strategi di tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja/SDM, yang diharapkan dapat mengungguli daya saing tenaga kerja dari daerah lain, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan potensi daerah dan memenuhi kebutuhan *link and match* dunia industri, investasi meningkat yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan pengentasan

kemiskinan.

2. Melaksanakan pelayanan AK1 dan informasi ketenagakerjaan secara *mobile* ke Kapanewon bahkan sampai Kalurahan.
3. Menjaga stabilitas dunia usaha, melalui kegiatan deteksi dini, mediasi, sosialisasi ketenagakerjaan dan monitoring perusahaan, sehingga iklim investasi tetap kondusif.
4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan melaksanakan padat karya infrastruktur di tahun 2025 sejumlah 308 paket, sehingga dihasilkan multi efek selain terserapnya tenaga kerja, juga mendukung peningkatan potensi daerah dengan pembangunan infrastruktur.
5. Peningkatan pencapaian realisasi pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan target sebesar Rp563.000.000,00 tercapai sebesar Rp731.868.600,00 atau mencapai 130%.
6. Melakukan optimalisasi pembayaran BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, dimana telah dilaksanakan sebesar 2.682 jiwa dalam masa tiga bulan.
7. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan inovasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
9. Optimalisasi ULD Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan, konsultasi jabatan, pelatihan dan fasilitasi layanan lain ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

c) Rasio Kewirausahaan Daerah

Capaian Indikator Rasio Kewirausahaan Daerah Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 4,00-4,50 terealisasi sebesar 4,72 atau capaian terhadap target sebesar 118,00% dengan kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun 2025 sebesar 4,72 telah menyumbang capaian sebesar 104,89% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030).

Rasio kewirausahaan daerah adalah indikator persentase jumlah wirausaha dibandingkan angkatan kerja di suatu wilayah, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ekonomi dan pertumbuhan usaha baru. Rasio ini menjadi basis evaluasi kebijakan pengembangan UMKM



dan ekosistem kewirausahaan.

Tabel 2.38 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 - 2025

Uraian	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (wirausaha)	29.969	26.604	27.052	22.465	23.382	24.324
Angkatan Kerja	609.943	595.343	626.283	602.581	607.606	608.535
Rasio Kewirausahaan	4,91	4,47	4,32	3,73	3,85	4,72

Sumber: Data olahan SiDAKUI DKUKMPP Kabupaten Bantul, 2026. BPS kabupaten Bantul

Rasio kewirausahaan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 mencapai 4,00% dari total angkatan kerja, naik dari 3,85% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah wirausaha yang aktif mengembangkan usaha mereka.

Faktor Pendukung dalam meningkatkan investasi daerah yaitu:

1. Kemudahan Perizinan: Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memudahkan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar BPOM, dan sertifikasi halal.
2. Akses Pembiayaan (KUR): Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempermudah modal bagi wirausaha baru. Pemerintah juga mengalokasikan minimal 30% kredit perbankan untuk UMKM.
3. Afirmasi Belanja Produk UMKM: Kebijakan yang mewajibkan kementerian/lembaga dan BUMN untuk memprioritaskan belanja produk dari UMKM, yang menciptakan pasar bagi wirausahawan baru.
4. Pengembangan Program *E-Hub*: Pemanfaatan ekosistem pembinaan terintegrasi seperti *E-Hub* Terpadu dan *superapps* SAPA UMKM untuk pembinaan yang berkesinambungan.
5. Transformasi Digital: Adopsi teknologi yang cepat dan penetrasi internet yang tinggi (lebih dari 200 juta pengguna) memungkinkan wirausahawan menjangkau pasar lebih luas dan mengefisiensikan operasional.
6. *E-commerce* dan *Fintech*: Berkembangnya platform digital memudahkan UMKM untuk *go digital*, memudahkan pemasaran dan

pembayaran.

7. Generasi Muda (*Milenial/Gen Z*): Tingginya minat generasi muda untuk berwirausaha menjadi pendorong utama, didukung oleh semangat inovasi dan penggunaan teknologi.
8. Pendidikan Kewirausahaan: Semakin banyaknya kurikulum bisnis, pelatihan, dan inkubator bisnis di kampus-kampus dan masyarakat yang mendorong *mindset* wirausaha.
9. Tren Bisnis Waralaba: Pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) yang memberikan jalan lebih mudah bagi pemula untuk masuk ke dunia bisnis.
10. Pasar Besar: Jumlah populasi Indonesia yang besar menyediakan pasar domestik yang potensial.
11. Kebutuhan Ekonomi: Kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran mendorong munculnya wirausaha baru.

Faktor Penghambat dalam meningkatkan Rasio Kewirausahaan yaitu:

1. Keterbatasan Akses Modal: Kesulitan dalam mendapatkan modal awal dan akses ke lembaga keuangan, seringkali karena persyaratan yang rumit atau kurangnya agunan.
2. Kurangnya Pengetahuan Manajerial dan Teknis: Banyak pelaku usaha kurang memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan, pemasaran, administrasi, dan perencanaan bisnis yang matang.
3. Faktor Budaya dan Pola Pikir: Adanya ketakutan akan risiko kegagalan dan pola pikir yang lebih mengutamakan menjadi karyawan atau pegawai negeri dibandingkan menjadi wirausahawan.
4. Minimnya Inovasi dan Adaptasi Teknologi: Lambatnya adopsi teknologi baru dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar.
5. Kurangnya Pendidikan dan Pendampingan: Sistem pendidikan yang belum sepenuhnya menanamkan jiwa kewirausahaan serta kurangnya mentor untuk membimbing pelaku usaha pemula.
6. Persaingan yang Tidak Sehat: Pasar yang kompetitif tanpa didukung keunggulan kompetitif yang memadai dapat menyulitkan usaha baru untuk bertahan.



Strategi dalam meningkatkan Rasio Kewirausahaan yaitu:

1. Pembangunan Ekosistem & Inkubasi: Mendirikan *Entrepreneur Hub* di berbagai daerah sebagai pusat pelatihan dan pendampingan, serta memperkuat inkubator bisnis di perguruan tinggi untuk melahirkan wirausaha pemula.
2. Digitalisasi dan Kemitraan UMKM: Mempercepat adopsi teknologi (*e-commerce*, digital marketing) dan menghubungkan UMKM dengan industri besar (rantai pasok) agar naik kelas.
3. Akses Permodalan Inklusif: Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan melibatkan lembaga keuangan non-bank untuk pembiayaan wirausaha pemula yang sering terkendala persyaratan perbankan.
4. Pendidikan Kewirausahaan: Mengintegrasikan materi kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan dan memberikan pelatihan praktis, termasuk mendorong pola kemitraan dan waralaba lokal.
5. Penyederhanaan Regulasi (*Deregulasi*): Memberikan kemudahan perizinan (NIB), sertifikasi (Halal/BPOM), dan insentif pajak/retribusi daerah untuk memotivasi pelaku usaha.
6. Pengembangan Berbasis Inovasi: Mendorong wirausaha yang fokus pada inovasi teknologi dan produk berbasis riset agar lebih berdaya saing global.

Penguatan ini bertujuan agar UMKM tidak hanya tumbuh secara jumlah, tetapi juga memiliki kualitas dan keberlanjutan usaha.

d) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)

Capaian Indikator Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 17.078 terealisasi sebesar 17.240 atau capaian terhadap target sebesar 100,95% dengan kinerja Sangat Tinggi (angka sementara, capaian tahun 2024). Realisasi tahun 2025 telah menyumbang capaian sebesar 91,51% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030).

Tabel 2.39 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) Tahun 2020 – 2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Bantul	15.517	15.545	16.002	16.524	16.851	17.240

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Tabel 2.40 Persentase Pengeluaran Konsumsi di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2025

Jenis Pengeluaran Konsumsi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Non Makanan	57,63	57,29	57,29	59,12	56,44	59,05
Makanan	42,47	42,7	42,7	40,87	43,56	40,95

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp17.240.000 per orang per tahun dan persentase pengeluaran non makanan penduduk Bantul lebih dominan dibandingkan pengeluaran makanan. Hal ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat di wilayah Bantul.

Diharapkan dengan pendapatan riil masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat, sehingga kemampuan untuk melakukan pengeluaran per kapita juga naik.

Faktor Penghambat dalam pengeluaran perkapita yaitu:

1. Rendahnya kualitas SDM dan Pendidikan.
2. Tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi lapangan



kerja.

3. Tingginya angka kemiskinan.
4. Ketimpangan distribusi pendapatan.
5. Keterbatasan modal dan investasi.

Faktor Pendukung dalam pengeluaran perkapita yaitu:

1. Peningkatan PDRB Perkapita Riil.
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Penguasaan teknologi.
5. Stabilitas tingkat suku bunga, kurs mata uang, dan permintaan/penawaran yang seimbang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil.
6. Stabilitas politik dan kondisi sosial yang aman memfasilitasi aktivitas ekonomi dan investasi.

Strategi dalam meningkatkan pengeluaran perkapita yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM.
2. Hilirisasi industri dan produktivitas.
3. Pembangunan infrastruktur.
4. Penguatan sektor UMKM dan ekonomi lokal.
5. Digitalisasi ekonomi.
6. Kemudahan investasi guna menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan Masyarakat.

3) Sasaran Menurunnya Kedalaman Kemiskinan.

Tabel 2.41 Capaian Dan Realisasi Sasaran Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	%Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	1,28	2,16	1,28*	140,74	1,98	134,69

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024 **) angka proyeksi

a) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab Bantul Tahun 2025 sebesar 1,28 sedangkan target yang ditetapkan sebesar 2,16 atau tercapai 140,74% dari target yang ditetapkan di tahun 2025. Capaian tersebut sama besarnya jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 134,69% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2030.

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan, sementara penurunan nilai mengindikasikan pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.42 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2021–2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	14,04	12,27	11,96	11,66	11,54
Tingkat Kemiskinan D.I Yogyakarta	12,80	11,34	11,04	10,83	10,23
Tingkat Kemiskinan Nasional	10,14	9,54	9,36	9,03	8,47

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Bantul. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti



makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Data perbandingan antara wilayah DIY dan Nasional, posisi Kabupaten Bantul saat ini masih berada di peringkat atas atau top tier dalam angka kemiskinan. Berdasarkan tabel tersebut, angka kemiskinan di Bantul pada tahun 2021 dimulai dari 14,04% dan perlahan turun menjadi 11,54% di tahun 2025. Meskipun trennya terus menurun, angka ini nyatanya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Provinsi DIY yakni 10,23% maupun angka Nasional yakni 8,47%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul masih memiliki tantangan besar, diperlukan sinergi yang lebih kuat dan terarah untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.43 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2021–2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	418.265	445.511	488.340	510.740	531.456
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	146.980	130.130	128.510	126.930	127.250
3	Tingkat Kemiskinan (%)	14,04	12,27	11,96	11,66	11,54
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,24	2,11	1,79	2,18	1,28
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,54	0,50	0,44	0,56	0,26

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2025

Masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentase penduduk miskin (P0) tetapi juga harus memperhatikan aspek kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur seberapa besar rata-rata selisih pengeluaran warga miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh jarak rata-rata pengeluaran masyarakat dari garis kemiskinan, yang berarti upaya untuk mengangkat mereka keluar dari zona miskin memerlukan sumber daya yang lebih besar. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin. Nilai P2 yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi

di dalam kelompok masyarakat miskin itu sendiri yang semakin lebar.

Peningkatan Garis Kemiskinan yang mencapai Rp531.456 pada tahun 2025 mencerminkan adanya tekanan inflasi terhadap biaya kebutuhan pokok, namun kemampuan daerah dalam menekan angka kemiskinan dan mengatasi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terdapat tiga strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. penurunan beban pengeluaran masyarakat;
2. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi tersebut merupakan landasan daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur dengan harapan hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif untuk menurunkan angka kemiskinan.

Implementasi strategi penanggulangan kemiskinan dijabarkan melalui program dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut: a) Mengurangi Beban Pengeluaran: 68 Sub Kegiatan; b) Peningkatan Pendapatan Masyarakat: 39 Sub Kegiatan; dan c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan: 27 Sub Kegiatan. Jumlah keseluruhan program dan sub kegiatan program penanggulangan kemiskinan yakni 134 sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 165.280.354.357,00.

Intervensi program yang dilaksanakan per kapanewon antara lain program: Boga Sehat, Sambung Pangan, Program Perbaikan Rumah, PBI APBD, Padat Karya APBD, Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan, Santunan anak yatim, Dana Insentif Kalurahan, dan lain-lain.

Faktor pendorong, antara lain:

1. Adanya program bantuan social.
2. Pemenuhan akses layanan dasar kesehatan, pendidikan, air minum, sanitasi.



3. Pertumbuhan ekonomi.
4. Menekan inflasi.
5. Pelatihan dan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
6. Peningkatan akses infrastruktur menfurangi kesenjangan wilayah.

Faktor penghambat, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan berbagai upaya untuk optimalisasi pembiayaan penanggulangan kemiskinan dari sumber pendanaan di luar anggaran pemerintah agar penanggulangan kemiskinan dapat lebih maksimal.
2. Kabupaten Bantul telah melakukan pendataan berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Daerah, namun sampai dengan saat ini belum semua penduduk terdata. Penduduk yang sudah terdata sekitar 70% dari total penduduk Kabupaten Bantul.
3. Kurangnya kemampuan individu maupun kelompok sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dalam menggunakan bantuan yang diterima secara tepat guna dan berkelanjutan.
4. Kondisi PPKS sangat beragam dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Rencana tindaklanjut untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengumpulan, Zakat, Infaq, Sedakah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk Penanggulangan Kemiskinan melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul dan CSR.
2. Akselerasi Pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial Daerah melalui *sharing* pembiayaan dengan APBKal.
3. Pendampingan serta monitoring dan evaluasi secara berkala sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
4. Penyediaan pelayanan dan penanganan perlu disesuaikan secara fleksibel.

d. Misi 4 Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 4 yaitu Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dengan indikator Indeks Pengembangan Wilayah target sebesar 64,39 tercapai 63,12 atau sebesar 98,03% dari target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2029. Misi 4 ini didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur.

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana.

Tabel 2.44 Rencana Dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Menurunnya Risiko Bencana Di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,67	66,07	71,05	107,54	66,59	106,70
b)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	129,5	123,02	96,02	121,95	95,19	99,13

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024; **) angka proyeksi

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah.

Capaian IKLH Kab Bantul Tahun 2025 tercapai sebesar 71,05

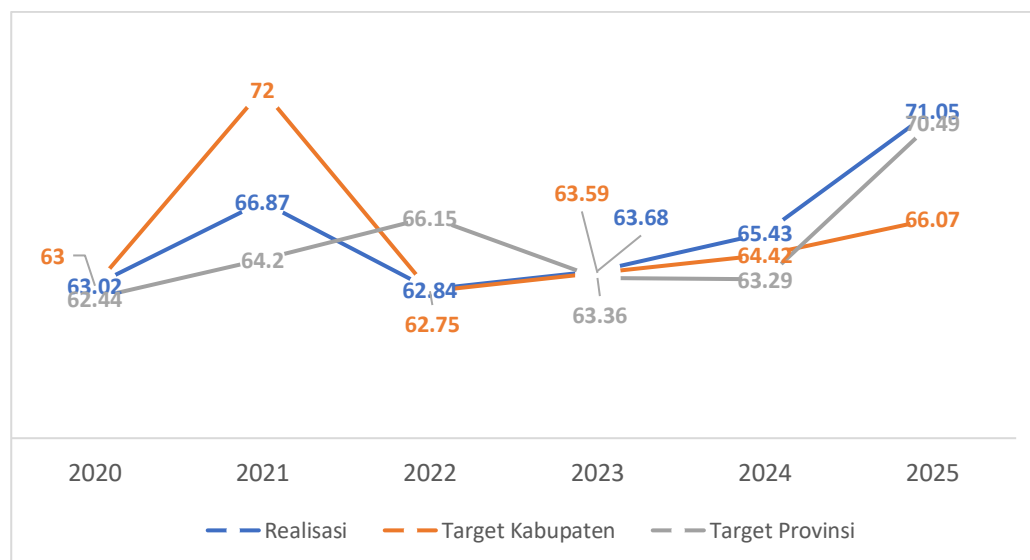


melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 66,07 atau tercapai 107,54% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut naik sebesar 5,60 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 61,67. Pencapaian ini telah menyumbangkan sebesar 106,70% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2030 sebesar 66,59.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan Indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari IKA, IKU, IKTL, capaian pengelolaan sampah dan persentase ketaatan kegiatan/usaha. Indikator-indikator ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.



Grafik 2.26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2025 (Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2026)

Dalam melakukan penghitungan untuk mendapatkan nilai IKLH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara langsung dilakukan untuk mendapatkan data primer IKA dan IKU, sementara untuk IKL dilakukan penghitungan menggunakan data sekunder.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memberikan gambaran instrumen/indikator keberhasilan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari pengukuran parameter kualitas air sungai yang mengalir di Kabupaten Bantul. Sampel air berjumlah 15 sampel dari 15 titik pengambilan, yaitu mewakili hulu, tengah, hilir pada 3 (dua) periode (penghujan, kemarau dan peralihan). Pemantauan kualitas air sungai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: derajat keasaman (pH), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD),



kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi (TSS), oksigen terlarut (DO), nitrat (NO₃-N), total fosfat dan fecal coliform. Selanjutnya dianalisa dan dihitung untuk mengetahui kondisi kualitas air di masing masing sungai.

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, capaian IKA mengalami kenaikan dan penurunan. Tabel 2.45 berikut adalah hasil capaian IKA dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi.

Tabel 2.45 Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2021- 2025

Indikator	Indeks Kualitas Air				
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target Kabupaten	56,00	40	40,5	41	66,07
Target Provinsi	40,80	42.50	37,2	37,75	70,49
Realisasi Kab. Bantul	56,00	36.67	39,83	43,67	71,05

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2026

Dari Tabel 2.45 diatas dapat dijelaskan bahwa target IKA Kabupaten Bantul diharapkan terus bertambah sehingga kualitas air dapat terjaga. Hal ini bisa dilihat dari tabel bahwa realisasi hasil IKA mengalami kenaikan mulai tahun 2022. Pada tahun 2025 realisasi hasil IKA mengalami kenaikan tajam dari tahun 2024 karena adanya perubahan formulasi perhitungan kualitas air sungai oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2025 tentang Status Dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, Lampiran III. Metode penentuan Indeks Kualitas Air berbasis formulasi dari *National Sanitation Foundation – Water Quality Index* (NSF – WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, keputusan dengan metode Delphi. Rumusan tersebut digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

1. penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;

2. ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
3. penggunaan air; dan
4. tingkat erosi dan sedimentasi.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan dari pengukuran parameter kualitas udara ambien yang berada di Kabupaten Bantul. Dalam pemantauan IKU terdapat pemantauan yang dilakukan bersama-sama dengan KLHK maupun yang dilakukan secara mandiri. Titik sampling pemantauan kualitas udara dilakukan di beberapa sektor antara lain Transportasi, Pemukiman, Perkantoran dan Kawasan Industri. Parameter utama yang diperiksa adalah NO_x dan SO_x.

Adapun data titik lokasi pemantauan udara disajikan dalam Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46. Titik lokasi pemantauan udara untuk penghitungan IKU (Indeks Kualitas Udara)

No	Sektor	Lokasi
1	Transportasi	Pertigaan Jodog, Jl. Srandakan, Bantul Jl. Mgr Sudiyono pranoto Jl. Srandakan, Depan Kapanewon Srandakan
2	Pemukiman	Perumahan Sewon Residence Dusun Gedongsari Perumahan Sewon Asri
3	Perkantoran	Komplek II Manding Pemerintah Kabupaten Bantul, Depan Gedung PBJ Komplek II Pemerintah Kabupaten Bantul, Komplek Perkantoran Parasamya, Pemerintah Kabupaten Bantul.
4	Industri	Kawasan Industri Piyungan PT Ameya Lving Style PT. Madu Baru

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2026

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, capaian IKU mengalami fluktuasi. Berikut adalah hasil capaian IKU dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten dan Provinsi.



Tabel 2.47 Tabel Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2021 - 2025

Indikator	Indeks Kualitas Udara				
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target Kabupaten	90,00	87	87,5	88	70,61
Target Provinsi	89,07	89.74	86,93	87,16	70,98
Realisasi	83,27	86.34	88,16	88,02	81,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2026

Dari data Tabel 2.47 dapat disimpulkan bahwa nilai IKU di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2025 yang berarti menurunnya kualitas udara di Bantul. Realisasi IKU tahun 2025 berada di atas target Kabupaten dan Provinsi. Indeks Kualitas Udara sebesar 81,46 termasuk dalam kategori baik, yang berarti kualitas udara di Kabupaten masih dalam kategori baik.

Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2021 - 2025 dihitung dari penjumlahan:

1. Hutan Lindung.
2. Hutan Rakyat.
3. Ruang Terbuka Hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan. Upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan area bekas tambang dan pembangunan RTH.

Dalam rentang waktu pemantauan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, capaian IKL mengalami hasil yang fluktuatif setiap tahunnya. Berikut adalah hasil capaian IKL dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten.

Tabel 2.48 Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Bantul, bila dibandingkan dengan Target Kabupaten dan Provinsi DIY Tahun 2020 - 2024

Indikator	Indeks Kualitas Lahan (IKL)				
Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target Kabupaten	61,20	57	59	61	49,48
Target Provinsi	63,05	66.2	51,36	51,44	54,79
Realisasi	55,21	57,42	59,34	61,02	49,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul, 2026

Dari Tabel 2.48. dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 capaian IKL melebihi target Kabupaten dan menurun dari capaian tahun 2024. Indeks Kualitas Lahan dipengaruhi oleh:

1. Kecukupan luas (kawasan hutan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
2. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen).

Arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Hasil analisis Tutupan Lahan berdasarkan penggunaan data citra satelit Landsat, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan luas tutupan lahan dilakukan secara intensif melalui penanaman pohon dengan sasaran pada hutan, lahan kritis, sempadan sungai, jalur selatan, kawasan mangrove dan pembangunan RTH.

Faktor penghambat dalam pencapaian Indikator IKLH adalah:

1. Wilayah administratif Kabupaten Bantul yang berada di hilir aliran sungai yang memungkinkan tingginya akumulasi pencemaran air sungai.
2. Kondisi darurat sampah sehingga mendorong timbulnya banyak lokasi pembuangan sampah ilegal yang akan memperburuk kualitas air



sungai.

3. Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai).
5. Cakupan ketersediaan RTH Publik Kawasan Perkotaan minimal 20% belum terpenuhi.

Faktor pendorong dalam pencapaian Indikator IKLH adalah:

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi perizinan yang sudah dimiliki.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan penghijauan lingkungan.
3. Adanya transportasi publik yang melintasi wilayah Perkotaan Kabupaten Bantul mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga emisi SO₂ dan NO₂ yang ditimbulkan berkurang.
4. Tersedianya tenaga ahli dalam pelaksanaan deliniasi untuk menghitung tutupan lahan.

Strategi kedepan dalam pencapaian menghadapi masalah tersebut adalah:

1. Sinergitas pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, Institusi Polri dan TNI melalui Babinsa dan Babinkamtibnas, Swasta dan Akademisi dan Masyarakat.
2. Sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, penguatan kelembagaan pengelola sampah dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang telah dimiliki Kabupaten Bantul.
3. Penguatan pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyesuaian regulasi perijinan pembuangan air limbah, emisi dan limbah B3 secara terpadu.
4. Peningkatan fungsi pengawasan bagi industri terkait dengan pengelolaan limbah, emisi dan limbah B3.
5. Pemberian *reward* pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup pada

kegiatan usahanya serta *punishment* pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola lingkungannya dengan baik.

6. Peningkatan ketersediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten Bantul.
7. Peningkatan gerakan dan budaya konservasi lingkungan hidup.

b) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana pada tahun 2025 tercapai dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini dilihat dari indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun 2025 tercapai 96,02 dari target 123,02 atau nilai capaian sebesar 121,95%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 129,5 capaian tahun 2025 mengalami keaikan sebesar 33,48. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,13% dari target akhir RPJMD tahun 2030 sebesar 95,19.

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011. Sejak tahun 2013, BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia. Perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan perubahan substansi dari penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko).

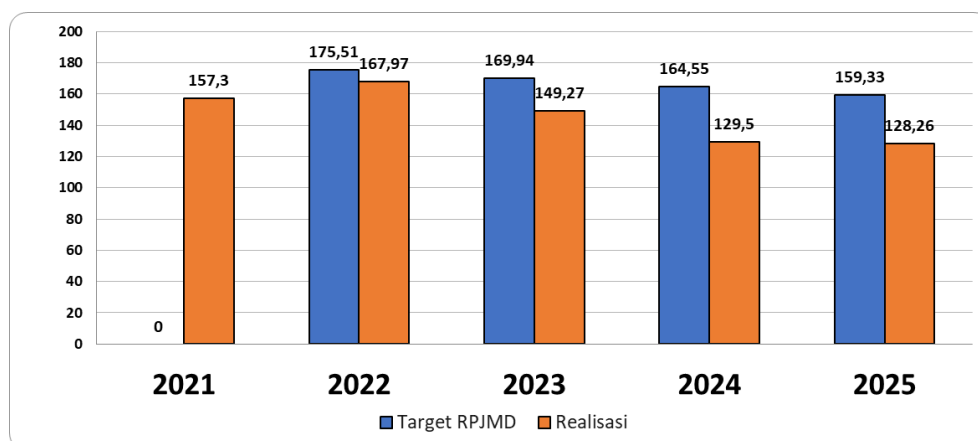
Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan instrumen dalam mengukur risiko bencana di suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana (IRB) dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indeks Risiko Bencana (IRB) dinilai berdasarkan 3 komponen yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas

dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Indeks Risiko Bencana (IRB) dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Grafik 2.27 Rumus Indeks Resiko Bencana (Sumber: BPBD Kab. Bantul)

Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1). Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2). Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3). Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4). Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5). Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6). Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7). Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bantul tahun 2021-2025 dapat dilihat pada Grafik 2.28 berikut.



Grafik 2.28 Perkembangan dan Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2021 – 2025 (Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2025)

Selama periode 5 tahun, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten termasuk dalam wilayah Kategori Risiko Tinggi. Kabupaten Bantul selama 5 tahun berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana sebesar 29,04 poin atau sebesar 18,46%.

Perbandingan capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Propinsi dan Kabupaten/Kota se DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49 Tabel Nilai IRB Tahun 2024-2025 Kabupaten/kota se-DIY

No	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana		Kenaikan/ Penurunan (%)
		2024	2025	
1.	Kabupaten Kulon Progo	152,65	107,52	45,13
2.	Kabupaten Bantul	129,50	96,02	33,48
3.	Kabupaten Gunungkidul	94,43	86,94	7,49
4.	Kabupaten Sleman	73,35	102,26	-28,91
5.	Kota Yogyakarta	64,22	51,79	12,43
Propinsi DI Yogyakarta		108,15	88,9	19,25
Nasional		128,52	38,80	89,72

Sumber: BNPB, 2025 dan 2026

Dari Tabel 2.49. menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Bantul termasuk tertinggi ke-3 se kabupaten/kota di Propinsi DIY. Kabupaten Bantul pada tahun 2025 berhasil menurunkan indeks risiko bencana sebesar 33,48 poin dari capaian tahun 2024 atau merupakan penurunan IRB tertinggi ke-2 se DIY. Keberhasilan ini tidak lepas dari integrasi strategi *pentahelix* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media serta fokus program dan kegiatan dalam peningkatan Kapasitas Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.



Tabel 2.50 Faktor Penghambat, Faktor Pendorong, dan Strategi dalam pencapaian Sasaran Daerah Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana tahun 2026

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Strategi
- Belum Optimalnya Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. - Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemulihan Pasca Bencana.	- Jumlah Relawan dan Penggiat Kebencanaan yang cukup banyak. - Sinergi dengan Dunia Usaha dan Institusi Perguruan Tinggi yang berjalan baik.	- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana terintegrasi. - Peningkatan Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). - Peningkatan Kapasitas Daerah Berbasis Kawasan melalui pengembangan Kaltana, dan SPAB. - Peningkatan Kapasitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB). - Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Komando Terintegrasi melalui peningkatan cakupan dan kualitas gladi posko dan gladi lapang. - Peningkatan kualitas manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. - Optimalisasi sistem pemulihan pasca bencana yang meliputi pemulihan infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan sumberdaya alam.

Sumber: BPBD Kab. Bantul, 2026

2) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur.

Tabel 2.51 Realisasi dan Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Sasaran Satuan	Realisasi 2024	2025				Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
			Target	Realisasi	% Realisasi			
1.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks 58,72	59,08	69,2	117,13		65,97	104,90

Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024; **) angka proyeksi

a) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKI)

Pembangunan insfrastruktur harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk melakukan pengukuran atas kualitas infrastruktur, dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Infrastruktur. Terpenuhinya

Kualitas Sarana dan Prasarana Publik yang diukur melalui IKU Indeks Kualitas Infrastruktur menunjukkan angka yang baik, di mana pada tahun 2025 capaian kinerjanya sebesar 69,2 dari target sebesar 59,08 atau tercapai 117,13% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pencapaian ini menyumbangkan sebesar 89,56% dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2030 sebesar 104,90%.

Penentuan IKI didasarkan pada perhitungan kualitas infrastruktur sesuai 6 (enam) IKU Perangkat Daerah, yaitu: tingkat kemantapan jalan; rasio bangunan gedung laik fungsi; rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Penduduk berakses air minum layak, Penduduk berakses sanitasi yang layak, dan Penanganan Kawasan kumuh. Dari 6 (enam) IKU OPD tersebut didapatkan data kualitas infrastruktur sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Target dan Realisasi Data Kualitas Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun 2025.

No	IKU DPUPKP	Target	Realisasi	Capaian
a.	Tingkat kemantapan jalan	65,38	65,87	100,75
b.	Rasio bangunan gedung laik fungsi	0,55	2,33	423
c.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	81,45	84,68	103,97
d.	Penduduk berakses air minum layak	90,75	90,91	100,18
e.	Penduduk berakses sanitasi yang layak	96,85	92,36	95,27
f.	Penanganan Kawasan kumuh	56,25	56,22	99,95

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025

Berdasarkan Tabel 2.52 diatas, dapat diketahui bahwa kualitas semua kategori infrastruktur Kabupaten Bantul memiliki kualitas sangat baik dengan capaian masing-masing sebesar 100,75%, 423%, 99,17%, 100,18%, 95,27% dan 99,95%. Capaian kualitas infrastruktur secara lengkap sebagai berikut:

1. Tingkat Kemantapan Jalan

Hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan menunjukkan tingkat

kemantapan jalan sebesar 65,87%. Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.210,72km dengan 1.001 ruas jalan. Jalan dengan kondisi mantap sepanjang 797,5km atau 65,87% dan kondisi tidak mantap sepanjang 413,22km atau 34,13%.



Gambar 2.6 Dokumentasi Hasil Kegiatan Pengaspalan Jalan (Sumber: DPUPKP Kab. Bantul, 2025)

Mutu yang baik pada hasil perhitungan kualitas infrastruktur jalan merupakan hasil dari kegiatan baik rehabilitasi/pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan, talud jalan, gorong-gorong maupun drainase jalan kabupaten. Pada tahun 2025, telah berhasil ditangani jalan dan jembatan sesuai Tabel 2.44.

Tabel 2.53 Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Peningkatan/rehabilitasi jalan kabupaten	31,847km
2	Peningkatan/rehabilitasi jembatan pada jalan kabupaten	3 unit
3	Pemeliharaan jalan kabupaten	235km

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025

2. Rasio Bangunan Laik Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, laik fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai

dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan. Suatu gedung dinyatakan laik fungsi jika telah diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah. Penerbitan SLF dilakukan untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Kualitas infrastruktur bangunan gedung dapat ditilik dari rasio bangunan gedung laik fungsi yang ada di daerah. Penerbitan SLF bangunan Gedung Kabupaten Bantul pada sampai dengan Tahun 2025 ini adalah sebanyak 1.577 dokumen. Dibandingkan dengan jumlah bangunan gedung yang ada di kabupaten Bantul sebesar 67.785 unit, didapatkan rasio gedung laik fungsi sebesar 2,33%.

Kualitas infrastuktur bangunan Gedung pada Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa fasilitasi penerbitan SLF dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pembangunan/rehabilitasi Gedung pemerintah dalam rangka mewujudkan Gedung laik fungsi dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

3. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Kualitas infrastruktur berupa jaringan irigasi dapat dilihat dari rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi. Dari total seluas 8.634 Ha DI kewenangan Kabupaten Bantul, DI seluas 6.975,83 Ha dapat dilayani oleh jaringan irigasi atau sekitar 84,68%. Data penanganan jaringan irigasi pada DI kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.45.

Tabel 2.54. Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Uraian Penanganan DI	Luas (Ha)
1	Peningkatan/ Rehabilitasi	473,55
2	Operasional/Pemeliharaan	6.502,28
Total		6.975,83

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025

Secara rinci, peningkatan/rehabilitasi Daerah Irigasi pada Tahun 2025 dilaksanakan pada DI seperti pada Tabel 2.55.



Tabel 2.55. Data Penanganan Jaringan Irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Nama Daerah Irigasi	Lokasi
1	Daerah Irigasi Kepuh Kulon	Banguntapan
2	Daerah Irigasi Jotawang	Banguntapan
3	Daerah Irigasi Karangploso	Banguntapan, Pleret, Piyungan
4	Daerah Irigasi Bangeran	Bantul
5	Daerah Irigasi Talok	Imogiri
6	Daerah Irigasi Sindet	Imogiri
7	Daerah Irigasi Kemiri	Jetis
8	Daerah Irigasi Timbulsari	Jetis
9	Daerah Irigasi Bayem	Kasihan
10	Daerah Irigasi Gupit	Pleret
11	Daerah Irigasi Pacar	Pleret
12	Daerah Irigasi Klegen	Pundong
13	Daerah Irigasi Gayam	Sewon

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025



Gambar 2.7. Dokumentasi Peningkatan/Rehabilitasi DI Jotawang Tahun 2025 (Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025)

4. Penduduk Berakses Minum Layak

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, di antaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana salah satu layanannya berupa Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan pemenuhan SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018 adalah

dengan menyusun Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Bantul 2021 – 2026.

Tabel 2.56. Data Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No.	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah (SR)	Unit
1	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPAM Perdesaan Caturharjo	Pandak	71	
		SPAM Perdesaan Gilangharjo	Kasihani	106	
		SPAM Perdesaan Srandakan Poncosari	Srandakan	99	
		SPAM Perdesaan Imogiri Sriharjo	Imogiri	133	
		SPAM Perdesaan Dlingo Terong	Dlingo	88	
2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM Perdesaan Girirejo	Imogiri	100	
		SPAM Perdesaan Mangunan	Pandak	102	
		SPAM Perdesaan Potorono	Banguntapan	67	
		SPAM Perdesaan Srimulyo	Piyungan	43	
		SPAM Perdesaan Wirokerten	Banguntapan	51	
		SPAM Perdesaan Wukirsari	Imogiri	92	
		SPAM Argorejo	Sedayu	170	
		SPAM Argosari	Sedayu	170	
		SPAM Banguntapan	Banguntapan	570	
		SPAM Segoroyoso	Pleret	300	
		SPAM Sidomulyo	Bambanglipuro	300	

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025

Akses penduduk terhadap air minum yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan air minum. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan peningkatan/perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun



perkotaan. Data peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.56.

Peningkatan akses penduduk terhadap air minum di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

5. Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak

Seperti halnya dengan penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak juga merupakan salah satu amanah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah diwajibkan memenuhi layanan dasar pada 6 (enam) layanan dasar urusan pemerintah, di antaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mana layanan yang kedua adalah berupa Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Akses penduduk terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu parameter penentuan kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Data peningkatan/ perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2025 tercantum pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57. Data Peningkatan/Perluasan SPALD Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah (SR)	Unit
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	SPALD-S Argosadi	Sedayu	30	
		SPALD-S Argosari	Sedayu	20	
		SPALD-S Guwosari	Pajangan	30	
		SPALD-S Sendangsari	Pajangan	31	
		SPALD S Terong	Dlingo	31	
		SPALD S Timbulharjo	Sewon	31	

No	Kategori	Uraian	Kapanewon	Jumlah (SR)	Unit
		SPALD S Wijirejo	Pandak	30	
2	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	SPALD-T Sriharjo	Imogiri	64	
		SPALD-T Tamanan	Bambanglipuro	62	
3	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	SR SPALDT Bambanglipuro	Bambanglipuro	145	
4	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	SR SPALDT Sewon	Sewon	150	

Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025

Peningkatan akses penduduk terhadap penyediaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bantul, didukung oleh pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan/perluasan SPALD SPALD Setempat, SPALD Terpusat Skala Permukiman maupun SPALD Terpusat Skala Kota. Saat ini, layanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 2 unit SPALD yaitu SPALD Terpusat Sewon milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Kapanewon Sewon dan SPALD Terpusat Bambanglipuro yang berada di Kapanewon Bambanglipuro. SPALD Terpusat Bambanglipuro dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2021 - 2022, yang saat ini masih berstatus pinjam pakai. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan serah terima pengelolaan dan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Kabupaten Bantul dan sekarang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum



Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

6. Penanganan Kawasan Kumuh

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bantul, terdapat 330,26 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang tersebar pada 7 Kapanewon dan 31 Kalurahan. Sinergitas penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Salah satu upaya mengurangi dan mengatasi kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan telah dibangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) melalui anggaran APBN. Sampai dengan tahun 2025 terdapat 4 Rusunawa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan (Pringgolayan) dan Rusunawa Tamanan.

Pada tahun 2025 telah dilakukan penanganan Kawasan kumuh di Kawasan Wiyoro Banguntapan. Seluas 0,58Ha Kawasan telah direvitalisasi dengan pembangunan drainase dan jalan lingkungan,

Selain itu, untuk memenuhi layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang selama ini mendapat anggaran dari pemerintah pusat/daerah. Pada tahun 2025, rumah tidak layak huni dapat tertangani 110 unit dengan rincian 53 unit peningkatan kualitas, dan 20 unit Pembangunan baru rumah tidak layak huni serta penanganan RTLH dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim sebanyak 37 unit dari APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025.



Gambar 2.8. Pengentasan Kawasan Kumuh di Wiyoro, Banguntapan di Kabupaten Bantul. (Sumber: Dinas PUPKP Kab. Bantul, 2025)

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur:

1. Akses jalan yang belum sepenuhnya mantap, terutama dengan adanya Keputusan Bupati Bantul Nomor 609 Tahun 2022 tentang Status Jalan dan Jembatan Kabupaten, terdapat penambahan ruas dan panjang jalan sehingga menyebabkan kondisi kemantapan menjadi rendah.
2. Rasio Bangunan Gedung Pemerintah laik fungsi yang masih rendah. Proses penerbitan sertifikat laik fungsi sering terkendala karena aplikasi SIMBG sering mengalami gangguan.
3. Belum optimalnya akses air minum yang aman.
4. Belum optimalnya akses sanitasi aman.
5. Belum semua lahan / daerah irigasi terlayani air irigasi dengan baik.
6. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat.
7. Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu.
8. Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu.
9. Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
10. Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Indeks Kualitas Infrastruktur:



1. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam menunjang keberhasilan kegiatan.
2. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus maupun dana APBN.
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan.

Strategi ke depan:

4. Peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/rutin jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan.
5. Melakukan sosialisasi pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bangunan Gedung.
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana air bersih dan meningkatkan akses penduduk terhadap layanan air minum layak.
7. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak.
8. Pembangunan/peningkatan drainase lingkungan.
9. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan kecukupan air irigasi.
10. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi.
11. Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu.
12. Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu.
13. Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana.
14. Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni.

Strategi kedepan guna meningkatkan capaian indikator di atas, diupayakan dengan beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan kabupaten, meningkatkan kenyamanan jalan kabupaten, peningkatan kondisi dan kualitas jalan kabupaten, dan terutama pada fasilitas penunjang jalan kabupaten (PJU, trotoar, marka, drainase jalan).
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah (SPALD, MCK), pelayanan air bersih (PDAM, SPAM, SIPAS),

prasarana dan sarana layanan persampahan (TPS, TPS-3R, bank sampah), dan peningkatan jalan lingkungan, ketersediaan saluran air hujan/drainase/biopori dan ketersediaan ruang terbuka hijau (taman, makam, ruang publik) akan ditingkatkan.

3. Meningkatkan ketersediaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi, kecukupan kebutuhan air irigasi, pemerataan/distribusi air irigasi, keandalan/kontinuitas air irigasi; partisipasi petani pengguna air (P3A) dalam pemeliharaan jaringan/saluran dan bangunan irigasi.

e. Misi 5 Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Misi 5 yaitu Meningkatkan Keharmonisan Daerah, dengan indikator yaitu Indeks Harmoni Indonesia dengan target sebesar 7,51 tercapai 74,44 atau sebesar 99,07% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Capaian ini adalah sementara (capaian tahun 2024).

Tujuan: Meningkatkan Keharmonisan Daerah, didukung dengan 2 sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya Pelestarian Budaya.
2. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah.

1) Meningkatnya Pelestarian Budaya

Tujuan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah meningkatkan keharmonisan daerah, yang diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, toleransi sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan kondisi sosial yang rukun, aman, dan berkelanjutan. Salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan.



Tabel 2.58 Capaian dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Indeks Pelestarian Kebudayaan Di Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2026)	% Capaian terhadap Akhir RPJMD (2026)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
a)	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	71,82	89,26	89,42	100,18	97,52	91,69

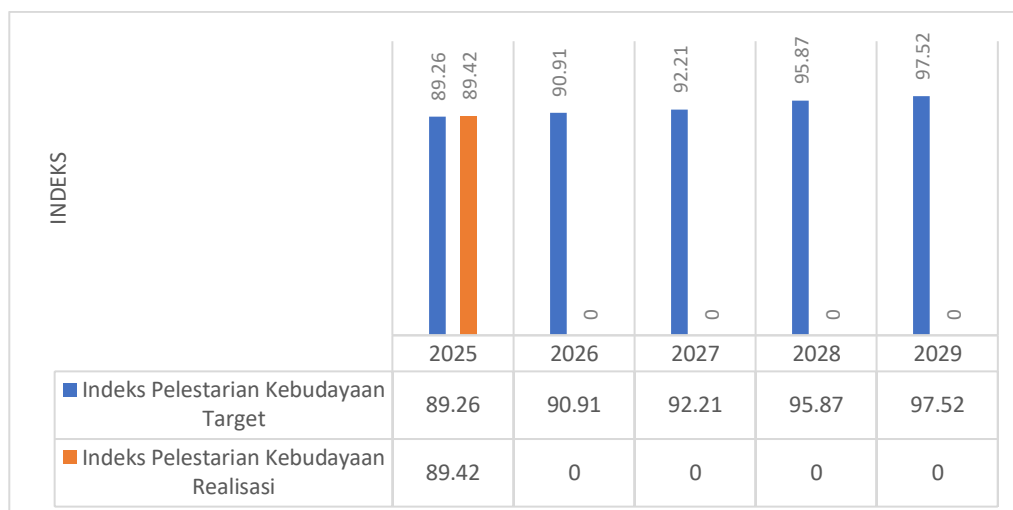
Sumber: Bag. Organisasi, Bappeda, BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024; **) angka proyeksi

a) Indeks Pelestarian Kebudayaan

Indeks Pelestarian Kebudayaan dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 89,26 terealisasi sebesar 89,42 atau tercapai sebesar sebesar 100,18% dengan kinerja Tinggi. Realisasi tersebut telah menyumbang capaian sebesar 73,65% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) sebesar 97,52%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 capaian tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 17,6.

Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan adalah kondisi meningkatnya keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah yang diukur melalui **Indeks Pelestarian Kebudayaan** Kabupaten Bantul. Dengan meningkatnya capaian Indeks Pelestarian Kebudayaan, diharapkan terjadi penguatan identitas dan jati diri daerah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta berkurangnya potensi konflik sosial. Kondisi tersebut secara langsung berkontribusi terhadap terwujudnya keharmonisan daerah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pencapaian sasaran *Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan* menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pencapaian tujuan *Meningkatkan Keharmonisan Daerah*.



Grafik 2.29 Target Indeks Pelestarian Kebudayaan Tahun 2025-2029 Dan Realisasi Pada Tahun 2025 Kabupaten Bantul (Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2026)

Berdasarkan hasil pengukuran tahun berjalan, nilai Indeks Pelestarian Kebudayaan Daerah menunjukkan capaian tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dengan dukungan perangkat daerah terkait dan pemerintah kalurahan/desa, telah berjalan efektif.

Capaian indeks didukung beberapa faktor, antara lain:

1. pelaksanaan inventarisasi dan perlindungan cagar budaya/warisan budaya benda yang ditetapkan menjadi cagar budaya;
2. pembinaan terhadap pelaku dan lembaga kebudayaan;
3. kebijakan pelestarian budaya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
4. meningkatnya aktivitas pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah di infrastruktur budaya di wilayah Kabupaten Bantul.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi capaian sasaran, antara lain:

1. keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran;
2. belum meratanya pelaksanaan pelestarian kebudayaan di seluruh wilayah; dan
3. belum optimalnya pendataan dan dokumentasi kebudayaan daerah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada



periode selanjutnya.

Strategi yang akan dilaksanakan:

1. Mengajarkan kebudayaan itu pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap dapat bertahan.
2. Mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain.
3. mempraktikkan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat dan berbahasa.

Secara umum, capaian sasaran *Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan* menunjukkan arah yang **positif** dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus melakukan penguatan kebijakan, program, dan sinergi lintas sektor guna meningkatkan nilai **Indeks Pelestarian Kebudayaan** secara berkelanjutan.

2) Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah

Tabel 2.59 Capaian dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2025.

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD (2030)	%Capaian terhadap Akhir RPJMD (2030)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
a)	<i>Crime Rate</i>	Per penduduk	73	148	73*	150,68	138,5	147,29

Sumber : BPS, 2026, Data diolah; *) angka 2024; **) angka proyeksi

a) *Crime Rate*

Indikator *Crime Rate* pada tahun 2025 menetapkan target sebesar 148% terealisasi sebesar 73% tercapai sebesar 150,68% dengan kinerja Tinggi, capaian ini adalah angka sementara yaitu capaian tahun 2024. Realisasi tersebut menyumbang capaian sebesar 147,29% dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD (2030) yaitu 138,5%.

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan

masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Pemerintah daerah berupaya mewujudkan tujuan daerah “Meningkatkan Keharmonisan Daerah” dan sasaran daerah “Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah ”

dengan indikator kinerja utama Bupati Bantul “*Crime Rate*”. *Crime Rate* dapat diartikan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur banyaknya kejahatan yang dialami oleh penduduk di suatu wilayah. Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk pada suatu waktu tertentu. Semakin besar angka kejahatan menunjukkan semakin banyaknya kejahatan yang terjadi dibandingkan dengan jumlah penduduk sekaligus merupakan salah satu indikasi semakin tidak amannya suatu wilayah. Adapun formula untuk mengukur indikator tersebut sebagai berikut:

Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

Crime Rate di Kabupaten Bantul tercatat di tahun 2025 berdasarkan realisasi tahun 2024 sebesar 73 didapat dari perhitungan jumlah peristiwa kejahatan pada tahun 2024 yang diperoleh dari jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat “*dark number*”. Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun 2024 tersebut kemudian dibagi jumlah penduduk dikali 100.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa



scara rata-rata terjadi sebanyak 73 kasus kejahatan pada setiap 100.000 penduduk. Angka ini menurun dari tahun 2023 yang tercatat 293. Semakin menurunnya angka *crime rate* menunjukkan bahwa risiko menjadi korban kejahatan menurun. Namun tetap diperlukan koordinasi antar stakeholder dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah salah satu *stakeholder* yang terkait adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Satpol PP tahun 2025 antara lain adalah:

1. Sinergitas koordinasi dengan *stakeholder* terkait termasuk aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan TNI serta mitra kerja).
2. Penguatan kapasitas SDM Satpol PP memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi, profesionalitas, dan produktifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak perda dan perkara.
3. Animo masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Faktor penghambat keberhasilan antara lain adalah:

1. Masih perlunya optimalisasi koordinasi dengan OPD teknis, terkait jenis penegakan perda yang fungsi tindakan preventif yang diampu oleh OPD teknis (pengampu perda).
2. Regulasi yang ada belum bisa mengakomodir semua pelanggaran yang terjadi di Masyarakat.
3. Keterbatasan infrastruktur pendukung penegakan perda dan perkara.

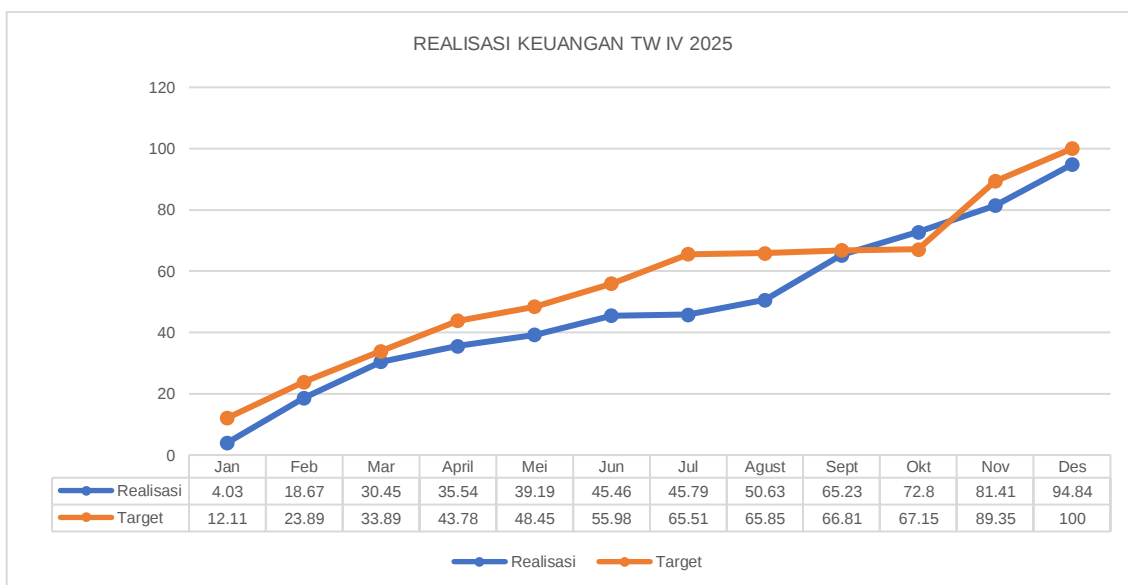
Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU persentase cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat melalui media massa, media sosial maupun pertemuan langsung.
2. Meningkatkan kolaborasi yang baik antar mitra kerja agar penegakan hukum berjalan efektif dan sinergis.
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan CCTV yang terpasang di kawasan rawan pelanggaran perda/perkada.

4. Melakukan patroli pengamanan sebagai upaya pengawasan yang efektif dalam mencegah gangguan trantibum.
5. Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Perda.
6. Mengoptimalkan peran linmas Kalurahan sebagai perangkat deteksi dini ketenteraman dan ketertiban di daerah.
7. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas.
8. Mengaktifkan peran Jagawarga.

2.3.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

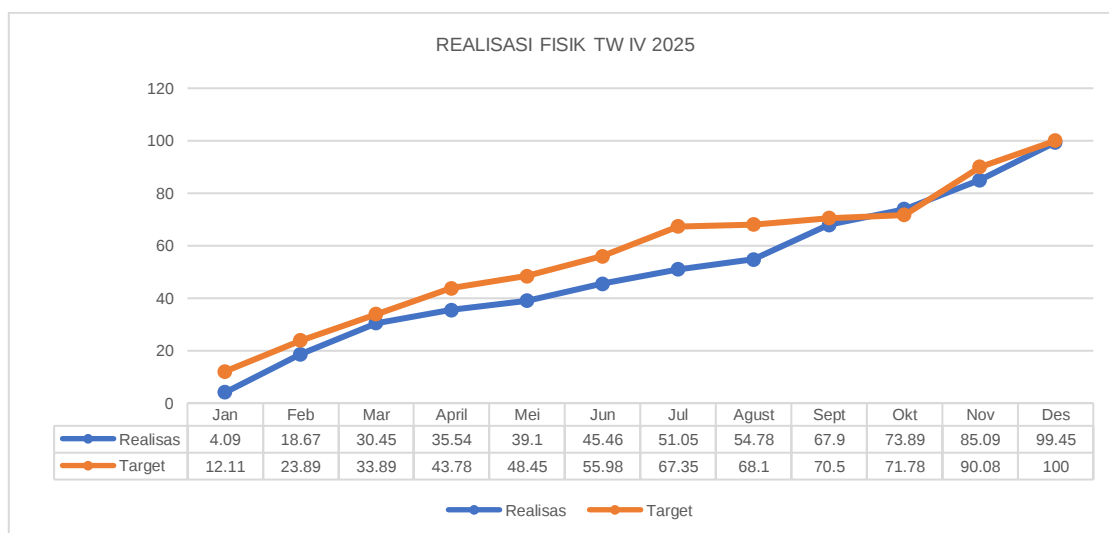
Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kabupaten Bantul telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif di mana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di tahun 2025 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 135 program, 289 kegiatan dan 871 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp2.636.904.600.204,41 terealisasi Rp2.501.013.620.265,84 atau sebesar 94,84%. Sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dalam data capaian keuangan dan fisik setiap bulannya. Prosentase target dan realisasi perbulan tersaji pada Grafik 2.30. sedangkan prosentase target dan realisasi fisik tersaji pada Grafik 2.31, sedangkan Tabel 2.60. menyajikan Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.



Grafik 2.30 Target dan realisasi Keuangan per Bulan terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Sumber: Bappeda Kab. Bantul, 2026 (diolah); Ket: LRA cut off 23 Januari 2026)

Berdasarkan data pada Grafik 2.30 di atas menunjukkan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun sebesar 94,84% dari target yang di tetapkan sehingga terjadi deviasi keuangan sebesar 5,16%. Secara umum penyebab terjadinya deviasi adalah adanya sisa gaji tunjangan, efisiensi anggaran, dan sisa lelang/pengadaan barang jasa.

Sedangkan untuk realisasi fisik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.31 Target dan realisasi Fisik per Bulan terhadap Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Sumber: Bappeda Ka. Bantul, 2026 (diolah); Ket: LRA cut off 23 Januari 2026)

Berdasarkan data pada Grafik 2.31 menunjukkan realisasi fisik sampai dengan akhir tahun sebesar 99,45% dari target yang ditetapkan sehingga terjadi deviasi fisik sebesar 0,55%. Secara umum penyebab terjadinya deviasi adalah:

1. Pensertifikatan tanah Pemerintah Kabupaten Bantul belum selesai karena berkas pendaftaran tanah/pendukung perolehan tanah tidak lengkap.
2. Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk implant dari sasaran akseptor 1.200 orang baru tercapai 1.053 orang.
3. Pendaftaran Tanah Kalurahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Pendaftaran Sertipikat Tanah Kasultanan tidak terealisasi sesuai target karena proses pengukuran untuk sisa target yang belum selesai baru dapat dilaksanakan di awal tahun 2026.
4. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab./Kota belum terealisasi karena Bencana skala sedang terjadi di akhir tahun 2025, dokumen akan disusun pada tahun berikutnya (bencana longsor di Srikeminut).

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistemik dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena yang dapat mendorong interaksi antar arenasebagai kunci reformasi birokrasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan di dalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program di tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada Tabel 2.60.



Tabel 2.60. Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	1. Harapan Lama Sekolah	1 Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Rata-rata Lama Sekolah	2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		3. Usia Harapan Hidup	3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
		4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	5 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			6 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			7 Program Pembinaan Perpustakaan
			8 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			9 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			10 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			11 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			12 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			14 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***

SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			15 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			16 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			17 Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			18 Program Perlindungan Perempuan
			19 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
			20 Program Perlindungan Khusus Anak
			21 Program Pengendalian Penduduk
			22 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			23 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
2.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	1. Nilai AKIP 2. Opini BPK 3. Indeks Pencegahan Korupsi Daerah 4. Indeks Pelayanan Publik	1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			3 Program Riset dan Inovasi Daerah
			4 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			5 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			6 Program Pengelolaan Arsip
			7 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			8 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			9 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			10 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			11 Program Kepegawaian Daerah
			12 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			14 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			15 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			16 Program Perekonomian dan Pembangunan
			17 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			18 Program Penyelenggaraan Pengawasan
			19 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
			20 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			21 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			22 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			23 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			24 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			25 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			26 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			27 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			28 Program Informasi dan Komunikasi Publik
			29 Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
			30 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			31 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			32 Program Pendaftaran Penduduk
			33 Program Pencatatan Sipil
			34 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	1. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2. Rasio PDRB Industri Pengolahan 3. PDRB Sektor Pertanian ADHB	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			2 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			4 Program Pemasaran Pariwisata
			5 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***



SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			7 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			8 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			9 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			10 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			11 Program Penanganan Kerawanan Pangan
			12 Program Pengawasan Keamanan Pangan
			13 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			14 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			15 Program Perizinan Usaha Pertanian
			16 Program Penyuluhan Pertanian
			17 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan kebudayaan***
			18 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			19 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			20 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			21 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			22 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			23 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			24 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			25 Program Pengendalian Izin Usaha Industri
			26 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			27 Program Pengembangan Ekspor
			28 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
			29 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			30 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			31 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
			32 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
4.	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	1. Pembentukan Modal Tetap Bruto 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Rasio Kewirausahaan Daerah 4. Pengeluaran Per Kapita	1 Program Pelayanan Penanaman Modal
			2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			3 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			5 Program Promosi Penanaman Modal



SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
		Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			7 Program Penempatan Tenaga Kerja
			8 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			9 Program Hubungan Industrial
			10 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			11 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			12 Program Pengembangan UMKM
			13 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			14 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program
			15 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			16 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
			17 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			18 Program Penilaian Kesehatan KSP/SP
			19 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
5.	Menurunnya kedalaman kemiskinan	1. Indeks Kedalaman Kemiskinan	1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			2 Program Pemberdayaan Sosial
			3 Program Rehabilitasi Sosial
			4 Program Penanganan Bencana

SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			6 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			7 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			8 Program Kawasan Permukiman
			9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah
			10 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			11 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
			12 Program Pengembangan Perumahan
			13 Program Peningkatan Kerjasama Desa
			14 Program Administrasi Pemerintahan Desa
			15 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			16 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan***
			17 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***
6.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Indeks kualitas lingkungan hidup 2. Indeks Risiko Bencana (IRB)	1 Program Pengelolaan Persampahan
			2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			4 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			5 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			6 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			7 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			8 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			10 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			11 Program Penanggulangan Bencana
			12 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
			13 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
7.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1 Program Penyelenggaraan Jalan
			2 Program Penataan Bangunan Gedung
			3 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			5 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
			6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			7 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			8 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			9 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			10 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			11 Program Penatagunaan Tanah
			12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			13 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			14 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			15 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			16 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan***
8.	Meningkatnya pelestarian budaya	1. Indeks Pelestarian Kebudayaan	1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
9.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban	1. <i>Crime Rate</i>	1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



SASARAN DAERAH		IKU	PROGRAM
	dan Kenyamanan Daerah		2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan***
			3 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang***
			4 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			5 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			6 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			7 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Sumber: RKPD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun 2025, Bappeda, Bagian Organisasi Setda; data diolah

2.3.8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2025 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp2.488.884.349.506,96 dan belanja sebesar Rp 2.636.904.600.204,41 sehingga terdapat devisit anggaran sebesar Rp 148.020.250.697,45 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2025 untuk pendapatan sebesar Rp 2.512.298.437.218,89 realisasi belanja Rp 2.501.013.620.265,84 terdapat devisit pembiayaan Rp 11.284.816.953,05. Sehingga terdapat Silpa Rp 160.971.011.435,50. Rencana pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul tahun 2025 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut.

Tabel 2.61 Tabel. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	% 2025
A	PENDAPATAN DAERAH	2.488.884.349.506,96	2.512.298.437.218,89	100,94
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	773.220.778.377,96	766.131.199.608,89	99,08
	Pajak Daerah	409.430.783.300,00	414.970.679.632,50	101,35
	Retribusi Daerah	330.331.530.552,00	312.457.635.841,00	94,58
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.199.694.868,00	20.838.377.004,15	103,16
	Lain-lain PAD yang Sah	13.258.769.657,96	17.864.507.131,24	134,73
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	773.220.778.377,96	766.131.199.608,89	99,08
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.715.663.571.129,00	1.745.825.974.633,00	101,75
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.570.277.248.668,00	1.589.798.154.936,00	101,24
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.386.322.461,00	156.027.819.697,00	107,31
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	145.386.322.461,00	156.027.819.697,00	107,31
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.715.663.571.129,00	1.745.825.974.633,00	101,75
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	341.262.977,00	0,00
	Pendapatan Hibah	0.00	340.350.528,00	0,00



No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	% 2025
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	912.449,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	341.262.977,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.488.884.349.506,96	2.512.298.437.218,89	100,94
C	BELANJA DAERAH	2.636.904.600.204,41	2.501.013.620.265,84	94,84
	BELANJA OPERASI	2.054.869.567.977,38	1.953.446.228.782,04	95,06
	Belanja Pegawai	1.056.701.685.446,47	1.000.755.806.665,00	94,70
	Belanja Barang dan Jasa	900.300.140.867,91	856.399.680.925,04	95,12
	Belanja Hibah	91.882.816.349,00	91.182.341.192,00	99,23
	Belanja Bantuan Sosial	5.984.925.314,00	5.108.400.000,00	85,35
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.054.869.567.977,38	1.953.446.228.782,04	95,06
	BELANJA MODAL	209.530.341.302,52	195.412.733.322,80	93,26
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.617.407.546,52	60.251.382.383,00	94,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.825.933.733,00	13.492.099.185,00	91,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.073.263.503,00	111.660.165.894,80	92,22
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.449.736.520,00	9.447.873.360,00	99,98
	Belanja Modal Aset Lainnya	564.000.000,00	561.212.500,00	99,50
	JUMLAH BELANJA MODAL	209.530.341.302,52	195.412.733.322,80	93,26
	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.360.421.425,51	3.525.110.891,00	31,02
	Belanja Tidak Terduga	11.360.421.425,51	3.525.110.891,00	31,02
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	11.360.421.425,51	3.525.110.891,00	31,02
	BELANJA TRANSFER	361.144.269.499,00	348.629.547.270,00	96,53
	Belanja Bagi Hasil	40.548.857.469,00	40.548.857.469,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan	320.595.412.030,00	308.080.689.801,00	96,09
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	361.144.269.499,00	348.629.547.270,00	96,53
	JUMLAH BELANJA	2.636.904.600.204,41	2.501.013.620.265,84	94,84

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	% 2025
	SURPLUS/DEFISIT	(148.020.250.697,45)	11.284.816.953,05	(7,62)
D	PEMBIAYAAN DAERAH	148.020.250.697,45	149.686.194.482,45	101,12
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.720.250.697,45	175.061.744.482,45	100,19
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	173.920.250.697,45	173.920.250.697,45	100,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	1.141.493.785,00	142,68
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.720.250.697,45	175.061.744.482,45	100,19
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.700.000.000,00	25.375.550.000,00	95,03
	Penyertaan Modal Daerah	26.700.000.000,00	25.375.550.000,00	95,03
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.700.000.000,00	25.375.550.000,00	95,03
	PEMBIAYAAN NETTO	148.020.250.697,45	149.686.194.482,45	101,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	160.971.011.435,50	0,00

Sumber: LRA Unaudited, BPKPAD Kab. Bantul, 2026; data diolah

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.636.904.600.204,41 yang digunakan untuk membiayai Belanja.



Tabel 2.62 Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	(%) Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,70	15,91	101,34	1.431.233.866.920,03	1.379.428.327.388,95	96,38%
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,88	10,11	102,33			
		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86	75,04	100,24			
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,50-13,50	16,5	93,55			
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,125	0,127	98,4			
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	Angka	82,73	82,80	100,08	706.274.465.257,38	650.596.495.428,00	92,12%
		Opini BPK	Opini	1 (WTP)	1 (WTP)	100,00			
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,68	91	97,14			
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47-4,51	4,68	104,70			
3	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,77-12,86	13,32	104,31	88.985.696.389,00	85.765.259.357,00	96,38%

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	(%) Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,10-14,77	14,10	100,28			
		PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	5.107,17 – 5.152,41	5.393,17	105,60			
4	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,75-26,82	26,72	99,89	60.679.286.332,00	58.872.849.625,00	97,02%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08-3,58	3,57	100			
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	4,00-4,50	4,72	118			
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	17.078	17.240	100,95			
5	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,16	1,28	140,74	83.958.166.757,00	78.820.546.166,89	93,88%
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,07	71,17	107,72	56.878.545.497,20	53.366.663.309,20	93,83%
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	123,02	96,02	121,95			

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Kinerja			Anggaran		
				Target	Realisasi	(%) Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	59,08	69,2	117,13	168.731.287.698,80	155651878886,80	92,25%
8	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	89,26	71,82	80,46	15.990.478.517,00	15.150.920.333,00	94,75%
9	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah	Crime Rate	Per 100.000 penduduk	148	73	150,68	24.172.806.836,00	23.360.679.771,00	96,64%
TOTAL BELANJA							2.636.904.600.204,41	2.501.013.620.265,84	94,84%

Sumber: Bagian Organisasi, BPKPAD Kab. Bantul, 2026; Data diolah



Sisa belanja pada tahun 2025 sebesar 5,16% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran diperoleh dari sisa anggaran dikurangi anggaran kegiatan yang tidak terlaksana atau tidak tercapai outputnya. Akan tetapi pada tahun 2025 semua output sub kegiatan tercapai sehingga efisiensi tahun 2025 sebesar Rp135.890.979.938,57 atau 5,16%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5,16%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan pada sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional sebesar 7,88% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan pada sasaran Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk sebesar 2,98%.

Tabel 2.63 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target	Realisasi	Rp	%
1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	1.431.233.866.920,03	1.379.428.327.388,95	51.805.539.531,08	3,62%
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	706.274.465.257,38	650.596.495.428,00	55.677.969.829,38	7,88%
3	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	88.985.696.389,00	85.765.259.357,00	3.220.437.032,00	3,62%
4	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga	60.679.286.332,00	58.872.849.625,00	1.806.436.707,00	2,98%

No	Sasaran	Anggaran (Rp)		Efisiensi Anggaran	
		Target	Realisasi	Rp	%
	Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk				
5	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	83.958.166.757,00	78.820.546.166,89	5.137.620.590,11	6,12%
6	Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	56.878.545.497,20	53.366.663.309,20	3.511.882.188,00	6,17%
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastrukturu	168.731.287.698,80	155.651.878.886,80	13.079.408.812,00	7,75%
8	Meningkatnya Pelestarian Budaya	15.990.478.517,00	15.150.920.333,00	839.558.184,00	5,25%
9	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Daerah	24.172.806.836,00	23.360.679.771,00	812.127.065,00	3,36%
Total Belanja		2.636.904.600.204,41	2.501.013.620.265,84	135.890.979.938,57	5,16%

Sumber: Bagian Organisasi, BPKPAD Kab. Bantul, 2026; Data diolah



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

**LPPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Pusat dapat memberikan Tugas Pembantuan (*medebewind*) kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di luar enam urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah. Pemerintah provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/000.7.2.3/02775/RIDA/2025 tanggal 30 Desember 2025, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Provinsi. Dengan demikian tidak terdapat Pelaksanaan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Provinsi pada tahun 2025.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55711
Telepon (0274) 367533; Faksimile (0274) 367795
Laman <http://www.bappeda.bantulkab.go.id>, Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR B/000.7.2.3/02775/RI/DA/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARI BUDI NUGROHO, ST,M.Sc
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
NIP : 197103231999031002

dengan ini menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 30 Desember 2025
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



ARI BUDI NUGROHO, ST,M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSN.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**LPPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
		2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)
2	Pendidikan Dasar		
	SD	1	Kemampuan literasi
		2	Kemampuan numerasi
		3	Indeks iklim keamanan
		4	Indeks iklim kebhinekaan
		5	Indeks iklim inklusivitas
	SMP	1	Kemampuan literasi
		2	Kemampuan numerasi
		3	Indeks iklim keamanan
		4	Indeks iklim kebhinekaan
		5	Indeks iklim inklusivitas
3	Pendidikan Kesenjangan	1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.1.2. Target Pencapaian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target pencapaian SPM Pendidikan tahun 2025 ditentukan berdasarkan pada kemampuan daerah, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; serta *Education Management Information System* (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Target selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 594 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025. Target pencapaian SPM Pendidikan tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	23.620
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	82,01
	2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	83,81
2.	Pendidikan Dasar		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	108.847
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR		



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	(20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	SD		
	1 Kemampuan literasi	Nilai	74,44
	2 Kemampuan numerasi	Nilai	63,06
	3 Indeks iklim keamanan	Nilai	78,68
	4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,37
	5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,99
	SMP		
	1 Kemampuan literasi	Nilai	87,25
	2 Kemampuan numerasi	Nilai	74,32
	3 Indeks iklim keamanan	Nilai	73,43
	4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,01
	5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,68
3.	Pendidikan Kesetaraan		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3.208
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	100

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100,00 %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					100,00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persen tase	100	100,77	+0,77	100,77%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	23.620	23.620	0,00	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	82,01	82,01	0,00	100,00 %
	2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	83,81	83,81	0,00	100,00 %
2.	Pendidikan Dasar					100,00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persen tase	100	101,69	+1.69	101,69 %
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persen tase	100	100,07	+0.07	100,07 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Harus Dilayani	Terlayani		
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	108.847	108.847	0,00	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	SD					100,00 %
	1 Kemampuan literasi	Nilai	74,44	89,12	+14,68	100,00 %
	2 Kemampuan numerasi	Nilai	63,06	86,84	+23,78	100,00 %
	3 Indeks iklim keamanan	Nilai	78,68	78,68	0,00	100,00 %
	4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	76,37	76,37	0,00	100,00 %
	5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,99	59,99	0,00	100,00 %
	SMP					100,00 %
	1 Kemampuan literasi	Nilai	87,25	94,23	+6,98	100,00 %
	2 Kemampuan numerasi	Nilai	74,32	91,70	+17,38	100,00 %
	3 Indeks iklim keamanan	Nilai	73,43	73,43	0,00	100,00 %
	4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,01	73,01	0,00	100,00 %
	5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,68	61,68	0,00	100,00 %
3.	Pendidikan Kesetaraan					100,00 %
			Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	100	99,91	0,09	99,91%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	3.208	3.208	0,00	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	1 Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	100	100	0,00	100,00 %

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangka.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Pendidikan pada pencapaian penerima semua jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Pendidikan tercapai 100,00% dengan kategori Tuntas Paripurna.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Data anggaran yang dilaporkan dalam e-SPM untuk semua Bidang Urusan SPM, pada awal tahun pelaporan (Triwulan 1) dan pada akhir tahun pelaporan (Triwulan 4) tentu mengalami perubahan, seiring dengan dinamika perubahan APBD beserta penjabarannya selama satu tahun anggaran. Data anggaran yang dilaporkan pada Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Alokasi anggaran penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Alokasi Anggaran SPM Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PD (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)	801.614.945.818	30,44 %		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	445.122.392.920		16,90 %	55,53 %
	APBD	445.122.392.920			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	133.083.870.120			
	C. APBD DAK FISIK	1.228.431.000			
	D. APBD DAK NON FISIK	310.810.091.800			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Pendidikan Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.5. berikut.

Tabel 4.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Pendidikan Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
SPM PENDIDIKAN			445.122.392.920	440.353.291.280	98,93 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1.386.685.500	1.357.905.490	97,92 %
	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *)	Ruang	0	0	0,00 %
	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	734.107.000	718.507.000	97,87 %
	3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	250.000	250.000	100,00%
	4 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	381.488.500	376.068.500	98,58 %
	5 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	52.225.000	49.805.260	95,37 %
	6 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) *)	Unit	0	0	0,00 %
	7 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	48.290.000	47.972.480	99,34 %
	Kekhususan PAUD				
	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD *)	Unit	0	0	0,00 %
	2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD*)	Paket	0	0	0,00 %
	3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	73.125.000	69.277.500	94,74 %
	4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	97.200.000	96.024.750	98,79 %
	5 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	6 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	7 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan*)	Dokumen	0	0	0,00 %
	8 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*)	Komunitas	0	0	0,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		102.990.704.644	102.532.933.283	99,56 %
	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) *)	Unit	0	0	0,00 %
	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik	101.242.312.244	100.967.797.269	99,73 %
	3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	789.768.500	736.057.586	93,20 %
	4 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	58.250.000	57.915.536	99,43 %
	5 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	578.211.400	471.548.892	81,55 %
	6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	194.200.000	187.304.000	96,45 %
	Literasi				
	1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik*)	Paket	0	0	0,00 %
	2 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	6.225.000	6.225.000	100,00 %
	3 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*)	Orang	0	0	0,00 %
	4 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	53.500.000	49.860.000	93,20 %
	5 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	6 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	7 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*)	Komunitas	0	0	0,00 %
	8 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik*)	Buku	0	0	0,00 %
	9 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan		SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	Numerasi					
	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama*)	Orang	0	0	0,00 %
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama*)	Orang	0	0	0,00 %
	3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	5	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*)	Komunitas	0	0	0,00 %
	6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik*)	Buku	0	0	0,00 %
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik*)	Paket	0	0	0,00 %
	9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	55.875.000	44.062.500	78,86 %
	Keamanan					
	1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	3.500.000	3.500.000	100,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*)	Kegiatan	0	0	0,00 %
	Kebhinekaan				
	1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	8.862.500	8.862.500	97,74 %
	Inklusifitas				
	1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*)	Kegiatan	0	0	0,00 %
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		59.488.449.873	59.430.839.870	99,90 %
	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) *)	Unit	0	0	00,00 %
	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	398.920.500	392.312.500	98,34 %
	3 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	58.176.103.873	58.176.103.873	100,00 %
	4 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	549.138.000	530.316.000	96,57 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan		SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.050.000	0	0,00 %
	6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.250.000	687.500	55,00 %
	Literasi					
	1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	222.625.000	210.237.497	94,44 %
	2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*)	Orang	0	0	0,00 %
	3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama *)	Orang	0	0	0,00 %
	4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0,00 %
	5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*)	Komunitas	0	0	0,00 %
	8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik*)	Buku	0	0	0,00 %
	9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.375.000	1.375.000	100,00 %
	Numerasi					
	1	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.500.000	1.500.000	100,00 %
	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama*)	Orang	0	0	0,00 %
	3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	4 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	9.125.000	9.125.000	100,00 %
	5 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan*)	Komunitas	0	0	0,00 %
	6 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	7 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik*)	Buku	0	0	0,00 %
	8 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik*)	Paket	0	0	0,00 %
	9 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	53.500.000	41.520.000	77,61 %
	Keamanan				
	1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	11.500.000	11.500.000	100,00 %
	Kebhinekaan				
	1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	6.362.500	56.162.500	90,06 %
	4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*)	Kegiatan	0	0	0,00 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	Inklusifitas				
	1 Pengembangan konten digital untuk pendidikan*)	Konten Digital	0	0	0,00 %
	2 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan*)	Orang	0	0	0,00 %
	3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*)	Satuan Pendidikan	0	0	0,00 %
	4 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi*)	Kegiatan	0	0	0,00 %
4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		245.830.457.414	241.832.606.798	98,37 %
	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	245.449.308.478	241.540.245.362	98,41 %
	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	381.148.936	292.361.436	76,71 %
5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah		0	0	0,00 %
	Literasi				
	1 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota*)		0	0	0,00 %
	Numerasi				
	1 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota*)		0	0	0,00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
1	Literasi				



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	1 Pengelolaan Dana BOP PAUD		23.572.814.616	23.539.095.350	99,86 %
	2 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		5.251.650.000	5.229.876.879	99,59 %
	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		318.844.873	314.157.485	98,53 %
	4 Pengadaan Perlengkapan PAUD		19.750.000	19.530.000	98,89 %
	5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		701.439.000	681.530.400	97,16 %
	6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD		413.987.000	410.563.099	99,17 %
	7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP		1.000.000	1.000.000	100,00 %
	8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP		1.250.000	750.000	60,00 %
	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP		3.125.000	2.650.000	84,80 %
	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP		320.040.000	311.761.400	97,41 %
	11 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		2.650.360.000	2.626.577.000	99,10 %
	12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		222.625.000	210.237.497	94,44 %
	13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP		724.630.000	678.784.388	93,67 %
	14 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SMP		113.850.000	109.025.000	95,76 %
	15 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		32.900.000	31.400.000	95,44 %
	16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		468.185.000	463.281.400	98,95 %
	17 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		250.000	250.000	100,00 %
	18 Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		250.000	250.000	100,00 %
	19 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		250.000	250.000	100,00 %
	20 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		250.000	250.000	100,00 %
	21 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		250.000	250.000	100,00 %
	22 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non		254.500.000	254.500.000	100,00 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	Formal/Kesetaraan				
23	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kesetaraan		351.145.000	310.285.941	88,36 %
24	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Kesetaraan		250.000	250.000	100,00 %
25	Pengadaan Mebel Sekolah SD		2.500.000	2.500.000	100,00 %
2	Numerasi		0	0	0,00 %
3	Inklusivitas		0	0	0,00 %
4	Kebhinekaan		0	0	0,00 %
5	Keamanan		0	0	0,00 %

*) Subkegiatan ditutup pada aplikasi e-SPM karena menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2025

	PNS	PPPK	PPPK PW	NON ASN	Tingkat Pendidikan							Sertifikasi
					SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3	
Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Sekretaris Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretariat	39	8	20	0	0		49	5	13	0	0	0
Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal	8	0	3	0	0	0	6	1	3	1	0	0
Bidang Sekolah Dasar	10	0	2	0	0	0	4	0	7	1	0	0
Bidang Sekolah Menengah Pertama	10	1	2	0	0	0	4	0	6	3	0	0
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10	0	1	0	0	0	4	1	5	1	0	0
BIDANG PORA	4	1	30	0	0	0	33	0	1	1	0	0



	PNS	PPPK	PPPK PW	NON ASN	Tingkat Pendidikan							Sertifikasi
					SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3	
SKB	7	0	2	0	0	0	2	1	5	1	0	0
Penilik	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
Pengawas TK	6	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0
Pengawas SD	28	0	0	0	0	0	0	0	6	22	0	0
Pengawas SMP	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Pendidik PAUD	185	0	0	4.032	44	64	1.563	273	2.231	42	0	1.015
Tenaga Kependidikan PAUD	8	0	9	515	59	87	317	14	55	0	0	0
Pendidik Pendidikan Non Formal	0	0	0	517	0	0	0	0	468	42	7	116
Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal	0	0	0	119	2	5	73	39		0	0	0
Pendidik SD	1.628	1.349	365	1.299	17	2	49	35	4.346	192	0	3.754
Tenaga Kependidikan SD	29	11	508	448	37	76	473	129	281	0	0	0
Pendidik SMP	693	487	286	631	3	1	15	5	1.827	246	0	1.551
Tenaga Kependidikan SMP	38	12	207	238	16	43	268	43	122	3	0	0
Jumlah	2.718	1.869	1.435	7.799	178	278	2.860	546	9.380	571	8	6.436
Total	13.821 (Tiga belas ribu delapan ratus dua puluh satu) orang											

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2026)

4.1.5. Dukungan Personil

SPM Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Pendidikan ditunjukkan dalam Tabel 4.6.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Pendidikan pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.7 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025

Permasalahan	Solusi
Dalam pendataan menemui kendala, karena data isian yang diperlukan tidak bisa diperoleh di tingkat kabupaten. Data merupakan data dari Kemendikdasmen, Kabupaten/Kota hanya diberikan data yang sudah jadi bukan data mentah melalui situs Rapor Pendidikan.	Tetap menunggu rilis data Rapor Pendidikan.
Data capaian mutu layanan SPM yang bersumber dari rapor Pendidikan diperoleh setiap tahun.	Mengisi capaian per triwulan di aplikasi e-SPM disesuaikan dengan target.
Kesulitan dalam pengisian rincian anggaran literasi dan numerasi dalam aplikasi e-SPM karena harus dirinci/dipecah, sementara anggaran literasi dan numerasi pelaksanaannya menjadi satu dalam satu subkegiatan.	Mengisikan pada salah satu komponen saja yaitu pada anggaran literasi.
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan Tahun N-1 (Tahun 2024) sebesar 99,91 tidak dapat mencapai 100% (tidak masuk dalam perhitungan), karena terdapat 3 (tiga) anak putus sekolah karena mengikuti orang tua, dan secara data belum tercatat pada sekolah formal maupun serta belum terlacak pada sekolah nonformal. Adapun pada Tahun 2025, APS kesetaraan dapat mencapai 100%.	Memperkuat koordinasi lintas sektor serta percepatan pendataan dan penempatan kembali ke pendidikan formal atau nonformal agar capaian APS dapat dipertahankan 100%.

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul (2026), Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah



4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM kesehatan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)
		2 Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)
		3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Tes Kehamilan
		4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB
		5 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah
		6 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin
		7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining <i>triple</i> eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV
		8 Kartu ibu/rekam medis ibu
		9 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		10 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
		11 Gel USG
		12 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi
		13 Tenaga kesehatan : Perawat
		14 Tenaga kesehatan: Bidan
		15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
		16 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
		17 Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 Formulir Partograf
		2 Kartu ibu (rekam medis)
		3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		4 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
		5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi
		6 Tenaga kesehatan: Bidan
		7 Tenaga kesehatan : Perawat
		8 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
		9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)
		2 Vitamin K1 injeksi
		3 Salep/tetes mata antibiotic
		4 Formulir bayi baru lahir
		5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)
		6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
		7 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
		8 Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak
		9 Tenaga kesehatan: Bidan
		10 Tenaga kesehatan: Perawat
		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
		12 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
		13 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
		14 Kader Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
		2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)
		3 Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)
		4 Vitamin A Biru
		5 Vitamin A Merah
		6 Vaksin imunisasi dasar: BCG
		7 Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes
		8 Vaksin imunisasi dasar: IP√
		9 Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib
		10 Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella
		11 Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib
		12 Vaksin imunisasi lanjutan: Campak-Rubella
		13 Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)
		14 Peralatan Anafilaktik
		15 Formula Terapi Gizi Buruk
		16 Tenaga medis : Dokter
		17 Tenaga kesehatan: Bidan
		18 Tenaga kesehatan: Perawat
		19 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
		20 Guru PAUD
		21 Kader Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1 Form pencatatan/buku rapor kesehatanku
		2 Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan
		3 Kuesioner skrining Kesehatan
		4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
		remaja di dalam sekolah
		5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah
		6 Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah
		7 Alat Pemeriksaan Hb
		8 Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7
		9 Media promosi Kesehatan
		10 Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
		11 Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi
		12 Tenaga kesehatan: Bidan
		13 Tenaga kesehatan: Perawat
		14 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi
		15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
		16 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
		17 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru
		18 Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)
		2 Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)
		3 Alat : Tensimeter
		4 Alat : Glukometer
		5 Alat: Alat Pemeriksa Hb
		6 Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol
		7 Alat : KIT IVA Tes
		8 Strip dan Reagen pemeriksaan Hb
		9 Kit Ophthalmologi Komunitas
		10 Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)
		11 Alat Pelayanan KB
		a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
		b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan
		c. Vasectomi Set
		12 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
		13 Vaksin Tetanus Difteri (td)
		14 Tenaga medis : Dokter
		15 Tenaga kesehatan : Bidan
		16 Tenaga kesehatan : Perawat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
		17 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
		18 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
		19 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1 Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter 2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah 3 Alat pemeriksaan kolesterol 4 Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol 5 Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i> 6 Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya 7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 8 Tenaga medis : Dokter 9 Tenaga kesehatan : Bidan 10 Tenaga kesehatan : Perawat 11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 13 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 2 Obat Hipertensi 3 Tensimeter 4 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) 5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6 Tenaga medis : Dokter 7 Tenaga kesehatan : Bidan 8 Tenaga kesehatan : Perawat 9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi 10 Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku 11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1 Obat Diabetes Melitus 2 Fotometer atau Glukometer 3 BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet 4 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat



No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
		Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)
		5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
		6 Tenaga medis : Dokter
		7 Tenaga kesehatan : Bidan
		8 Tenaga kesehatan : Perawat
		9 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian
		10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat
		11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi
		12 Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	1 Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) 2 Penyediaan Psikofarmaka 3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi 4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan 5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 6 Tenaga kesehatan : Dokter 7 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa 8 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa 9 Tenaga profesional lainnya
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 2 Reagen Zn TB 3 Masker bedah dan Masker N95 4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering 5 Katrid tes cepat molekuler 6 Formulir pencatatan dan pelaporan 7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) 8 Tuberkulin 9 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru 10 Tenaga kesehatan : Perawat 11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian 12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat 13 Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 14 Tenaga kesehatan : Radiografer 15 Kader Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>)	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 2 Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Tes (RDT)</i> pertama 3 Bahan Medis Habis Pakai, <i>Handschoen</i> , Alkohol <i>Swab</i> , Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/vacutainer dan Jarum Sesuai 4 Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK 5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 6 Tenaga kesehatan : Bidan 7 Tenaga kesehatan : Perawat 8 Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 9 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan Masyarakat 10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.2.2. Target Pencapaian

Target pencapaian SPM kesehatan tahun 2025 ditentukan berdasarkan sasaran riil tahun 2025 yang dilayani oleh fasilitas kesehatan. Target pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	9.019
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	9.019
	2 Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.623.420
	3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Tes Kehamilan	Orang	9.019



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	9.019
	5 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	9.019
	6 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	9.019
	7 Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining <i>triple</i> eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	9.019
	8 Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9.019
	9 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.019
	10 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9.019
	11 Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	100
	12 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	30
	13 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	14 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	16 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	17 Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	9.019
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani
A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	9.019
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Formulir Partograf	Formulir	9.019
	2 Kartu ibu (rekam medis)	Paket	9.019
	3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.019
	4 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	75
	5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	30
	6 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	7 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	8 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	7.364
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin	7.364
	2 Vitamin K1 injeksi	Ampul	7.364
	3 Salep/tetes mata antibiotik	Orang	7.364
	4 Formulir bayi baru lahir	Formulir	7.364
	5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	7.364
	6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	7.364
	7 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27
	8 Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	27
	9 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	10 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	27
	13 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	14 Kader Kesehatan	Orang	27
4.	Pelayanan Kesehatan Balita		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	45.000
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	45.000
	2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	45.000
	3 Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	45.000



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	4 Vitamin A Biru	Kapsul	8.000
	5 Vitamin A Merah	Kapsul	37.000
	6 Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	45.000
	7 Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	45.000
	8 Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	45.000
	9 Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin	45.000
	10 Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	45.000
	11 Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib	Vaksin	45.000
	12 Vaksin imunisasi lanjutan: Campak-Rubella	Vaksin	45.000
	13 Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	45.000
	14 Peralatan Anafilaktik	Paket	27
	15 Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	27
	16 Tenaga medis : Dokter	Orang	27
	17 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	18 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	19 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	20 Guru PAUD	Orang	27
	21 Kader Kesehatan	Orang	27
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total yang Harus Dilayani
A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	121.607
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	121.607
	2 Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	27
	3 Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	121.607
	4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	27
	5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	27
	6 Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	1.074.216
	7 Alat Pemeriksaan Hb	Alat	27
	8 Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	6.817

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	9 Media promosi kesehatan	Paket	75
	10 Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	38.790
	11 Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	27
	12 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27
	13 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27
	14 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	27
	15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	16 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	17 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	27
	18 Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	27
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	268.848
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27
	2 Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	27
	3 Alat : Tensimeter	Unit	27
	4 Alat : Glukometer	Unit	27
	5 Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	27
	6 Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	27
	7 Alat : KIT IVA Tes	Unit	27
	8 Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	27
	9 Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27
	10 Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	27
	11 Alat Pelayanan KB	Unit	
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	27
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	27



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	c. Vasectomi Set	Unit	27
	12 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	27
	13 Vaksin Tetanus Difteri (td)	Orang	592
	14 Tenaga medis : Dokter	Orang	27
	15 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	16 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	17 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	18 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	19 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	107.711
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	27
	2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	27
	3 Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	27
	4 Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	107.711
	5 Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket	27
	6 Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	27
	7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27
	8 Tenaga medis : Dokter	Orang	27
	9 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	13 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi	Orang	27

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	tertentu		
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	13.450
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27
	2 Obat Hipertensi	Paket	13.450
	3 Tensimeter	Unit	27
	4 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	27
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27
	6 Tenaga medis : Dokter	Orang	27
	7 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	8 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	10 Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	5.100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Obat Diabetes Melitus	Paket	5.100
	2 Fotometer atau Glukometer	Unit	27
	3 BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam	Unit	61.200



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet		
	4 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	27
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27
	6 Tenaga medis : Dokter	Orang	27
	7 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	8 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27
	12 Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.601
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	27
	2 Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	2.601
	3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	2.601
	4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	27
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	27
	6 Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	27
	7 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	27
	8 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	27
	9 Tenaga profesional lainnya	Orang	27
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	11.620
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27
	2 Reagen Zn TB	Kit	387
	3 Masker bedah dan Masker N95	Paket	11.620
	4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	11.620
	5 Katrid tes cepat molekuler	Tes	11.620
	6 Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	27
	7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	27
	8 Tuberkulin	√ial	2.324
	9 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	27
	10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27
	13 Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27
	14 Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	27
	15 Kader Kesehatan	Orang	27
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi $\sqrt{\text{virus}}$ Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency $\sqrt{\text{virus}}$)		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	11.264
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output
	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27
	2 Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Tes (RDT)</i> pertama	Tes	11.264
	3 Bahan Medis Habis Pakai, <i>Handschoen</i> , Alkohol <i>Swab</i> , Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	11.264
	4 Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	27
	5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	27
	6 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27
	7 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27
	8 Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27
	10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	27

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM kesehatan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS UTAMA			98,39%
1)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					93,08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)	73,97%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	9.019	8.339	680	92,46%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			(20%)	19,11%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani/	

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Dipenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					95,56%
	1 Vaksin Tetanus Differi (Td)	Vaksin	9.019	8.339	680	92,46%
	2 Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1.623.420	1.501.020	122.400	92,46%
	3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Tes Kehamilan	Orang	9.019	8.339	680	92,46%
	4 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	9.019	8.339	680	92,46%
	5 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	9.019	8.339	680	92,46%
	6 Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	9.019	8.339	680	92,46%
	7 Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	9.019	8.339	680	92,46%
	8 Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	9.019	8.339	680	92,46%
	9 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.019	8.339	680	92,46%
	10 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	9.019	8.339	680	92,46%
	11 Gel USG	Botol	100	100	0	100,00%
	12 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	30	30	0	100,00%
	13 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	14 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%
	16 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	17 Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	9.019	9.019	0	100,00 %
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					99,95%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	79,96%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	9.019	8.465	554	93,86%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19,59%
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					97,95%
	1 Formulir Partograf	Formulir	9.019	8.465	554	93,86%
	2 Kartu ibu (rekam medis)	Paket	9.019	8.465	554	93,86%
	3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	9.019	8.465	554	93,86%
	4 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	75	75	0	100,00%
	5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	30	30	0	100,00%
	6 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	7 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99,28%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	79,35%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	7.364	7.304	60	99,19%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19,93%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					99,65%
	1 Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin	7.364	7.304	60	99,19%
	2 Vitamin K1 injeksi	Ampul	7.364	7.304	60	99,19%
	3 Salep/tetes mata antibiotik	Orang	7.364	7.304	60	99,19%
	4 Formulir bayi baru lahir	Formulir	7.364	7.304	60	99,19%
	5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	7.364	7.304	60	99,19%
	6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	7.364	7.304	60	99,19%
	7 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	27	27	0	100,00%

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	9 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	10 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	27	27	0	100,00%
	13 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	14 Kader Kesehatan	Orang	27	27	0	100,00%
4)	Pelayanan Kesehatan Balita					93,68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	74,93%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	45.000	42.147	2.853	93,66%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18,75%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					93,77%
	1 Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	45.000	42.147	2.853	93,66%
	2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	45.000	42.147	2.853	93,66%
	3 Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	45.000	42.147	2.853	93,66%
	4 Vitamin A Biru	Kapsul	8.000	3.108	4.892	38,85%
	5 Vitamin A Merah	Kapsul	37.000	40.697	+3.697	100,00%
	6 Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	7 Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	8 Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	9 Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	10 Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	11 Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	12 Vaksin imunisasi lanjutan: Campak-Rubella	Vaksin	45.000	42.147	2.853	93,66%
	13 Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	45.000	42.147	2.853	93,66%



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	14 Peralatan Anafilaktik	Paket	27	27	0	100,00%
	15 Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	27	27	0	100,00%
	16 Tenaga medis : Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	17 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	18 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	19 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	20 Guru PAUD	Orang	27	27	0	100,00%
	21 Kader Kesehatan	Orang	27	27	0	100,00%
5)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	121.607	121.607	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Form pencatatan/buku rapor kesehatan	Buku	121.607	121.607	0	100,00%
	2 Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	27	27	0	100,00%
	3 Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	121.607	121.607	0	100,00%
	4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	27	27	0	100,00%
	5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	27	27	0	100,00%
	6 Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	1.074.216	1.074.216	0	100,00%
	7 Alat Pemeriksaan Hb	Alat	27	27	0	100,00%
	8 Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	6.817	6.817	0	100,00%
	9 Media promosi kesehatan	Paket	75	75	0	100,00%
	10 Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	38.790	38.790	0	100,00%

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	11 Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	27	27	0	100,00%
	12 Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	13 Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	14 Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	15 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%
	16 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	17 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	27	27	0	100,00%
	18 Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	27	27	0	100,00%
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	268.848	268.848	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	2 Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	27	27	0	100,00%
	3 Alat : Tensimeter	Unit	27	27	0	100,00%
	4 Alat : Glukometer	Unit	27	27	0	100,00%
	5 Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	27	27	0	100,00%
	6 Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	27	27	0	100,00%
	7 Alat : KIT IVA Tes	Unit	27	27	0	100,00%
	8 Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	27	27	0	100,00%
	9 Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27	27	0	100,00%
	10 Kuesioner PUMA (Deteksi dini	Dokumen	27	27	0	100,00%



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)					
	11 Alat Pelayanan KB	Unit				100,00%
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	27	27	0	100,00%
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	27	27	0	100,00%
	c. Vasectomi Set	Unit	27	27	0	100,00%
	12 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	27	27	0	100,00%
	13 Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul/Vial	592	592	0	100,00%
	14 Tenaga medis : Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	15 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	16 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	17 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	18 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	19 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27	27	0	100,00%
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)		80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	107.711	107.711	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			(20%)		20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	27	27	0	100,00%
	2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	27	27	0	100,00%
	3 Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	27	27	0	100,00%
	4 Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah	Paket	107.711	107.711	0	100,00%

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	dan kolesterol, lancet, kapas alkohol					
	5 Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket	27	27	0	100,00%
	6 Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	27	27	0	100,00%
	7 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga medis : Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	9 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	13 Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	27	27	0	100,00%
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			(80%)	80,00%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	13.450	13.450	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			(20%)	20,00 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	2 Obat Hipertensi	Paket	13.450	13.450	0	100,00%
	3 Tensimeter	Unit	27	27	0	100,00%
	4 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	27	27	0	100,00%
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	6 Tenaga medis : Dokter	Orang	27	27	0	100,00%



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	7 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	10 Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27	27	0	100,00%
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	5.100	5.100	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Obat Diabetes Melitus	Paket	5.100	5.100	0	100,00%
	2 Fotometer atau Glukometer	Unit	27	27	0	100,00%
	3 BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	61.200	61.200	0	100,00%
	4 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	27	27	0	100,00%
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	6 Tenaga medis : Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	7 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	10 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	27	0	100,00%
	12 Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	27	0	100,00%
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2.601	2.601	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	27	27	0	100,00%
	2 Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	2.601	2.601	0	100,00%
	3 Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	2.601	2.601	0	100,00%
	4 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	27	27	0	100,00%
	5 Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	27	27	0	100,00%
	6 Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	27	27	0	100,00%
	7 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	27	27	0	100,00%
	9 Tenaga profesional lainnya	Orang	27	27	0	100,00%
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	



No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	11.620	14.350	+2.730	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	2 Reagen Zn TB	Kit	387	387	0	100,00%
	3 Masker bedah dan Masker N95	Paket	11.620	14.350	+2.730	100,00%
	4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	11.620	14.350	+2.730	100,00%
	5 Katrid tes cepat molekuler	Tes	11.620	14.350	+2.730	100,00%
	6 Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	27	27	0	100,00%
	7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	27	27	0	100,00%
	8 Tuberkulin	Vial	2.324	2.324	0	100,00%
	9 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	27	27	0	100,00%
	10 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	11 Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100,00%
	12 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	13 Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	27	0	100,00%
	14 Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	27	27	0	100,00%
	15 Kader Kesehatan	Orang	27	27	0	100,00%
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	11.264	12.472	+1.208	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00%

No	Indikator Kinerja /Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00%
	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100,00%
	2 Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Tes (RDT)</i> pertama	Tes	11.264	12.472	+1.208	100,00%
	3 Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol <i>Swab</i> , Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	11.264	12.472	+1.208	100,00%
	4 Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	27	27	0	100,00%
	5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	27	27	0	100,00%
	6 Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	27	27	0	100,00%
	7 Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	27	27	0	100,00%
	8 Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	27	27	0	100,00%
	9 Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27	27	0	100,00%
	10 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	27	27	0	100,00%

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Kesehatan belum dapat direalisasikan 100% secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Kesehatan tercapai 98,39% dengan kategori Tuntas Utama.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pelaksanaan penerapan SPM Kesehatan seoptimal mungkin. Sasaran riil setiap jenis layanan



SPM sejatinya telah terlayani, namun belum secara lengkap dan menyeluruh sesuai ketentuan standar teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sehingga tidak semua dapat dicatatkan sebagai capaian SPM. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya capaian SPM Kesehatan pada tahun 2025, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Terdapat 680 ibu hamil tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan ibu hamil tidak memeriksakan diri secara rutin sesuai standar Kemenkes. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan ibu hamil tidak menyadari jika dirinya hamil atau ibu hamil merasa tidak ada keluhan sehingga datang ke fasilitas kesehatan tidak sejak trimester awal kehamilan.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Terdapat 554 ibu bersalin tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan persalinan melewati hari perkiraan lahir yang semula di Desember 2025 menjadi mundur ke Januari 2026, serta terdapat kasus abortus, persalinan *premature*, *Intrauterine Fetal Death* (IUFD) sehingga tidak memenuhi K6, dan pindah domisili sehingga tidak tercatat sebagai persalinan di Kabupaten Bantul.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Terdapat 60 bayi baru lahir tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan tidak mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) karena adanya regulasi persalinan SC tidak bisa dilakukan IMD, adanya komplikasi persalinan pada ibu dan bayi sehingga tidak memungkinkan dilakukan IMD.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Terdapat 2.853 balita tidak dapat dicatatkan sebagai capaian SPM disebabkan balita tidak ditimbang sebanyak 8 kali selama setahun dan/atau tidak dinilai tumbuh kembangnya sebanyak dua kali dalam setahun.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Kesehatan Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Alokasi Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PD (Dinas Kesehatan)	295.322.153.462	11,21%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	10.015.892.650		0,38%	3,39%
	APBD	10.015.892.650			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	2.164.482.700			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	7.851.409.950			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Tabel 4.12 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Kesehatan Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
SPM KESEHATAN			10.015.892.650	9.730.066.345	97,15 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.825.495.000	2.818.178.608	99,74 %
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.440.087.500	1.436.050.000	99,72 %
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	22.450.000	22.450.000	100,00 %
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	11.010.000	11.010.000	100,00 %
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	21.317.500	21.317.500	100,00 %
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	604.717.500	601.917.500	99,54 %
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	9.270.000	9.270.000	100,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	314.337.500	313.861.508	99,85 %
	8 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	31.210.000	31.210.000	100,00 %
	9 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	16.750.000	16.750.000	100,00 %
	10 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	198.327.500	198.324.600	100,00 %
	11 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	140.412.500	140.412.500	100,00 %
	12 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	15.605.000	15.605.000	100,00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA		7.190.397.650	6.911.887.737	96,13 %
	1 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		7.190.397.650	6.911.887.737	96,13 %

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.2.5. Dukungan Personil

SPM Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Kesehatan ditunjukkan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2025

	PNS	PPPK	PPPK PW	Tingkat Pendidikan						
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3
Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretariat	6	2	0	0	0	0	1	4	3	0
Bidang Kesehatan Masyarakat	18	4	0	0	0	2	2	16	2	0
Bidang Penanggulangan Penyakit	14	7	3	0	0	3	5	13	3	0
Bidang Pelayanan Kesehatan	11	3	1	0	0	1	5	9	0	0
Bidang Sumber Daya Kesehatan	18	9	5	0	0	11	6	9	6	0
1. Puskesmas Srandakan	37	16	2	0	0	7	29	18	1	0
2. Puskesmas Sanden	39	20	5	1	1	6	34	20	2	0
3. Puskesmas Kretek	44	10	6	0	1	5	26	25	3	0
4. Puskesmas Pundong	30	32	1	0	1	8	39	13	2	0
5. Puskesmas Bambanglipuro	37	13	9	0	0	10	34	14	1	0
6. Puskesmas Pandak I	34	14	3	0	0	9	27	12	3	0
7. Puskesmas Pandak II	32	7	2	0	0	6	17	17	1	0
8. Puskesmas Bantul I	28	9	2	1	0	6	19	12	1	0
9. Puskesmas Bantul II	32	8	2	0	1	5	16	20	0	0
10. Puskesmas Jetis I	37	7	11	1	0	6	33	12	3	0
11. Puskesmas Jetis II	31	3	8	0	5	2	22	13	0	0
12. Puskesmas Imogiri I	43	17	2	0	1	6	44	11	0	0
13. Puskesmas Imogiri II	29	7	8	0	1	4	23	16	0	0
14. Puskesmas Dlingo I	32	11	7	0	1	5	31	12	1	0
15. Puskesmas Dlingo II	25	13	6	0	0	8	18	18	0	0
16. Puskesmas Pleret	40	16	6	0	1	10	29	21	1	0
17. Puskesmas Piyungan	38	12	12	0	0	9	31	22	0	0
18. Puskesmas Banguntapan I	35	9	0	0	0	8	20	16	0	0
19. Puskesmas Banguntapan II	37	11	1	1	2	1	28	16	1	0



	PNS	PPPK	PPPK PW	Tingkat Pendidikan						
				SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3
20. Puskesmas Banguntapan III	24	10	1	0	0	3	16	15	1	0
21. Puskesmas Sewon I	38	22	4	1	0	6	30	26	1	0
22. Puskesmas Sewon II	25	13	6	0	0	4	23	16	1	0
23. Puskesmas Kasihan I	31	21	4	1	1	6	33	13	2	0
24. Puskesmas Kasihan II	30	16	2	0	0	6	23	17	2	0
25. Puskesmas Pajangan	28	19	1	0	0	5	26	17	0	0
26. Puskesmas Sedayu I	37	14	2	0	0	6	29	17	1	0
27. Puskesmas Sedayu II	24	13	3	0	0	1	25	14	0	0
Jumlah	965	388	125	6	16	175	744	494	43	0
Total	1.478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) orang									

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2026)

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Kesehatan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.14 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2025

Permasalahan	Solusi
Kendala pada pengambilan data SPM di faskes non pemerintah.	Diupayakan koordinasi yang lebih baik dan terpadu.
Data capaian SPM Kesehatan membutuhkan proses validasi untuk menjadi data capaian yang valid sehingga penginputan pelaporan pada e-SPM baru bisa dilakukan setelah proses validasi selesai.	Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan supaya proses validasi dilakukan sesuai rencana dan target selesai validasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum aplikasi ditutup terpenuhi.
Keberlanjutan ketersediaan Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk pelayanan TB menjadi pekerjaan rumah karena hanya ada 1 (satu) penyedia. Adanya surat kemenkes Nomor PM.01.01/C.III/578/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Target Program TBC Tahun 2025 - 2030, target penemuan terduga TB Tahun 2025 untuk Kabupaten Bantul meningkat sebesar 2730 orang. Pemkab Bantul pada tahun 2025 berhasil memenuhi target Kemenkes tersebut, sehingga capaian SPM Pelayanan terduga TB melampaui target yang ditetapkan oleh Pemkab Bantul.	Pembiayaan capaian yang melebihi target ini tidak mempengaruhi penambahan anggaran/ pembiayaan pada TA 2025 karena mutu layanan dapat menggunakan <i>buffer stock</i> tahun sebelumnya. Perlu memperkuat keberlanjutan ketersediaan Tes Cepat Molekuler (TCM) dengan melakukan koordinasi intensif bersama penyedia tunggal, mengelola <i>buffer stock</i> dari tahun sebelumnya secara strategis, serta mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan alat di seluruh fasilitas kesehatan pelayanan TB, sehingga target penemuan terduga TB yang meningkat sesuai surat Kemenkes dapat tercapai tanpa menambah anggaran, sekaligus menjaga mutu layanan dan kontinuitas pelayanan bagi masyarakat.
Adanya kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk kegiatan SPM dilakukan pada rekening 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan.	Penyesuaian mekanisme perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan efisiensi kegiatan yang beralih dari luring ke daring sehingga anggaran untuk belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas dan ketersediaan layanan SPM bagi penerima layanan



Permasalahan	Solusi
Adanya kebijakan Cek Kesehatan Gratis (CKG), penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) banyak ditemukan, sehingga pemenuhan obat Hipertensi dan DM menjadi pekerjaan rumah dalam hal ketersediaan anggaran.	Pengajuan kepada pimpinan/TAPD dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk penambahan anggaran penyediaan obat Hipertensi dan DM.
Peningkatan jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten Bantul Tahun 2025 sehingga capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV melampaui target yang telah ditetapkan Pemkab Bantul.	Memperkuat strategi pencegahan, deteksi dini, dan layanan kesehatan terpadu bagi kelompok berisiko tinggi melalui edukasi, konseling, pemeriksaan, serta kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kasus dapat tertangani secara efektif tanpa mengganggu pencapaian target pelayanan kesehatan.
Adanya kasus abortus, persalinan premature, Intrauterine Fetal Death (IUFD) sehingga tidak memenuhi K6, pindah domisili, dan persalinan lewat dari Hari Perkiraan Lahir (HPL) di bulan Januari 2026.	Perlu memperkuat pemantauan ibu hamil melalui koordinasi intensif antara tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan pemerintah desa/kalurahan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian khusus seperti abortus, persalinan premature, IUFD, pindah domisili. Adapun untuk persalinan dengan HPL di akhir tahun sebaiknya dicatatkan pada target tahun selanjutnya.
Pindah domisili, terjadinya abortus, tidak tercatatnya persalinan di Kabupaten Bantul karena persalinan di luar Kabupaten Bantul, dan tidak terlacak karena pendatang.	Perlu memperkuat sistem pelaporan dan integrasi data lintas sektor dan lintas daerah melalui koordinasi aktif antara fasilitas kesehatan, Disdukcapil, puskesmas, rumah sakit, dan pemerintah desa/kalurahan, serta melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala agar kejadian pindah domisili, abortus, persalinan di luar daerah, dan pendatang tetap tercatat dan terlacak.
Ada sejumlah 60 bayi baru lahir tidak mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) karena adanya regulasi persalinan SC tidak bisa dilakukan IMD, adanya	Memperkuat edukasi, pendampingan, dan kebijakan faskes terkait praktik Inisiasi Menyusui Dini (IMD) alternatif bayi yang lahir dengan SC atau mengalami komplikasi, agar bayi tetap mendapat

Permasalahan	Solusi
komplikasi persalinan pada ibu dan bayi sehingga tidak memungkinkan dilakukan IMD.	manfaat menyusui awal sesuai kondisi medis.
Belum semua balita mengikuti minimal 8 kali penimbangan di posyandu karena tidak ada pengasuh yang mengantar, anak sekolah dan tidak mengikuti penimbangan baik di posyandu maupun sekolah.	Memperkuat strategi jemput bola melalui kunjungan rumah oleh kader posyandu dan tenaga kesehatan, meningkatkan koordinasi dengan sekolah dan perangkat desa/kalurahan, serta mengintensifkan edukasi dan pendampingan kepada orang tua agar balita tetap mendapatkan minimal 8 kali penimbangan meskipun terkendala pengantaran atau jadwal sekolah.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (2026), Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jaringan Perpipaan	
		1	Kuantitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)
		2	Kualitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)
		Bukan Jaringan Perpipaan	
		3	Kuantitas SPAM



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)
		4	Kualitas SPAM Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Kuantitas SPALD	
		1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik
		Kualitas SPALD	
		2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota
		3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota.
		4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.3.2. Target Pencapaian

Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.16

Tabel 4.16 Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
1)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.668
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	Jaringan Perpipaan		
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	3.556
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	3.556
	Bukan Jaringan Perpipaan		
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM*)	Rumah Tangga	
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau*)	Rumah Tangga	
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3.116
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
			Dilayani / Dipenuhi
	KUANTITAS SPALD		
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	779
	KUALITAS SPALD		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)		
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	395
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)		
1	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	150
2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	234

*) Mutu ditutup pada aplikasi e-SPM karena bukan jaringan perpipaan telah dibangun dan dikelola mandiri oleh masyarakat
Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.17 sebagai berikut.

Tabel 4.17 Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100,00 %
1)	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100,00 %
			Rekap Target	Rekap Capaian	Selisih	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			(Harus Dilayani)	(Terlayani)		
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	636.788	636.788	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	10.668	14.492	+3.824	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	Jaringan Perpipaan					
	1 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon).	Rumah Tangga	3.556	3.623	+67	100,00 %
	2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	3.556	3.623	+67	100,00 %
	Bukan Jaringan Perpipaan					
	3 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon *)	Rumah Tangga				
	4 Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.*)	Rumah Tangga				
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan					100,00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Air limbah Domestik					
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	654.496	654.496	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3.116	3.748	+632	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	KUANTITAS SPALD					
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	779	937	+158	100,00 %
	KUALITAS SPALD					
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	395	421	+26	100,00 %
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)					
1	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala	Rumah Tangga	150	282	+132	100,00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota					
2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	234	234	0	100,00 %

*) Mutu ditutup pada aplikasi e-SPM karena bukan jaringan perpipaan telah dibangun dan dikelola mandiri oleh masyarakat
 Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Pekerjaan Umum pada pencapaian penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar pada tahun 2025 dapat direalisasikan 100%, dan secara riil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik, anggaran dapat dioptimalkan untuk menambah jaringan air minum sehingga capaian mutu air minum melebihi target yang direncanakan. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Pekerjaan Umum tercapai 100,00% dengan kategori Tuntas Paripurna.



4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Alokasi Anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PD (Dinas PUPKP)	158.550.339.216	6,02%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	34.277.088.656		1,30%	21,62%
	APBD	34.277.088.656			
	A. APBD MURNI	21.356.938.656			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	12.920.150.000			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
SPM PEKERJAAN UMUM			34.277.088.656	32.524.562.125	94,89 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		18.908.285.942	17.448.634.054	92,28 %
	1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM *)	Dokumen			
	2 Supervisi	Dokumen			

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM *)				
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan *)	Liter/Detik			
4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	SR			
5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan *)	Liter/Detik			
6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	Liter/Detik			
7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan *)	SR			
8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	SR			
9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum *)	Penyelenggara SPAM			
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri *)	Badan Usaha			
11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat *)	Kelompok Masyarakat			
12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM *)	Unit			
13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM *)	Unit			
14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM *)	Penyelenggara SPAM			
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan *)	Unit			
16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan *)	Unit			
17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	Rumah Tangga			
18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	-			
19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	-			
20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan *)	Unit			
21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan *)	Unit			
22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan *)	Unit			
23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	19.723.000	19.183.000	97,26 %
24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	76.625.000	76.610.000	99,98 %
25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	843.649.872	830.981.494	98,50 %
26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	3.515.150.000	3.515.150.000	100,00 %
27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	19.283.000	18.320.000	95,01 %
28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan *)	Liter/Detik			
29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	154.030.070	152.010.660	98,69 %
30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan	Unit	1.700.000	1.700.000	100,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	4.596.875.000	3.665.489.000	79,74 %
	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	9.680.400.000	9.168.339.900	94,71%
	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	850.000	850.000	100,00%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		11.141.802.714	10.848.928.071	97,37%
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota *)	Dokumen			
	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota *)	Dokumen			
	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota *)	Rumah Tangga			
	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota *)	Rumah Tangga			
	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman *)	Rumah Tangga			
	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat *)	Rumah Tangga			
	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik *)	Orang			
	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik *)	Kelompok Masyarakat			
	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik *)	Orang			
	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik *)	Unit			
	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman *)	Dokumen			
	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman *)	Rumah Tangga			
	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja *)	Unit			
	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja *)	Rumah Tangga			
	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT *)	M ³ /Hari			
	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT *)	M ³ /Hari			
	17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT *)	Dokumen			
	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	2.060.035.000	1.957.693.500	95,03%
	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	4.250.000	4.250.000	100,00 %
	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala	M ³ /Hari	2.125.000	2.125.000	100,00 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	Permukiman Berbasis Masyarakat				
21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	1.400.000	700.000	50,00%
22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	1.173.525.000	1.173.500.000	100,00 %
23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik *) (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat *)	M³/Hari			
24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	2.125.900.000	2.026.311.250	95,32 %
25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan *)	M³/Hari			
26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	325.000.000	325.000.000	100,00 %
27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M³/Hari	2.062.500	2.062.500	100,00 %
28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M³/Hari	1.400.000	1.400.000	100,00 %
29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	1.785.000	850.000	47,62%
30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu *)	M³/Hari			
31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu *)	M³/Hari			
32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman *)	M³/Hari			
33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	43.851.900	43.759.300	99,79 %
34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	37.677.500	37.677.500	100,00 %
35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	51.848.100	50.735.000	97,85 %
36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M³/Hari	850.000	850.000	100,00 %
37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	17.839.000	17.448.000	97,81 %
38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1.874.378.842	1.828.686.827	97,56 %
39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	2.652.000.000	2.622.000.000	98,87 %
40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	49.200.000	49.150.000	99,90 %
41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	716.674.872	704.729.194	98,33 %
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
	1 Perluasan jaringan SR Air Minum PDAM		4.227.000.000	4.227.000.000	100,00 %

*) Subkegiatan ditutup pada aplikasi e-SPM karena menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah
 Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)



4.3.5. Dukungan Personil

SPM Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Pekerjaan Umum pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025

	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	NON ASN	Tingkat Pendidikan						
					SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diplo ma	D-IV/ S1	S2	S3
Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretaris Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekretariat	19	2	11	2	1	4	21	1	5	2	0
Bidang Sumber Daya Air	10	2	10	1	0	0	12	0	10	1	0
Bidang Cipta Karya	9	1	6	1	0	0	3	0	13	1	0
Bidang Bina Marga	13	0	4	0	0	2	8	1	4	2	0
Bidang Bina Konstruksi	8	0	1	3	0	0	9	0	2	1	0
UPTD Pengamatan Pengairan Winongo	6	1	17	0	1	0	22	0	1	0	0
UPTD Pengamatan Pengairan Opak Oyo	6	1	19	0	0	1	24	0	0	1	0
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	6	9	4	0	0	12	1	6	2	0
Jumlah	74	13	77	11	2	7	111	3	41	11	0
Total	175 (seratus tujuh puluh lima) orang										

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2026)

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.21 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

Permasalahan	Solusi
Pemkab Bantul menyelenggarakan program sanitasi LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal) namun minat masyarakat kurang/keberatan.	Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program sanitasi LLTT, sekaligus menyesuaikan mekanisme layanan agar lebih mudah diterima dan diminati warga.
Pemenuhan layanan SPM Pekerjaan Umum bergantung pada dana Pusat (DAK, TP, Hibah).	Ke depan, diupayakan pembiayaan SPM dari sumber-sumber pendanaan lainnya.
Capaian Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik dapat melebihi target yang telah ditetapkan (lebih dari 100%), namun total capaian dalam aplikasi tetap terhitung 100% sehingga terdapat selisih pada kolom yang belum dilayani.	Tetap menginput capaian sesuai realisasi dan mencantumkan penjelasan mengapa capaian dapat melebihi target dalam tab permasalahan. Meningkatkan mekanisme fleksibilitas dan koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik, sehingga optimalisasi anggaran di lapangan dapat dimanfaatkan untuk penambahan jaringan air minum dan air limbah tanpa mengurangi mutu pekerjaan dan memungkinkan capaian layanan melebihi target yang direncanakan.

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2026), Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
1)	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
		2	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana
		3	Pembangunan Baru di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana
		4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
		a	Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;
		b	Proses sosialisasi kepada masyarakat; sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi; dan
		c	Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.
		2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.4.2. Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output
1 .	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Tidak Terjadi Bencana (Melampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)			
	Melakukan pengumpulan data, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form)			Form 4A, 4B, 4C
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Ada Relokasi Program Pemerintah			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	8
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah (Mutu Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	
	a	Penilaian oleh tim penaksir (<i>appraisal</i>);	Rumah	2
	b	Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	2
	c	Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	2
	2	Bantuan Akses Rumah Layak Huni *)	Rumah	0

*) Mutu ditutup pada aplikasi e-SPM karena tidak terdapat perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas dimaksud pada Tahun 2025
Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM perumahan rakyat Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.24

Tabel 4.24 Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS PARIPURNA			100,00 %	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00 %	
	Tidak Terjadi Bencana (Melampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)						
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form)		Form 4A, 4B, 4C				
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					100,00 %	
	Ada Relokasi Program Pemerintah						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8	8	0	100,00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dipenuhi					100,00 %	
	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				100,00 %
		a	Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	2	2	0
b		Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	2	2	0	100,00 %
c		Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	2	2	0	100,00 %
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni *)	Rumah	0	0	0	0,00 %	

*) Mutu ditutup pada aplikasi e-SPM karena tidak terdapat perencanaan dan penganggaran untuk aktivitas dimaksud pada Tahun 2025
Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)



Tabel 4.24 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Perumahan Rakyat pada jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar di tahun 2025 dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Perumahan Rakyat tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

Pada tahun 2025 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, namun Pemerintah Kabupaten Bantul tetap mengalokasikan anggaran bagi jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. Karena tidak terjadi bencana dan telah dilampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, dan 4C3 maka capaian dihitung 100%.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25 Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PD (Dinas PUPKP)	158.550.339.216	6,02%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	654.870.000		0,02%	0,41%
	APBD	654.870.000			
	A. APBD MURNI	654.870.000			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.26 berikut.

Tabel 4.26 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	SPM PERUMAHAN RAKYAT		654.870.000	36.912.500	5,64 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		3.060.000	765.000	25,00 %
1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	382.500	382.500	100,00 %
3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	382.500	0	0,00 %
4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	382.500	0	0,00 %
5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	382.500	382.500	100,00 %
6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	382.500	0	0,00 %
7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	382.500	0	0,00 %
8	Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	382.500	0	0,00 %
9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
10	Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	382.500	0	0,00 %
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		651.810.000	36.147.500	5,55 %
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	449.132.500	0	0,00 %
2	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana *)	Ha	0	0	0,00 %
4	Pembangunan rumah bagi	Unit	165.382.500	0	0,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	korban bencana	Rumah			
5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota *)	Unit Rumah	0	0	0,00 %
6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	382.500	382.500	100,00 %
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota *)	Rumah Tangga	0	0	0,00 %
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	382.500	382.500	100,00 %
9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	35.382.500	35.382.500	100,00 %
10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	382.500	0	0,00 %
11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	382.500	0	0,00 %
12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	382.500	0	0,00 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
	1 -		0	0	0,00 %

*) Subkegiatan ditutup pada aplikasi e-SPM karena menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah
Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.4.5. Dukungan Personil

SPM Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPKP) Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat ditunjukkan dalam Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2025

	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	NON ASN	Tingkat Pendidikan						
					SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3
Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretaris Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekretariat	19	2	11	2	1	4	21	1	5	2	0
Bidang Perumahan dan Permukiman	8	0	3	0	0	0	3	0	7	1	0
UPTD Rusunawa dan Permakaman	2	3	39	0	0	0	33	2	9	0	0
Jumlah	30	5	53	2	1	4	57	3	21	4	0
Total	90 (sembilan puluh) orang										

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2026)

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.28 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025

Permasalahan	Solusi
Sebagai langkah antisipasi dalam pemenuhan layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana, Pemkab Bantul telah menyediakan anggaran sebesar Rp 654.870.000,00 untuk 25 unit rumah. Karena pada tahun 2025 tidak terjadi bencana, maka anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana tidak terealisasi dan menjadi SILPA.	Jika tidak terjadi bencana, perlu diatur mekanisme supaya anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan prioritas lain. Ke depan, perlu dipertimbangkan penganggaran untuk antisipasi bencana melalui mekanisme BTT, bukan di Perangkat Daerah.
Mutu layanan bantuan akses sewa rumah layak huni ditutup dalam aplikasi e-SPM karena tidak tersedia di Tahun 2025 karena keterbatasan jumlah rumah hunian sewa milik Pemerintah Kabupaten Bantul (terdapat 4 rumah susun sederhana sewa yaitu Rusunawa Projotamansari I, II, III dan IV).	Ke depan perlu direncanakan dan dikembangkan alternatif skema pemanfaatan rumah hunian sewa, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta, agar layanan bantuan akses sewa rumah layak huni tetap dapat disediakan meskipun jumlah rumah hunian sewa milik Pemerintah Kabupaten Bantul terbatas.

Sumber: Dinas PUPKP Kabupaten Bantul (2026), Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah



4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas 3 (tiga) sub urusan yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana, dan sub urusan kebakaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)
		2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			unjuk rasa kerusuhan massa)
		3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)
		4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material
		5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)
		6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)
Sub urusan Kebencanaan			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana
			a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			(sesuai dengan kebutuhan)
		2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
			a. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana
			1) Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)
			2) Terlaksananya sosialisasi tatap muka
			3) Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)
			4) Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)
			b. Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia
			1) Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)
			4) Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)
			5) Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)
			c. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik
			1) Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			2) Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)
			4) Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)
			5) Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
			a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)
			c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)
			d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)
			e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)
		2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)
			a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)
			b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)
			c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)
			d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)
		3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi
			a. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur
			1) Tersedianya Perlengkapan sarpras



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			4) Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)
			5) Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)
			6) Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			b. Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi warga Negara
			1) Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
			4) Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)
			5) Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)
		4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			a. Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)
			1) Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Penyelenggara simulasi

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)
			b. Gladi Lapang
			1) Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)
		5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			a. Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			1) Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)
			2) Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)
			3) Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)
			4) Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
			5) Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
			b. Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana
			1) Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			3) Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)
			4) Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)
		c.	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara <i>Broadcast</i>
			1) Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)
		d.	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat
			1) Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)
			2) Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)
		6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)
			b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)
			c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)
			d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)
3	Pelayanan	1	Respon Cepat Darurat Bencana

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)
			b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)
			c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)
	2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	
		b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	
		c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	
		d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	
		e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	
	3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana	
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan	



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
			kebutuhan)
Sub urusan Kebakaran			
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran
		4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia
		5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran
		6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangka.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.5.2. Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output
1)	SPM TRANTIBUM			
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	1.485
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1	Standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	51
	2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka	Dokumen	9

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)		
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	Orang	900
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	Dokumen	2
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1
12)	SPM KEBENCANAAN		
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	608.936
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana		
	a. Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1
	b. Berita Acara Diskusi Publik	Dokumen	1
	c. Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB	Orang	4
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB	Orang	5
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik	Orang	5
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		
	1) Sosialisasi melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana		
	a. Bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	1.000
	b. Sosialisasi tatap muka	Desa	45
	c. Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	120
	d. Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia		
	a. Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	6
	b. Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20
	c. Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3
	e. Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik		
	a. Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20
	b. Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2
	c. Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9
	d. Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6
	e. Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	972.259
	1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		
	a. Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	1
	b. Berita Acara Diskusi Publik	Dokumen	3
	c. Berita Acara Asistensi BNPB	Orang	3
	d. Tenaga ahli/personil penyusun RPB	Orang	4
	e. Penyelenggara Diskusi Publik	Orang	5
	2) Pembuatan Rencana Kontinjensi (REKON)		
	a. Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	4
	b. Berita Acara Diskusi Publik	Dokumen	8
	c. Personil penyusun Renkon	Orang	10
	d. Penyelenggara Diskusi Publik	Orang	10
	3) Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi		
	1) Pelatihan, Penanggulangan Bencana bagi Aparatur		
	a. Perlengkapan sarpras pelatihan	Paket	1
	b. Materi pelatihan	Paket	2
	c. Sertifikat pelatihan	Buah	30
	d. Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana	Paket	0
	e. Instruktur dan Narasumber	Orang	5
	f. Penyelenggara Pelatihan	Orang	8
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara		
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan	Paket	1
	b. Tersedianya Materi pelatihan	Paket	10
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan	Buah	300
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber	Orang	10
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan	Orang	8
	4) Tersedianya Penyelenggara Pelatihan		
	1) Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)		
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise	Dokumen	1

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise	Paket	1
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise	Orang	10
		2) Gladi Lapang		
		a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang	Dokumen	1
		b. Tersedianya Sarpras dan Peralatan Pendukung Gladi Lapangan	Paket	1
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang	Orang	10
		5) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7	Hari	365
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana	Pertemuan	12
		c. Tersedianya Manajer Pusdalops	Orang	1
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops	Orang	4
		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops	Orang	16
		2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana		
		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops	Unit	2
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama	Unit	1
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan	Unit	1
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops	Unit	1
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast		
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast	Paket	1
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi	Paket	1
		4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat		
		a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat	Paket	1
		b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas	Paket	1
		6) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
		a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas	Paket	1
		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga	Paket	0
		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi	Paket	0
		d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana	Unit	23
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	955
		1) Respon Cepat Darurat Bencana		
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat	Dokumen	1
		b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana	Dokumen	1
		c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan	Orang	44
		2) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
		a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan	Paket	1



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	Darurat Bencana/PDB		
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi	Dokumen	1
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian	Dokumen	1
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana	Dokumen	1
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB	Dokumen	1
	3) Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana		
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan	Paket	1
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi	Unit	1
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	Unit	1
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	Dokumen	1
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban	Dokumen	1
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan	Orang	1
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	Orang	1
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	Orang	1
3)	SPM KEBAKARAN		
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	145
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	180
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	Dokumen	5
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	350
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	30
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	10

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Satuan	Indikator Pencapaian / Output
	6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	145

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.31

Tabel 4.31 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
TOTAL CAPAIAN SPM TRANTIBUMLINMAS: TUNTAS UTAMA						99,77%
I. KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100,00%
1 Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80%			(80%)	80,00%		
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. Jmlah yang Harus Dilayani		Orang	1.485	1.485	0	100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			(20 %)	20,00 %		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						100,00%
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	51	51	0	100,00%
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan	Dokumen	9	9	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)	Orang	900	900	0	100,00%
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	2	2	0	100,00%
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) *)	Orang	1	0	1	100,00%
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) *)	Orang	1	0	1	100,00%
II KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						99,32%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80,00%
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	608.936	608.936	0	100,00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%)	20,00%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						100,00%
1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana						100,00%
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	Orang	4	4	0	100,00%
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana						100,00%
	a. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					100,00%
	1) Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	1.000	1.000	0	100,00%
	2) Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	45	45	0	100,00%
	3) Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	120	120	0	100,00%
	4) Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	40	40	0	100,00%
	b. Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					100,00%
	1) Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	6	6	0	100,00%
	2) Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20	20	0	100,00%
	3) Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	4) Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuh	Orang	3	3	0	100,00%
	5) Tersedia Penyelenggaraan Sosialisasi Media Sosial dan Multimedia (sesuai dengan kebutuhab)	Orang	4	4	0	100,00%
3	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik					100,00%
a.	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	20	20	0	100,00%
b.	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	2	2	0	100,00%
c.	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9	9	0	100,00%
d.	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	0	100,00%
e.	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100,00%
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						97,96%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%)	80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	972.259	972.259	0	100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%)	17,96%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi						89,81%
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana					100,00%
a.	Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	Dokumen	1	1	0	100,00%
b.	Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen	3	3	0	100,00%
c.	Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	Orang	3	3	0	100,00%
d.	Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	4	0	100,00%
e.	Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
2	Pembuatan Rencana Kontijensi					100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
(RENKON)						
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	4	5	+1	100,00%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	8	9	+1	100,00%
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	50	+40	100,00%
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	50	+40	100,00%
3	Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi					91,67%
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					83,33%
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	0	100,00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	30	30	0	100,00%
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100,00%
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100,00%
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	0	100,00%
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					100,00%
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	10	10	0	100,00%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	300	300	0	100,00%
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00%
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	0	100,00%
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100,00%
	Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)					100,00%
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00%
	Gladi Lapang					100,00%
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	0	100,00%
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana					97,19%
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					88,75%
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	0	100,00%
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	12	12	0	100,00%
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	0	100,00%
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	4	3	1	75,00 %
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	16	11	0	100,00%
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					100,00%
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100,00%
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100,00%
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100,00%
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast					100,00%
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi	Paket	1	1	0	100,00%

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	(sesuai dengan kebutuhan)					
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					100,00%
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					50,00%
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	0,00%
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	0,00%
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	23	23	0	100,00%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100,00%
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80,00%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	955	1.605	+650	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20,00%
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	Status Tanggap Darurat					
1	Respon Cepat Darurat Bencana					100,00%
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	44	44	0	100,00%
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang				100,00%



No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
	(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)					
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100,00%
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	8	+7	100,00%
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	2	+1	100,00%
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100,00%
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100,00%
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	11	+10	100,00%
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	107	+106	100,00%
III KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBAKARAN						100,00%
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran						100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00%	
Jumlah Total Yang			Jumlah Total Yang	Yang Belum		

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian	
			Harus Dilayani	Terlayani	Terlayani		
A. Jumlah yang Harus Dilayani			Orang	145	325	+180	100,00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)							20,00%
B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi		
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan e√akuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan E√akuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	180	199	+19	100,00%	
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan e√akuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	Dokumen	5	5	0	100,00%	
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan e√akuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	Unit	350	350	0	100,00%	
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	30	32	+2	100,00%	
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan e√akuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	10	16	+6	100,00%	
6	Pelayanan penyelamatan dan e√akuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	145	325	+180	100,00%	

*) Pada akhir tahun pelaporan, mutu ditutup karena tidak terdapat warga negara yang mengalami kerugian material ataupun yang memperoleh pelayanan pengobatan akibat penegakan Perda dan Perkada

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

Tabel 4.31 menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada pencapaian penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar dapat direalisasikan 99,77%.



Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangka.kemendagri.go.id>, indeks total pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 sebesar 99,77% dengan kategori kategori Tuntas Utama.

Mutu layanan SPM Sub Urusan Kebencanaan yaitu jumlah Koordinator Tim Teknis Pusdalops dan Anggota Tim Pusdalops tidak terealisasi karena keterbatasan personil pada Tim Teknis Pusdalops sehingga sulit memenuhi target capaian yang merupakan jumlah ideal tim.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32 Alokasi Anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
ANGGARAN TRANTIBUMLINMAS					
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PD (Satpol PP, BPBD)	37.060.449.650	1,41%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	16.649.817.858		0,63%	44,93%
	APBD	16.649.817.858			
	A. APBD MURNI	4.968.011.961			
	B. APBD DAU	11.365.200.497			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	316.605.400			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			
ANGGARAN SUB BIDANG TRANTIBUM					
1	APBD KAB. BANTUL	2.633.614.491.204			

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
	(Belanja Daerah)				
2	ALOKASI ANGGARAN PD (Satpol PP)	15.303.550.098	0,58%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	5.284.617.361		0,20%	34,53%
	APBD	5.284.617.361			
	A. APBD MURNI	4.968.011.961			
	B. APBD DAU	0			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	316.605.400			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			
ANGGARAN SUB BIDANG KEBENCANAAN					
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PD (BPBD)	9.066.031.579	0,34%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	5.878.002.675		0,22%	64,84%
	APBD	5.878.002.675			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	5.878.002.675			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			
ANGGARAN SUB BIDANG KEBAKARAN					
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
2	ALOKASI ANGGARAN PD (BPBD)	12.690.867.973	0,48%		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	5.487.197.822		0,21%	43,24%
	APBD	5.487.197.822			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	5.487.197.822			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.33 berikut

Tabel 4.33 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
TOTAL REALISASI ANGGARAN SPM TRANTIBUMLINMAS			16.649.817.858	15.931.680.791	95,69 %
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG TRANTIBUM					
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		5.284.617.361	5.228.454.712	98,94 %
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten		3.240.608.359	3.199.961.290	98,75 %
	1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4.325.000	4.325.000	100,00 %
	2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	514.711.616	511.424.411	99,36 %
	3 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	219.525.500	219.525.500	100,00 %
	4 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	4.930.000	4.930.000	100,00 %
	5 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum *)	Unit	0	0	0,00 %
	6 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	2.125.000	2.125.000	100,00 %
	7 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada *)	Laporan	0	0	0,00 %
	8 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP, Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional *)	Orang	0	0	0,00 %
	9 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	10 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan *)	Orang	0	0	0,00 %
	11 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat *)	Orang	0	0	0,00 %
	12 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas *)	Orang	0	0	0,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	13 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan *)	Kasus	0	0	0,00 %
	14 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1.332.580.132	1.320.451.422	99,09 %
	15 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa*)	Laporan	0	0	0,00 %
	16 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	1.150.496.111	1.130.494.957	98,26 %
	17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah **)	Laporan	5.142.500	0	0,00 %
	18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	6.772.500	6.685.000	98,71 %
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		2.019.867.252	2.006.568.422	99,34 %
	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota *)	Laporan	0	0	0,00 %
	2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota *)	Laporan	0	0	0,00 %
	3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota *)	Laporan	0	0	0,00 %
	4 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah *)	Laporan	0	0	0,00 %
	5 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	6 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) *)	Unit	0	0	0,00 %
	7 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah *)	Laporan	0	0	0,00 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah *)	Laporan	0	0	0,00 %
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	899.166.000	896.994.000	99,76 %
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	931.485.352	925.488.027	99,36 %
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	189.215.900	184.086.395	97,29 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		24.141.750	21.925.000	90,82 %
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah *)	Laporan	0	0	0,00 %
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS *)	Laporan	0	0	0,00 %
	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	24.141.750	21.925.000	90,82 %
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA					
	1	-		0	0	0,00 %
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG KEBENCANAAN						
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			5.878.002.675	5.323.905.134	90,57 %
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		672.292.000	580.862.639	86,40 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	16.204.000	14.752.703	91,04 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	656.088.000	566.109.936	86,29 %
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2.913.290.590	2.628.993.264	96,00 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4.500.000	4.500.000	100,00 %
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	188.889.000	78.753.750	41,69 %
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	625.660.000	591.036.653	94,47 %
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	1.500.543.190	1.467.872.161	97,82 %
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	304.769.900	280.068.500	91,90 %
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	bencana *)				
7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota *)	-	0	0	0,00 %
8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	27.625.000	10.475.000	37,92 %
9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	96.114.000	61.442.200	63,93 %
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	72.827.500	64.840.000	89,03 %
11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	37.362.000	17.005.000	45,51 %
12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	55.000.000	53.000.000	96,36 %
13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota *)	Kegiatan	0	0	0,00 %
14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota *)	Unit	0	0	0,00 %
16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota *)	Kawasan	0	0	0,00 %
17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota *)	Laporan	0	0	0,00 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.036.119.850	921.504.871	88,94 %
1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	1.700.000	1.700.000	100,00 %
2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	16.950.000	12.500.000	73,75 %
3	Pencarian, pertolongan dan e/akuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	249.961.900	219.701.200	87,89 %
4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota *)	Dokumen	4.990.000	3.400.000	68,14 %
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota *)	Orang	40.225.000	32.162.500	79,96 %
6	Penyediaan logistik penyelamatan dan e/akuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	457.970.000	407.182.091	88,91 %
7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	425.000	425.000	100,00 %
8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	263.897.950	244.434.080	92,62 %
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		137.475.000	77.864.000	56,64 %
1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	21.350.000	13.500.000	63,23 %
2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	70.075.000	45.625.500	65,11 %
3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana *)	Laporan	0	0	0,00 %
	6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota *)	Orang	0	0	0,00 %
	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	13.850.000	10.950.000	79,06 %
	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	9.955.000	7.788.500	78,24 %
	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota *)	Lembaga	0	0	0,00 %
	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota *)	Laporan	0	0	0,00 %
	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	22.245.000	0	0,00 %
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA					
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji Non ASN Pusdalops PB, TRC)		977.786.860	977.786.860	100,00 %
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		141.038.375	136.893.500	97,06 %
KATEGORI REALISASI ANGGARAN SUB BIDANG KEBAKARAN						
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)			5.487.197.822	5.379.320.945	98,03 %
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.986.777.000	1.916.353.288	96,46 %
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	9.775.000	9.775.000	100,00 %
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	263.400.000	242.063.038	91,90 %
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	25.000.000	24.965.000	99,86 %
	4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota *)	Dokumen	0	0	0,00 %
	5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan	Unit	5.000.000	5.000.000	100,00 %



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	24.146.000	22.766.000	94,28 %
7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1.775.000	1.775.000	100,00 %
8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) *)	Dokumen	0	0	0,00 %
9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	24.756.000	23.000.000	92,91 %
10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) *)	Dokumen	0	0	0,00 %
11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran *)	Dokumen	0	0	0,00 %
12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	31.500.000	30.837.000	97,90 %
13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran *)	Dokumen	0	0	0,00 %
14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.597.175.000	1.551.922.250	97,17 %
15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	4.250.000	4.250.000	100,00 %
16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga *)	Dokumen	0	0	0,00 %
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		14.262.400	12.362.400	86,68 %
1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	4.850.000	4.050.000	83,51 %
2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	9.412.400	8.312.400	88,31 %
3	Investigasi Kejadian Kebakaran*)		0	0	0,00 %
1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran*)	Dokumen	0	0	0,00 %
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		395.482.750	380.779.600	96,28 %
1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	253.460.200	250.437.200	98,81 %
2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	117.584.300	106.332.800	90,43 %
3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	Dokumen	24.438.250	24.009.600	98,25 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
	melalui penyediaan sarana dan prasarana				
5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		245.019.500	240.748.985	98,26 %
1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	39.947.500	39.176.985	98,07 %
2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan e√akuasi	Dokumen	5.000.000	3.350.000	67,00 %
3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan e√akuasi	Unit	14.422.000	13.572.000	94,11 %
4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	185.650.000	184.650.000	99,46 %
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji Non ASN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		2.281.502.672	2.281.502.672	100,00 %
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		564.153.500	547.574.000	97,06 %

*) Subkegiatan ditutup pada aplikasi e-SPM karena menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan daerah
 Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)



Tabel 4.34 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2025

	PNS	PPPK	PPP Paruh Waktu	Non ASN	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Tingkat Pendidikan Diploma	D-IV/ S1	S2	S3
SUB URUSAN TRANTIBUM (SATPOL PP)											
Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretariat	8	10	7	1	7	2	5	3	8	1	0
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	10	5	0	2	0	0	6	0	10	1	0
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	17	8	60	1	0	0	73	6	7	0	0
Bidang Perlindungan Masyarakat	4	1	0	4	0	0	3	0	5	1	0
Jumlah	40	24	67	8	7	2	87	9	30	4	0
Total	139 (seratus tiga puluh sembilan) orang										
SUB URUSAN KEBENCANAAN DAN KEBAKARAN (BPBD)											
Kepala Pelaksana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretariat	7	5	14	0	2	0	13	2	8	1	0
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana	9	0	1	0	0	0	1	1	6	2	0
Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan	6	0	5	0	1	1	3	0	5	1	0
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	61	52	1	0	1	111	0	5	2	0
Tim Reaksi Cepat	0	0	11	0	0	0	10	0	1	0	0
Pusdalops	0	0	11	0	0	0	1	1	9	0	0
Jumlah	28	66	94	1	3	2	139	4	34	7	0
Total	189 (seratus delapan puluh sembilan) orang										

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2026), BPBD Kabupaten Bantul (2026)

4.5.5. Dukungan Personil

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada masyarakat pada tahun 2023 melalui 2 (dua) perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Satpol PP merupakan perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul; dan BPBD merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran; sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Dukungan jumlah pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan pada Tabel 4.34.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.35 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

Permasalahan	Solusi
PERMASALAHAN SUB URUSAN TRANTIBUM	
Belum adanya standarisasi biaya pelatihan keterampilan SDM Satlinmas.	Menetapkan standarisasi biaya pelatihan ketrampilan SDM Satlinmas, sehingga perencanaan anggaran lebih jelas, transparan, dan pelatihan dapat diselenggarakan secara konsisten.
Dalam rangka pemenuhan mutu layanan ketiga (standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP) tidak dapat dipenuhi sendiri oleh Satpol PP, karena tusi penyelenggaraan diklat dilaksanakan oleh	Koordinasi dengan BKPSDM terkait kebutuhan diklat.



Permasalahan		Solusi
BKPSDM.		
Masih terdapat kondisi sarpras Trantibum yang belum sesuai standar.		Melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap sarpras Trantibum, serta merencanakan perbaikan atau pengadaan sesuai standar agar fasilitas mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
Belum dilakukan pendataan ulang anggota Linmas aktif di Kalurahan.		Menyelenggarakan pendataan ulang anggota Linmas aktif di Kalurahan secara terstruktur menggunakan aplikasi Sedata Sebantul agar keaktifan, distribusi, dan kebutuhan dapat terpantau secara tepat dan efisien.
PERMASALAHAN SUB URUSAN KEBENCANAAN		
Penjelasan capaian mutu layanan pembuatan Rencana Kontingensi (RENKON) melebihi target karena pada tahun 2025 ditetapkan 1 renkon tambahan yaitu Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi Emerging Pernapasan (hasil kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kontingensi Penyakit Infeksi <i>Emerging</i> Pernapasan.		Dilaporkan sesuai realisasi.
Keterbatasan personil Koordinator Tim dan Anggota Tim Teknis PUSDALOPS.		Koordinasi dengan BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.
Penjelasan capaian layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melebihi target: pada akhir tahun 2025 terjadi bencana hidrometeorologi sehingga jumlah penerima layanan meningkat melebihi target yang telah ditetapkan.		Dilaporkan sesuai realisasi.
Keterbatasan Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana.		Melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap peralatan penanggulangan bencana, serta merencanakan perbaikan atau pengadaan sesuai standar agar fasilitas mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
PERMASALAHAN SUB URUSAN KEBAKARAN		
Keterbatasan jumlah personil pemadam kebakaran dan penyelamatan.		Koordinasi dengan BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.

Permasalahan	Solusi
Belum semua desa/kalurahan membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.	Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran di seluruh desa/kalurahan, sehingga seluruh wilayah memiliki kemampuan tanggap darurat kebakaran yang merata.
Keterbatasan Jumlah Peralatan Pemadaman dan Penyelamatan.	Melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap peralatan pemadaman dan penyelamatan, serta merencanakan perbaikan atau pengadaan sesuai standar agar fasilitas mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
Masih terdapat 2 WMK belum terbentuk di wilayah Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Dlingo	Memfasilitasi pembentukan 2 (dua) WMK di wilayah Kapanewon Srandakan dan Kapanewon Dlingo, termasuk koordinasi dengan perangkat desa/kalurahan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar seluruh wilayah memiliki unit pengelola yang lengkap.

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bantul (2026), BPBD Kabupaten Bantul (2026), Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Sosial di Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.36.

Tabel 4.36 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1 Layanan data dan pengaduan
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
	3 Penyediaan permakanan
	4 Penyediaan sandang
	5 Penyediaan alat bantu
	6 Penyediaan perbekalan kesehatan



Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		13	Layanan rujukan
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		12	Layanan rujukan
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang
		5	Penyediaan alat bantu
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar
		9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
		10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		13	Layanan rujukan
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	1	Layanan data dan pengaduan
		2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat
		3	Penyediaan permakanan
		4	Penyediaan sandang

Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Pelayanan Dasar	
	Pengemis di Luar Panti	5	Penyediaan perbekalan kesehatan
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		12	Layanan rujukan
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyediaan permakanan
		2	Penyediaan sandang
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan
		5	Pelayanan dukungan Psikososial

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.6.2. Target Pencapaian

Target pencapaian SPM Sosial di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.37 sebagai berikut.

Tabel 4.37 Target Pencapaian SPM Sosial Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.634
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	1.634
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	280
	3 Penyediaan permakanan	Orang	1.002



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
4	Penyediaan sandang	Orang	50
5	Penyediaan alat bantu	Orang	53
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	9
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	240
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	211
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.634
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5
13	Layanan rujukan	Orang	18
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			Jumlah Total Yang Harus Dilayani
A. Jumlah yang Harus Dilayani		Orang	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			
B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	100
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	3
3	Penyediaan permakanan	Orang	30
4	Penyediaan sandang	Orang	31
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	5
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	31
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	31
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	21
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	102
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2
12	Layanan rujukan	Orang	5

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.200
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	1.200
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	100
	3 Penyediaan permakanaan	Orang	900
	4 Penyediaan sandang	Orang	9
	5 Penyediaan alat bantu	Orang	10
	6 Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	8
	7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	900
	8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	100
	9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	5
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	4
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	4



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output
3	Penyediaan permakanan	Orang	5
4	Penyediaan sandang	Orang	4
5	Penyediaan perbekalan Kesehatan	Orang	4
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	4
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	4
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2
12	Layanan rujukan	Orang	2
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	125
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi
1	Penyediaan permakanan	Orang	125
2	Penyediaan sandang	Orang	20
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	75
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	5

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

4.6.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.38.

Tabel 4.38 Realisasi Pencapaian SPM Sosial Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100,00 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100,00 %
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Masuk Dalam Hitungan	Orang	7.500	7.500	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.634	2.914	+1.280	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	1.634	2.914	+1.280	100,00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	280	280	0	100,00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	1.002	1.002	0	100,00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	50	50	0	100,00 %
5	Penyediaan alat bantu	Orang	53	53	0	100,00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	9	9	0	100,00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	240	240	0	100,00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	211	211	0	100,00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100,00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.634	1.634	0	100,00 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	3	0	100,00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	0	100,00 %
13	Layanan rujukan	Orang	18	18	0	100,00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100,00 %
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Masuk Dalam Hitungan	Orang	707	707	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	100	208	+108	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	1 Layanan data dan pengaduan	Orang	100	208	+108	100,00 %
	2 Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	3	3	0	100,00 %
	3 Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0	100,00 %
	4 Penyediaan sandang	Orang	31	31	0	100,00 %
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	5	5	0	100,00 %
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	31	31	0	100,00 %
	7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	31	31	0	100,00 %
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	21	21	0	100,00 %
	9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	102	102	0	100,00 %
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	0	100,00 %
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100,00 %
	12 Layanan rujukan	Orang	5	5	0	100,00 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100,00 %
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Masuk Dalam Hitungan	Orang	5.763	5.763	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.200	2.498	+1.298	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani/	Mutu Yang Belum Terlayani/	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			Dilayani/ Dipenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	1.200	2.498	+1.298	100,00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	100	100	0	100,00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	900	900	0	100,00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	9	9	0	100,00 %
5	Penyediaan alat bantu	Orang	10	10	0	100,00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	8	8	0	100,00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	900	900	0	100,00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	100	100	0	100,00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	0	100,00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100,00 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	8	8	0	100,00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100,00 %
13	Layanan rujukan	Orang	8	8	0	100,00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100,00 %
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Masuk Dalam Hitungan	Orang	25	25	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80,00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani		5	10	+5	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	4	10	+6	100,00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	4	4	0	100,00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	5	5	0	100,00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	4	4	0	100,00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	4	4	0	100,00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	4	4	0	100,00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	4	4	0	100,00 %
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2	2	0	100,00 %
	9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	0	100,00 %
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3	3	0	100,00 %
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100,00 %
	12 Layanan rujukan	Orang	2	2	0	100,00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100,00 %
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) * Tidak Masuk Dalam Hitungan	Orang	110	110	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80 %)	80, 00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	125	159	+34	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20 %)	20,00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					100,00 %
	1 Penyediaan permakanan	Orang	125	159	+34	100,00 %
	2 Penyediaan sandang	Orang	20	20	0	100,00 %
	3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	75	75	0	100,00 %
	4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5	5	0	100,00 %
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	5	5	0	100,00 %

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangka.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)

Tabel 4.38. menunjukkan bahwa target pencapaian SPM Sosial pada penerima jenis layanan dasar dan mutu layanan dasar dapat direalisasikan 100%. Berdasarkan perhitungan indeks pencapaian SPM pada aplikasi pelaporan SPM <https://spm.bangka.kemendagri.go.id>, indeks pencapaian SPM Sosial tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Sosial Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.38.

Tabel 4.39 Alokasi Anggaran SPM Sosial Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)	Persentase Anggaran PD Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap APBD	Persentase Anggaran Penerapan SPM Terhadap Anggaran PD
1	APBD KAB. BANTUL (Belanja Daerah)	2.633.614.491.204			
2	ALOKASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (Dinas Sosial)	27.234.774.414	1,03 %		
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA PD	13.274.285.113		0,50 %	48,74 %
	APBD	13.274.285.113			
	A. APBD MURNI	0			
	B. APBD DAU	13.274.285.113			
	C. APBD DAK FISIK	0			
	D. APBD DAK NON FISIK	0			
	E. DANA BAGI HASIL	0			
	F. KERJASAMA	0			
	G. OTONOMI KHUSUS	0			
	NON APBD	0			
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0			
	APBN	0			
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0			
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0			
	DANA LAINNYA	0			

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

Rincian kegiatan dan anggaran SPM Sosial Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.40 berikut.



Tabel 4.40 Rincian Kegiatan dan Anggaran SPM Sosial Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
SPM SOSIAL			13.274.285.113	13.123.003.927	98,86 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		9.705.883.746	9.673.789.998	99,67%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		9.459.843.146	9.430.526.898	99,69 %
1	Penyediaan permakanan	Orang	8.165.374.796	8.165.357.294	100,00 %
2	Penyediaan sandang	Orang	28.517.500	28.466.497	99,82 %
3	Penyediaan alat bantu	Orang	122.488.000	121.767.869	99,41 %
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8.000.000	7.999.998	100,00 %
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	298.131.024	291.931.022	97,92 %
6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	179.006.949	177.287.498	99,04 %
7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	96.304.398	96.304.396	100,00 %
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	102.296.181	102.042.114	99,75 %
9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.362.500	1.362.498	100,00 %
10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	384.949.427	364.595.344	94,71 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	67.412.372	67.412.370	100,00 %
12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	5.999.999	5.999.998	100,00 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		246.040.600	243.263.100	98,87 %
1	Penyediaan makanan	Orang	147.989.500	146.489.500	98,99 %
2	Penyediaan sandang	Orang	10.175.500	10.175.500	100,00 %
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	32.720.000	31.742.500	97,01 %
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	31.524.600	31.274.600	99,21 %
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	23.631.000	23.581.000	99,79 %

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				3.568.401.367	3.449.213.929	97,00 %
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			31.538.700	31.438.700	99,68 %
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			303.178.110	292.098.110	96,35 %
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			169.308.232	155.753.326	91,99 %
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			248.670.500	247.285.300	99,44 %
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			415.702.300	413.195.300	99,40 %
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			539.662.050	530.481.010	98,30 %
	7	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			3.165.000	3.165.000	100,00 %
	8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			237.390.800	192.199.040	80,96 %
	9	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			58.700.000	58.574.500	99,79 %
	10	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			595.118.971	591.991.448	99,47 %
	11	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			11.920.000	11.920.000	100,00 %
	12	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			584.910.416	552.849.507	94,52 %
	13	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			369.136.288	368.262.688	99,76 %

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026)



Tabel 4.41 Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Penerapan SPM Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025

	PNS	PPPK	PPPK PW	NON ASN	Tingkat Pendidikan						
					SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma	D-IV/ S1	S2	S3
Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Sekretaris Dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekretariat	6	0	2	0	0	0	3	2	3	0	0
Bidang Rehabilitasi Sosial	7	0	24	2	0	4	13	2	12	2	0
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5	0	3	1	0	0	0	1	7	1	0
Bidang Pemberdayaan Sosial	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
Jumlah	22	0	29	3	0	4	16	5	24	5	0
Total	54 (lima puluh empat) orang										

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2026)

4.6.5. Dukungan Personil

SPM Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaku perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah pegawai Dinas Sosial yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sosial ditunjukkan dalam Tabel 4.41.

Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan mitra dan relawan sosial yang merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka pemenuhan SPM Sosial. Mitra PSKS yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 4.42.

Tabel 4.42 Mitra PSKS yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penerapan SPM Sosial Tahun 2025

No	Mitra PSKS Tahun 2024	Jumlah
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	17 Orang
2	Karang Taruna	81 Orang
3	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	92 Orang
4	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	1 Orang
5	Pekerja sosial dan pendamping penyandang disabilitas rehabilitasi sosial	4 Orang
6	Tim Reaksi Cepat (TRC) penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	12 Orang
7	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	19 Orang
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	69 Orang
9	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	103 Orang
10	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	201 Orang
11	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	17 Orang
12	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	157 Orang
13	Pekerja sosial dan pendamping penyandang disabilitas rehabilitasi sosial di Shelter Kesejahteraan Sosial	2 Orang
14	Anggota Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3 Orang
Jumlah		778 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2026)



4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM Sosial pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4.43 Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sosial Tahun 2025

Permasalahan	Solusi
Terdapat pembiayaan dan pelaksanaan pemberian layanan yang anggarannya bersumber dari APBN, CSR, dan Mitra Sosial. Namun, anggaran tersebut tidak dapat dimasukkan dalam rincian kegiatan dan anggaran SPM karena anggaran tersebut langsung diberikan kepada penerima layanan.	Melakukan pencatatan dan pelaporan pembiayaan dari APBN, CSR, dan Mitra Sosial sebagai pendukung capaian layanan dalam bentuk pelaporan terpisah atau catatan tambahan, sehingga capaian SPM tetap tercatat tanpa mengubah rincian kegiatan dan anggaran resmi.
Pendataan PPKS bersifat dinamis sehingga penentuan target awal penerima layanan dilakukan melalui proyeksi.	Menggunakan proyeksi berbasis data historis dan pemuktahiran berkala untuk menentukan target awal penerima layanan PPKS sehingga pendataan yang dinamis tetap dapat mendukung perencanaan dan pemantauan capaian layanan secara akurat.
Penentuan komponen biaya pada alat bantu spesifik tidak dapat dianggarkan pada awal perencanaan karena biaya alat bantu spesifik harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima layanan.	Menetapkan mekanisme anggaran fleksibel atau alokasi sementara untuk alat bantu spesifik, sehingga biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima layanan saat perencanaan dan pengadaan dilakukan.
Pada nomenklatur sub kegiatan sesuai Kepmendagri (SIPD) tidak merinci per PPKS. Namun, dalam aplikasi e-SPM Bangda, anggaran harus dirinci per jenis PPKS.	Menyusun mekanisme pemetaan dan alokasi dari sub kegiatan sesuai SIPD ke jenis PPKS secara internal, sehingga penginputan di aplikasi e-SPM Bangda dapat dilakukan sesuai ketentuan tanpa mengubah nomenklatur resmi.
Pelaksanaan realisasi anggaran per sub kegiatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan karena	Menerapkan mekanisme pelaporan realisasi anggaran berbasis persentase sesuai

Permasalahan	Solusi
masing-masing penerima layanan kebutuhan masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda, penerima layanan, sehingga anggaran untuk masing-masing perbedaan alokasi per individu penerima layanan juga tetap tercatat secara proporsional berbeda. Pelaporan realisasi anggaran dan akurat di aplikasi e-SPM.	
pada aplikasi eSPM dilakukan dengan cara mempersentasekan jumlah data per jenis PPKS dibandingkan dengan anggaran per sub kegiatan.	
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2026), Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada https://spm.bangda.kemendagri.go.id/ (diunduh 20 Januari 2026), diolah	

4.7. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Penerapan SPM

4.7.1. SPM Pendidikan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam Tabel 4.44.

Tabel 4.44 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		1.01.02
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		1.01.02.2.03
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	1.01.02.2.03.0011
2	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	1.01.02.2.03.0015
3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02.2.03.0025
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02.2.03.0030
5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02.2.03.0041
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	1.01.02.2.03.0016
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1.01.02.2.03.0017
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		1.01.02.2.01
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02.2.01.0054
2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02.2.01.0038
3	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02.2.01.0046
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02.2.01.0047
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02.2.01.0051



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
	6 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1.01.02.2.01.0026
	7 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02.2.01.0035
	8 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02.2.01.0049
	9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0028
	10 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02.2.01.0043
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.01.02.2.02
	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02.2.02.0014
	2 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02.2.02.0032
	3 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02.2.02.0051
	4 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02.2.02.0059
	5 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02.2.02.0062
	6 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	1.01.02.2.02.0067
	7 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02.2.02.0061
	8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02.2.02.0039
	9 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02.2.02.0054
	10 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02.2.02.0060
	11 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	1.01.02.2.02.0055
	12 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0041
4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1.01.04.2.01
	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	1.01.04.2.01.0001
	2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	1.01.04.2.01.0002
PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lainnya			
	1 Pengelolaan Dana BOP PAUD		1.01.02.2.03.0018

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
	2 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0017
	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		1.01.02.2.03.0002
	4 Pengadaan Perlengkapan PAUD		1.01.02.2.03.0009
	5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		1.01.02.2.03.0046
	6 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD		1.01.02.2.01.0016
	7 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP		1.01.02.2.02.0017
	8 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP		1.01.02.2.02.0012
	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP		1.01.02.2.02.0018
	10 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP		1.01.02.2.02.0024
	11 Pengadaan Perlengkapan Sekolah		1.01.02.2.02.0027
	12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		1.01.02.2.02.0067
	13 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP		1.01.02.2.01.0025
	14 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1.01.02.2.02.0042
	15 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		1.01.02.2.02.0043
	16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		1.01.02.2.02.0064
	17 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0041
	18 Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0048
	19 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0055
	20 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0010
	21 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0014
	22 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		1.01.02.2.04.0016
	23 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan kesetaraan		1.01.02.2.04.0027
	24 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Kesetaraan		1.01.02.2.04.0036
	25 Pengadaan Mebel Sekolah SD		.01.02.2.02.0025

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah



4.7.2. SPM Kesehatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka penerapan SPM Kesehatan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam Tabel 4.45.

Tabel 4.45 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.02.02
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.02.02.2.02
1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.02.02.2.02.0001
2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.02.02.2.02.0002
3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	1.02.02.2.02.0003
4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.02.02.2.02.0004
5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1.02.02.2.02.0005
6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1.02.02.2.02.0006
7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1.02.02.2.02.0007
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	1.02.02.2.02.0008
9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1.02.02.2.02.0009
10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.02.02.2.02.0010
11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1.02.02.2.02.0011
12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	1.02.02.2.02.0012
PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lainnya			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.02.02
1	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		1.02.02.2.01.0023

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.7.3. SPM Pekerjaan Umum

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka penerapan SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam Tabel 4.46.

Tabel 4.46 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1.03.03
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		1.03.03.2.01
1	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	1.03.03.2.01.0023
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	1.03.03.2.01.0024
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	1.03.03.2.01.0025
4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	1.03.03.2.01.0026
5	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	1.03.03.2.01.0027
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1.03.03.2.01.0029
7	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.03.2.01.0030
8	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03.2.01.0031
9	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1.03.03.2.01.0032
10	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	1.03.03.2.01.0033
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.03.05
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.03.05.2.01
1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	1.03.05.2.01.0018
2	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	1.03.05.2.01.0019
3	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	1.03.05.2.01.0020
4	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	1.03.05.2.01.0021
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	1.03.05.2.01.0022
6	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	1.03.05.2.01.0024



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
7	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1.03.05.2.01.0026
8	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	1.03.05.2.01.0027
9	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	1.03.05.2.01.0028
10	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	1.03.05.2.01.0029
11	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1.03.05.2.01.0033
12	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	1.03.05.2.01.0034
13	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	1.03.05.2.01.0034
14	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	1.03.05.2.01.0036
15	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	1.03.05.2.01.0037
16	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	1.03.05.2.01.0038
17	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	1.03.05.2.01.0039
18	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	1.03.05.2.01.0040
19	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1.03.05.2.01.0041
PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lainnya			
1	Perluasan jaringan SR Air Minum PDAM	-	-

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangka.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.7.4. SPM Perumahan Rakyat

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka penerapan SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam Tabel 4.47.

Tabel 4.47 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2025.

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.04.02
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.01
1	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1.04.02.2.01.0002
2	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	1.04.02.2.01.0003

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
	3 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	1.04.02.2.01.0004
	4 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1.04.02.2.01.0005
	5 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02.2.01.0006
	6 Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02.2.01.0007
	7 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02.2.01.0008
	8 Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.04.02.2.01.0010
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0001
	2 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0004
	3 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0006
	4 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.04.02.2.03.0008
	5 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0009
	6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0010
	7 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0011
	8 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.04.02.2.03.0012

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.7.5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka penerapan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam Tabel 4.48.



Tabel 4.48 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		1.05.02
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.05.02.2.01
	1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.02.2.01.0003
	2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02.2.01.0004
	3 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	1.05.02.2.01.0005
	4 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.05.02.2.01.0006
	5 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	1.05.02.2.01.0008
	6 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	1.05.02.2.01.0015
	7 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus	1.05.02.2.01.0016
	8 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	1.05.02.2.01.0017
	9 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	1.05.02.2.01.0018
	2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1.05.02.2.02
	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02.2.02.0010
	2 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	1.05.02.2.02.0011
	3 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.05.02.2.02.0012
	3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		1.05.02.2.03
	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1.05.02.2.03.0006
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		1.05.03
	4 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1.05.03.2.01
	1 Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.01.0003
	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	1.05.03.2.01.0004

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		SATUAN	KODE
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.05.03.2.02
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.02.0001
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03.2.02.0002
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.02.0003
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	1.05.03.2.02.0004
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	1.05.03.2.02.0005
	6	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03.2.02.0008
	7	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	1.05.03.2.02.0009
	8	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.05.03.2.02.0010
	9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.02.0011
	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	1.05.03.2.02.0012
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.05.03.2.03
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	1.05.03.2.03.0001
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.03.0002
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03.2.03.0003
	4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.03.0007
	5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03.2.03.0008
	6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03.2.03.0009
	7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	1.05.03.2.03.0010
	8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	1.05.03.2.03.0011
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.05.03.2.04
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.04.0001
	2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.04.0002
	3	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.05.03.2.04.0008
	4	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.03.2.04.0010
	5	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	1.05.03.2.04.0013
	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lainnya			
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji Non ASN Pusdalops PB, TRC)		1.05.01.2.08.0004
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.05.01.2.09.0002
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,				1.05.04



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
3	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (KEBAKARAN)		
8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.05.04.2.01
1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04.2.01.0001
2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.05.04.2.01.0002
3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	1.05.04.2.01.0003
4	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04.2.01.0005
5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.05.04.2.01.0007
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1.05.04.2.01.0008
7	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	1.05.04.2.01.0012
8	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1.05.04.2.01.0015
9	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.05.04.2.01.0017
10	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1.05.04.2.01.0018
9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		1.05.04.2.02
1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	1.05.04.2.02.0001
2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	1.05.04.2.02.0002
10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		1.05.04.2.04
1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Orang	1.05.04.2.04.0001
2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	1.05.04.2.04.0002
3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	1.05.04.2.04.0003
11	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		1.05.04.2.05
1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	1.05.04.2.05.0001
2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	1.05.04.2.05.0002
3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	1.05.04.2.05.0004
4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	1.05.04.2.05.0005

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lainnya			
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji Non ASN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		1.05.01.2.08.0004
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.05.01.2.09.0002

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah

4.7.6. SPM Sosial

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka penerapan SPM Sosial di Kabupaten Bantul ditunjukkan dalam Tabel 4.49.

Tabel 4.49 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Dilaksanakan Dalam Rangka Penerapan SPM Sosial Tahun 2025

No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.06.04
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.06.04.1.01
1	Penyediaan permakanan	Orang	1.06.04.2.01.0001
2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.04.2.01.0001
3	Penyediaan alat bantu	Orang	1.06.04.2.01.0001
4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.06.04.2.01.0001
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.06.04.2.01.0001
6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	1.06.04.2.01.0001
7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	1.06.04.2.01.0001
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.06.04.2.01.0001
9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	1.06.04.2.01.0001
10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	1.06.04.2.01.0001
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.06.04.2.01.0001
12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	1.06.04.2.01.0001
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.06.06.2.01
1	Penyediaan makanan	Orang	1.06.06.2.01.0001
2	Penyediaan sandang	Orang	1.06.06.2.01.0002
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.06.06.2.01.0003
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1.06.06.2.01.0004



No	PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	KODE
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.06.06.2.01.0005
PROGRAM/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lainnya			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.06.01
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.06.01.2.01
	1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.06.01.2.01.0007
	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.06.01.2.01.0001
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.06.01.2.06.0009
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.06.01.2.09.0002
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.06.02
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03
	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03.0001
	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03.0002
	3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03.0003
	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03.0004
	5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		1.06.02.2.03.0005
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.06.05
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02
	1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02.0001
	2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02.0001
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.06.06
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1.06.06.2.02
	1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		1.06.06.2.02.0001
	2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		1.06.06.2.02.0002

Sumber: Pelaporan SPM Triwulan 4 Tahun 2025 pada <https://spm.bangka.kemendagri.go.id/> (diunduh 20 Januari 2026), diolah



BAB V PENUTUP



**LPPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**





BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 merupakan perwujudan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dan pemenuhan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021.

Sebagai penutup, LPPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Pencapaian kinerja diharapkan menjadi lebih optimal sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan dapat menjadi sebuah hasil yang bermanfaat, diberikan catatan dan rekomendasi yang membangun, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Bantul, 26 Maret 2026
BUPATI BANTUL

H. Abdul Halim Muslih



LAMPIRAN



**LPPD KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Halim Muslih

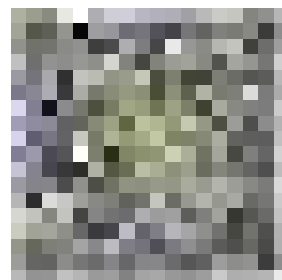
Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, 31 Januari 2025

Bupati



H. Abdul Halim Muslih

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN BANTUL**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tujuan: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,25
1.1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Indeks	4.2815
		Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Indeks	90-94
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.25
2.	Tujuan : Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,99-82,53
2.1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.2	Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,7
2.3	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	12
3	Tujuan: Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Indeks Rasa Aman	Indeks	2,79
3.1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persen	100
4	Tujuan: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20 - 5,32
4.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0,390 - 0,410
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08 - 3,58
		Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	100
5	Tujuan : Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	69,50
5.1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	77,47

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,63
5.2	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,70
5.3	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	146
6	Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,75 - 11,02
6.1	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	38.575
7	Tujuan: Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,75
6.1	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	74,31
		Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	KLA

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.251.994.821.153,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	92.209.227.371,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	8.858.735.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.891.261.169.443,03
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	199.751.137.705,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	212.151.181.936,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.052.605.888,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	10.465.184.313,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	170.000.000,00
DINAS KESEHATAN	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	342.683.914.375,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.432.610.864,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	780.687.000,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	397.811.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	19.662.610.421,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	20.149.487.888,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.072.867.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.186.262.042,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.405.296.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.403.156.980,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.448.828.895,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.108.280.644,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.977.209.792,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.324.787.400,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.040.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.965.037.824,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.525.835.914,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.968.085.979,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.039.593.650,00
DINAS SOSIAL	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	963.429.402,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.476.154.994,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.490.446.138,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	564.482.950,00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	252.057.492,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.175.643.638,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.494.125.302,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.626.663.500,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	510.038.712,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	412.995.500,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.683.567.884,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	47.013.000,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	350.004.100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.210.846.330,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	408.660.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.623.499.056,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.976.560.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.637.500,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	777.649.936,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	496.950.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.875.000,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.948.324.906,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.499.462.436,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.865.422.842,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000,00
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	11.250.000,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	930.804.883,00
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.012.500,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	927.722.764,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	140.404.500,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	278.902.116,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	118.425.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.237.269.664,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.856.924.730,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.500.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	145.624.872,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	493.271.500,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	144.077.500,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	56.300.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	28.508.598.488,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	726.139.260,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	368.850.296,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	432.960.523,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	7.129.500,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENATAAN DESA	1.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	35.440.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.112.915.890,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.440.145.502,00
DINAS PERHUBUNGAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	153.274.620.039,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.700.673.416,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.297.095.100,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	9.549.170.571,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	430.725.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.325.889.138,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	85.795.887,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	188.541.903,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	53.256.803,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	274.981.819,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	184.467.606,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	393.086.631,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	460.725.320,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	183.663.759,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.090.733.338,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	261.177.212,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	764.427.006,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	478.685.800,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	71.730.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.742.477.724,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	136.532.403,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.091.600,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	40.831.750,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	210.417.236,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	425.888.634,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	82.012.436,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	146.382.436,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.756.142.184,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	357.863.544,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	5.324.800,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.566.147.020,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.659.222.168,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	435.428.000,00

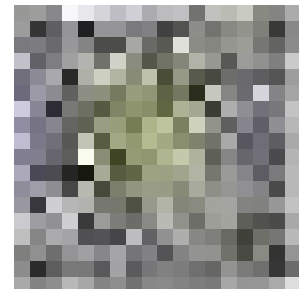
PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	875.543.936,00
DINAS PARIWISATA	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.217.297.586,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	632.800.696,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	157.031.250,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	957.051.714,00
SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.191.310.438,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.619.891.394,00
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	25.410.363.500,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.118.326.400,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.837.446.520,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	269.785.800,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	411.549.554.220,03
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.470.199.300,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.111.374.778,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.958.330.084,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	141.385.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.221.719.000,00
KAPANEWON	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	64.801.007.151,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.897.401.151,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.985.957.651,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.878.342.651,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.186.900.000,00

PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	ANGGARAN (RP.)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.068.462.400,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	266.683.250,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	620.552.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	356.781.000,00

Bantul, 31 Januari 2025

Bupati



H. Abdul Halim Muslih



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Halim Muslih

Jabatan : Bupati Bantul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bantul, 19 September 2025

Bupati



H. Abdul Halim Muslih

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN BANTUL**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
T1	Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,10-82,53
S1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan penguatan masyarakat yang inklusif	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,70
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,88
		Usia Harapan Hidup	Tahun	74,86
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,50-13,50
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,125
T2	Meningkatkan reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	88,25
S2.1	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Nilai AKIP	Angka	82,73
		Opini BPK	Opini	1 (WTP)
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	Indeks	93,68
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,47-4,51

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
T3	Meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,16-5,36
		PDRB per kapita	Rp Juta	36,99-38,21
		Gini Ratio	Indeks	0,390-0,410
S3.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,77-12,86
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	14,10-14,77
		PDRB Sektor Pertanian ADHB	Rp miliar	5.107,17-5.152,41
S3.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja, Mendorong Kewirausahaan dan Pendapatan Penduduk	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	26,75-26,82
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,08-3,58
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	4,00-4,50
		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun)	Ribu rupiah	17.078
T4	Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,75-11,02

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
S4.1	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	2,16
T5	Mengembangkan wilayah dengan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Indeks Pengembangan Wilayah	Indeks	64,39
S5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	66,07
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	123,02
S5.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	59,08
T6	Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,51
S6.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Kebudayaan	Indeks	89,26
S6.2	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	<i>Crime Rate</i>	per 100.000 penduduk	148

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6,173,704,330.00
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	16,199,199,000.00
3	Program Hubungan Industrial	1,534,992,100.00
4	Program Kawasan Permukiman	2,118,227,500.00
5	Program Kepegawaian Daerah	5,238,232,584.00
6	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,694,151,900.00
7	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,489,668,650.00
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4,175,835,438.00
9	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	85,126,420.00
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	440,888,634.00
11	Program Pemasaran Pariwisata	1,088,644,616.00
12	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	373,877,812.00
13	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	251,803,550.00
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	3,005,060,000.00
15	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	773,815,922.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,538,556,502.00
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	401,709,200.00
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,847,416,066.00
19	Program Pemberdayaan Sosial	917,675,771.00
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkh)	934,297,514.00
21	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	127,424,872.00
22	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	574,732,000.00
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	9,619,719,056.00
24	Program Pembinaan Perpustakaan	1,945,701,788.00
25	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	304,441,600.00
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	118,320,884,944.00
27	Program Penanganan Bencana	580,757,410.00
28	Program Penanganan Kerawanan Pangan	508,932,000.00
29	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	38,765,000.00
30	Program Penanggulangan Bencana	4,759,177,440.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
31	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	4,573,900.00
32	Program Penataan Bangunan Gedung	7,349,427,608.00
33	Program Penataan Desa	1,000,000.00
34	Program Penatagunaan Tanah	418,442,704.00
35	Program Pencatatan Sipil	315,037,796.00
36	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,641,541,650.00
37	Program Pendaftaran Penduduk	726,139,260.00
38	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	242,848,991,614.00
39	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	471,332,219.00
40	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	278,677,900.00
41	Program Penempatan Tenaga Kerja	22,722,604,802.00
42	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	413,661,500.00
43	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	177,902,436.00
44	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20,875,000.00
45	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	416,977,600.00
46	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	10,073,908,071.00
47	Program Pengelolaan Arsip	457,592,244.00
48	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,441,876,379.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
49	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11,142,117,714.00
50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3,571,221,000.00
51	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18,918,285,942.00
52	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	197,032,436.00
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	448,081,023.00
54	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,807,248,800.00
55	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6,377,391,652.00
56	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	374,452,267,124.51
57	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11,261,957,230.00
58	Program Pengelolaan Pendidikan	200,110,590,646.00
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2,662,351,918.00
60	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,463,348,770.00
61	Program Pengelolaan Persampahan	28,514,481,391.00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	7,129,500.00
63	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	43,013,000.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
64	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	197,247,200.00
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20,240,241,294.00
66	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	266,131,060.00
67	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	151,781,250.00
68	Program Pengembangan Ekspor	679,394,072.00
69	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40,831,750.00
70	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,073,071,744.00
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13,610,819,677.00
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,081,130,688.00
73	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	170,000,000.00
74	Program Pengembangan Perumahan	3,887,775,592.00
75	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	4,057,591,900.00
76	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	802,187,652.00
77	Program Pengembangan Umkm	532,830,821.00
78	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15,500,000.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
79	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	79,300,000.00
80	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	117,100,872.00
81	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2,046,325,692.00
82	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	82,012,436.00
83	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,430,114,954.00
84	Program Pengendalian Penduduk	402,260,000.00
85	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	39,459,800.00
86	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	227,902,500.00
87	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	855,303,836.00
88	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,286,901,500.00
89	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	55,617,336.00
90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,096,000,956.00
91	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,098,637,436.00
92	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,414,163,364.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
93	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,284,617,361.00
94	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	289,628,450.00
95	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	726,792,500.00
96	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,700,230,900.00
97	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	5,645,842,400.00
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,411,315,781.00
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,240,895,890,995.90
100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,457,417,536.00
101	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,990,699,296.00
102	Program Penyelenggaraan Jalan	61,618,068,695.00
103	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	16,257,672,150.00
104	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	7,113,128,700.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
105	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	7,700,317,000.00
106	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	900,708,000.00
107	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj)	26,869,776,516.00
108	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	784,228,000.00
109	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	887,022,656.00
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	141,085,000.00
111	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1,325,850,680.00
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	293,572,000.00
113	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	127,537,650.00
114	Program Penyuluhan Pertanian	1,605,342,860.00
115	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,636,212,994.00
116	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1,597,746,484.00
117	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	168,425,000.00
118	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,761,463,740.00
119	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	170,614,376.00
120	Program Perizinan Usaha Pertanian	24,959,500.00
121	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,055,852,210.00

NO	NAMA PROGRAM	PAGU
122	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	5,324,800.00
123	Program Perlindungan Khusus Anak	2,221,852,530.00
124	Program Perlindungan Perempuan	1,670,081,884.00
125	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	780,000,000.00
126	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1,006,733,000.00
127	Program Promosi Penanaman Modal	192,767,236.00
128	Program Rehabilitasi Sosial	9,632,624,724.00
129	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	767,737,000.00
130	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	242,261,226.00
131	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	520,870,923.00

Bantul, 19 September 2025

Bupati



H. Abdul Halim Muslih



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN